



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

### Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juli 2024  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 5 Juli 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan pembangunan daerah lima tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan, maka dalam proses penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Selain itu, juga berorientasi terhadap substansi yang menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang diarahkan pada “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan”. RKPD Tahun 2025 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Semarang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di mana akan menjadi landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengikuti gambar sebagai berikut.



**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025**

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

- Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang



- Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

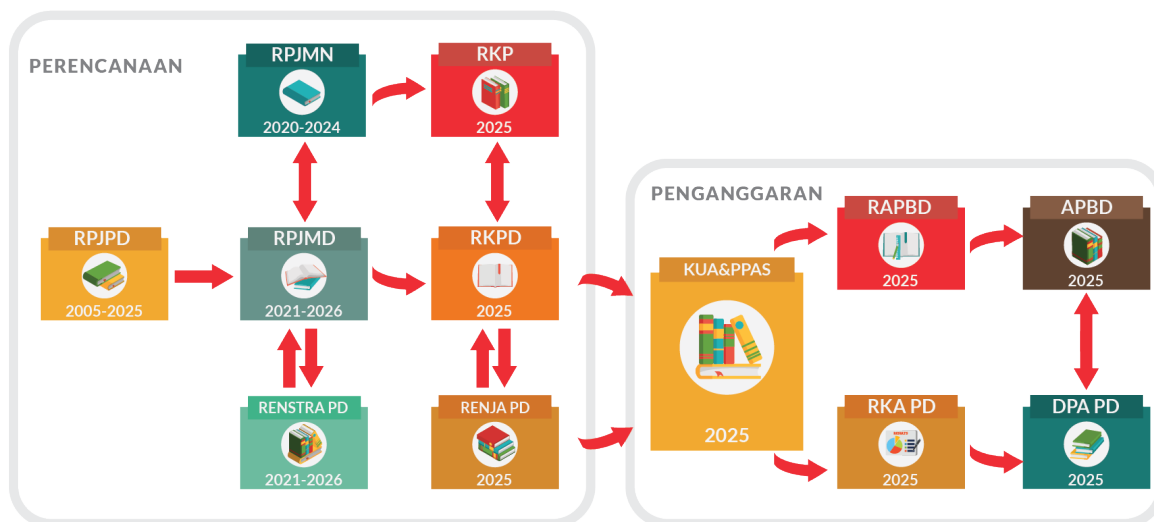
#### **1.3.1 Integrasi RPJPD 2005 - 2025 dan RPJMD 2021 - 2026 dalam Penyusunan RKPD 2025**

Dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan jangka panjang yang termaktub dalam RPJPD dimana di dalamnya menjelaskan terkait visi, misi, arah, dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJPD ditorehkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau 5 tahunan pada RPJMD yang kemudian dijabarkan kedalam tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahapan dalam bentuk RKPD. Sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD yang menjadi pedoman penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Berikutnya, dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota dan DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2023. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk menjamin akuntabilitas dan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Semarang menggunakan sistem berbasis website yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi lain yang terkait di Kota Semarang.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mempedomani Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Peraturan Wali Kota Semarang tentang RKPD Tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Penyusunan RKPD ini mengacu juga kepada nomenklatur pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang; Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; serta Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.



**Gambar 1.2**  
**Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2025**

Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Semarang yang terkait dengan RKPD Tahun 2025 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031; Rencana Induk Semarang Kota Cerdas; *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka Kematian Ibu/Bayi; Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang; serta dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kota Semarang. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka penentuan tema pembangunan di tahun 2025.

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan daerah, serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2025;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

## **1.5 Kaidah Pelaksanaan**

Tujuan dari kaidah pelaksanaan pada bab ini adalah sebagai pedoman kepada seluruh stakeholder khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, perubahan rencana pembangunan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu, serta pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan. Kaidah pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2025 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun yang disusun dengan mendasarkan kepada tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi, prioritas dan target yang telah ditetapkan. RKPD Kota Semarang juga disinkronkan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Nasional. Prioritas pada RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026.
2. RKPD Tahun 2025 menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2025, serta menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
3. Perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan peraturan terbaru tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan.

## **1.6 Sistematisa Dokumen RKPD**

Dokumen RKPD Kota Semarang 2025 disusun dengan sistematisa sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan serta sistematisa RKPD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 dan realisasi capaian terhadap target RPJMD 2021-2026, serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dihadapi.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun 2023 serta perkiraan tahun 2024-2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023, keterkaitannya dengan RPJMD dan RPJPD, serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

### **BAB VII PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Daerah

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, Kota Semarang berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi mencakup antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang.

##### 2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

###### a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup> dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

sebelah barat : Kabupaten Kendal  
sebelah timur : Kabupaten Demak  
sebelah selatan : Kabupaten Semarang  
sebelah utara : Laut Jawa

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Kota Semarang**

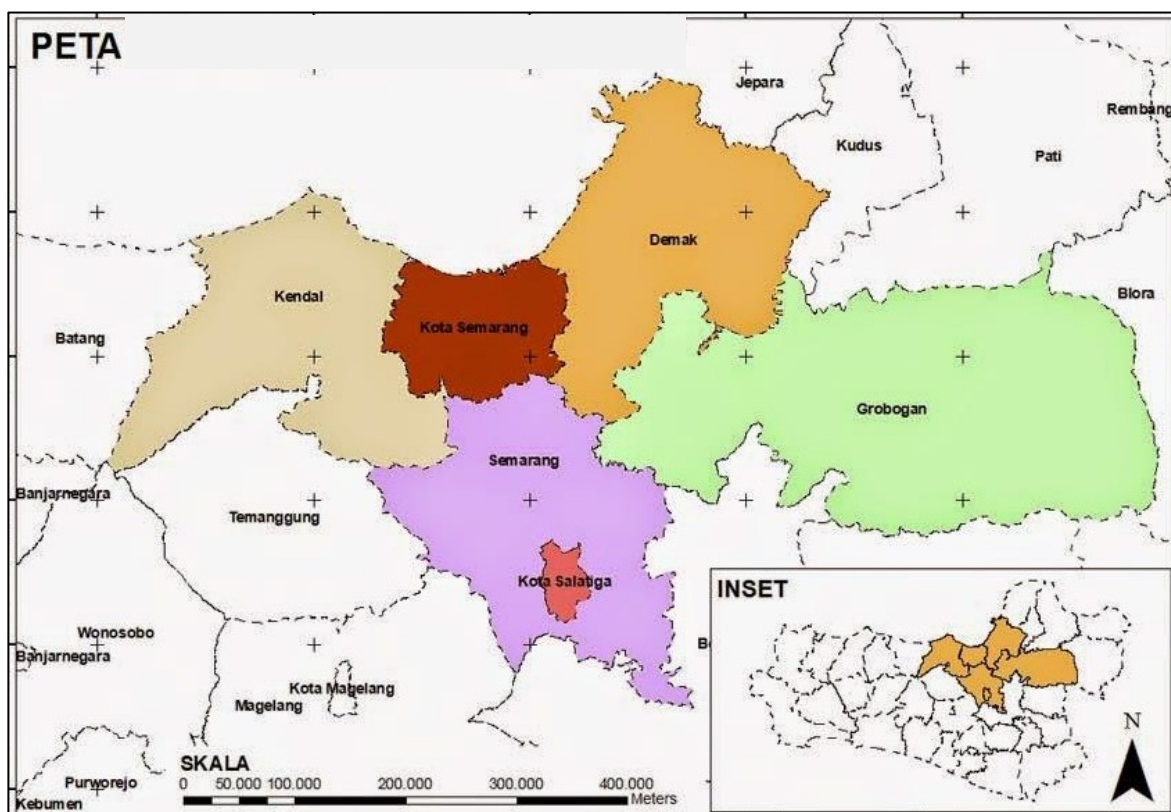
No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
	<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>373,70</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

### b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak pada garis 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang juga memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor Pantai Utara; koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak/Kabupaten Grobogan; dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.1**

### **Peta Kota Semarang dan Sekitarnya**

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk ke dalam wilayah Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

### c. Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain:

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota Bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan di bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 - 348,00 mdpl.

### d. Geologi

Kondisi geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur *joint* (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kaligarang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan.



Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua, sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

#### **e. Hidrologi**

Kondisi hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai-sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar drainase, yaitu:

1. *Sistem Drainase Mangkang*,  
terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); dan Sub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).
2. *Sistem Drainase Semarang Barat*,  
terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambakharjo dan Sungai Tugurejo); Sub Sistem Sungai Silandak; Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); dan Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).
3. *Sistem Drainase Semarang Tengah*,  
terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru.
4. *Sistem Drainase Semarang Timur*,  
terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedor), Sub Sistem Sungai Pedurangan.

#### **f. Klimatologi**

Secara klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembapan relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembapan lebih rendah, dan jarang mendung.

Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang

mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1°C pada September ke 24,6°C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9°C ke 32,9°C. Kelembapan relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global berdampak pada kehidupan makhluk hidup, terjadinya bencana alam, wabah penyakit, serta fenomena lainnya. Kota Semarang pada tahun 2018 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim, serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan, emisi GRK Kota Semarang selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif yaitu selalu mengalami penurunan, dari tahun 2016 sebesar 5.937,63 ton CO<sub>2</sub>e menurun menjadi 3.626,26 ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2020 dimana besaran emisi tersebut tidak memperhitungkan emisi dari penggunaan listrik, karena di Kota Semarang listrik merupakan aktivitas tidak langsung penghasil emisi.

#### **2.1.1.2. Zonasi Pola Ruang Kota Semarang**

Mendasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain:

##### **a. Kawasan Peruntukan Lindung**

Merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut mencakup:

- Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Ruang Terbuka Hijau
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi:
  - Kawasan Rawan Bencana Rob disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (*land subsidence*) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik.
  - Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
  - Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.
  - Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.
  - Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang.

## **b. Kawasan Budidaya**

Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya ini mencakup:

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Olah Raga
- Kawasan Wisata
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan Keamanan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Kesehatan
- Kawasan Peribadatan
- Kawasan Campuran
- Ruang Terbuka Non Hijau , yang merupakan ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori

## **c. Kawasan Strategis**

- Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi
- Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas
- Pengembangan kawasan Waduk Jatibarang
- Pengembangan kawasan Reklamasi Pantai
- Peningkatan kawasan Masjid Agung Semarang
- Peningkatan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah
- Peningkatan kawasan pendidikan
- Peningkatan kawasan Gedong Batu
- Pengembangan kawasan Kota Lama

Agar tetap terjaga keterpaduan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemerintah, swasta dan masyarakat, serta hasil pembangunan tidak semakin mempertajam kesenjangan antar wilayah dan menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, maka perlu kiranya keselarasan rencana program pembangunan dengan rencana penataan ruang, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

### **2.1.1.3. Demografi**

Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 berjumlah 1.696.366 jiwa, terdiri dari 839.836 jiwa (49,51%) penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sejumlah 856.530 jiwa (50,49%). Jika dibandingkan dengan penduduk tahun 2022 (1.688.981 jiwa), terdapat penambahan sejumlah 7.385 jiwa atau tumbuh sebesar 0,44%.

Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 11.859 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.065 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rinci, jumlah penduduk dengan

data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan sex ratio per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			%	SEX RATIO (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km <sup>2</sup> )
		LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)			
1	Banyumanik	71.304	73.146	144.450	8,52	97,48	5622,81
2	Candisari	38.239	39.320	77.559	4,57	97,25	11859,17
3	Gajahmungkur	28.695	29.635	58.330	3,44	96,83	6431,09
4	Gayamsari	35.637	36.246	71.883	4,24	98,32	11631,55
5	Genuk	63.651	63.148	126.799	7,47	100,80	4629,39
6	Gunungpati	50.516	50.674	101.190	5,97	99,69	1870,08
7	Mijen	40.829	40.877	81.706	4,82	99,88	1419,74
8	Ngaliyan	71.501	72.101	143.602	8,47	99,17	3779,99
9	Pedurungan	98.299	100.359	198.658	11,71	97,95	9587,74
10	Semarang Barat	75.369	77.785	153.154	9,03	96,89	7044,80
11	Semarang Selatan	32.705	34.113	66.818	3,94	95,87	11267,79
12	Semarang Tengah	27.665	29.925	57.590	3,39	92,45	9379,48
13	Semarang Timur	33.782	35.632	69.414	4,09	94,81	9014,81
14	Semarang Utara	58.953	60.357	119.310	7,03	97,67	10876,03
15	Tembalang	95.735	96.293	192.028	11,32	99,42	4344,52
16	Tugu	16.956	16.919	33.875	2,00	100,22	1065,92
<b>TAHUN 2023</b>		<b>839.836</b>	<b>856.530</b>	<b>1.696.366</b>	-	<b>98,05</b>	<b>4.539</b>
<b>TAHUN 2022</b>		<b>835.754</b>	<b>853.227</b>	<b>1.688.981</b>	-	<b>97,69</b>	<b>4.520</b>
<b>TAHUN 2021</b>		<b>835.404</b>	<b>851.818</b>	<b>1.687.222</b>	-	<b>98,07</b>	<b>4.515</b>
<b>TAHUN 2020</b>		<b>835.138</b>	<b>850.771</b>	<b>1.685.909</b>	-	<b>98,16</b>	<b>4.511</b>
<b>TAHUN 2019</b>		<b>828.848</b>	<b>845.510</b>	<b>1.674.358</b>	-	<b>98,03</b>	<b>4.480</b>
<b>TAHUN 2018</b>		<b>825.992</b>	<b>841.139</b>	<b>1.667.131</b>	-	<b>98,20</b>	<b>4.461</b>
<b>TAHUN 2017</b>		<b>823.173</b>	<b>835.379</b>	<b>1.658.552</b>	-	<b>98,54</b>	<b>4.438</b>

Sumber: Dispendukcapil (data diolah), 2024

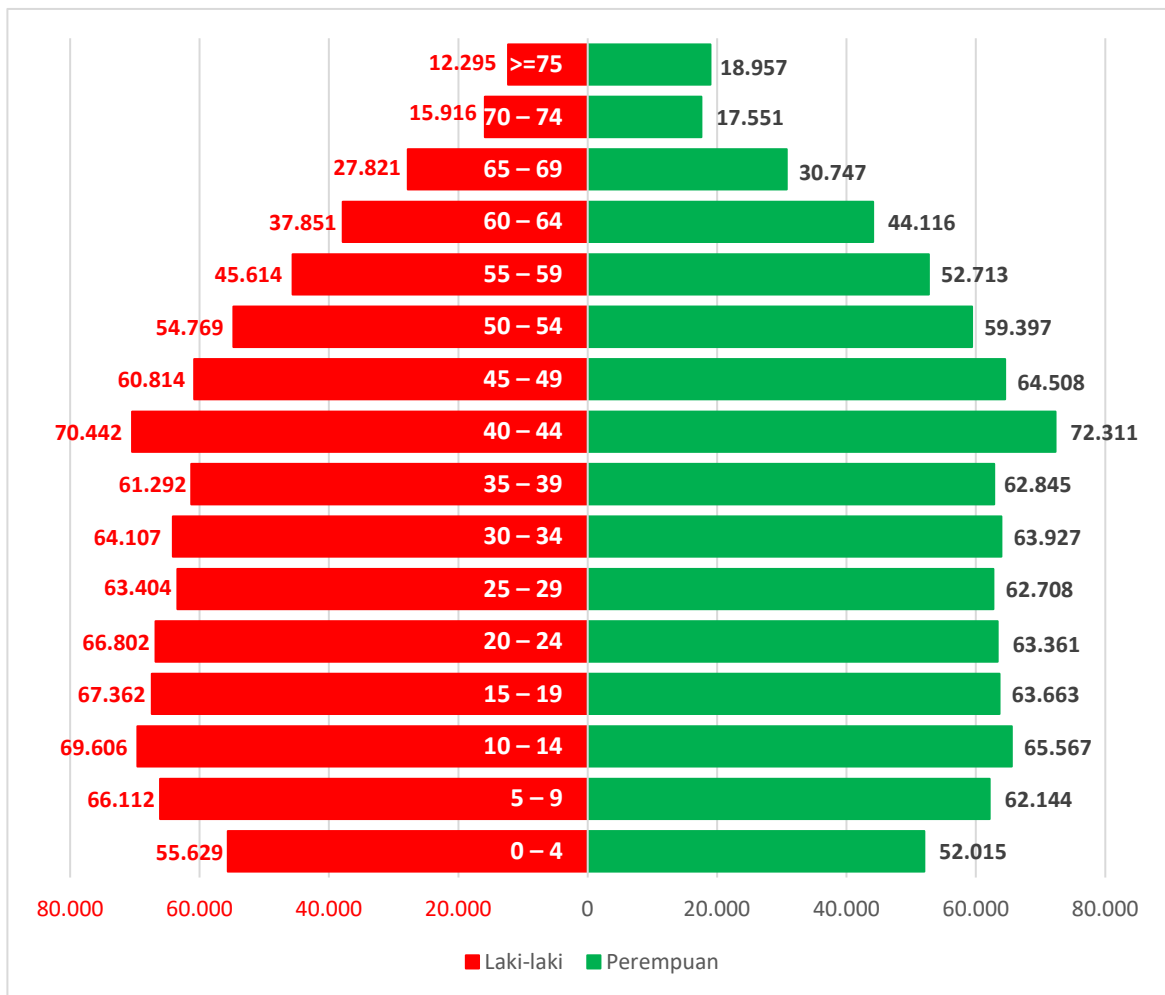
Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2023 sejumlah 1.202.006 jiwa (70,86%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 494.360 jiwa (29,14%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebesar 41,13%. Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.113 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	(%)
<b>0 - 4</b>	55.629	52.015	107.644	6,35
<b>5 - 9</b>	66.112	62.144	128.256	7,56

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	(%)
10 – 14	69.606	65.567	135.173	7,97
15 – 19	67.362	63.663	131.025	7,72
20 – 24	66.802	63.361	130.163	7,67
25 – 29	63.404	62.708	126.112	7,43
30 – 34	64.107	63.927	128.034	7,55
35 – 39	61.292	62.845	124.137	7,32
40 – 44	70.442	72.311	142.753	8,42
45 – 49	60.814	64.508	125.322	7,39
50 – 54	54.769	59.397	114.166	6,73
55 – 59	45.614	52.713	98.327	5,80
60 – 64	37.851	44.116	81.967	4,83
65 – 69	27.821	30.747	58.568	3,45
70 – 74	15.916	17.551	33.467	1,97
>=75	12.295	18.957	31.252	1,84
<b>Jumlah</b>	<b>839.836</b>	<b>856.530</b>	<b>1.696.366</b>	<b>100</b>

Sumber: Dispendukcapil, 2024



Sumber: Dispendukcapil, 2024

**Gambar 2.2**

**Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023**

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang dengan persentase terbesar adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 27,04%, disusul dengan penduduk SLTA/MA sederajat sebesar 27,26%.

Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 14,44%, yang terdiri dari Diploma I/II sebesar 0,33%, Akademi/Diploma III/Sarjana sebesar 3,22%, Diploma IV/Strata I sebesar 9,84%, Strata II sebesar 0,99% dan S3 sebesar 0,07%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak/belum sekolah	458.778	27,04
2	Belum tamat SD/ sederajat	225.237	13,28
3	Tamat SD/MI sederajat	97.636	5,76
4	SLTP/MTs/ sederajat	207.454	12,23
5	SLTA/MA/ sederajat	462.345	27,26
6	Diploma I II	5.529	0,33
7	Akademi/Diplom III/Sarjana Muda	54.625	3,22
8	Diploma IV/Strata I	166.888	9,84
9	Strata II	16.717	0,99
10	Strata III	1.157	0,07
<b>JUMLAH</b>		<b>1.696.366</b>	<b>100</b>

Sumber: SIPD, Dispendukcapil (data diolah) 2024

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (30,45%), mengurus rumah tangga (12,09%), wiraswasta (4,85%) dan PNS/TNI/POLRI (2,65%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 28,76% dan pelajar/mahasiswa sebesar 13,97%. Mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun secara persentase kecil namun ragamnya cukup banyak. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2023**

No	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	No	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
1	Karyawan Swasta	516.467	30,45%	21	Bidan	680	0,04%
2	Mengurus Rumah Tangga	205.122	12,09%	22	Pelaut	526	0,03%
3	Wiraswasta	82.336	4,85%	23	Pembantu Rumah Tangga	508	0,03%
4	PNS/TNI/POLRI	44.974	2,65%	24	Apoteker	400	0,02%
5	Buruh Tani/Perkebunan	27.952	1,65%	25	Pendeta	367	0,02%
6	Pensiunan	15.576	0,92%	26	Tukang Batu	347	0,02%
7	Buruh Harian Lepas	15.055	0,89%	27	Mekanik	283	0,02%
8	Guru	14.326	0,84%	28	Pengacara	213	0,01%
9	Pedagang	9.303	0,55%	29	Tukang Jahit	207	0,01%
10	Petani/Pekebun	7.355	0,43%	30	Industri	187	0,01%
11	Karyawan BUMN	6.739	0,40%	31	Wartawan	182	0,01%
12	Dosen	4.243	0,25%	32	Biarawan/ Biarawati	169	0,01%

No	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	No	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
13	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	4.158	0,25%	33	Konsultan	146	0,01%
14	Dokter	3.282	0,19%	34	Notaris	142	0,01%
15	Perawat	3.039	0,18%	35	Seniman	138	0,01%
16	Karyawan Honorer	1.519	0,09%	36	Konstruksi	135	0,01%
17	Nelayan/Perikanan	1.381	0,08%	37	Transportasi	132	0,01%
18	Perdagangan	1.088	0,06%	38	Lainnya	956	0,06%
19	Sopir	918	0,05%	39	Belum/Tidak Bekerja	487.853	28,76%
20	Karyawan BUMD	902	0,05%	40	Pelajar/Mahasiswa	237.060	13,97%
<b>JUMLAH</b>						<b>1.696.366</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dispendukcapil, diolah 2024

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2023 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

##### a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019–2023) mengalami peningkatan dari Rp 175.223,20 Milyar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 248.902,61 Milyar pada tahun 2023. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp 140.199,52 Milyar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 161.849,11 Milyar pada tahun 2023. Kontribusi tiga sektor terbesar pada PDRB ADHB disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata prosentase lima tahun

terakhir sebesar 28,50%), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 26,54%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 13,51%). Selain itu, kontribusi terbesar pada PDRB ADHK disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 25,92%), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 25,07%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 13,39%). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

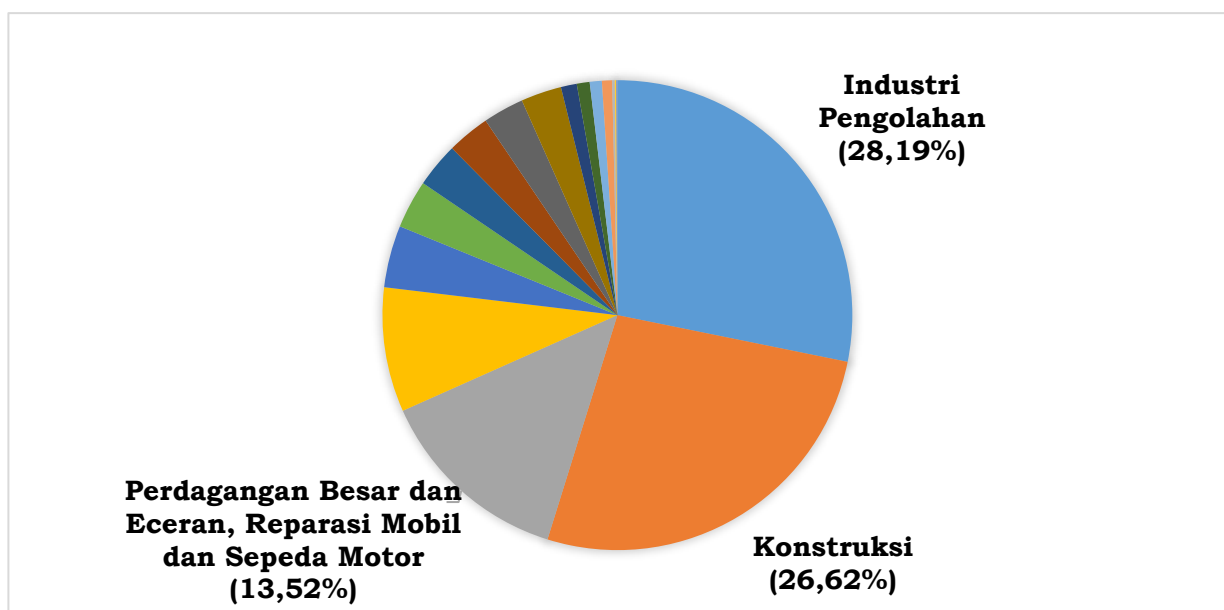
**Tabel 2.6.**  
**Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kota**  
**Semarang Tahun 2019 - 2023**

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai/ Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2019 - 2023 (dalam Milyar Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.554,99	1.610,97	1.721,15	1.830,81	1.940,69
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,81</b>	<b>0,85</b>	<b>0,84</b>	<b>0,81</b>	<b>0,78</b>
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	342,42	359,64	373,92	370,33	390,36
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,18</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	52.552,40	54.010,54	58.895,09	65.643,04	71.637,30
		Kontribusi kategori (%)	<b>27,46</b>	<b>28,62</b>	<b>28,75</b>	<b>28,87</b>	<b>28,78</b>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	211,56	210,72	213,14	213,61	233,13
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	137,53	147,83	163,72	165,66	169,99
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
F	Konstruksi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	51.435,48	49.078,35	55.385,71	59.872,60	65.835,44
		Kontribusi kategori (%)	<b>26,88</b>	<b>26,00</b>	<b>27,03</b>	<b>26,33</b>	<b>26,45</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	26.068,40	25.511,98	27.650,59	30.005,77	32.584,49
		Kontribusi kategori (%)	<b>13,62</b>	<b>13,52</b>	<b>13,50</b>	<b>13,20</b>	<b>13,09</b>
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	7.546,36	4.435,88	4.776,12	9.485,98	11.485,75
		Kontribusi kategori (%)	<b>3,94</b>	<b>2,35</b>	<b>2,33</b>	<b>4,17</b>	<b>4,61</b>
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	6.386,73	5.233,22	5.665,45	6.970,48	7.961,83
		Kontribusi kategori (%)	<b>3,34</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	<b>3,07</b>	<b>3,20</b>
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	15.015,40	18.085,59	18.886,96	19.604,74	21.282,49
		Kontribusi kategori (%)	<b>7,85</b>	<b>9,58</b>	<b>9,22</b>	<b>8,62</b>	<b>8,55</b>
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	8.038,38	8.155,86	8.718,46	9.524,47	9.891,71
		Kontribusi kategori (%)	<b>4,20</b>	<b>4,32</b>	<b>4,26</b>	<b>4,19</b>	<b>3,97</b>
L	Real Estate	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.375,79	5.407,70	5.685,16	6.090,51	6.576,52
		Kontribusi kategori (%)	<b>2,81</b>	<b>2,87</b>	<b>2,77</b>	<b>2,68</b>	<b>2,64</b>
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.407,45	1.324,33	1.379,62	1.538,79	1.710,03



No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai/ Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2019 - 2023 (dalam Milyar Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,74</b>	<b>0,70</b>	<b>0,67</b>	<b>0,68</b>	<b>0,69</b>
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.824,86	5.774,58	5.821,37	6.054,64	6.438,38
		Kontribusi kategori (%)	<b>3,04</b>	<b>3,06</b>	<b>2,84</b>	<b>2,66</b>	<b>2,59</b>
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.565,05	5.567,51	5.659,48	5.777,47	6.157,22
		Kontribusi kategori (%)	<b>2,91</b>	<b>2,95</b>	<b>2,76</b>	<b>2,54</b>	<b>2,47</b>
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.579,93	1.823,71	1.850,88	1.922,62	2.056,11
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,83</b>	<b>0,97</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>	<b>0,83</b>
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	2.309,32	1.993,28	2.024,17	2.302,68	2.551,17
		Kontribusi kategori (%)	<b>1,21</b>	<b>1,06</b>	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>
TOTAL PDRB ADHB		Jumlah (dalam Milyar Rupiah)	175.223,20	191.352,04	188.731,69	227.374,21	248.902,61
<b>TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB</b>		(%)	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Semarang, 2024



**Gambar 2.3**  
**Grafik Tiga Sektor Terbesar Rata-rata kontribusi PDRB ADHB di Kota Semarang Tahun 2019-2023**

Sedangkan untuk Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010), perkembangan dari tahun 2019-2023 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut ini.

**Tabel 2.7.**  
**Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Kota Semarang Tahun 2019-2023**

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2019 - 2023 (dalam Milyar Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.089,57	1.106,08	1.141,64	1.169,22	1184,14
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,78</b>	<b>0,80</b>	<b>0,79</b>	<b>0,76</b>	<b>0,73</b>
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	169,46	173,67	179,61	170,72	174,76
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	35.950,39	36.020,69	37.990,51	40.131,85	41.796,24
		Kontribusi kategori (%)	<b>25,64</b>	<b>26,18</b>	<b>26,25</b>	<b>26,23</b>	<b>25,82</b>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	171,17	171,50	173,22	171,12	185,58
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	120,68	123,68	131,24	132,79	136,25
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>
F	Konstruksi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	35.908,41	34.031,87	36.235,04	36.666,19	38.714,97
		Kontribusi kategori (%)	<b>25,61</b>	<b>24,73</b>	<b>25,04</b>	<b>23,96</b>	<b>23,92</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	20.520,79	19.756,74	21.039,60	21.865,39	22.939,43
		Kontribusi kategori (%)	<b>14,64</b>	<b>14,36</b>	<b>14,54</b>	<b>14,29</b>	<b>14,17</b>
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.320,84	3.184,25	3.424,05	6.128,51	6.775,97
		Kontribusi kategori (%)	<b>3,80</b>	<b>2,31</b>	<b>2,37</b>	<b>4,01</b>	<b>4,19</b>
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.547,72	3.770,08	4.039,33	4.859,46	5.482,66
		Kontribusi kategori (%)	<b>3,24</b>	<b>2,74</b>	<b>2,79</b>	<b>3,18</b>	<b>3,39</b>
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	15.505,40	18.654,55	19.479,19	20.217,45	21.909,64
		Kontribusi kategori (%)	<b>11,06</b>	<b>13,56</b>	<b>13,46</b>	<b>13,21</b>	<b>13,54</b>
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.364,00	5.457,98	5.560,38	5.581,21	5.681,71
		Kontribusi kategori (%)	<b>3,83</b>	<b>3,97</b>	<b>3,84</b>	<b>3,65</b>	<b>3,51</b>
L	Real Estate	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.338,39	4.334,92	4.497,48	4.728,54	5.053,43
		Kontribusi kategori (%)	<b>3,09</b>	<b>3,15</b>	<b>3,11</b>	<b>3,09</b>	<b>3,12</b>
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	948,80	873,42	900,15	957,00	1.026,95

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2019 - 2023 (dalam Milyar Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,68</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.087,63	3.996,12	3.937,30	4.010,14	4.177,13
		Kontribusi kategori (%)	<b>2,92</b>	<b>2,90</b>	<b>2,72</b>	<b>2,62</b>	<b>2,58</b>
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	3.368,21	3.283,67	3.287,61	3.351,58	3.564,40
		Kontribusi kategori (%)	<b>2,40</b>	<b>2,39</b>	<b>2,27</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.068,68	1.197,89	1.212,98	1.246,53	1.314,03
		Kontribusi kategori (%)	<b>0,76</b>	<b>0,87</b>	<b>0,84</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.719,37	1.464,88	1.475,25	1.610,90	1.731,83
		Kontribusi kategori (%)	<b>1,23</b>	<b>1,06</b>	<b>1,02</b>	<b>1,05</b>	<b>1,07</b>
TOTAL PDRB ADHK		Jumlah (dalam Milyar Rupiah)	140.199,52	137.601,98	144.704,57	152.995,41	161.849,11
<b>TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB</b>		(%)	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

**Tabel 2.8.**  
**PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2019 - 2023**

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57.078,16	54.271,35	55.708,27	58.495,08	62.643,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	896,56	871,92	914,21	959,52	1.036,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.298,74	13.597,03	13.763,06	13.800,90	14.152,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	90.264,29	82.578,49	87.457,76	87.970,16	91.911,16
5. Perubahan Inventori	568,79	1.100,88	812,98	972,55	1.010,16
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	76.187,93	-14.817,69	-13.951,72	-9.198,84	-8.724,02
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>98.968,23</b>	<b>137.601,98</b>	<b>144.704,57</b>	<b>152.999,37</b>	<b>161.842,11</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum sama dengan konsep investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan (Koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan stok. Pada tahun 2021 PMTB memiliki porsi kontribusi kedua terbesar terhadap PDRB Kota Semarang yakni sebesar 65,76% turun menjadi 61,58% pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai

proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

**Tabel 2.9.**

**Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2019-2023**

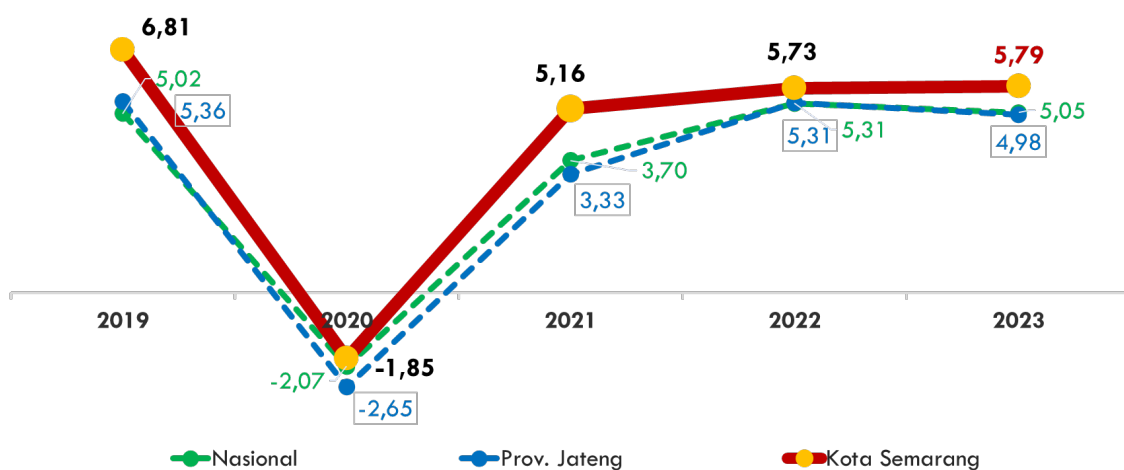
Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	1,51	3,22	2,42	1,28
B	Pertambangan dan Pengalihan	15,77	2,49	3,42	-4,95	2,37
C	Industri Pengolahan	8,29	0,20	5,47	5,64	4,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,96	0,19	1,00	-1,21	7,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,40	2,48	6,12	1,17	2,61
F	Konstruksi	5,27	-5,23	6,47	1,19	5,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,82	-3,72	6,49	3,92	4,91
H	Transportasi dan Pergudangan	9,77	-40,16	7,53	79,01	10,56
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,25	-17,10	7,14	20,30	12,82
J	Informasi dan Komunikasi	11,38	20,31	4,42	3,79	8,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	1,75	1,88	0,37	1,80
L	Real Estate	5,76	-0,08	3,75	5,14	6,87
M, N	Jasa Perusahaan	10,44	-7,94	3,06	6,32	7,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	-2,24	-1,47	1,85	4,16
P	Jasa Pendidikan	3,39	-2,51	0,12	1,95	6,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	12,09	1,26	2,77	5,41
R, S,T,U	Jasa lainnya	9,14	-14,80	0,71	9,20	7,51
<b>LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK</b>		6,81	-1,85	5,16	5,73	5,79

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024 (Data diolah)

Tiga sektor terbesar rata-rata prosentase pertumbuhan dalam lima tahun terakhir terjadi pada lapangan usaha pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,34%, jasa informasi dan komunikasi sebesar 9,65%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,68%. Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,82%, transportasi dan pergudangan sebesar 10,56%, serta jasa informasi dan komunikasi sebesar 8,37%.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2019–2023) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,85 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi makro kembali mengalami peningkatan pasca Pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan capaian sebesar 5,16 pada tahun 2021 dan semakin meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,79. Tidak hanya Kota Semarang, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi di kabupaten/kota lain, bahkan sampai ke tingkat nasional.

Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2019-2023:



Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2024 (Data Diolah)

**Gambar 2.4**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 - 2023**

Selain Kota Semarang, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh Kabupaten/Kota yang ada di daerah sekitar. Berikut disajikan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang jika disandingkan dengan kota besar setara.

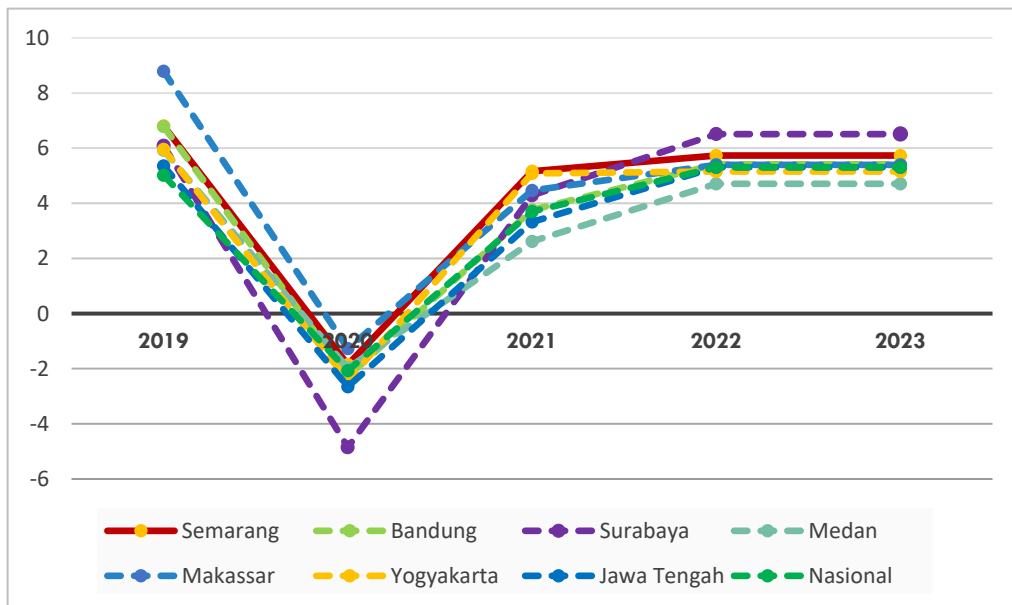
**Tabel 2.10.**

**Laju Pertumbuhan (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng, Nasional, dan Kota Besar Setara Tahun 2019-2023**

KABUPATEN/ KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	6,48	6,81	-1,85	5,16	5,73	5,79
Bandung	7,08	6,79	-2,28	3,76	5,41	5,07
Surabaya	6,19	6,09	-4,85	4,29	6,51	5,70
Medan	5,92	5,93	-1,98	2,62	4,71	5,04
Makassar	8,42	8,79	-1,27	4,47	5,4	5,31
Yogyakarta	5,49	5,96	-2,42	5,09	5,15	5,08
Jawa Tengah	5,3	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2024 (Data diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dialami oleh Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan kota besar setara pada tahun 2023. LPE Kota Semarang sebesar 5,73 berada di bawah Kota Surabaya dengan capaian sebesar 6,51 di tahun 2023. Pada tahun 2020, LPE beberapa kota di Indonesia juga mengalami penurunan hingga mencapai angka minus. Namun, kondisi membaik setelah pandemi Covid-19 sehingga LPE kota di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Berikut disajikan grafik pergerakan LPE Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional pada kurun waktu 2018-2023:



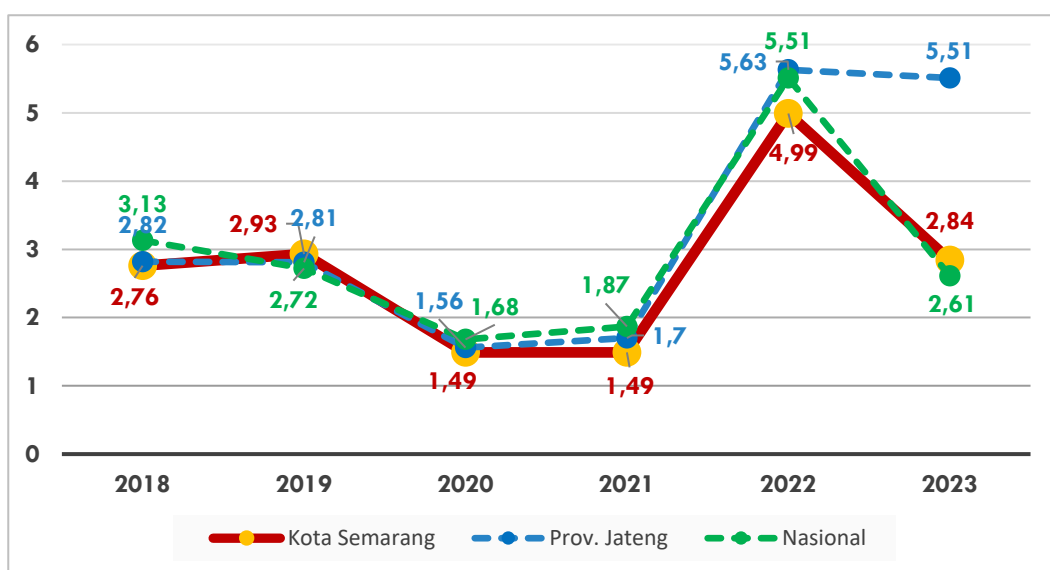
Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2024 (Data diolah)

**Gambar 2.5**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jateng, dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

**b. Laju Inflasi**

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflator Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Berikut perbandingan laju inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS 2024

**Gambar 2.6**

**Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023**

Inflasi Kota Semarang pada tahun 2019-2023 sangat fluktuatif, khususnya pada akhir tahun 2019 sebagai inflasi tertinggi sebesar 2,93% sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 1,49% dan tidak terjadi perubahan pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 dampak perang Ukraina dan Rusia menyebabkan tingginya harga BBM dan ini memicu Inflasi Kota Semarang hingga menyentuh 4,99%. Selama lima tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang meski kondisi pandemi pada empat tahun belakangan ini lebih disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru). Pada tahun 2023, angka inflasi Kota Semarang kembali menurun hingga berada di angka 2,84 di mana angka ini berada jauh di bawah angka nasional. Hal ini terjadi mengingat banyaknya kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya untuk menjaga angka inflasi agar tetap berada di posisi yang rendah.

### c. PDRB Perkapita

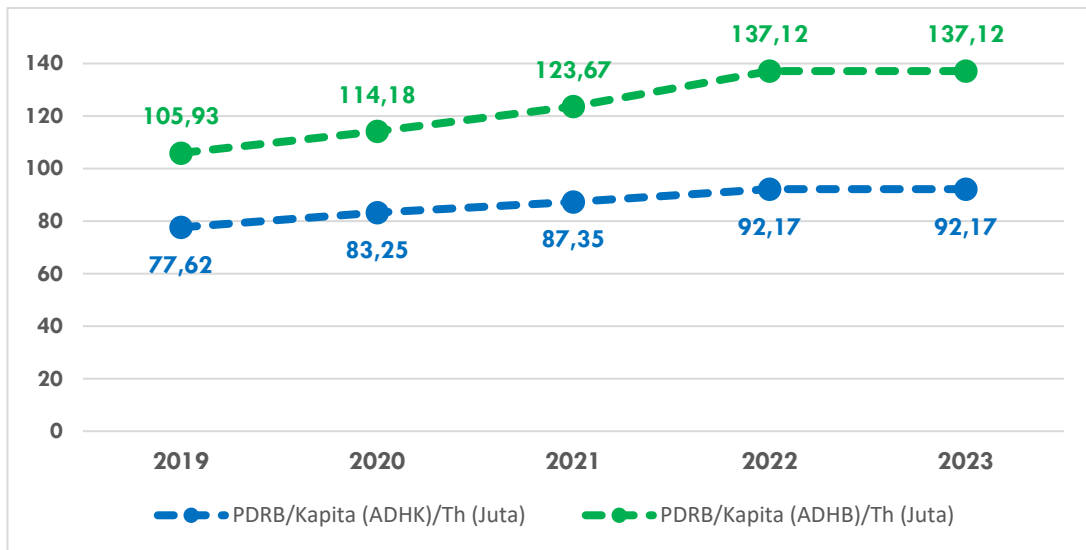
PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan proyeksi jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

**Tabel 2.11.**  
**Pendapatan per kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun 2018-2023**

Uraian	Rupiah				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Milyar)	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.619,17	227.619,17
PDRB ADHK (Milyar)	140.199,52	137.601,98	144.704,57	152.999,37	152.999,37
<b>PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)</b>	105,93	114,18	123,67	137,12	137,12
<b>PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)</b>	77,62	83,25	87,35	92,17	92,17

Sumber: Data diolah dari BPS Prov Jateng, Disdukpendukcapil, 2024

Dari data tabel di atas, diperoleh pendapatan perkapita atas dasar berlaku (memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 137,12 juta rupiah per jiwa/tahun. Trend PDRB perkapita yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023 mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun dengan asumsi sebaran kemakmurannya merata. Mendasarkan pada pertumbuhan PDRB baik ADHK maupun ADHB yang menunjukkan trend positif semenjak pandemi, maka PDRB per kapita ditargetkan meningkat mengikuti Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Adapun target PDRB ADHK per kapita pada tahun 2023 dan 2024 berturut-turut sebesar 91 juta dan 92,51 juta rupiah dalam setahun. Berikut disajikan grafik PDRB Kota Semarang dalam kurun waktu 2019-2023:



Sumber: BPS Kota Semarang, 2024 (Data diolah)

**Gambar 2.7**

**Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2019-2023**

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHK per kapita per tahun dan PDRB ADHB per kapita per tahun dari tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Nilai tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022, dengan PDRB ADHK per kapita per tahun sebesar 92,17 juta rupiah dan PDRB ADHB per kapita per tahun sebesar 137,12 juta rupiah.

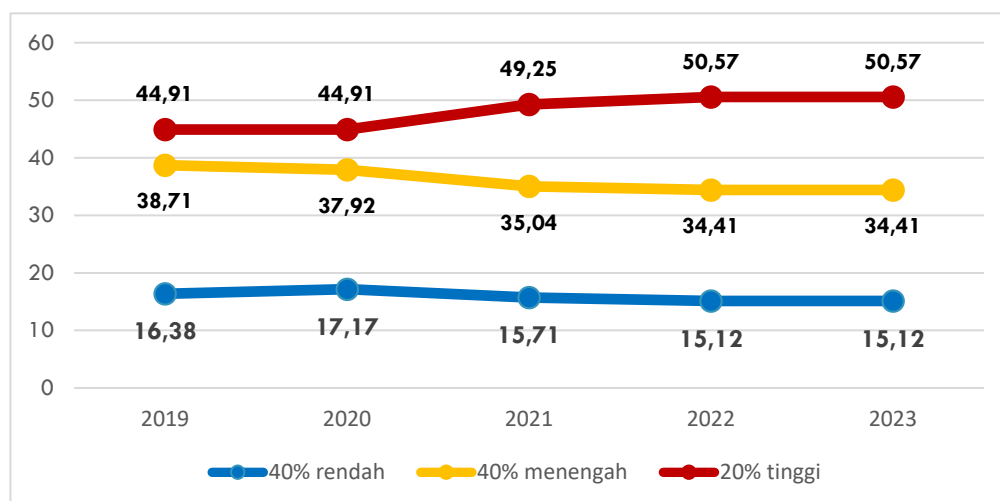
**d. Indeks Gini**

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 ( $0 < \text{Koefisien Gini} < 1$ ).

Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 0,00 < G < 0,30 → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- 0,30 < G < 0,50 → pemerataan / ketimpangan sedang
- G > 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Berikut disajikan grafik ketimpangan penduduk Kota Semarang pada kurun waktu 2019-2023:



Sumber: BPS, BPS Kota Semarang, 2024 (Data diolah)

**Gambar 2.8**

**Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2019 – 2023**



Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati bagian pendapatan sebesar 15,12% pada tahun 2022, lebih rendah daripada tahun 2021 sebesar 15,71%. Selain itu, untuk 40,00% penduduk lapisan menengah/sedang terjadi penurunan bagian pendapatan yaitu dari 35,04% pada tahun 2021 menjadi 34,31% pada tahun 2022. Sedangkan, 20,00% penduduk lapisan atas, terjadi peningkatan bagian pendapatan yaitu 49,25% pada tahun 2021 menjadi 50,57% pada tahun 2022.

Secara total, kelompok pendapatan menengah dan tinggi menguasai 84,88% distribusi pendapatan masyarakat di Kota Semarang. Sehingga dapat dikatakan dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan untuk penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. Idealnya untuk kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi mampu mentransfer ke kelompok penerima pendapatan rendah sehingga akan lebih merata.

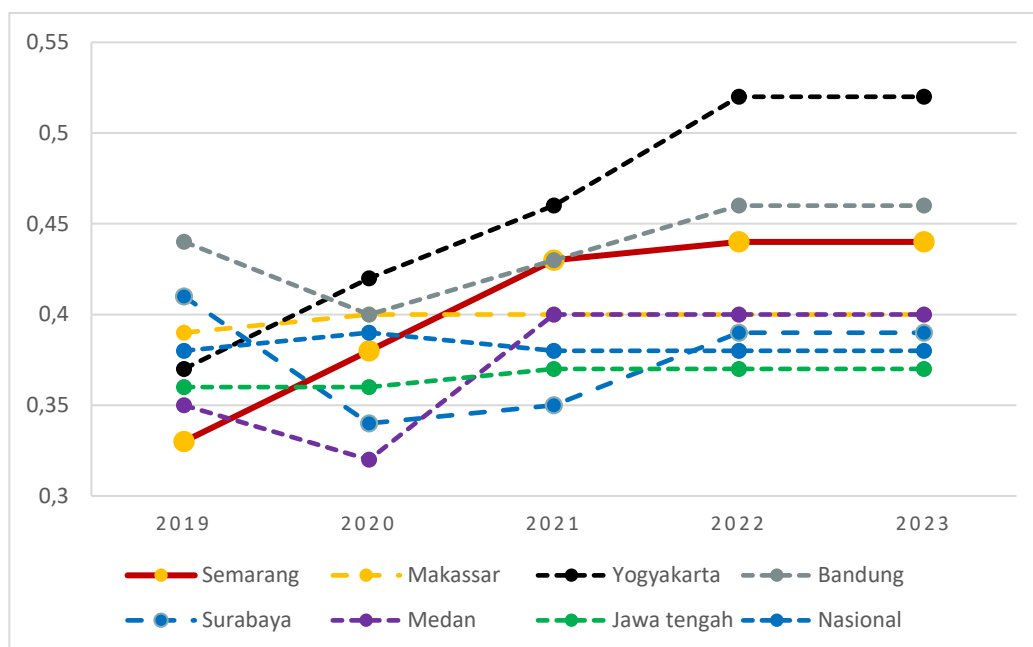
Indeks Gini Kota Semarang di tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 0,38 tahun 2021 sebesar 0,43 dan tahun 2022 sebesar 0,44. Berikut disajikan tabel perbandingan indeks gini Kota Semarang dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.

**Tabel 2.12.**  
**Indeks Gini Kota Semarang dengan Kota Besar Setara,**  
**Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

<b>KOTA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
Semarang	0,33	0,38	0,43	0,44	0,44
Makassar	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40
Yogyakarta	0,37	0,42	0,46	0,52	0,52
Bandung	0,44	0,40	0,43	0,46	0,46
Surabaya	0,41	0,34	0,35	0,39	0,39
Medan	0,35	0,32	0,40	0,40	0,40
Jawa Tengah	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37
Nasional	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38

*Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Kota Semarang, 2024*

Perubahan indeks gini Kota Semarang mengalami penurunan. Pada tahun 2021 indeks gini Kota Semarang meningkat sebesar 0,05 dari tahun 2020 dan kembali meningkat sebesar 0,01 pada tahun 2022. Peningkatan indeks gini Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 0,05 lebih besar dari rata-rata capaian kota pembanding (Makassar, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan) yang mengalami peningkatan sebesar 0,03 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, Peningkatan indeks gini Kota Semarang sebesar 0,01 lebih kecil dari rata-rata capaian kota pembanding yang mengalami peningkatan sebesar 0,03.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2024 (Data diolah)

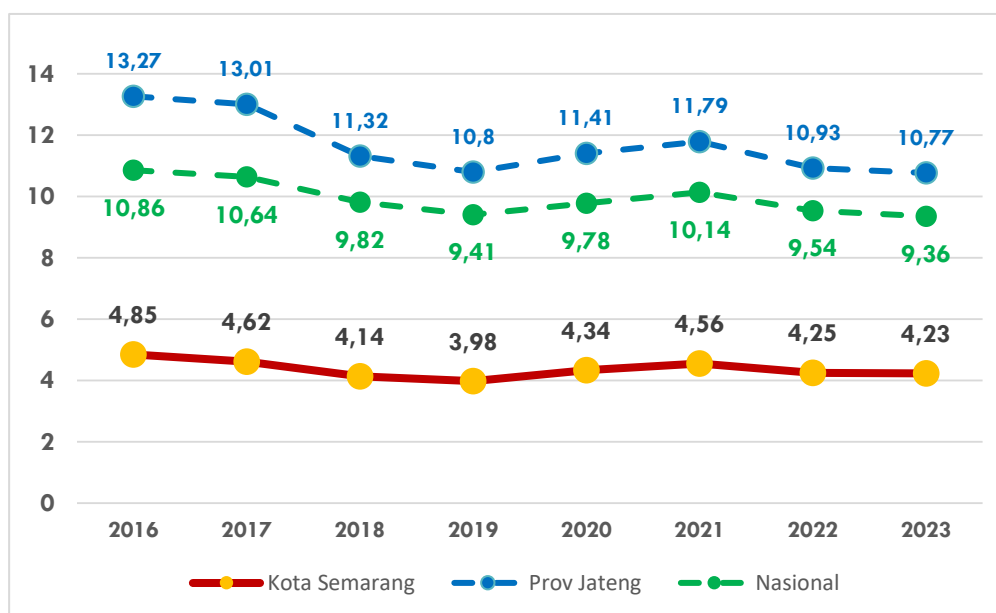
**Gambar 2.9**

**Perbandingan Indeks Gini Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, peningkatan indeks gini Kota Semarang sebesar 0,05 lebih besar dari nasional yang justru mengalami penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2021. Begitu pula pada tahun 2022, peningkatan indeks gini Kota Semarang sebesar 0,01 masih lebih tinggi daripada nasional yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2021.

**e. Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin merupakan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya cenderung menurun sejak tahun 2016-2023, namun karena adanya wabah pandemi yang juga berimbas pada menurunnya perekonomian mengakibatkan persentase penduduk miskin di Kota Semarang sedikit meningkat menjadi sebesar 4,56% di Tahun 2021, dan kembali menurun menjadi sebesar 4,25% pada tahun 2022, dan terus menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 4,23%. Meski demikian, angka ini masih yang terendah dibandingkan angka kemiskinan Kabupaten atau Kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi, mulai dari pemberian bansos, relaksasi kredit/pembiayaan/pajak, juga refocusing anggaran di Kota Semarang baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya. Akan tetapi, dampak pukulan ekonomi masih tidak bisa dihindarkan. Pada periode delapan tahun terakhir (2016-2023), terlihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebagai berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.10**  
**Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016 – 2023**

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Semarang dan kota besar lainnya dapat terlihat pada tabel sebagai berikut ini.

**Tabel 2.13.**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

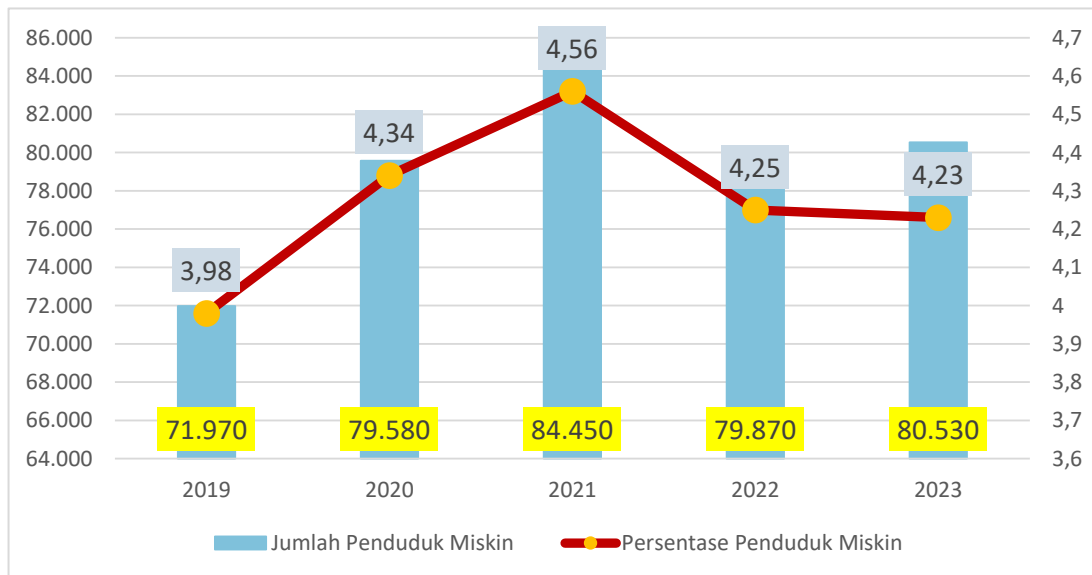
KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN					PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	71.970	79.580	84.450	79.870	80.530	3,98	4,34	4,56	4,25	4,23
Bandung	84.670	100.020	112.500	109.820	102.800	3,38	3,99	4,25	4,37	4,25
Surabaya	130.550	145.670	152.490	138.210	136.370	4,51	5,02	5,23	4,72	4,65
Medan	183.790	183.540	193.030	187.740	187.280	8,08	8,01	8,34	8,07	8,00
Makassar	65.120	69.980	74.690	71.830	71.830*	4,28	4,54	4,82	4,58	4,58*
Yogyakarta	29.450	31.620	34.070	29.680	29.480	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49
Jawa Tengah	3.679.400	4.119.930	3.934.010	3.858.230	3.791.500	10,58	11,84	11,25	10,93	10,77
Nasional	24.785.870	27.549.690	26.503.650	26.363.270	25.900.000	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber: Data diolah dari BPS Prov Jateng dan Nasional, 2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin kota besar setara yang terdiri dari Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta capaian Kota Semarang tidak lebih baik dibandingkan kota besar lain di Indonesia yaitu sebesar 4,23%. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin hanya mengalami penurunan sebesar 0,02%. Sedangkan rata-rata penurunan persentase penduduk miskin dari kota lainnya telah mencapai 0,098%. Capaian penurunan angka kemiskinan ini, juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,21%. Walaupun demikian, capaian angka kemiskinan ini telah mencapai target yang berada rentang 4,04 hingga 4,24%.

Jika ditinjau dari jumlah penduduk miskin di Kota Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlahnya sebesar 80.530 jiwa dengan peningkatan penduduk miskin sebesar 660 jiwa. Jumlah penduduk miskin ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kota besar pembanding seperti Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta yang jumlahnya mengalami penurunan sebesar 1.904 jiwa. Begitu pula jika dibandingkan dengan dengan penurunan jumlah

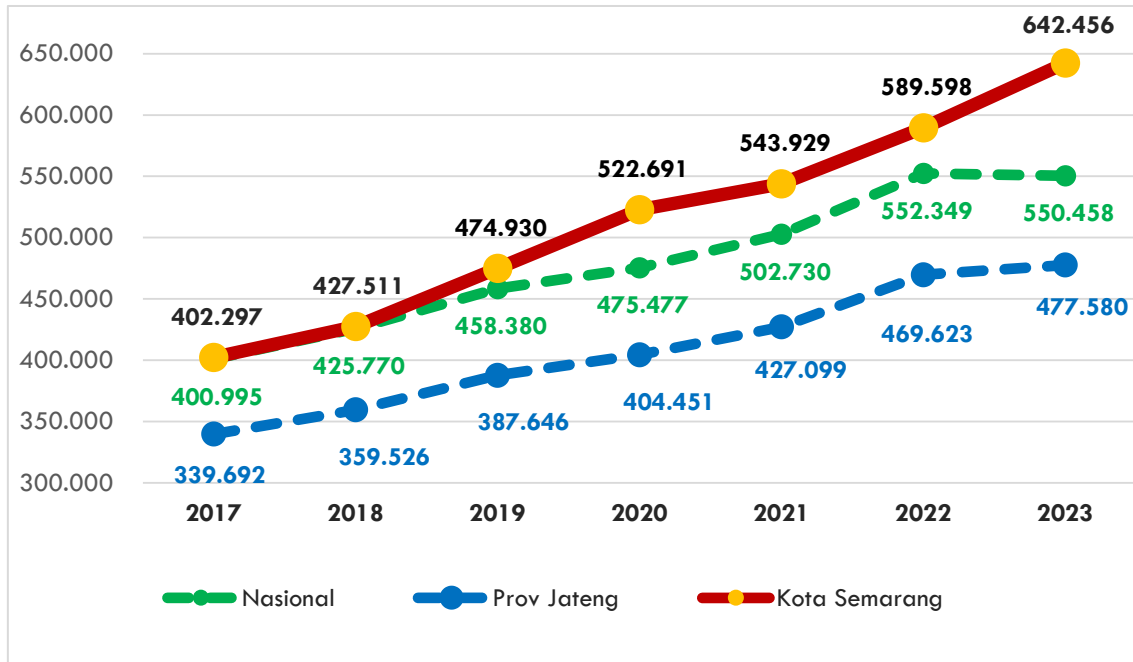
penduduk miskin nasional yang mencapai 463.270 jiwa, dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 66.730 jiwa, maka capaian penduduk miskin di Kota Semarang ini dapat disimpulkan tidak masuk ke dalam kategori yang baik.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2024 (Data diolah)

**Gambar 2.11**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang**  
**Tahun 2019-2023**

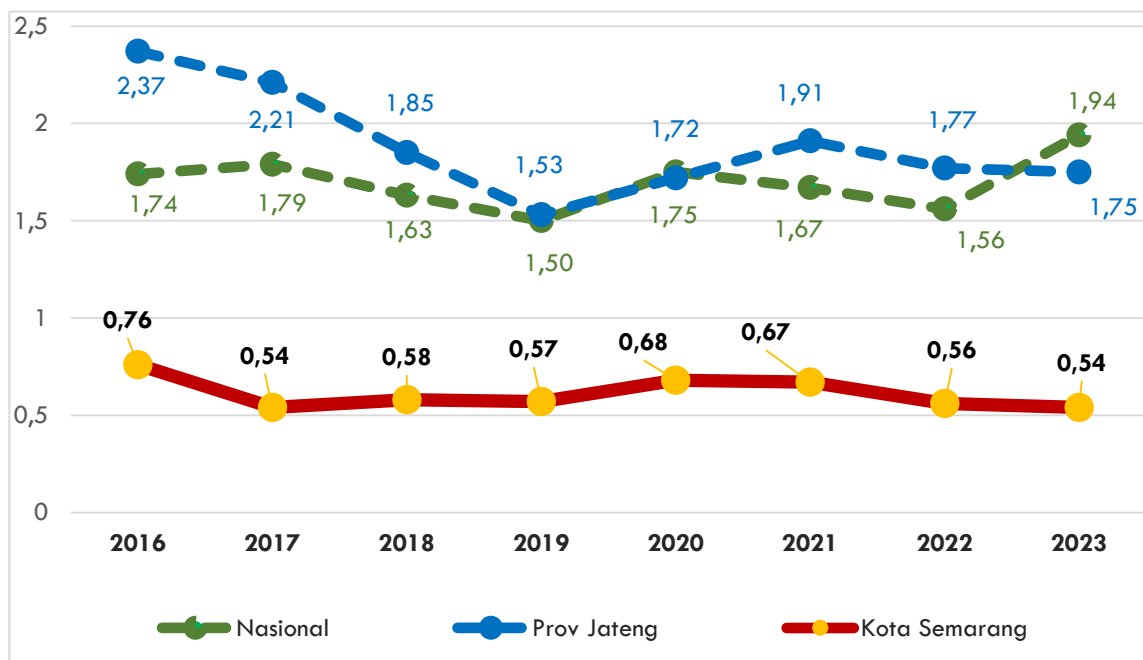
Dari tahun 2016-2018 perubahan pertumbuhan penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,48%. Akan tetapi, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kembali mengalami peningkatan dan baru pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,31%. Garis kemiskinan sebagai garis batas ukuran seseorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak, merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok lebih tinggi (diatas) garis kemiskinan, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin, demikian pula sebaliknya. Dilihat dari perbandingan garis kemiskinan antara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, terlihat bahwa batas ukuran kemiskinan di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Artinya orang miskin di Kota Semarang, belum tentu tergolong miskin jika diukur menggunakan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2024 (Data diolah)

**Gambar 2.12**  
**Garis Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional**  
**Tahun 2017 – 2023**

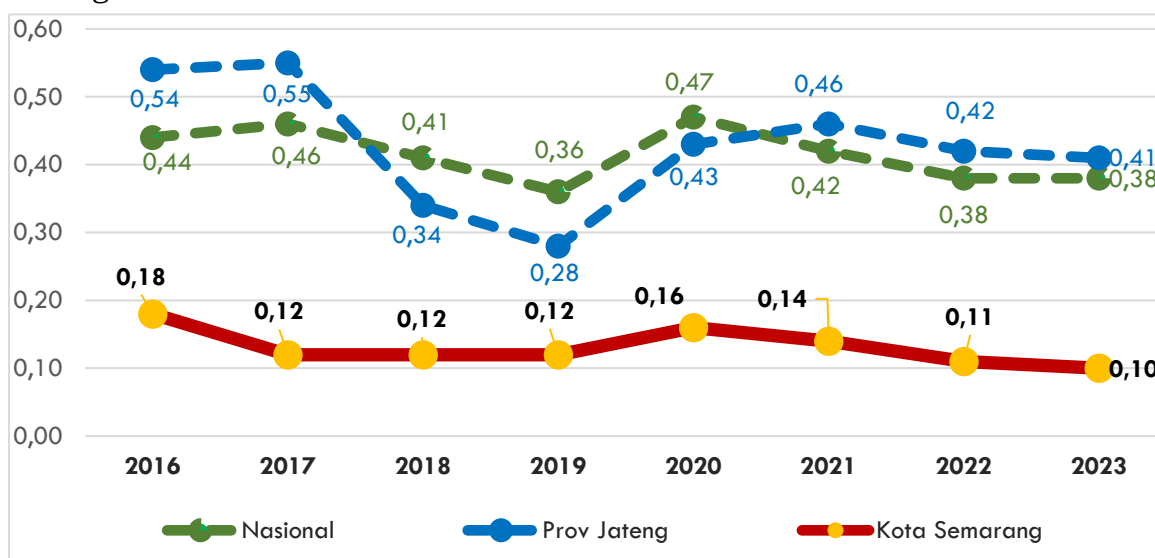
Indeks Kedalaman Kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Gambaran Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang selama delapan tahun terakhir menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kota Semarang lebih rendah, dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Artinya mengentaskan warga miskin di Kota akan lebih mudah dilakukan karena kesenjangan terhadap garis kemiskinan tidak terlalu jauh.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.13**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan**  
**Nasional Tahun 2016 – 2023**

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama tahun 2016-2022, indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang selalu menduduki peringkat terbawah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan pada Tingkat Nasional.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.14**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016-2023**

Dengan terbitnya UU No. 13 Tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No. 10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

**Tabel 2.14.**  
**Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Kota Semarang				Prov Jateng		Nasional	
		Versi Pemkot Smg/BDT Kemensos		Versi BPS		Versi BPS		Versi BPS	
		Jiwa	(%)	Jiwa (ribu)	(%)	Jiwa (ribu)	(%)	Jiwa (ribu)	(%)
1	2017	303.715	18,3	80,86	4,62	4.197,49	12,23	26.582,99	10,12
2	2018	280.211	16,8	73,65	4,14	3.867,42	11,19	25.674,58	9,66
3	2019	229.564	13,8	71,97	3,98	3.679,40	10,58	24.785,87	9,22
4	2020	271.396	16,15	79,58	4,34	3.980,90	11,84	27.549,69	10,19
5	2021	407.363	24,23	84,45	4,56	3.934,01	11,25	26.503,65	9,71
6	2022	186.675	11,06	79,87	4,25	3.858,23	10,93	26.363,27	9,57
7	2023	186.506	11,05	80,53	4,23	3.791,50	10,77	25.900,00	9,36

Sumber: Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015, [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id); [bps.go.id](http://bps.go.id), Dinas Sosial, 2024

Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Kota Semarang, data update Januari 2024 dapat diketahui bahwa rasio penduduk miskin Kota Semarang

pada tahun 2023 menyentuh angka 4,23% atau sebesar 80,53 ribu jiwa. Angka ini lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 4,25% dan bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 10,77%. Sedangkan meningkatnya angka kemiskinan berdasarkan data BDT Kemensos menjadi sebesar 24,23% pada tahun 2021 disebabkan karena terdapat kebijakan dari KL terkait angka DTKS pada tahun 2021 di mana angka kesejahteraan sosial ini menjadi meliputi usulan daerah, fitur usul sanggah aplikasi cek bansos, data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda dan *geo tagging* data spasial dari citra satelit. Selain itu juga data penerimaan bantuan dari KL lain selain Kemensos.

Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH dan berbagai program kegiatan lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam *Sustainable Development Goals* (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

#### f. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak terhadap perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Kriminalitas dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2019 - 2023, jumlah tindak pidana menonjol (*crime index*) menurut jenis dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2.15.**  
**Jumlah Tindak Pidana Menonjol (*Crime Index*) Menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2019 – 2023**

Jenis Tindak Pidana	Jumlah di Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
a. Pencurian dengan pemberatan	1	0	14	138	162
b. Pencurian ranmor	19	33	31	91	40
c. Pencurian dengan kekerasan	2	4	7	11	23
d. Penganiayaan	30	19	38	115	168
e. Pembunuhan	1	3	1	6	5
f. Perkosaan	2	0	0	2	5
g. Uang palsu	0	0	NA	NA	18
h. Narkotika	NA	NA	NA	21	138
i. Perjudian	0	0	1	7	4
j. Pemerasan/Ancaman	4	3	3	16	5
k. Lainnya	1.092	1.268	1.084	928	722
<b>Jumlah Kejadian</b>	<b>1.151</b>	<b>1.330</b>	<b>1.253</b>	<b>1.335</b>	<b>1.290</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2024 (Data Diolah)

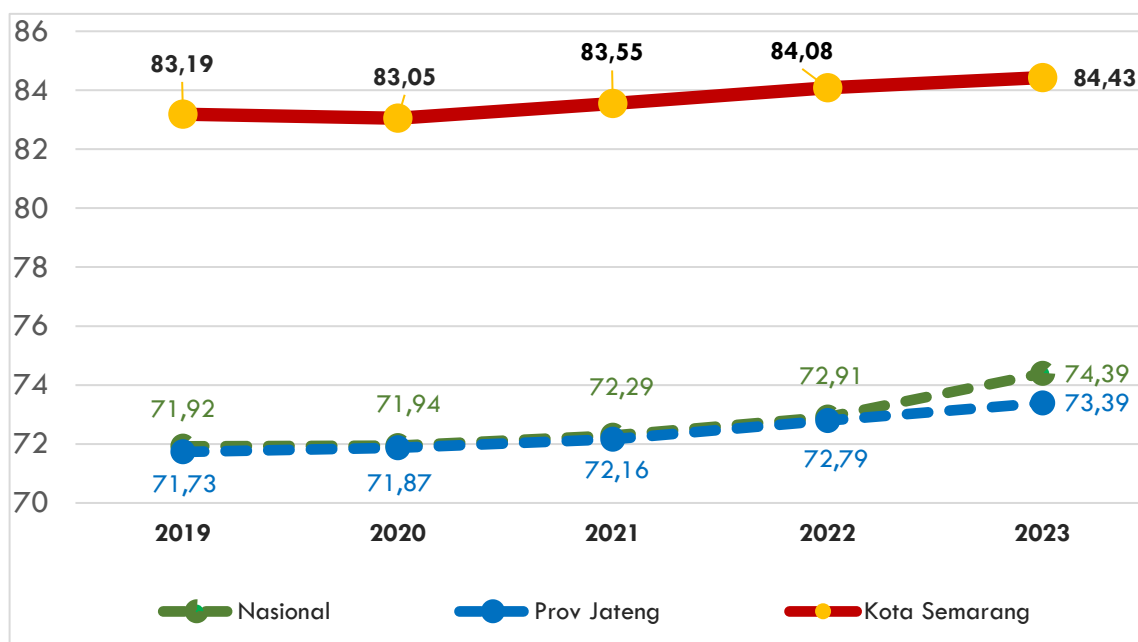
Dalam kurun tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa jumlah angka kriminalitas di Kota Semarang mempunyai kecenderungan meningkat. Berdasarkan data yang ada di atas, pada tahun 2023 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 1.290 kasus jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 1.151 kasus. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka kriminalitas mengalami penurunan sebanyak 45 kasus. Pada tahun 2023 ini, angka kriminalitas terbanyak berada pada kasus penganiayaan, pencurian dengan pemberatan dan narkoba. Angka kriminalitas Kota Semarang dari tahun 2019-2023 mengalami tren yang fluktuatif. Hal ini terjadi karena tingkat perekonomian masyarakat yang belum stabil pasca pandemi Covid-19.

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2023 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan, kecuali dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dari semula 83,19 menjadi 83,05 namun kembali naik di tahun 2021 menjadi 83,55, dan juga mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 dan 2023 yang menjadi secara berturut-turut yaitu 84,08 dan 84,43. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang terutama paska pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.15**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2019 – 2023**

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Adapun skor-skor dari indikator pembentuk IPM sejak Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.



**Tabel 2.16.**  
**Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2018-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b>	<b>Harapan Lama Sekolah (HLS)</b>	<b>Rata2 Lama Sekolah (RLS)</b>	<b>Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)</b>
2018	77,23	15,50	10,51	14.895,-
2019	77,25	15,51	10,52	15.550,-
2020	77,34	15,52	10,53	15.243,-
2021	77,51	15,53	10,78	15.425,-
2022	77,69	15,54	10,80	16.047,-
2023	77,90	15,55	10,81	16.420,-

*Sumber: BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam lima tahun terakhir masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian  $\geq 80$ . Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Semarang antara lain adalah selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat. Peran pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi pola hidup sehat, penuntasan buta aksara, penurunan angka putus sekolah, pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, serta sarpras penunjang terkait dengan pembelajaran daring yang harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli, apalagi selama pandemi sektor ini banyak mengalami kelesuan, di samping sektor hiburan, wisata, serta sektor ekonomi lainnya. IPM Kota Semarang dan Pertumbuhan IPM Kota Semarang serta Perbandingan IPM Kota Semarang dengan IPM kota-kota besar setara ditunjukkan pada gambar berikut.

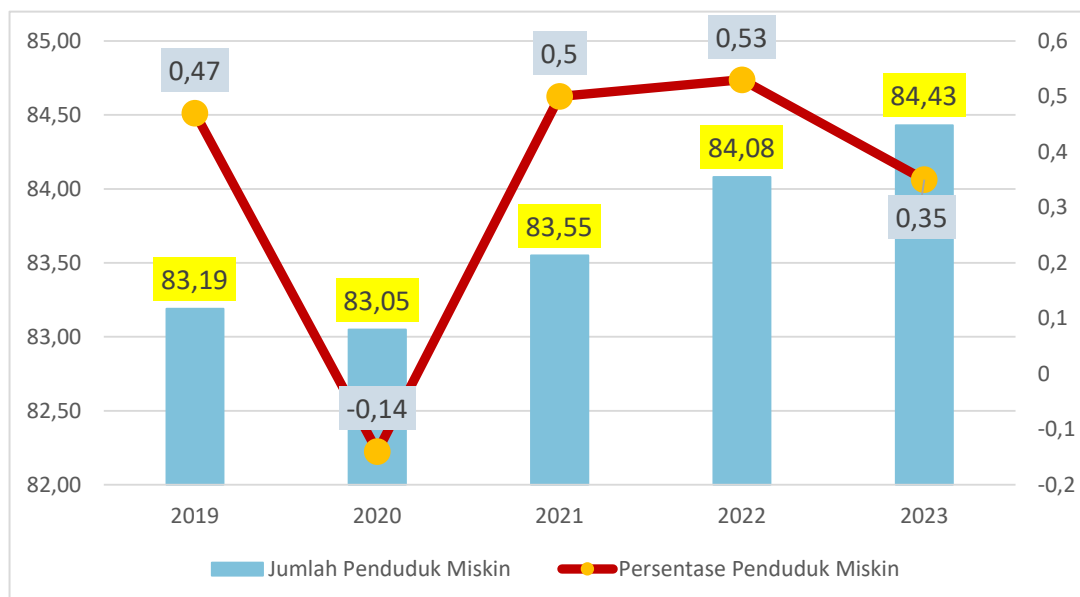
**Tabel 2.17.**  
**IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Semarang	83,19	83,05	83,55	84,08	84,43
Bandung	81,62	81,51	81,96	82,50	83,04
Surabaya	82,22	82,23	82,31	82,74	83,99
Medan	80,97	80,98	81,21	81,76	82,61
Makassar	82,25	82,25	82,66	83,12	83,52
Yogyakarta	86,65	86,61	87,18	87,69	88,61
Jawa Tengah	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39
Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

*Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Semarang berada di atas kemajuan dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Akan tetapi, capaian IPM di Kota Semarang pada tahun 2023 berada di bawah Kota Yogyakarta yang telah mencapai nilai IPM sebesar 88,61. Berikut disajikan grafik pertumbuhan IPM Kota Semarang untuk

kurun waktu tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2024

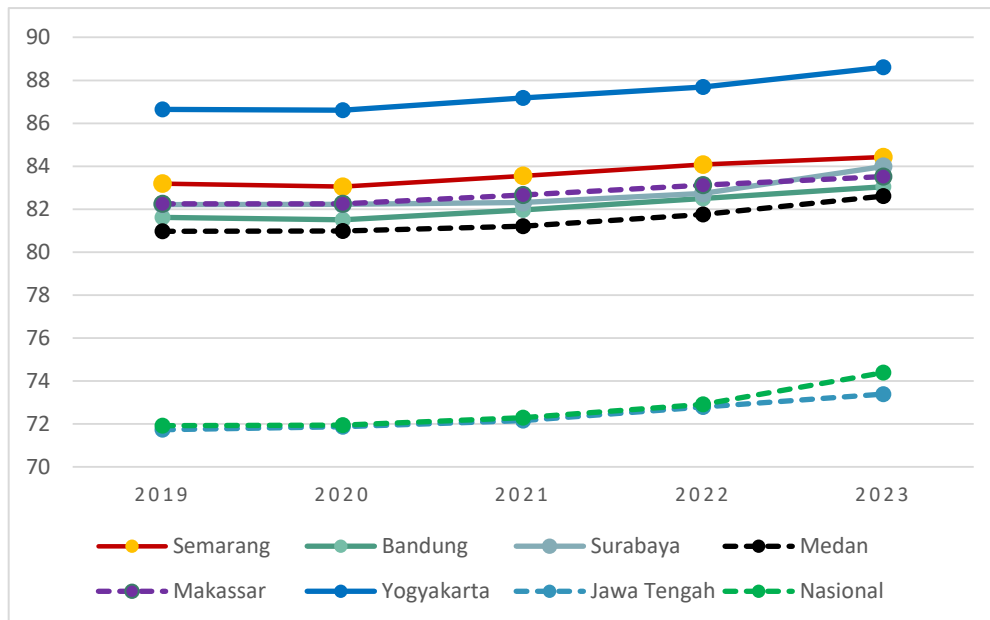
**Gambar 2.16**  
**Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang**  
**Tahun 2019 - 2023**

Pertumbuhan IPM Kota Semarang pada tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, IPM Kota Semarang sedikit mengalami penurunan sebesar 0,14 dibanding tahun 2019 dikarenakan pandemi Covid-19. Kemudian setelah pandemi IPM Kota Semarang kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,5; tahun 2022 sebesar 0,53 dan pada tahun 2023 sebesar 0,35 hingga IPM Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 84,43. Pertumbuhan IPM Kota Semarang di tahun 2023 lebih rendah dari pertumbuhan IPM kota besar lainnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut data pertumbuhan IPM Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023.

**Tabel 2.18.**  
**Pertumbuhan IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah,**  
**dan Nasioal Tahun 2019-2023**

KABUPATEN / KOTA	IPM					PERTUMBUHAN IPM				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	83,19	83,05	83,55	84,08	84,43	0,47	-0,14	0,5	0,53	0,35
Bandung	81,62	81,51	81,96	82,50	83,04	0,56	-0,11	0,45	0,54	0,54
Surabaya	82,22	82,23	82,31	82,74	83,99	0,48	0,01	0,08	0,43	1,25
Medan	80,97	80,98	81,21	81,76	82,61	0,32	0,01	0,23	0,55	0,85
Makassar	82,25	82,25	82,66	83,12	83,52	0,52	0,00	0,41	0,46	0,40
Yogyakarta	86,65	86,61	87,18	87,69	88,61	0,54	-0,04	0,57	0,51	0,92
Jawa Tengah	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39	0,61	0,14	0,29	0,63	0,6
Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39	0,53	0,02	0,35	0,62	1,48

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2024

**Gambar 2.17**

**Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

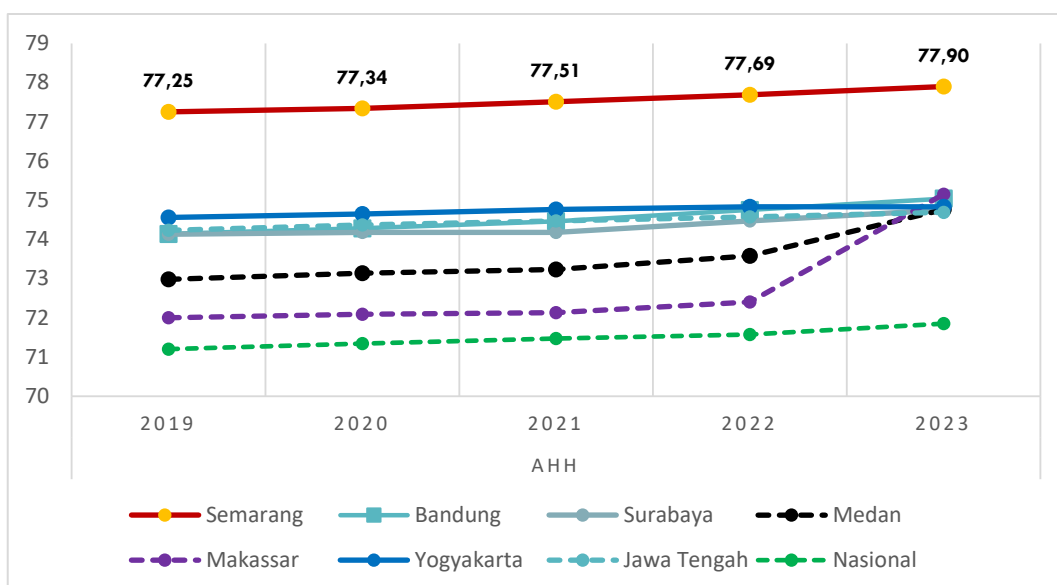
Sementara itu, Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang pada Tahun 2023 sebesar 0,21 tahun, lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar yang masing-masing tumbuh 0,29 tahun, 0,28 tahun, 1,18 tahun dan 2,75 tahun. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan AHH Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan nasional yang sebesar 0,28 tahun pada tahun 2023. Berikut disajikan data dan grafik terkait dengan AHH dan Pertumbuhan AHH Kota Semarang Tahun 2019-2023.

**Tabel 2.19.**

**Pertumbuhan AHH Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

KABUPATEN/ KOTA	AHH					PERTUMBUHAN AHH				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	77,25	77,34	77,51	77,69	77,90	0,02	0,09	0,17	0,18	0,21
Bandung	74,14	74,28	74,46	74,75	75,04	0,14	0,14	0,18	0,29	0,19
Surabaya	74,13	74,18	74,18	74,47	74,75	0,15	0,05	0,00	0,29	0,18
Medan	72,98	73,14	73,23	73,58	74,76	0,34	0,16	0,09	0,35	1,18
Makassar	72,00	72,09	72,13	72,40	75,15	0,30	0,09	0,04	0,27	2,75
Yogyakarta	74,56	74,65	74,76	74,83	75,52	0,11	0,09	0,11	0,07	0,00
Jawa Tengah	74,23	74,37	74,47	74,57	74,69	0,05	0,14	0,10	0,10	0,12
Nasional	71,34	71,47	71,57	71,85	71,85	0,14	0,13	0,10	0,28	0,28

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2024

**Gambar 2.18**

**Pertumbuhan AHH Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 - 2023**

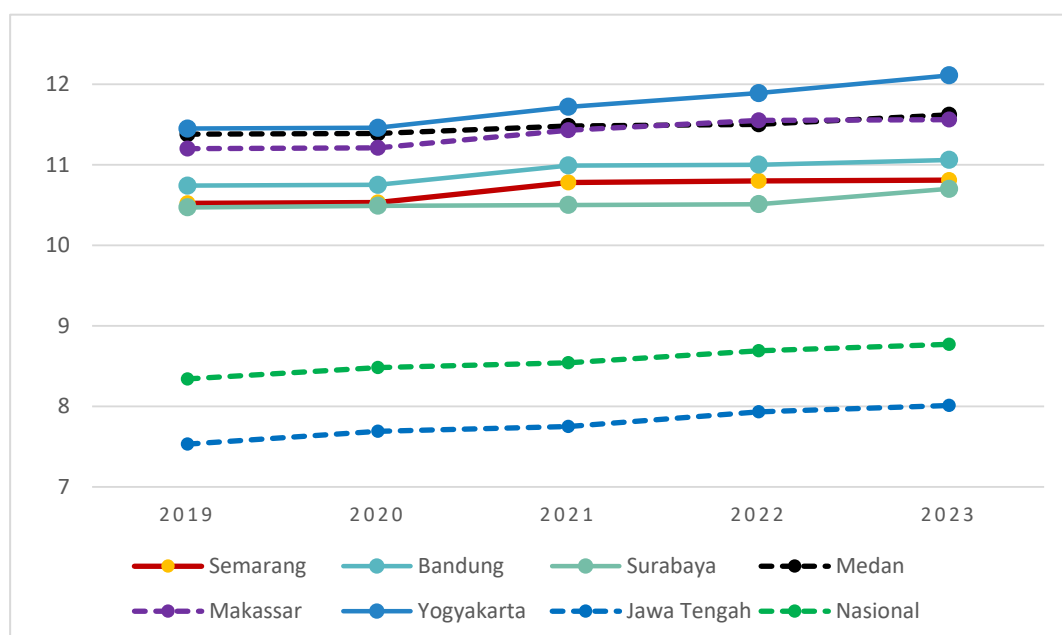
Pertumbuhan RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) Kota Semarang sebesar 10,81 tahun pada tahun 2023. RLS tersebut telah melampaui target tahun 2022 yaitu sebesar 10,59 tahun. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2023 RLS Kota Semarang naik sebesar 0,01 tahun. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan Bandung, Surabaya, Medan dan Yogyakarta. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan RLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,08 tahun. Data RLS dan pertumbuhan RLS dapat dilihat melalui tabel dan grafik yang digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 2.20.**

**Pertumbuhan RLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

KABUPATEN/ KOTA	RLS					PERTUMBUHAN RLS				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	10,52	10,53	10,78	10,80	10,81	0,01	0,01	0,25	0,02	0,01
Bandung	10,74	10,75	10,99	11,00	11,06	0,11	0,01	0,24	0,01	0,06
Surabaya	10,47	10,49	10,50	10,51	10,70	0,01	0,02	0,01	0,01	0,19
Medan	11,38	11,39	11,48	11,50	11,62	0,01	0,01	0,09	0,02	0,12
Makassar	11,20	11,21	11,43	11,55	11,56	0,11	0,01	0,22	0,12	0,01
Yogyakarta	11,45	11,46	11,72	11,89	12,11	0,01	0,01	0,26	0,17	0,22
Jawa Tengah	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01	0,18	0,16	0,06	0,18	0,08
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	0,17	0,14	0,06	0,15	0,08

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2024

**Gambar 2.19**

**Pertumbuhan RLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 - 2023**

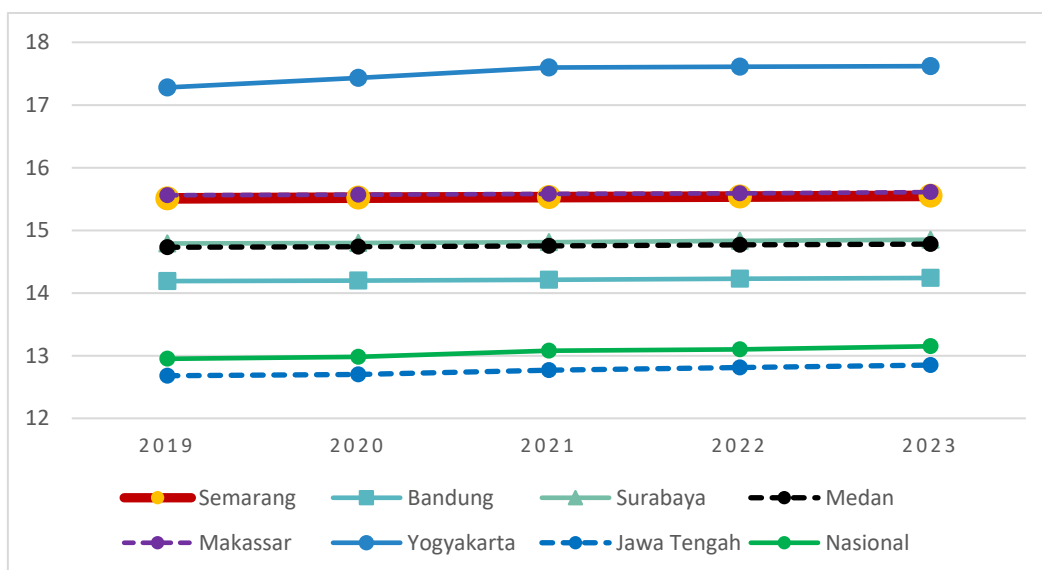
Pertumbuhan HLS (Harapan Lama Sekolah) Kota Semarang sebesar 15,55 tahun pada tahun 2023, sedikit lebih rendah target tahun 2023 sebesar 15,58 tahun. Meski demikian pertumbuhan HLS Kota Semarang positif meningkat sebesar 0,01 tahun. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara lain seperti Bandung, Surabaya, Medan dan Yogyakarta. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, pertumbuhan HLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan provinsi dan nasional. Data terkait HLS ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.21.**

**Pertumbuhan HLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

KABUPATEN/ KOTA	HLS					PERTUMBUHAN HLS				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	15,51	15,52	15,53	15,54	15,55	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Bandung	14,19	14,20	14,21	14,23	14,24	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Surabaya	14,79	14,80	14,81	14,83	14,85	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Medan	14,73	14,74	14,75	14,77	14,78	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
Makassar	15,56	15,57	15,58	15,59	15,61	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Yogyakarta	17,28	17,43	17,60	17,61	17,62	0,23	0,15	0,17	0,01	0,01
Jawa Tengah	12,68	12,70	12,77	12,81	12,85	0,05	0,02	0,07	0,04	0,04
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15	0,04	0,03	0,10	0,02	0,05

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2024

**Gambar 2.20**

**Pertumbuhan HLS Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 - 2023**

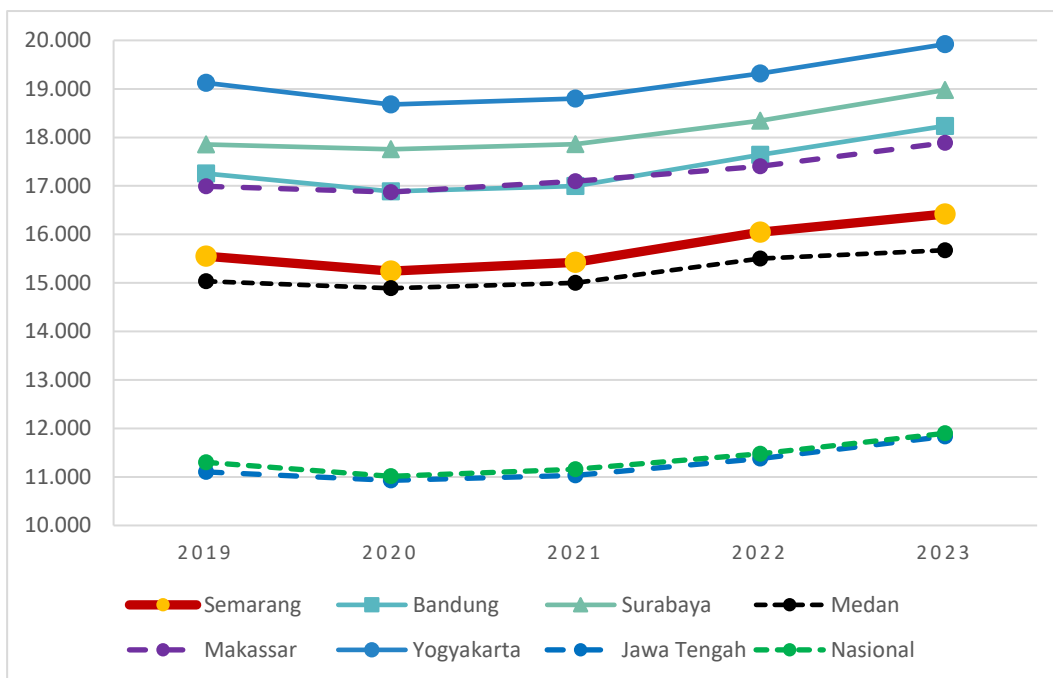
Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita Kota Semarang sebesar 16.420 ribu rupiah/orang/tahun, lebih kecil dibandingkan dengan kota besar setara Bandung, Surabaya, Makassar dan Yogyakarta namun lebih besar dibanding dengan Kota Medan. Pengeluaran per kapita Kota Semarang lebih besar dari pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.835 ribu rupiah/orang/tahun dan pengeluaran per kapita nasional yang sebesar 11.899 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2023.

**Tabel 2.22.**

**Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

KABUPATEN/ KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA					PERTUMBUHAN PENGELUARAN PER KAPITA				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	15.550	15.243	15.425	16.047	16.420	655	-307	182	622	373
Bandung	17.254	16.887	16.996	17.639	18.236	624	-367	109	643	597
Surabaya	17.854	17.755	17.862	18.345	18.977	697	-99	107	483	632
Medan	15.033	14.890	14.999	15.503	15.674	188	-143	109	504	171
Makassar	16.989	16.873	17.097	17.406	17.889	392	-116	224	309	483
Yogyakarta	19.125	18.678	18.801	19.319	19.920	496	-447	123	518	601
Jawa Tengah	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835	325	-172	104	343	458
Nasional	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899	240	-286	143	323	420

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2024

**Gambar 2.21**

**Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kota Semarang, Kota Besar Setara Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019 - 2023**

Pada saat pandemi Covid-19, pengeluaran per kapita di Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 307 ribu rupiah/orang/tahun. Akan tetapi, setelah pandemi Covid-19 pengeluaran per kapita telah mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pengeluaran per kapita pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan nominal angka peningkatan berturut-turut adalah 182 ribu rupiah/orang/tahun, 622 ribu rupiah/orang/tahun dan 373 ribu rupiah/orang/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli atau konsumsi masyarakat semakin tinggi, sehingga turut memperlihatkan bahwa masyarakatnya juga semakin sejahtera.

**b. Kesempatan kerja**

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

**1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

TPT merupakan perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan pada akhirnya berimbas pada sektor ketenagakerjaan, yaitu mulai dari tidak bekerja sampai dengan pengurangan jam kerja. Selain itu pandemi menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang akhirnya membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari tempat kerja dengan jam kerja yang monoton.

Untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi, perlu mempersiapkan SDM pekerja sebaik mungkin, meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi yang tepat, agar sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja paska pandemi. Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% dari sebelumnya yang hanya sebesar 4,54% dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 9,54% dan di tahun 2022 telah mencapai 7,60%. Pada tahun 2023, TPT di Kota Semarang semakin turun menjadi 5,99%. Akan tetapi, secara umum TPT Kota Semarang ini lebih tinggi jika dibandingkan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,13% dan juga nasional yang sebesar 5,32%.

Pada tahun 2020, angka TPT kembali melonjak tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum tahun 2020 karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang secara global menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Di luar pandemi Covid-19, penyebab tingginya TPT di Kota Semarang juga disebabkan karena jumlah masyarakat berpendidikan SMA dan perguruan tinggi berada pada kondisi yang lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, masyarakat tersebut cenderung untuk memilih-milih pekerjaan, sehingga menyebabkan angka TPT di Kota Semarang menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didukung pula dengan adanya data yang menyebutkan bahwa jumlah pekerja pada sektor pertanian di Kota Semarang pada tahun 2022 hanya mencapai 0,52%, jauh angkanya jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah yang jumlahnya bisa mencapai angka > 30%.

Jika dibandingkan dengan kota setara lainnya di Indonesia, dapat diketahui bahwa angka TPT di Kota Semarang sudah berada pada titik yang lebih rendah. Walaupun demikian, masih perlu berbagai upaya konkrit untuk menurunkan angka TPT dari hulu ke hilir, mulai dari proses penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui lembaga formal dan informal, hingga berbagai upaya untuk menempatkan pencari kerja pada pasar kerja. Dalam mendukung upaya tersebut, perlu adanya komunikasi bersama antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja agar nantinya terjadi link and match baik yang dilatih dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan dunia usaha. Selanjutnya perlu adanya pendataan yang tepat terhadap pekerja sektor non formal seperti online shop, ojek online, dan lain-lain. Pendataan yang tepat perlu dilakukan karena saat ini kecenderungan ekonomi justru tertuju pada sektor non formal, karena dinilai lebih praktis dan menjanjikan untuk konsumen pada tingkat perkotaan yang masyarakatnya memiliki mobilitas tinggi.

## **2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja pada daerah tersebut. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif, namun tetap dalam kisaran di atas 65%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Perkembangan TPT, TPAK dan jumlah angkatan kerja di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut.



**Tabel 2.23.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Kota Semarang Tahun 2018-2023**

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Jateng	Kota Semarang	Prov. Jateng	Kota Semarang
2018	4,51	5,29	68,56	65,56
2019	4,49	4,54	68,62	66,42
2020	6,48	9,57	69,43	69,89
2021	5,95	9,54	69,58	69,41
2022	5,57	7,60	70,84	70,96
2023	5,13	5,99	71,72	69,42

Sumber: BPS Prov. Jateng, 2024

**Tabel 2.24.**  
**Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2018-2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja:					
Bekerja	907.937	925.963	936.076	994.091	873.358
Pengangguran Terbuka	43.198	98.001	98.718	81.736	55.656
<b>Total Angkatan Kerja</b>	<b>951.135</b>	<b>1.023.964</b>	<b>1.034.794</b>	<b>1.075.827</b>	<b>929.014</b>

Sumber: BPS Prov. Jateng 2024

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan. Hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal berbasis vokasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang mengalami fluktuasi bila dibandingkan dengan kota-kota besar setara antara tahun 2018-2023. Berikut disajikan tabel TPT Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional untuk kurun waktu 2018-2022.

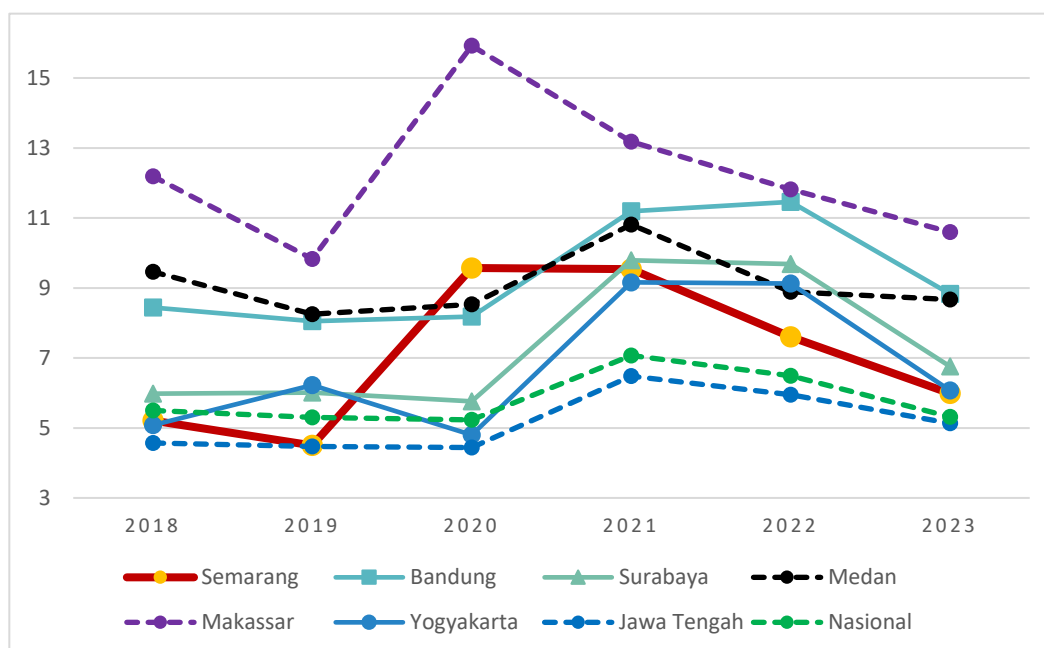
**Tabel 2.25.**  
**TPT Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi**  
**Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023**

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	5,21	4,50	9,57	9,54	7,60	5,99
Bandung	8,44	8,05	8,18	11,19	11,46	8,83
Surabaya	5,98	6,01	5,76	9,79	9,68	6,76
Medan	9,46	8,25	8,53	10,74	10,81	8,67
Makassar	12,19	9,83	15,92	13,18	11,82	10,60
Yogyakarta	5,08	6,22	4,8	9,16	9,13	6,07
Jawa Tengah	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95	5,13
Nasional	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49	5,32

Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2024

TPT di Kota Semarang pada tahun 2023 adalah 5,99%. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional. Akan tetapi, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar setara. Hal ini menunjukkan bahwa presentase jumlah penganggur di Kota Semarang lebih rendah daripada kota-kota besar setara. Berikut disajikan grafik pergerakan TPT Kota Semarang, kota-kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional untuk kurun waktu 2018-2023:

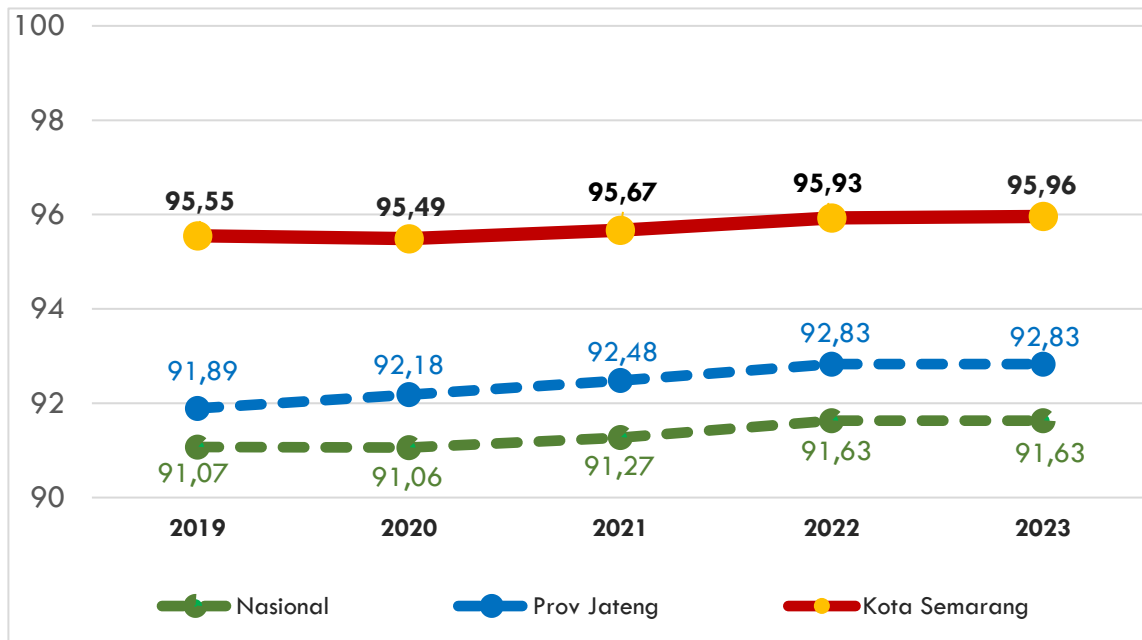


Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.22**  
**Perkembangan TPT Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2018-2023**

**c. Indeks Pembangunan Gender**

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Semarang mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, hal ini disebabkan AHH perempuan merupakan satu-satunya variabel IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki, sedangkan variabel komposit lainnya lebih rendah. Pada tahun 2021 IPG kembali meningkat menjadi sebesar 95,67% dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 95,93%. Pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat kesetaraan dan keadilan gender yang lebih baik di Kota Semarang jika dibandingkan dengan daerah lain.



Sumber : BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.23**

**Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023**

IPG Kota Semarang pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 95,93%, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83% dan Nasional sebesar 91,63%. Dibandingkan dengan 5 besar setara, Kota Semarang menempati posisi di bawah Kota Yogyakarta yang mencapai angka 98,48% seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.26.**

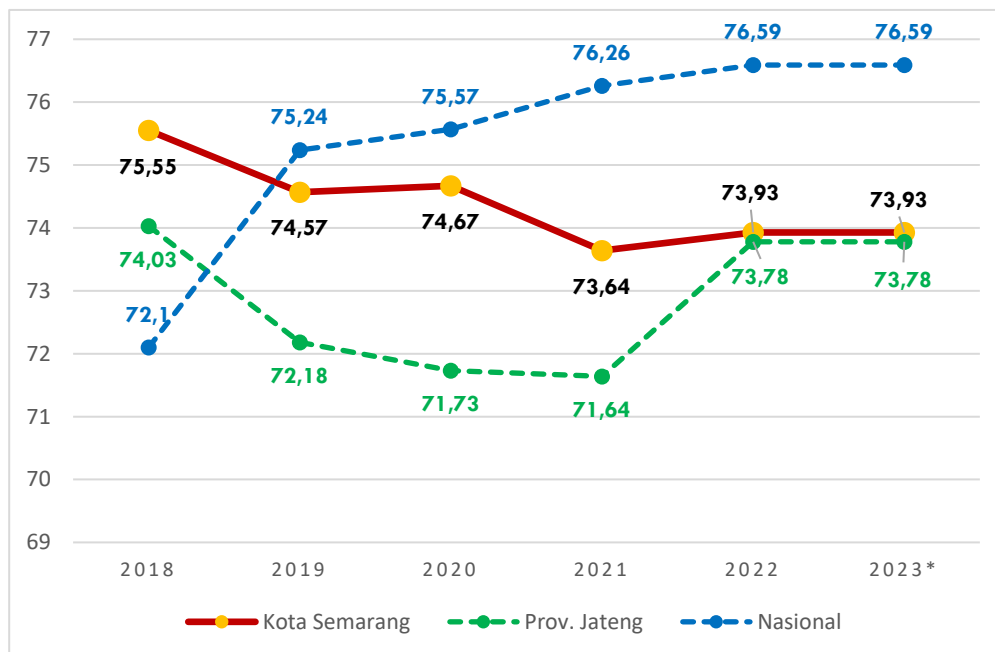
**Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Semarang	95,55	95,49	95,67	95,93	95,96
Bandung	94,82	94,68	94,72	94,81	95,24
Surabaya	93,60	93,58	93,90	94,21	95,56
Medan	94,02	94,00	93,76	93,85	94,13
Makassar	94,48	94,47	94,44	94,52	94,65
Yogyakarta	98,09	98,16	98,32	98,48	98,47
Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber: BPS Nasional, 2024

**d. Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Progres IDG dari tahun 2018-2023 terlihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

**Gambar 2.24**

**Perkembangan IDG Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**

Capaian IDG Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan perkembangan fluktuatif dari sebesar 75,55 pada tahun 2018 turun menjadi 74,57 di tahun 2019 dan kemudian naik kembali menjadi 74,67 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan 2022 capaian IDG Kota Semarang kembali turun menjadi 73,64, sedangkan IDG Nasional justru meningkat tajam menjadi sebesar 76,26 sebagai pencapaian tertinggi selama kurun waktu 2019-2022.

**2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran, prakarsa, dan keberdayaan masyarakat terlihat pada kinerja pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota, serta 2) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang diatur lebih lanjut melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang diantaranya memuat mekanisme penghitungan Indeks Pencapaian SPM, di mana untuk capaian SPM sebelum tahun 2022 dilakukan hanya pada aspek penerima layanan, sedangkan mulai tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM mempunyai bobot sebesar 80% dari aspek penerima layanan dan 20% lainnya dinilai dari capaian kualitas mutu layanan. Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan umum mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

### **2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan, diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan tahun 2023:

##### **1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 5-6 tahun sebesar 124,20% pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 116,76%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia PAUD yang bersekolah pada jenjang tersebut. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang berada hanya pada angka 81,50%. Hal ini disebabkan tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi covid, sedangkan balita dan usia PAUD termasuk dalam kelompok rentan, sehingga orang tuanya enggan mengikutsertakan putra-putrinya dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Namun demikian, pada tahun 2023 angkanya kembali meningkat, karena sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat dan operasional PAUD sudah kembali normal.

Di sisi lain persentase pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 sebesar 81,53% pada tahun 2023, persentase ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 81,33%. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya peserta didik PAUD tentunya diperlukan tenaga pendidik yang lebih banyak. Untuk itu perlu kiranya peningkatan kesejahteraan dan kapasitas pendidik PAUD, sehingga meningkatkan minat dan kualitas pendidikan di jenjang tersebut.

##### **2) Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar sembilan tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. APK dan APM SD/MI pada tahun 2023 masing-masing sebesar 109,88% dan 89,89% sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%. Beberapa kondisi yang meningkat pada tahun 2023 terjadi pada angka kelulusan sebesar 98,87%, persentase pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 menjadi sebesar 96,00%. Adanya penurunan ini dikarenakan terdapatnya pendidik yang telah memasuki masa purna tugas. Selain itu, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2023 mencapai 98,18%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 95,05%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dasar sembilan tahun, dan semakin banyak masyarakat yang percaya terhadap kualitas pendidikan di Kota Semarang.

Di sisi lain APK dan APM SMP/MTs pada tahun 2023 meningkat masing-masing menjadi sebesar 114,95% dan 83,41% jika dibandingkan dengan tahun 2022, demikian pula persentase Pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 96,55%. Sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%. Sedangkan angka kelulusan menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 99,55%.

Pelayanan urusan Pendidikan di bidang sarana gedung sekolah juga menjadi perhatian bersama. Untuk tahun 2023, baik kondisi bangunan sekolah SD/MI, maupun SMP/MTs yang kondisinya baik semuanya mengalami

peningkatan dimana untuk persentase jenjang SD dan SMP masing-masing sebesar 86,16% dan 92,47%. Hal ini disebabkan pelaksanaan perbaikan bangunan telah dilakukan sehingga proses belajar mengajar berjalan baik.

### 3) Pendidikan Non Formal Pendidikan

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan yang memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan keterampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Semarang sudah memiliki sekolah yang berbasis inklusi, baik pada jenjang sekolah dasar, maupun sekolah menengah pertama. Selain itu untuk mendukung pencapaian SDG's pendidikan, di Kota Semarang sudah banyak LPK Swasta yang dikembangkan yaitu sebanyak 119 lembaga. Selanjutnya, di Kota Semarang juga telah terdapat pula kelembagaan PKBM yang terakreditasi B dengan jumlah sebanyak 18 lembaga. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.27.**

#### **Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Pendidikan dasar</b>					
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	34,02	33,68	34,19	36,81	37,67
b.	Rasio guru/murid	01:18	01:18	01:18	01:18	1:18
c.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	2:20:28
<b>2</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>					
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)	28,32	27,92	27,86	26,86	28,64
b.	Rasio guru terhadap murid	01:17	01:17	01:17	01:17	1:18
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	1:18:32
<b>3</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>					
a.	SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b.	SMP/MTs	0,02	0,04	0,06	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>Angka Kelulusan</b>					
a.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,98	99,98	100,00	97,22	98,87
b.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,94	99,95	99,95	100,00	99,55
<b>5</b>	<b>Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)</b>	103,14	103,47	100,00	95,05	98,18
<b>6</b>	<b>Fasilitas Pendidikan</b>					
a.	SD/MI Kondisi Bangunan Baik	87,84	86,44	95,00	65,00	86,16
b.	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	93,09	92,95	99,00	80,00	92,47
<b>7</b>	<b>Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)</b>					
	- Jenjang PAUD	80,44	72,87	98,00	81,33	81,53
	- Jenjang SD/MI	90,6	96,43	97,00	93,33	96,00
	- Jenjang SMP/MTs	86,98	96,95	98,00	88,57	96,55

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
8	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	NA	1,92	1,94	75,64
9	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	NA	1,78	1,72	55,55
<b>Indikator SDGs</b>						
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target1)	96,10	97,66	90,00	90,41	89,89
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	84,88	84,88	80,00	73,11	83,41
12	APK PAUD 5-6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	83,01	83,01	81,50	116,76	85,87
13	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	110,59	111,67	100,00	103,71	109,88
14	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	114,41	115,59	100,00	98,95	114,95
15	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,52	10,53	10,55	10,80	10,81

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2024

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Pendidikan pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.28.**

**Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023**

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD:  Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	60,79%  <u>31.429</u> 51.705	86,50%  <u>44.233</u> 51.135	107,97%  <u>54.234</u> 50.231	89,53%  <u>44.656</u> 49.880	100%	100%	100%  (Tuntas Paripurna)
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs):  Jumlah Peserta Didik Usia 7-15 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th	79,48%  <u>187.578</u> 236.011	77,95%  <u>185.604</u> 238.093	95,56%  <u>231.952</u> 242.351	100,81%  <u>242.758</u> 240.798	100%	100%	100%  (Tuntas Paripurna)
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI):  Jml Peserta Didik Usia 7-12 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th			95,59%  <u>154.453</u> 161.580	103,45%  <u>165.544</u> 160.018	100%	100%	100%  (Tuntas Paripurna)

4	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs):  Jml Peserta Didik Usia 13-15 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 13-15 Th			95,51% <u>77.147</u> 80.771	95,59% <u>77.214</u> 80.780	100%	100%	100%  (Tuntas Paripurna)
5	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan:  Jml Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 thn ----- x 100% Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah	7,13 % <u>3.225</u> 45.235  (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th)	6 % <u>1.650</u> 27.501  (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th)	26,22% <u>1.617</u> 6.166  (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah)	84,12% <u>3.226</u> 3.835  (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah)	100%	100%	100%  (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Dinas Pendidikan, 2024

Dari data tersebut di atas, jika dilihat dari aspek capaian penerima layanan dasar, secara umum capaian SPM tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan predikatnya hampir semua mengalami peningkatan dari tuntas pratama dan tuntas madya ke tuntas utama. Permasalahan yang dijumpai di antaranya masih terdapat kekurangan guru dan tenaga kependidikan (GTK) ASN sehingga dipenuhi dengan GTK non ASN dan bahkan GTK paruh waktu yang dibiayai dengan dana BOSP. Di samping itu, juga masih terdapat anak putus sekolah meskipun kebijakan sekolah gratis dan juga beasiswa siswa miskin dan miskin berprestasi semakin diperluas pemanfaatannya. Perlu upaya nyata dan keseriusan berbagai pihak dalam peningkatan Indeks SPM pada bidang urusan pendidikan, diantaranya koordinasi dengan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kewenangan jenjang SMA/MA dan juga Paket C.

#### b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada, Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya: Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Inovasi Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100% didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor secara Gotong Royong (PANGERAN DIPONEGORO) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu, capaian ini juga didukung dengan adanya penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atas dukungan dan kontribusi dalam program jaminan kesehatan nasional dengan pencapaian UHC. Selain itu, penghargaan lain di bidang kesehatan juga diterima oleh RSD KRMT Wongsonegoro yang masuk ke dalam Top 5 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah untuk Aplikasi Sistem Informasi Harian Terpadu (SI RINDU) Tahun 2022-2023.

Terkait percepatan penanggulangan stunting di Kota Semarang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,30% pada tahun 2021 menjadi sebesar 10,40% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 capaiannya masih menunggu *release* dari survei status gizi Indonesia atau SSGI. Penanganan stunting



ini dilakukan secara holistik dan integratif melalui inovasi program yang dilakukan di antaranya: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan Pembuatan menu Balita dan Ibu Hamil. Selain itu juga Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), Kegiatan *day care* di Rumah Pelita (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor bagi Baduta). Selain itu Kota Semarang sudah mempunyai SK TPPS, Tim TPPS, penyelenggaraan kegiatan melalui konvergensi aksi, serta Perwal Percepatan Penurunan Stunting yang mengacu pada Perpres.

Kinerja dalam penanganan Penyakit Menular AIDS, TB dan Malaria (ATM) perlu ditingkatkan melibatkan lintas sector dan masyarakat sipil peduli terhadap ATM, karena trennya menunjukkan kecenderungan menurun. Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2019-2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.29.**

**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,21	0,22	0,229	0,24	0,25
2	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,60	2,00	2,00	1,90	1,90
3	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	2,03	2,16	2,21	2,43	1,82
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	2,78	2,96	2,94	3,36	5,21
5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	NA	0,29	0,31	0,32	0,33
6	Persentase RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi	NA	89,65	78,12	65,63	96,90
7	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	90,01	96,11	95,90	96,98	97,35
8	Nilai Kinerja BLUD Baik	70,20	71,85	73,20	87,50	86,37
<b>Indikator SDGs</b>						
9	Cakupan kelurahan UCI (%) (1.4.1.(b))	100	98,7	100	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan puskesmas (%)	231,25	231,25	231,25	237,50	237,50
13	Cakupan pembantu puskesmas	21,46	21,46	21,46	26,38	21,00
14	Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (Wasting: BB/TB) pada Balita (1.3.1.(a))	NA	NA	2,20	1,16	0,91
15	Cakupan pertolongan persalinan di faskes (1.4.1.(a))	100	100	100	100	100
16	Rasio akseptor KB per 1000 PUS (1.4.1.(c))	77,47	76,94	73,88	78,00	81,10
17	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting: TB/U) pada balita (Balita) (2.2.1*)	2,57	3,13	3,10	1,55	1,06
18	% kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) (2.2.1.(a))	2,48	2,48	2,81	0,27	0,54
19	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (2.2.2.(b))	69,39	71,31	71,91	74,33	83,70
20	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (3.1.1*)	95,8	100	94,24	99,24	100,00
21	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (3.1.2*)	75,8	71,35	95,32	67,25	79,80
22	Jumlah kasus kematian ibu	18	17	21	15	16

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
23	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (3.1.2.(a))	100	100	100	100	100
24	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)(3.2.1*)	100	100	100	100	100
25	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.1*)	7,29	7,01	6,95	6,50	7,44
26	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. (3.2.2*)	100	100	100	100	100
27	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.2(a))	6,15	6,09	6,04	5,6	7,09
28	Kelurahan UCI (3.2.2.(b))	100	98,7	100	100	100
29	Prevalensi HIV (3.3.1(a))	0,351	0,387	0,413	0,451	0,415
30	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (3.3.1(b))	106	79,18	100	100	100
31	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (3.3.1(b))	415	293	260	260	464
32	Prevalensi penduduk malaria per 1000 penduduk (3.3.3*)	0,03	0,018	0,035	0,041	0,027
33	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100
34	Jumlah Kasus Hepatitis B (3.3.4.(a))	424	441	406	406	386
35	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	13	8	10	10	10
36	Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (3.4.1.(b))	97,51	88,60	100	100	100
37	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (3.4.2(a))	119,7	100	100	100	100
38	Cakupan peserta KB aktif (3.7.1*)	77,47	74,99	73,88	76,08	77,72

Sumber: BPS & LKPJ Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang urusan kesehatan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.30.**  
**Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2019-2023**

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu Layanan
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: Jml bumil yg dilayani SS ----- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>25.655</u> 25.655	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.872</u> 22.872	100% <u>20.698</u> 20.698	100% <u>5.302.844</u> 5.302.844	100% (Tuntas Paripurna)
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin = Jml ibu bersalin yg dilayani SS ----- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>23.796</u> 23.796	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.330</u> 22.330	100% <u>20.098</u> 20.098	100% <u>110.047</u> 110.047	100% (Tuntas Paripurna)

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir = Jml BBL yg dilayani SS (KN1) ----- x 100% Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup)	100 % <u>25.073</u> 25.073	100,02% <u>23.829</u> 23.825	100% <u>22.030</u> 22.030	100% <u>22.304</u> 22.304	100% <u>20.047</u> 20.047	100% <u>179.870</u> 179.870	100% (Tuntas Paripurna)
4	Pelayanan Kesehatan Balita = jml balita yg dilayani SS ----- x 100% Jml balita di wilayah kerja	100 % <u>100.292</u> 100.292	88,78 % <u>65.137</u> 73.369	100% <u>100.403</u> 100.403	100% <u>89.239</u> 89.239	100% <u>68.759</u> 68.759	100% <u>1.282.728</u> 1.282.728	100% (Tuntas Paripurna)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jml anak usia Dikdas yg dilayani SS ----- x 100% jml semua anak usia dikdas	100% <u>218.841</u> 218.841	97,81% <u>215.016</u> 219.821	100% <u>227.547</u> 227.547	100% <u>227.182</u> 227.182	100% <u>224.808</u> 224.808	100% <u>752.233</u> 752.233	100% (Tuntas Paripurna)
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif = usia pengunjung 15-59 tahun ----- x 100% Jumlah warga negara usia 15-59 tahun	103,25% <u>1.157.214</u> 1.194.808	100% <u>1.014.944</u> 1.014.944	100% <u>1.112.588</u> 1.112.588	100% <u>1.125.431</u> 1.125.431	100% <u>1.116.174</u> 1.116.174	100% <u>1.118.416</u> 1.118.416	100% (Tuntas Paripurna)
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut = usia pengunjung >60 tahun ----- x 100% Jumlah WN usia > 60	100,49% <u>179.859</u> 178.972	85,98% <u>154.847</u> 180.096	100% <u>184.027</u> 184.027	100% <u>164.287</u> 164.287	100% <u>169.404</u> 169.404	100% <u>508.945</u> 508.945	100% (Tuntas Paripurna)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = jml pendrt hipert > 15 tahun ----- x 100% Jml est penderita hipert >15th	97,51% <u>232.180</u> 238.120	88,60% <u>255.727</u> 288.619	100% <u>289.903</u> 289.914	100% <u>290.910</u> 290.910	100% <u>321.721</u> 321.721	100% <u>2.704.921</u> 2.704.921	100% (Tuntas Paripurna)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = jml penderita DM > 15 tahun ----- x 100% jml est penderita DM usia >15 th	97,49% <u>38.899</u> 39.902	100% <u>40.303</u> 40.303	100% <u>40.483</u> 40.483	100% <u>40.623</u> 40.623	100% <u>41.468</u> 41.468	100% <u>2.227.055</u> 2.227.055	100% (Tuntas Paripurna)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) = jml ODGJ berat di wil kerja kota ----- x 100% Jml ODGJ Berat berdsr proyeksi wil kerja kota	119,70% <u>2.497</u> 2.086	100 % <u>4.172</u> 4.172	100% <u>4.215</u> 4.215	100% <u>4.218</u> 4.218	100% <u>4.222</u> 4.222	100% <u>4.518</u> 4.518	100% (Tuntas Paripurna)

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) = jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa ----- x 100% Jml orang yg terduga TBC kurun waktu 1 th	106% <u>14.7351</u> 13.901	34,55 % <u>7.770</u> 22.487	100% <u>15.853</u> 15.853	100% <u>37.270</u> 37.270	100% <u>38.509</u> 38.509	100% <u>465.031</u> 465.031	100% (Tuntas Paripurna)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV = jml org dgn resiko terinfeksi HIV yg mendpt pelynan sesuai stndar ----- x 100% Jml orang dgn risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota	103,77% <u>42.253</u> 40.716	98,81% <u>37.681</u> 38.136	99,72% <u>27.790</u> 27.869	100% <u>33.592</u> 33.592	100% <u>36.669</u> 36.669	100% <u>1.315.810</u> 1.315.810	100% (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag. Otda dan Kerjasama, Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk penghitungan capaian SPM termasuk pada bidang kesehatan sejak tahun 2022 dinilai dari dua aspek, yaitu aspek capaian penerima layanan dan aspek mutu layanan. Capaian SPM tahun 2023 dari aspek penerima layanan dan capaian mutu minimal layanan dasar sudah mencapai 100% dan semua aspek masuk ke dalam kategori tuntas paripurna. Walaupun seluruh nilai SPM pada bidang kesehatan capaiannya sudah 100%, namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala dalam melaksanakan urusan kesehatan di antaranya adalah perubahan masalah kesehatan yang ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk, transisi epidemiologi dan transisi risiko akibat perubahan pola hidup. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait kesehatan anak juga masih rendah, kebanyakan dari masyarakat masih menganggap bahwa pemeriksaan merupakan kebutuhan puskesmas saja. Selain itu, jumlah tenaga non kesehatan terlatih, kader kesehatan, sarana prasarana yang belum optimal juga merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan urusan kesehatan.

### c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diukur diantaranya dari kemantapan jalan, pengendalian banjir, berfungsinya drainase dan irigasi, menurunnya area kawasan kumuh, pengelolaan sarana prasarana persampahan, cakupan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah domestik dan lainnya. Berbagai kondisi ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

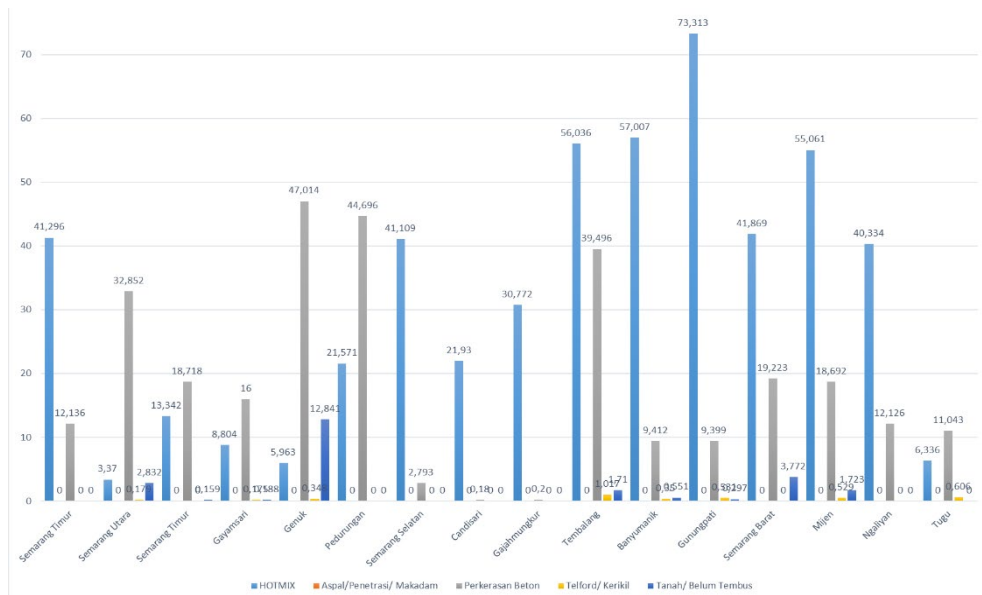
**Tabel 2.31.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan**  
**Penataan Ruang Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (%)	NA	NA	94,60	96,52	96,57
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS (%)	NA	NA	97,25	97,25*	97,25*
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	78	79	80,64	81,80	83,00
4	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	89,65% (752,97 km)	92,38% (775,88 km)	92,52% (778,12 km)	90,42% (759,42 km)	93,00% (781,14 km)
5	Rasio kepatuhan IMB (%)	54,49	55,04	55,56	51,25	62,10
6	Persentase luas sawah beririgasi (%)	43	43	43	43	43
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	NA	35	35,74	35,74	33,6
8	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,3	0,21	84	76,62	40,55
9	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	18,36%	22 %	24 ,35%	26,18 %	27,10
10	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80	95,85	82,50	82,50	82,50*
11	Persentase sampah yang terangkut dari TPS ke TPA	89,00%	89,50%	90,00%	90,50%	91,00%
12	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	86,46	86,51	98,93	98,94	99,04
13	Persentase kawasan banjir dan rob (%)	4,00 (Hanya jalan dan permukiman)	1,30 (Hanya jalan dan permukiman)	2,70 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,74 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	1,17 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)
14	Persentase kawasan banjir (%)	NA	NA	3,40	2,37	2,34
15	Persentase kawasan rob (%)	NA	NA	2,00	1,11	1,09
16	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik (%)	95,87%	95,87%	96,96%	97,46%	100,17%
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	73.141	73.141	74.815	77.557	79.718
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	76.292	76.292	77.161	77.557	79.718
<b>Indikator SDGs</b>						
17	Persentase rumah tangga yg terlayani air minum	95,40	96,28	97,14	98,94	99,62
18	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	92,15	96,28	96,28	96,28	96,28*
19	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	95	91	91	91	91*
20	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	1	1	1	1	1
21	Indeks kualitas air	48,75	50,44	50,00	33,76	46,00
22	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Semarang (%)	44,17	44,21	44,23	44,36	44,48

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
23	Persentase kesesuaian Tata Ruang	95,00	96,73	100	100	100

Sumber: BPS, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, 2024

Untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/360 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang, ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspal *hot mix* dengan proporsi mencapai 62,73% (526,873 km); disusul dengan perkerasan jenis beton blok/rigid sebesar 35,00% (293,980 km); telford/kerikil sebesar 0,44% (3.735 km) dan tanah/belum tembus sebesar 2,87% (24.073 km). Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 9 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk sepanjang 12,841 km, Kecamatan Semarang Barat sepanjang 3,772 km, Kecamatan Semarang Timur 2,832 km. Secara lengkap kondisi tersebut terbagi ke dalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:

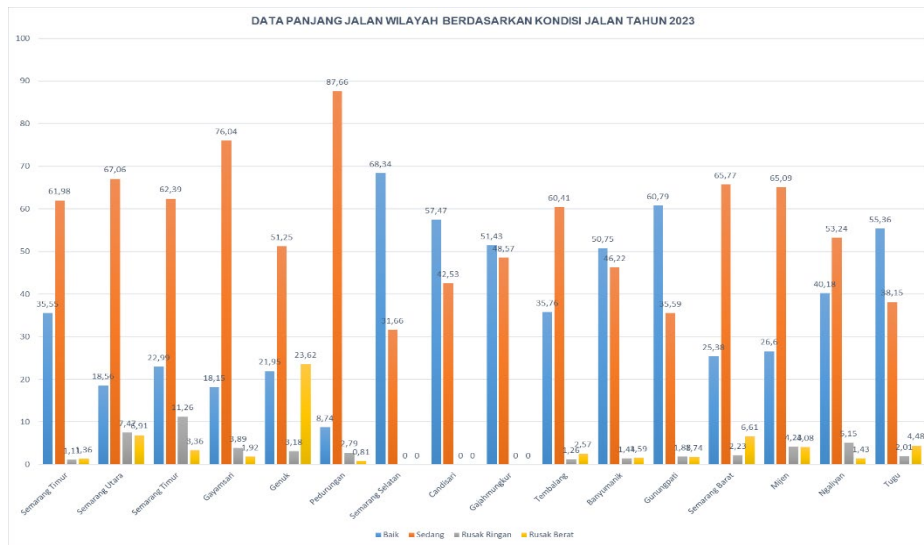


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

**Gambar 2.25**

**Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2023**

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Wali Kota tentang status jalan sepanjang 839,901 km, pada tahun 2023 persentase jalan dalam kondisi baik pada hampir seluruh kecamatan berada pada angka di atas 30%. Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil antara lain adalah Kecamatan Genuk, Semarang Utara dan Semarang Barat. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian program dan kegiatan selanjutnya. Adapun data lengkapnya mengikuti gambar sebagai berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

**Gambar 2.26**  
**Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2023 per Wilayah Kecamatan**

Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kawasan banjir dan rob, diantaranya dengan penataan sungai besar, normalisasi saluran drainase, pemeliharaan jaringan irigasi, operasionalisasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir, operasionalisasi dan pemeliharaan embung/penampung air lainnya, serta pemeliharaan polder/kolam retensi. Namun demikian, dikarenakan terdapat perubahan variabel dalam perhitungan kawasan banjir dan rob, dimana untuk tahun 2022 selain jalan dan permukiman juga memperhitungkan komponen kawasan ladang dan persawahan yang terdampak banjir dan rob, mengakibatkan terjadinya peningkatan persentase kawasan banjir dan rob dari sebesar 3,40% di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 3,48% tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, angkanya cenderung sama yaitu di tingkat 3,48% dengan rincian luasan banjir sebesar 7,91 Ha, genangan seluas 877,31 Ha dan rob seluas 416,95 Ha, sehingga total seluas 1.302,16 Ha atau sebesar 3,48% dari seluruh luas wilayah Kota Semarang.

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum diharapkan menunjukkan peningkatan utamanya wilayah pinggiran karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan terhadap kejahatan. Kebutuhan titik lampu yang terpasang di seluruh wilayah Kota Semarang sebesar 79.718 titik dan yang telah terpasang juga 79.718 titik. Pemenuhan 79.718 titik dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan di luar APBD. Selain dari aspek pemenuhan titik lampu, dalam rangka pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dan juga penghematan energi, Kota Semarang secara bertahap juga melakukan retrofit terhadap PJU konvensional menjadi PJU berbasis LED.

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan yang signifikan, berkat sinergitas peran masyarakat dan *stakeholder* persampahan lainnya. Pada tahun 2023 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.181,06 ton, di mana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 91,00% per hari dengan komposisi material organik sebesar  $\pm 62\%$  dan sisanya material anorganik. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestik, besar kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pilah sampah/bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dalam upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah di Kota Semarang, telah

dilakukan beberapa sebagai upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir diantaranya Gerakan Implementasi Ekonomi Sirkular pengelolaan Sampah Hulu Perkotaan berbasis Entitas berkelanjutan (GERAI ESHP), Patroli Pakde Uzt, gerakan peduli TPS bersih bermanfaat, pemanfaatan sampah organik menjadi ecoenzym, budidaya manggot/BSF pemakan sampah organik, *biowash*, dan penguatan kelembagaan KSM Kebersihan pada 16 Kecamatan di Kota Semarang. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 100%, sedangkan persentase kepatuhan bangunan ber-IMB pada tahun 2023 sebesar 62,10% dari target 62,10%. Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Pekerjaan Umum, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 2.32.**  
**Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari Jml yang dilayani Sesuai Standar ----- -----x 100 % Jml sasaran (1 SR melayani 8 jiwa)	95,40%	96,28% <u>1.623.225</u> 1.685.909	97,14% <u>1.638.931</u> 1.687.222	98,94% <u>556.977</u> 562.943	100% <u>567.250</u> 567.350	100%	100.00%  (Tuntas Paripurna)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jml yang dilayani Sesuai Standar ----- -----x 100 % Jml sasaran	86,46%	86,51% <u>382.195</u> 441.814	98,93% <u>556.442</u> 562.444	98,94% <u>556.991</u> 562.943	100% <u>563.937</u> 563.937	100%	100.00%  (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Perkim, 2024

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan tren yang positif. Untuk cakupan layanan pemenuhan air minum sebanyak 567.250 RT baik yang terlayani dengan jaringan PDAM (jaringan perpipaan) maupun melalui jaringan non perpipaan, dengan menggunakan asumsi 1 Rumah Tangga (RT) melayani 8 jiwa dengan standar mutu 60 liter/orang/hari dengan kondisi air tidak keruh, tidak berasa dan tidak berwarna.

#### d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman pada tahun 2023 terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.33.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio permukiman layak huni	97,91	98,17	98,63	98,34	99,53
2	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0,23 (dari 415,83 Ha)	0,21 (dari 415,83 Ha)	0,14 (dari 415,83 Ha)	23,38 (dari 431,54 Ha)	59,45 (dari 431,54 Ha Eksisting)



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
					Eksisting 330,65 Ha)	175,01 Ha)
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	1.687	934	1.669	1.713	1.862
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	NA	100 (9 perum)	100 (10 perum)	100 (25 perum)	100 (16 perum)
5	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	47,09	45,50	41,01	40,05	39,05

Sumber: Dinas Perkim, 2024

Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang dapat diketahui bahwa telah ditetapkan luas permukiman kumuh adalah sebesar 415,83 ha atau 4,16 km<sup>2</sup> atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Kinerja sampai dengan tahun 2021, luas lingkungan permukiman kumuh yang belum tertangani menyisakan seluas 52,85 Ha. Pada tahun 2022, dikarenakan adanya pembaharuan SK Kumuh pada tahun 2021 melalui SK Walikota Semarang Nomor 050/275, maka didapat luas kawasan kumuh terbaru menjadi 431,54 Ha. Selain itu, pada tahun tersebut, juga terdapat perubahan definisi operasional yang menyesuaikan dengan definisi operasional sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka yang sebelumnya pembagi indikator luas lingkungan permukiman kumuh adalah luas Kota Semarang dan dengan adanya SK tersebut maka pembagi indikator luas lingkungan permukiman kumuh adalah luas berdasarkan SK Kumuh. Oleh sebab itu, capaian luas lingkungan pemukiman kumuh (%) mengalami perubahan capaian dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,14% dari 415,83 Ha menjadi 76,62% dari 431,54 Ha pada tahun 2022, atau sebesar 330,65 Ha. Pada tahun 2023 ini, kawasan kumuh yang ditangani adalah 23,38% dari 431,54 Ha atau sebesar 100,89 Ha. Kinerja lain dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, pada tahun 2023 persentase rumah layak huni mengalami peningkatan menjadi 98,79%. Adapun Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.34.**

**Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 %	100% <u>2 unit</u> 2 unit	100% <u>17 unit</u> 17 unit	100% <u>8 unit</u> 8 unit	100% <u>27 unit</u> 27 unit	100%	100% (Tuntas Paripurna)
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	100% <u>97 KK</u> 97 KK	100% Tidak ada relokasi	100% <u>38 KK</u> 38 KK	100% <u>33 KK</u> 33 KK	100%	100% (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Perkim, 2024

Capaian SPM pada bidang Urusan Perumahan Rakyat selalu menunjukkan predikat tuntas paripurna, dengan jumlah sasaran penerima layanan yang

fluktuatif. Walaupun tercapai dengan baik, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian SPM pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kendala tersebut di antaranya adalah kesulitan dalam mengakses rumah korban bencana pada saat kendaraan mengangkut material saat pengerjaan rehabilitasi rumah korban bencana, sehingga karena harus dilakukan secara manual, sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama. Selain itu, jumlah masyarakat yang terlokasi seharusnya bisa lebih meningkat, namun karena masih adanya penolakan oleh warga masyarakat akan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum, maka jumlah yang terlokasi hanya berjumlah 38 KK.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Perkembangan pemerintahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.35.**

**Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,93	0,93	0,93	0,69	1,61
2	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	0,92	0,93	0,81	0,81	0,57
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	34,78	30,43	30,43	30,43	31,81
4	Partisipasi Pemilih Pada Pilpres/Pileg/Pilkada (%)	82,33	68,62	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada Pemilu
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50,26	77,04	79,87	90,13	88,55
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60%	62%	62%	64% (32 dari 50 perda)	66% (33 dari 50 perda)
7	Indeks Risiko Bencana (1.5.1.(e))	120,75	113,83	108,63	103,49	103,49
8	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	NA	77,04	77,04	90,13	88,55
<b>Indikator SDGs</b>						
10	Kelurahan Siaga Bencana (renja) (1.5.1.(a))	50	58	64	64	64
11	Persentase pemenuhan bagi korban bencana (1.5.1.(b))	100	100	100	100	100
12	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (1.5.1.(c))	90	90	90	90	90
13	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))	16	16	16	16	25
15	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Daerah (1.5.3*)	1	1	1	1	1
16	Jumlah kota (kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk. (11.5.1.(b))	16	21	22	30	34
17	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (16.1.1.(a)) (angka kriminalitas)	1.151	1.330	1.253	1.335	1.293

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa tingkat waktu tanggap (*response time* atau 15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 sebesar 88,55% artinya dari 489 kejadian kebakaran, 433 telah dilayani sesuai dengan *response time* oleh petugas pemadam kebakaran. Hal ini disebabkan terjadinya lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai *response time* 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras, serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kinerja positif juga terkadi pada capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) yang trennya menurun dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu selalu ditingkatkan kesadaran masyarakat, antisipasi, tindak pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana ke depannya.

Dari data di atas, dapat dilihat pula bahwa persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satpol PP Kota Semarang berada pada angka 66,00%. Dari 50 Perda dan Perkada yang ditegakkan terdapat 33 Perda dan Perkada yang diampu oleh Satpol PP Kota Semarang. Sedangkan dari sisi angka kriminalitas, terlihat bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas pada tahun 2023 menjadi 1.293 kasus dari 1.335 kasus pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP Kota Semarang dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas kedinasan telah dilaksanakan dengan baik. Dari 1.293 kasus yang ada tersebut, jenis kasus yang terbanyak terjadi di antaranya adalah penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, dan narkoba. Oleh sebab itu, masih diperlukan berbagai upaya dan langkah konkrit agar jumlah kasus kriminal dapat lebih ditekan, terutama pada ketiga jenis kasus yang memiliki jumlah kejadian terbanyak.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar pada bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.36.**

**Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100% <u>0 org</u> 0 org	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100 %	100%	100 %	100 % (Tuntas Paripurna)
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100% <u>60 org</u> 60 org	100% <u>1.687.222</u> 1.687.222	100 % <u>500 org</u> 500 org	100%	100%	100 % (Tuntas Paripurna)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	85,36%	86,3% <u>790 org</u> 890 org	100% <u>1.975</u> 1.975	100 % <u>900 org</u> 900 org	100%	100%	100 % (Tuntas Paripurna)
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	95,14%	100% <u>59</u> 59	100% <u>1.255</u> 1.255	100 % <u>1.255</u> 1.255	100%	100%	100 % (Tuntas Paripurna)

5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100% $\frac{1.680.417}{1.680.417}$	97,32% $\frac{837}{860}$	100 % $\frac{936}{936}$	100%	98,10%	99,62% (Tuntas Utama)
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, 2024

Capaian SPM pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sejak tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang positif. Di antara SPM layanan di Bidang Trantibum, kinerja yang tidak mencapai paripurna terdapat pada jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kendala yang dihadapi terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di antaranya adalah belum terdapat RISP KP dan manajemen pemadaman kebakaran ditingkat Kota, selain itu juga kapasitas SDM personil pemadam yang belum optimal (36,75% belum bersertifikasi) serta sarpras pemadam kebakaran yang kurang representatif (mobil tangga/snorkel rusak, sedangkan kebutuhan pemadaman digedung bertingkat meningkat, alat pelindung diri yang jumlahnya terbatas). Sedangkan secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinas antara lain:

- a. Belum terpenuhinya standar teknis terkait jumlah dan kualitas sarana prasarana dan juga jumlah dan kualitas personil pelaksana layanan.
- b. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- c. Jumlah pos pemadam kebakaran beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di setiap kecamatan untuk meningkatkan *respon time*.
- d. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang rendah.
- e. Kurangnya sarana prasarana yang dapat membantu pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Semarang.
- g. Belum optimalnya personil perlindungan masyarakat yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Pembangunan pada Urusan Sosial ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multidimensional. Angka kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2023 berada pada angka 4,23%. Angka ini menurun dari persentase penduduk miskin dari tahun 2022 yang berada pada angka 4,25%. Jika ditinjau dari persentase kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi di Kota Semarang selalu lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan bahkan tingkat Nasional. Hal Ini menunjukkan bahwa indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 Pembangunan Berkelanjutan atau TPB yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, data awal terdapat sebanyak 21.863 KK (102.394 individu) yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar pada 7 kelurahan, yaitu: Kelurahan Muktiharjo, Tandang, Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Rejosari, dan Muktiharjo Kidul. Setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi pada kantong kemiskinan tersebut, data penduduk yang termasuk dalam kategori ini menurun menjadi sebanyak 518 KK (2.446 Individu), yang selanjutnya sesuai dengan prioritas pembangunan,

ditargetkan menjadi nol pada tahun 2024 dengan pelibatan lintas sektor dan juga korporasi untuk mendapatkan *Corporate Social Responsibility* atau CSR.

**Tabel 2.37.**

**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS	229.564	518.358	501.322	755.979	192.715
2	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	231.148	516.759	501.322	755.979	192.715
3	PPKS yang memperoleh bantuan sosial	158.257	513.287	258.154	607.353	192.715
4	Jumlah sarana sosial /panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi	105	119	105	144	164
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
<b>Indikator SDGs</b>						
6	Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg (%) (indikator 1.2.1*)	13,80	16,15	24,23	11,06	11,05
7	Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) (indikator 1.3.1.(c))	100	100	100	100	100
8	Persentase Rumah Tangga miskin / jiwa yang memperoleh Program PKH (%) (indikator 1.3.1.(d))	4,8	7,99	7,99	14,72	8,68
9	Angka kemiskinan BPS (%) (indikator 10.1.1.(a))	3,98	4,34	4,56	4,25	4,23

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Sosial, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.38.**

**Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator SPM	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>274 orang</u> 274 orang	100 % <u>176 orang</u> 176 orang	100%	100% <u>150 orang</u> 150 orang	100%	100%	100% (Tuntas Paripurna)
2	Persentase (%) anak telantar	100% <u>11 orang</u> 11 orang	100% <u>29 orang</u> 29 orang	100%	100% <u>24 orang</u> 24 orang	100%	100%	100% (Tuntas Paripurna)

	yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti							
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% <u>117 orang</u> 117 orang	100% <u>148 orang</u> 148 orang	100%	100% <u>102 orang</u> 102 orang	100%	100%	100% (Tuntas Paripurna)
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100% <u>114 orang</u> 114 orang	100% <u>292 orang</u> 292 orang	100%	100% <u>83 orang</u> 83 orang	100%	100%	100% (Tuntas Paripurna)
5	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100% <u>792 orang</u> 792 orang	100% <u>510.650 orang</u> 510.650 orang	100%	100% <u>14.274 org</u> 14.274 org	100%	100%	100% (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda dan Kerjasama, Dinas Sosial, 2024

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan layanan SPM bidang urusan sosial adalah:

- Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya fakir miskin.
- Masih kurang memadainya rumah singgah/ *shelter* yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pemerlu pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
- Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/ *shelter* dan rumah autis yang dimiliki Dinsos Kota Semarang dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- Masih banyaknya SDM relawan sosial yang belum memiliki kompetensi atau *skill* yang tepat dalam penanganan masalah sosial.
- Masih kurangnya peran masyarakat atau dunia usaha melalui CSR yang dilibatkan dalam penanganan masalah sosial.
- Proses validasi data terhadap PPKS yang belum dilakukan secara maksimal.

### 2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan urusan tenaga kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Beberapa indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.39.**

#### **Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja Daerah / SDGs		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)	66,42%	69,89%	69,41%	70,96%	69,42%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,46%	90,43%	90,43%*	90,43%*	94,01%
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.431.894	1.191.265	1.490.742	1.516.197	1.338.215
4	Angkatan Kerja	951.135	1.023.964	1.034.794	1.075.827	929.014
	Jumlah Bekerja	907.937	925.963	936.076	994.091	873.358

Indikator Kinerja Daerah / SDGs		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Pengangguran Terbuka	43.198	98.001	98.718	81.736	55.656
	Total Angkatan Kerja	951.135	1.023.964	1.034.794	1.075.827	929.014
5	Bukan Angkatan Kerja	480.859	441.157	455.948	440.370	409.201
	Sekolah	174.979	151.538	165.797	139.678	123.051
	Mengurus Rumah Tangga	245.101	232.208	222.279	241.445	221.193
	Lainnya	60.779	57.411	67.872	59.247	64.957
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	NA	78,94% (15 keg)	80,95% (17 keg)	80,95% (17 keg)
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	73%	74%	68,14% (198.150 dari 272.399 TK)	72,74% (173.421 dari 254.511 TK)	77,09% (210.904 dari 273.592)
8	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	NA	50% (158 kasus, 79 PB)	50% (158 kasus, 79 PB)	61,11% (108 kasus, 66 PB)	70,51% (78 kasus, 55 PB)
<b>Indikator SDGs</b>						
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*)	4,54	9,57	9,54	7,60	5,99

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 69,42% menurun jika dibandingkan dengan 2022 sebesar 70,96%. Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Semarang, investasi dengan pelibatan tenaga kerja lokal menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Selain itu dengan banyaknya program kegiatan peningkatan kompetensi pencari kerja baik pada BLK maupun LPK membuat banyak pencari kerja yang ditempatkan baik pada pekerja formal, maupun sebagai wirausaha baru. Terlihat TPT di Kota Semarang terus menurun dari tahun 2018 sebesar 5,29% turun menjadi sebesar 4,54 % pada tahun 2019 dan melonjak drastis menjadi sebesar 9,57% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, dikarenakan semakin masifnya program ketenagakerjaan yang dilakukan, maka TPT kembali menurun hingga mencapai 5,99% pada tahun 2023. Penurunan TPT ini juga mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi semakin baik dan tenaga kerja yang ditempatkan juga semakin banyak. Jika ditinjau dari UMK, dapat dilihat bahwa Kota Semarang selalu mengedepankan kesejahteraan dari setiap masyarakatnya, hal ini terlihat bahwa UMK di Kota Semarang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan selalu menjadi Kota dengan nominal tertinggi se-Jawa Tengah. Adapun progres UMK sejak tahun 2019-2023 terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.40.**  
**UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2019-2023**

UMK DAN KHL	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Upah Minimum Kota Semarang	2.498.588	2.715.000	2.810.025	2.835.021	3.243.969

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2024

Angka penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi di tahun 2023, berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa penyelesaian dalam bentuk Persetujuan Bersama (PB) adalah sebesar 72 kasus, hal ini diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi hubungan industrial. Oleh sebab itu, masih perlu banyak upaya preventif yang dilakukan oleh Disnaker Kota Semarang untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Adapun data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41.**  
**Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial**  
**Tahun 2019-2023**

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus yang ditangani:		124	150	159	108	127
Penyelesaian:						
1	Dalam bentuk PB	83	84	63	57	72
2	Tahap anjuran mediator	53	51	33	30	45
3	Secara bipartite usai mediasi	21	21	10	9	6
4	Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor	14	3	2	2	6

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2024

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen sekaligus kinerja ini terlihat dengan diterimanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor dan predikat Kota Layak Anak kategori Utama dari Kementerian PPPA. Penyelenggaraan upaya terkait juga diperkuat dengan ditetapkannya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Disisi lain Rasio KDRT pada tahun 2023 sebesar 0,025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022. Sedangkan dengan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 25,46 menurun menjadi sebesar 25,08 pada tahun 2023, dan semuanya telah dapat ditangani sebesar 100%. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT dan korban kekerasan semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental RDRM yang menyediakan layanan konsultasi masalah anak, remaja dan keluarga, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

**Tabel 2.42.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,81%	7,26%	17,14%	59,38%	48,89%
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,018%	0,013%	0,017%	0,028%	0,027%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	22,23	17,04	18,78	25,46	25,08
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100% (188 orang)	100% (146 orang)	100% (160 orang)	100% (217 orang)	100% (214 korban)
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,57	74,67	73,64	73,93	73,93*
6.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	N/A	70,59	70,59	71,80
7.	Rasio KDRT	0,038	0,029	0,020	0,025	0,025%



No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikator SDGs</b>						
8.	Cakupan program pengarusutamaan gender	97,00	97,00	97,00	98,00	100,00
9.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan	0,0048	0,0041	0,0052	0,0092	0,01
10	Pemberdayaan terhadap korban KDRT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,57	74,67	73,64	73,64	73,93*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

### c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Inovasi pada penyelenggaraan urusan pangan dalam rangka antisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman melalui program Pak Rahman sebanyak 133 kali yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, *Fresh Mart*, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Dan upaya ini secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Kinerja lain adalah tercapainya pola pangan harapan pada tahun 2022 sebesar 91,80%, dimana semakin tinggi nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) maka akan semakin beragam konsumsi pangan masyarakat dan menuju PPH. Ketersediaan pangan berupa beras berdasarkan data tahun 2022 sebesar 410.452,16 ton, sedangkan tingkat kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang sebesar 100.354,02 ton, sehingga cadangan pangan masyarakat sebesar 409,01%.

Distribusi Pangan didukung oleh Mekanisme dan alur distribusi pangan (terutama berupa beras) kepada warga miskin yang sesuai aturan juga telah tercapai 100%. Demikian pula terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang. Selain itu juga berhasil menurunkan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dari yang ditargetkan 4% mencapai 0,56%, melalui Intervensi daerah rentan rawan pangan prioritas 1,2,3 dengan berbagai kegiatan antara lain: memberi bantuan beras melalui Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM-Beras), penyelenggaraan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), peningkatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Pelatihan pengembangan ketersediaan pangan dan Rakor dengan multistekholder lintas sektoral. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menginisiasi Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (Garang Asem) dan Penggunaan Pangan Lokal melalui kegiatan Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi (Pisang Legi) yang telah dilegalisasi melalui Surat Edaran Wali Kota. Beberapa kinerja pada Urusan Pangan terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.43.**

#### **Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor / hari	88,7	89,1	89,1	91,2	91,8
2	Ketersediaan Energi/ Kapita	Kkl/Kapita/ Hari	3.053	3.054	3.055	3.056	3.057
3	Tingkat Keamanan Pangan	%	76,01	91,26	91,27	84,6	84,61

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	NA	252,05	252,806	367,51	409,01
5	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	NA	7	6	3,40	0,56
6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	NA	NA	NA	99,40	98,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

#### d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dalam penyelenggaraan urusan pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota lebih pada dukungan pada program Reformasi Agraria bekerjasama dengan Kantor Pertanian/BPN terutama dalam hal fasilitasi atau mediasi sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya.

Capaian kinerja pada tertib administrasi pertanian ditunjukkan dengan menurunnya ketertiban administrasi pertanian dari 87,14 pada tahun 2022 menjadi sebesar 62,09% pada tahun 2023. Penyelesaian kasus tanah negara cenderung konsisten dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang mencapai 100%. Terdapat 61 kasus yang diselesaikan di tahun 2022. Adapun realisasi kinerja pada urusan pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.44.**

#### **Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tertib Administrasi Pertanian (%) (Peningkatan <i>Data Base</i> Pertanian)	57,00	88,27	87,18	87,14	62,09
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100% 7 kasus	100% 15 kasus	100% 27 Kasus	100% 61 Kasus	90,63% 58 Kasus
3	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	NA	58%	12,79%	12,79%	58,00%
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	NA	60%	11,08%	11,08%	60,00%

Sumber: BPN dan Dinas Penataan Ruang, 2024

#### e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan pada urusan Lingkungan Hidup salah satunya ditandai dengan diraihnya Penghargaan Nirwasita Tantra sebagai Entitas Pemerintah kategori Kota Besar Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklam dengan kategori partisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan program kampung iklim (proklam) di daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional (SMA Karangturi Semarang dan SMA N 16 Semarang), Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi (SMA N 8 Semarang, SD N Bulu Lor Semarang, SD Petra Semarang, dan SD N Peleburan 03 Semarang), Penghargaan Kampung Iklim (Proklam) Tingkat Nasional (Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklam Utama diberikan kepada RW 15, Kelurahan TanjungMas, Kecamatan Semarang Utara dan Program Kampung Iklim dengan kategori Trophy Proklam Lestari diberikan kepada RW 03, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik). Selain itu juga dilakukannya Program Strategis untuk menunjang terhadap

peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, diantaranya: pembatasan penggunaan plastik, secara periodik dilaksanakan *Car Free Day*, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampai dengan saat ini terdapat 497 unit bank sampah di masyarakat, juga rumah kompos, dan TPS 3R, yang masih menyisakan sebanyak 3.481,14 ton sampah atau sebesar 0,81% yang belum dikelola, baik yang dikurangi maupun yang di tangani.

Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang tahun 2023 sesuai Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.45.**  
**Data Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang Tahun 2023**

No	Keterangan	Nilai (Ton/tahun)
<b>I</b>	<b>JUMLAH TIMBULAN SAMPAH</b>	<b>431.534,65</b>
<b>II</b>	<b>JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (26,18%)</b>	<b>116.925,38</b>
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	68.317,23
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	1.492,06
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	47.116,09
<b>III</b>	<b>JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (72,88%)</b>	<b>311.128,13</b>
d	Pemilahan/Pengumpulan	-
e	Pengangkutan	-
f	Pengolahan	365,61
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i> )	365,61
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
g	Pemrosesan akhir	310.762,52
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	310.762,52
<b>IV</b>	<b>SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) = (99,06%)</b>	<b>428.053,51</b>
<b>V</b>	<b>SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) = (0,94%)</b>	<b>3.481.14</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 meningkat kinerjanya, pada tahun 2023 sebesar 56,84 sedangkan IKLH pada tahun 2022 sebesar 51,32. Peningkatan capaian ini disumbangkan oleh peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKA pada tahun 2023 sebesar 46 meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 33,76. Indeks Kualitas Udara (IKU) meningkat menjadi 80,55 di tahun 2023 dari tahun 2022 yang sebesar 77,38. Sedangkan dengan Indeks Kualitas Lahan yang mengalami penurunan menjadi 31,63 di tahun 2023 dari angka 33,28 di tahun 2022. Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan emisi GRK dalam 4 sektor sebagai berikut:

**Tabel 2.46.**  
**Upaya Penurunan Emisi GRK**

No	Sektor	Kegiatan	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi
1	Sektor Energi	<i>Off Grid PLTSa</i> (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)	pemanfaatan energi terbarukan <i>off grid</i> yaitu PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)	1.891,841 Ton CO2e
		<i>On Grid PLTS</i>	penggunaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0,062 Ton CO2e*

		<i>Efisiensi Energi</i>	penggantian lampu menjadi LED ( <i>Light-Emitting Diode</i> )	135.077,32 Ton CO <sub>2</sub> eq*
			penggunaan solar cell pada LPJU	0,08 Ton CO <sub>2</sub> e*
		<i>Substitusi Bahan Bakar</i>	Pembangunan Digester Biogas	7,71 Ton CO <sub>2</sub> e*
2	Sektor Transportasi	<i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>	Pemasangan ATCS ( <i>Area Traffic Control System</i> ) untuk mengendalikan kemacetan di simpang	18,06 Ton CO <sub>2</sub> e*
		<i>Reformasi Sistem Transit (Bus Rapid Transit) BRT</i>		11,20 Ton CO <sub>2</sub> e
		<i>Peremajaan Angkutan Umum</i>		326,59 Ton CO <sub>2</sub> e*
3	Sektor Lahan	penanaman pohon di beberapa kelurahan		178,85 Ton CO <sub>2</sub> e
4	Sektor Pertanian	Unit Pengolah Pupuk Organik	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	1.196,47 Ton CO <sub>2</sub> e

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2019-2023, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.47.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	62,88	66,05	59,60	51,32	56,84
2	Peningkatan Indeks kualitas air (IKA)	48,75	50,44	50,00	33,76	46,00
3	Peningkatan Indeks kualitas udara (IKU)	85,50	95,20	75	77,38	80,55
4	Peningkatan Indeks Kualitas Lahan	56,51	55,9	47,58	33,28	31,63
5	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	110,52	172,34	173,68	73,59	86,15
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:					
	1. Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	18,36 %	22%	24%	26,04%	27.10%
	2. Persentase penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	77,64%	75%	74%	73,31%	72.10%
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	NA	85,00%	85,20%	86,08%	88.23%
<b>Indikator SDGs</b>						
8	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (11.6.1.(a))	89,00	89,5	90,00	90,50	91,00
9	Jumlah Bank Sampah yang beroperasi (11.6.1.(b))	34	47	47	225	497
10	Jumlah ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan (perush)	38	50	52	54,5	29

Sumber: Bappeda, DLH Kota Semarang, 2024

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup diantaranya: Belum optimalnya resiliensi peningkatan terhadap bencana dan perubahan iklim, belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya air yang terpadu, belum optimalnya pelestarian dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta belum optimalnya pengelolaan persampahan dan akses sanitasi yang memadai.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2023 adalah 99,57% atau 1.250.011 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.255.403 orang. Sedangkan 0,43% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum rekam KTP-el. Capaian kinerja tersebut, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 terdapat peningkatan sejumlah 2,64%. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan kinerja di tahun 2023 adalah adanya peningkatan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP-el di Dinas dan TPKD Kecamatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan perkembangan teknologi sehingga jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.48.**

**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	37,16%	60,57%	62,05%	60,87%	66,45%
3	Kepemilikan akta kelahiran	NA	93,42	95,00	97,85	98,25
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100	100	100	100	100
5	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	NA	45	65	100	100
6	Perekaman KTP elektronik	97,14%	98,07%	98,48%	96,93%	99,57%
<b>Indikator SDGs</b>						
7	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun)	97,15%	97,15%	99,53%	99,48%	99,48%*
8	Rasio bayi berakta kelahiran (1.4.1.(j))	97,15%	98,81%	99,26	99,48%	99,48%*
9	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dispendukcapil, 2024

Persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2023 yaitu sebesar 66,45%, ditunjukkan dengan terdapat 275.077 anak yang memiliki KIA dari jumlah penduduk usia KIA yang sebanyak 413.969 anak. Capaian kepemilikan KIA pada tahun 2023 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71%. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya dan terdapat jumlah anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun maka sudah tidak dihitung ke dalam capaian kepemilikan KIA. Akan tetapi capaian KIA tahun 2023 sebesar 66,45% telah mencapai target nasional yang telah ditetapkan sebesar 50% pada tahun 2023.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan untuk tahun yang akan datang, dengan menerapkan pelayanan online adminduk yaitu Aplikasi SiD'nOK, melaksanakan pelayanan paket terintegrasi dengan penerbitan akta kelahiran sekaligus akan mendapatkan KIA dan Kartu Keluarga (KK) atau yang disebut Paket *3 in 1*. Selain itu dilaksanakan pula kerjasama pemanfaatan KIA dengan 9 (sembilan) Mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Kerjasama ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan nilai manfaat bagi anak yang memiliki KIA, selain itu untuk menarik minat warga agar membuat KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari.

**g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian presentase LPM aktif di tahun 2023 sebesar 100%.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja. Adapun permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu masih kurangnya pemahaman terkait fungsi lembaga kemasyarakatan sehingga terus dilakukan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 2.49.**  
**Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa**  
**Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase LPM aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024*

**h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 serta Surat Mendagri Nomor 470133761SJ dan 470133751SJ tanggal 5 Juni 2020, Kota Semarang telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 pilar, yang terdiri dari: Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan. Dan semuanya telah diinternalisasikan dalam program dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu juga telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2045.

Capaian kinerja pada indikator yang telah ditetapkan sebagian besar dapat tercapai dengan baik dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebagian besar indikator terdapat peningkatan. Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, UPPKA) perlu dilakukan terus-menerus.

**Tabel 2.50.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengendalian angka kelahiran (TFR)	2	1,99	1,86	1,75	1,74
2	Jumlah peserta KB Aktif	199.001	194.631	175.603	181.864	185.880
3	Rasio Akseptor KB per 100 PUS	77,47	76,94	72,71	76,08	77,72
4	Jumlah PIK Remaja perjumlah kelurahan	70	73	73	81	76
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Aktif	55,22	48,85	40,16	72,90	69,51
6	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	BKB: 254 BKR: 121 BKL: 234	BKB: 274 BKR: 124 BKL: 212	BKB: 283 BKR: 131 BKL: 218	BKB: 276 BKR: 113 BKL: 216	BKB: 286 BKR: 108 BKL: 218
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	75,40	76,94%	77%	76,09%	77,72
<b>Indikator SDGs</b>						
8	Cakupan peserta KB aktif	77,47	76,94	73,88	76,08	77,72
9	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern	25,79	25,19	29,03	29,58	31,41
10	Cakupan PUS unmet need (5.6.1.(a))	9,63	10,46	10,89	9,13	8,42

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2024

**i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada tahun 2023, ditandai diantaranya dengan diterimanya penghargaan: Penghargaan dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berupa Sertifikat untuk Pemerintah Daerah dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Terbaik, Pemenang II Kategori Inovasi Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan Pemenang III Lomba Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kinerja ini terlihat dari profil kecelakaan yang menunjukkan kecenderungan menurun baik dari jumlah kejadian kecelakaan, jumlah korban meninggal dunia (MD), dan korban luka ringan (LR), disisi lain dari jumlah korban luka berat (LB) dan kerugian material justru terjadi peningkatan.

Pada tahun 2022 jumlah kecelakaan sebesar 668 kejadian, terjadi penurunan sebesar 17% dari jumlah kejadian kecelakaan tahun 2021 sebanyak 803 kasus. Sedangkan korban meninggal dunia berkurang 110 orang dari tahun 2021 sebesar 141 orang menjadi 31 pada tahun 2022. Demikian pula untuk korban luka ringan juga menurun sebanyak 306 orang, dari tahun 2021 sebanyak 809 orang menjadi 503 orang korban luka ringan. Sedangkan kasus korban luka berat meningkat dari tahun 2021 nihil menjadi sebanyak 3 orang. Demikian pula secara material terjadi peningkatan kerugian material dari tahun 2021 sebesar Rp.651.950.000,- menjadi sebesar Rp. 785.250.000,- pada tahun 2022. Adapun identifikasi lima lokasi rawan kecelakaan tahun 2022, adalah: Jalan Urip Sumoharjo Mangkang (55 kasus); Jalan Brigjend Sudiarto (52 Kasus); Jalan Perintis Kemerdekaan (36 kasus) ; Jalan Soekarno-Hatta (33 kasus) dan Jalan Kaligawe Raya (21 kasus). Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Polresta Semarang diantaranya: Patroli & Turlalin, membentuk Tim Urai Kepadatan, Rekayasa arus lalu lintas dan mensiagakan derek, koordinasi dengan Ambulance Hebat dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan. Indikator Jumlah titik/ruas rawan macet yang pada tahun 2020 terdapat 3 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Siliwangi), pada tahun 2021 bertambah 1 lokasi yaitu Jl. Elang. Hal ini disebabkan adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Jumlah titik / lokasi rawan kemacetan sudah sesuai target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perbaikan. Lokasi rawan kemacetan pada tahun 2022 tercatat 3 lokasi yaitu Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Jl. Siliwangi. Pada Tahun 2023 ini untuk Jl. Elang yang pada tahun lalu masih padat sudah berangsur mengalami kelancaran. Hal ini didukung oleh rekayasa lalu lintas dan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi tersebut antara lain Traffic Light, rambu-rambu, dan marka jalan. Salah satu indikator titik kemacetan adalah kinerja tingkat pelayanan jalan (LOS). Berikut merupakan LOS pada tiga ruas jalan tersebut:

**Tabel 2.51.**  
**Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan (LOS)**

No	Ruas Jalan	Status Jalan	V/C	LOS
1	Jalan Brigjend Sudiarto	Provinsi	0,89	D
2	Jalan Setiabudi	Nasional	0,97	E
3	Jalan Siliwangi	Nasional	0,87	D

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Dari data di atas ketiga ruas jalan tersebut termasuk dalam tingkat pelayanan D dan E sehingga membutuhkan penanganan. Sejauh ini Pemerintah Kota Semarang telah berupaya melakukan penanganan di ketiga ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas meski belum optimal menurunkan V/C rasio jalan. Dan karena ketiga ruas jalan dimaksud termasuk ke dalam kewenangan Provinsi dan Nasional sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan penanganan.

Pada Jalan Bringjend Sudiarto yang merupakan jalan utama dari Kabupaten Grobogan ke Kota Semarang sudah terdapat perencanaan pembangunan *flyover* di Simpang Fatmawati, proses saat ini sudah dilakukan penyusunan DED oleh Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017. Sedangkan pada Jalan Setiabudi sudah terdapat perencanaan pembangunan *flyover* di Simpang Patung Diponegoro merupakan salah satu program penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur, dan saat ini progres perencanaan pembangunan sudah dilakukan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan Provinsi Jateng - DIY pada tahun 2021 oleh BBJN Wilayah Jateng DIY dan berdasarkan kajian tersebut akan dilakukan pembangunan pada tahun 2034. Selain itu pemerintah Kota Semarang juga berencana melakukan upgrade Simpang Ber-Apill di wilayah Tembalang dan sekitarnya menjadi simpang Ber-Apill terkoordinasi ATCS. Sedangkan pada ruas Jalan Siliwangi untuk mengurai kepadatan lalu lintas terdapat perencanaan Pembangunan Harbour Tol yang menyambung dari Pesisir Kendal menuju Pelabuhan Tanjung Mas dan merupakan salah satu program



penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur.

Kondisi lalu lintas di Kota Semarang secara umum masih dalam kondisi normal, meski demikian untuk pelayanan transportasi diperlukan peningkatan rekayasa lalu lintas, layanan angkutan massal, serta peningkatan prasarana lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas.

**Tabel 2.52.**  
**Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2019 - 2023**

URAIAN		SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	koridor	8	8	11	12	12
2	Load Faktor Trans Semarang						
A	Koridor 1 (T Mangkang - T Penggaron)	%	93,92	41,53	43,46	65,68	69,72
B	Koridor 2 (T Terboyo - T Sisemut)	%	100,60	60,63	56,80	82,87	82,82
C	Koridor 3 (Tanjung Emas - Akpol)	%	59,35	34,27	50,20	94,37	101,00
D	Koridor 4 (Terminal Cangkiran - St Tawang)	%	71,82	42,91	38,08	60,93	77,42
E	Koridor 5 (Meteseh - Bandara - PRPP)	%	108,28	63,09	55,77	78,23	84,86
F	Koridor 6 (Undip - Unnes)	%	43,79	23,53	24,89	50,29	61,84
G	Koridor 7 (T. Terboyo - Soekarno Hatta - Pemuda)	%	73,81	46,45	52,44	54,47	65,04
H	Koridor 8 (T. Cangkiran - T. Gunung pati - Sp Lima)	%	NA	45,26	45,80	76,51	86,60
I	Feeder 1 (Ngaliyan - Madukoro - Ngaliyan)	%	NA	13,47	17,42	37,41	60,91
J	Feeder 2 (T. Terboyo - Lamper Tengah - Soekarno Hatta - T. Terboyo)	%	NA	10,87	6,06	23,02	36,54
K	Feeder 3 (Banyumanik - Penggaron)	%	NA	NA	NA	55,85	36,54
L	Feeder 4 (Terminal Gunungpati - Unnes - BSB)	%	NA	NA	7,50	8,74	12,38
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	%	61,73	63,13	65,09	67,71	69,32
4	Ketersediaan terminal Terminal Tipe C	unit	3	3	3	5	3
5	Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal (halte BRT)	unit	376	376	376	437	438
6	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00*
7	Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	81,32	83,42	84,00	86,42	NA

URAIAN		SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	%	NA	NA	NA	86.42	90,06
8	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	23.180.418	10.935.306	12.028.837	15.869.466	22.956.716
9	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	Titik/ruas rawan macet	4	3	4 (2 titik dari periode lalu, ditambah 2 titik baru)	3	3
10	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	NA	1913	1932	2191	2026
Indikator SDGs							
11	Jumlah penumpang BRT (11.2.1.(a))	Penumpang	10.233.291	6.835.778	6.207.674	11.013.922	13.146.318
12	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar (11.2.1.(b))	NA	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Arus penumpang angkutan umum telah melebihi target dan meningkat dibanding tahun 2022. Arus penumpang angkutan umum di tahun 2023 sebesar 22.956.716 meningkat sebesar 44,65% dari tahun 2022. Hal ini ditunjang oleh perbaikan pelayanan angkutan umum dan pergerakan kegiatan ekonomi yang meningkat sehingga masyarakat mulai kembali menggunakan angkutan umum. Penggunaan angkutan umum oleh masyarakat menjadikan kondisi lalu lintas lancar, dan biaya perjalanan yang murah.

Kepemilikan kir angkutan umum di tahun 2023 sebesar 2.026 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2.191. Kepemilikan kir angkutan umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Kir/uji laik sebagai upaya meningkatkan keamanan angkutan umum.

Persentase fasilitas perlengkapan jalan meningkat jika dibandingkan tahun 2022 dimana pada tahun 2023 berhasil mencapai 69,32%. Dampak dari pencapaian ini adalah cukup tersedianya perlengkapan jalan dalam rangka rekayasa lalu lintas, yang berguna dalam mengatur lalu lintas sehingga lalu lintas di jalan menjadi lebih tertib.

#### **j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, ditandai diantaranya dengan diterimanya penghargaan Implementasi Smartcity Terbaik Tahun 2023 Kategori “Smart Economy” dan “Smart Living”, Badan Publik Informatif “Keterbukaan Informasi Publik”, “Instansi Terbaik Pertama” dalam Instansi Teraktif dalam Pendaftaran PSE Lingkup Publik Tingkat Pemerintah Kota Tahun 2023, dan meraih “Terbaik Ke-2” Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik di Kota Semarang pada tahun 2023 terlaksana forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Dan sebagai dasar pelaksanaannya telah di tetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/122 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022.

Pengelolaan laporan layanan pengaduan yang masuk selama tahun 2023 melalui kanal-kanal yang tersedia telah diterima laporan sebanyak 6.129, terdiri dari 6.113 pengaduan, 4 permintaan informasi, dan 12 aspirasi. Dari 6.113 laporan, 4.958 laporan atau 81,11% laporan telah selesai dan 17 laporan selesai bersyarat.

Sedangkan, laporan yang masih dalam proses sebesar 1.097 laporan dan laporan belum selesai sebesar 41 laporan (pada saat akhir desember 2023). Lima OPD yang paling banyak mendapat laporan pada tahun 2023 yaitu Dinas Perhubungan dengan 1.234 laporan, Dinas Pekerjaan Umum dengan 1.103 laporan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 751 laporan, Satpol PP dengan 331 laporan, dan PDAM Tirta Moedal dengan 310 laporan.

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan pengelolaan dan monitoring evaluasi Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang. Panggilan melalui CC 112 selama tahun 2023 sebanyak 33.676, dengan rincian 13.454 yang merupakan panggilan yang valid, 8.688 merupakan prank, 6.096 merupakan ghost dan 5.438 merupakan informasi. Topik panggilan adalah Ambulance Transportasi, Pemeriksaan, Home Care, Kecelakaan, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Evakuasi Hewan Liar, Gangguan Lalu Lintas, Bencana Alam, Ambulance Jenazah Pmi, Kebakaran, Keamanan Dan Ketertiban Umum/Masyarakat, Balap Liar, Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Pohon Tumbang, Lampu PJU Padam, Tiang Listrik Rubuh (Pju/PIn/Telkom), Kabel Menjuntai, Rescue, Pipa Bocor, Evakuasi Kecelakaan, Kriminalitas, Kerusakan/Tawuran, Penemuan Mayat, Kekerasan Perempuan/Anak/Kdrt, Ambulance Jenazah Disperkim, Covid 19. Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.53.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75	75,33	75,95	95,23	95,87
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/ replikasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i> sesuai dengan <i>Masterplan</i>	75	75	80	100	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2024

Kinerja pada urusan komunikasi dan informatika menunjukkan kinerja yang positif, terkait akses internet di OPD, integrasi sistem, cakupan penyebaran dan penyediaan informasi publik serta implementasi masterplan *smart city*.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, diantaranya: Belum maksimalnya penanganan hoaks di Kota Semarang, terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang, ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti hacking, phishing, dan deface, serta OPD tidak memahami proses bisnis dan tidak memiliki dokumentasi saat berkeinginan membuat aplikasi sehingga menyulitkan proses develop sistem.

### k. **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah untuk menyelesaikan permasalahan terkait kesulitan pemasaran produk dan akses permodalan bagi KUMKM, kota semarang mempunyai program kredit wibawa bagi Koperasi dan pelaku UMKM serta melaksanakan Fasilitasi kemitraan antara koperasi dan UMKM dan melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bersama Gerai Oleh-oleh Bandara A.Yani Semarang, Hotel Santika, Supermarket *Carrefour*, Superindo, Pangan Mart dan *Sampoerna Retail Community* (SRC) untuk memperluas akses jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

Di samping itu juga dikembangkan sebuah system pendataan UMKM di kota Semarang melalui SI-UMI (Sistem Informasi Usha Mikro) untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan UMKM di Kota Semarang.

**Tabel 2.54.**

#### **Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah/ SDGs	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UMKM yang dibina	Orang	2.857	2.822	3.575	5.220	4.006
2	Jumlah koperasi aktif	unit	634	637	638	561	567
3	Jumlah seluruh koperasi	unit	715	718	720	732	736
4	Persentase koperasi aktif	%	86,67	88,72	88,61	76,64	77.04
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	NA	10,24	11,00	16,93	17,17
6	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	NA	50,70	52,00	48,22	58,91
<b>Indikator SDGs</b>							
7	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan. (8.3.1.(c))	%	1.498/ 16.456x 100% = 9,10% (Kredit Wibawa)	1.899/ 16.802x 100% = 11,30% (Kredit Wibawa)	2.238/ 21.065x 100% = 10,62% (Kredit Wibawa)	2.361/ 29.611x 100% = 7,97% (Kredit Wibawa)	2.415/ 30.024 x 100% = 8,04% (kredit Wibawa)

Sumber: Dinas Koperasi & UM, 2024

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2023 sebesar 77,04% meningkat dari tahun 2022 sebesar 76,64%. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah koperasi sebanyak 4 unit, sehingga tahun 2023 menjadi sebanyak 736 koperasi terdaftar di Kota Semarang. Disisi lain terjadi peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha dari tahun 2022 sebesar 16,93%, meningkat menjadi sebesar 17,17 pada tahun 2023.

### l. **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah kinerja dalam urusan penanaman modal. Di mana kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum, menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Pada tahun 2023 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik, dimana persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,08% melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%. Beberapa capaian urusan wajib penanaman modal di Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.55.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**  
**Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	33.658.609	18.209.772	22.538.063	24.662.877	27.205.700
2	Persentase peningkatan investasi	32,61%	-40,21%	3,09%	10,24%	10,31%
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	312	344	416	675	556
4	Persentase ijin terbit sesuai SP	98,20%	98,70%	99,33%	95,63%	95,69%

*Sumber: DPMPSTP, 2024*

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) dari yang ditargetkan 492 investor mencapai 556 Investor. Namun, realisasi jumlah investor di tahun 2023 menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 675 investor. Semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Semarang akan membawa dampak positif, beberapa diantaranya adalah adanya peningkatan tenaga kerja bagi masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan terciptanya perubahan kualitas sumber daya manusia serta taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Nilai investasi tahun 2023 mencapai Rp 27.205.700.000.000,- berhasil melebihi target kinerja RPJMD Kota Semarang yaitu sebesar Rp 25.684.059.000.000 dan meningkat dari tahun 2022 yang sebesar Rp 24.662.877.213.739,-.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya Aksesibilitas lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

#### **m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, karena tempat olahraga di masa pandemi ini banyak yang ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, sehingga pengoperasionalan dengan pengetatan dan penyediaan sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olah raga terbuka tidak bisa dihindari.

Untuk keaktifan organisasi dan kegiatan kepemudaan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan, karena hampir seluruh kegiatan dispora melibatkan banyak orang sehingga tidak bisa dilaksanakan, dan untuk tahun 2022 mulai terdapat peningkatan jumlah organisasi kepemudaan maupun keolahragaan yang telah melakukan aktifitasnya. Organisasi kepemudaan yang aktif di tahun 2023 meningkat menjadi 37 organisasi sedangkan organisasi olahraga cenderung konsisten sebanyak 63 organisasi.

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditandai dengan diraihnya kejuaraan prestasi pada tahun 2023 yaitu meraih 186 medali emas, 138 medali perak, dan 137 medali perunggu pada PORPROV Tahun 2023. Selain itu atlet Kota Semarang meraih 15 medali emas, 6 medali perak, dan 8 medali perunggu pada PERAPROV IV Tahun 2023. Sedangkan pada event POPDA, meraih 30 medali emas, 24 medali perak, dan 54 medali perunggu.

**Tabel 2.56.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan & Olahraga**  
**Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	90	74	25	30	37
2	Jumlah organisasi olahraga	61	63	45	63	63
4	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	6	6	6
5	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda	4 keg	2 keg	2 keg	2 keg	10 keg
6	Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda (SDGs)	200 org	100 Org	100 org	100 org	250 org
7	Peningkatan prestasi olahraga	NA	NA	NA	8,92	8,92
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	NA	0,93	0,94	0,94	0,94
9	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	NA	0,035	0,035	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2024

**n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Statistik ditandai dengan prestasi pada tahun 2023, diantaranya dengan diraihnya Predikat Optimum dalam Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang, Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga perolehan Skor Kematangan sebesar 86,25% dalam Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang, Tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta mendapat Predikat Terbaik ke-2 se-Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah, Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektorial Kota Semarang adalah Peraturan Walikota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian sasaran, diantaranya: Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektorial, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektorial, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial, Pengembangan Infrastruktur, serta Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah.

**Tabel 2.57.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2024

Indikator presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan Sistem

Data dan Statistik yang terintegrasi mencapai 100% sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, demikian halnya integrasi sistem data dan statistik yang mengindikasikan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang telah dimanfaatkan oleh semua pihak. Capaian yang tinggi selalu dijaga dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pemahaman produsen data di OPD tentang Pengelolaan Data Statistik Sektorial & Penyebarluasan Informasi Geospasial dan melakukan pendampingan kepada produsen data dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik.

**o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Tingkat keamanan informasi pemerintah di tahun 2023 yaitu sebesar 100% berhasil konsisten mempertahankan prestasi dari tahun 2019. Peningkatan SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikat pada tahun 2023 yang meliputi Pelatihan Internal Audit ISO 27001:2013 dan Awareness of ISO 27001:2022, serta Surveillance I Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

**Tabel 2.58.**

**Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	NA	NA	40,00%	50,00%	100%

Sumber : Setda Kota Semarang dan Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2024

**p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Kinerja Bidang Kebudayaan dapat dilihat dari terlestarikannya cagar budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal. Terlestarikannya cagar budaya meningkat menjadi 78,93% di tahun 2023 dari angka 77,78% di tahun 2022. Sedangkan untuk apresiasi terhadap kesenian lokal tahun 2023 meningkat menjadi 64,96% dibandingkan realisasi di tahun 2022 yang sebesar 45,27%. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang.

**Tabel 2.59.**

**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang	Group	792	813	859	929	1.031
2	Jumlah grup kesenian	Group	792	813	859	929	1.031
3	Jumlah gedung kesenian	Gedung	14	14	14	15	15
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Gedung	199	199	199	200	202
5	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	Buah	12	12	12	12	12
6	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	336	336	351	400	401
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	34,18	70,96	71,30	77,78	78,93

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461	461	534	578
9	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	0	4	4	8	10
10	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	77,34	23,92	25,66	45,27	64,96

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2024

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan kebudayaan diantaranya: kurangnya apresiasi masyarakat terhadap atraksi seni budaya; belum optimalnya pemeliharaan artefak dan cagar budaya; dan belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.

#### q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berawal pandemi menyebabkan jumlah kunjungan *offline* pada perpustakaan Kota Semarang berkurang tajam, dan sebaliknya jumlah pengunjung pada perpustakaan digital meningkat sebagai dampak pandemi yang menerapkan social distancing. Pada tahap awal, SiBooky (perpustakaan digital Kota Semarang) berisi koleksi *ebook* baik *ebook* komersial dengan sistem DRM (*Digital Right Management*) dan *ebook open source* atau non komersial tanpa sistem DRM. Untuk *ebook* dengan sistem DRM, setiap judul baru tersedia satu buku, sehingga jika *ebook* ini sedang dibaca pengunjung lain, maka pembaca berikutnya harus menunggu lebih dahulu. Sedangkan untuk buku komersial, tidak menggunakan sistem DRM sehingga bisa dibaca oleh siapa saja dalam waktu bersamaan.

Untuk manajemen peminjaman *online* juga telah dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk lama waktu tertentu untuk dibaca melalui *smartphone*. Koleksi *ebook* perpustakaan Kota Semarang juga akan disediakan di beberapa tempat umum yang bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi cukup dengan koneksi bluetooth dengan aplikasi tertentu. Pada jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2022 sebanyak 588.851 pengunjung, berasal dari Kunjungan Perpustakaan Digital (*SiBooky*), Kunjungan Inlist, Layanan Terpadu, dan Perpustakaan Keliling dan ini jauh meningkat. Terdapat peningkatan signifikan pada pengunjung perpustakaan, hal ini didukung oleh peningkatan kunjungan perpustakaan digital *SiBooky*. Akan tetapi, sudah mulai tampak kelemahan daripada *SiBooky* salah satunya adalah keberagaman koleksi dan jumlah koleksi yang masih perlu ditingkatkan, selain dari sistem informasinya (baik *user interface* maupun *user experience*).

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Semarang di tahun 2023 sebesar 69,17% meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 67,00%. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2023 sebesar 1.123.815 orang yang meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 588.851 atau naik sebesar 52,40%. Peningkatan kunjungan perpustakaan didukung oleh meningkatnya jumlah koleksi buku di perpustakaan sebesar 115.548 buku di tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 108.937 buku.

**Tabel 2.60.**

#### **Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perpustakaan milik Pemerintah	1	1	1	1	1
	Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah	191	191	193	195	195



No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	28.960	10.471	1.066 (peminjam)	588.851 (dari inlist, layanan terpadu, pusling, dan SiBooky)	1.123.815
3	Jumlah Koleksi buku perpustakaan	134.000	101.460	106.168	108.937	115.548
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	NA	42,07%	45,00%	67,00%	69,17 %
5	Pengunjung perpustakaan per tahun	NA	22,00%	24,00%	36,00%	66,53 %
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	NA	56,58%	57,00%	59,80%	70,78 %

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024

#### r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan urusan kearsipan pada tahun 2023 diantaranya: Peringkat 9 Tingkat Nasional dalam Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota serta menerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Secara umum kinerja pada urusan kearsipan di tahun 2023 berada pada nilai realisasi yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik meningkat menjadi 31.608 di tahun 2023. Peningkatan klasifikasi dan rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara cenderung konsisten dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang masing-masing sebesar 100% dan 95%. Dari keberhasilan capaian Bidang Kearsipan yang meningkat di tahun 2023 masih terdapat permasalahan yang muncul yaitu kurang tersedianya arsiparis pada beberapa OPD untuk mengelola arsip dinamis, sehingga pengelolaan arsip pada tingkat kota masih butuh berbenah. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan sebagai berikut:

**Tabel 2.61.**

#### **Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2019-2023**

INDIKATOR KINERJA		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik	25.141 arsip	28.055 arsip	29.000 arsip	30.500 arsip	31.608 Arsip
2	Peningkatan klasifikasi arsip	8%	10%	10%	100%	100%
4	Rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	100%	99%	100%	95%	95%
5	Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	50	50	50	50	51
6	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan /dipelihara	25.000 arsip	37.000 Arsip	37.000 arsip	37.500 arsip	37.605 arsip
7	Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi	65.000 dokumen	83.491 dokumen	83.491 dokumen	84.991 dokumen	85.060 dokumen
8	Pameran tentang kearsipan yang diikuti	2 kali	1 kali	1 kali	2 kali	3 kali
9	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang	NA	76,16%	76,00%	79,02%	80.76%

INDIKATOR KINERJA		2019	2020	2021	2022	2023
	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
10	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	NA	55,33%	56%	57,05%	59.8%
11	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	89.770 arsip	139.000 arsip	145.000 arsip	149.000 arsip	150.108 arsip

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2024

### 2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

#### a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 3.067,45 ton meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3.008,92 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 3.896,25 ton juga berhasil meningkat dari tahun 2022 sebesar 3.887,87 ton. Sehingga total produksi perikanan pada tahun 2023 meningkat yaitu sebesar 6.963,7 ton.

Selain itu, pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan angka konsumsi ikan menjadi sebesar 43,75 Kg/Kapita/Thn dan juga meningkatkan produksi ikan olahan menjadi sebesar 17.88,98 ton/tahun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 17.604,14 ton.

Secara umum meskipun capaian bidang kelautan dan perikanan baik, masih terjadi beberapa permasalahan yaitu sebagian pengolah mengalami kendala dalam memasarkan hasil olahan ikan yang sudah di produksi. Selain itu permasalahan akan adanya cuaca ekstrim yang mengakibatkan debit air kurang, perubahan suhu ekstrim antara siang dan malam sehingga menyebabkan banyak kematian pada ikan, banyak timbul penyakit ikan karena *stress* pada ikan serta menyebabkan hasil tangkapan ikan oleh nelayan menurun sehingga pendapatan nelayan juga menurun. Berikut kinerja urusan kelautan dan perikanan tahun 2019-2023.

**Tabel 2.62.**

#### Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan & Perikanan Tahun 2019-2023

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok	202	215	235	235	196
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/Tahun	3.725,78	3.738,10	3.810,67	3.887,87	3.896,25
3	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/Tahun	3.153,45	2.801,12	2.901,45	3.008,92	3.067,44
4	Produksi ikan olahan	Ton/Tahun	17.919	17.485	17.506,11	17.604,14	17.688,98
5	Konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	38,56	40,16	40,17	40,25	43,75
6	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	6.879,23	6.539,12	6.487,98	6.896,79	6.963,70

Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

## b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan kepariwisataan pada tahun 2023 mulai menunjukkan kinerja positif di beberapa indikatornya dibandingkan kinerja pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Persentase Kenaikan Persentase Kunjungan wisata di tahun 2023 sebesar 21,52% yang telah melampaui dari target 6%. Sumbangan paling tinggi dirasakan pada jumlah wisatawan domestik, meskipun wisatawan mancanegrapun juga mengalami kenaikan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang sejumlah 6.492.875 orang dengan 6.478.883 orang wisatawan domestik dan 13.992 orang wisatawan mancanegara.

Untuk meningkatkan daya Tarik wisata Kota Semarang saat ini dilakukan rencana pembangunan kereta perkotaan atau Trem yang digunakan untuk angkutan wisata. Perlu diketahui rencana pembangunan trem ini bertujuan untuk menghidupkan Kembali Trem Semarang sebagai jalur wisata Pendidikan heritage yang menghubungkan dengan situs bersejarah Semarang Lama juga sebagai pengingat bahwa Kota Semarang merupakan kota pertama di Indonesia yang mengoperasikan trem yaitu pada tahun 1882. Rencananya rencana jalur trem tersebut terdapat 2 trase yaitu trase barat stasiun tawang-tugu muda-stasiun Poncol-Stasiun Tawang dan trase timur Stasiun Tawang-Tugu Muda-Simpang Lima-Jalan Gajah Mada-Stasiun Tawang. Jika melihat hasil kajian kelayakan yang disusun oleh PT. KAI estimasi jumlah penumpang dan ATP WTP masih berdasarkan pergerakan komuter sehingga tidak layak untuk operasional maka mungkin dapat menggunakan pendekatan pariwisata akan meningkatkan ATP dan WTP sehingga dapat layak operasional.

Dalam upaya mencapai target kepariwisataan, Kota Semarang terus menggalakkan upaya peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti *leaflet*, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan portal atau *website*, serta melalui media sosial dan paket wisata lainnya.

**Tabel 2.63.**

### **Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%	26,62	-59,77	-18.46	100,58	21,52
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	Orang	7.305.559	3.266.931	2.663.761	5.343.151	6.492.875
	Mancanegara	Orang	82.030	628	77	4.918	13.992
	Domestik	Orang	7.223.529	3.260.303	2.663.684	5.338.233	6.478.883
3	Pendapatan sektor pariwisata	Juta Rupiah	PAD Rp 282.781. 657.326	10,17% PAD Rp 190.758. 295.291	7,96 % PAD Rp 207.712. 087.923	14,13% PAD Rp 357.978. 839.578	15,50% PAD Rp 447.122. 505.670
4	Jumlah Destinasi Wisata	Obyek	71	71	200	373	381
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang	8.619	5.109	427.305	770.439	799.896
6	Lama menginap MICE	hari	1,51	1,4	1,32	1,43	1,74
7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	26,62 7.305.559	-59,77 3.266.931	-18.46 2.663.761	100,59 5.343.151	21,52 6.492.875

No	Indikator Kinerja	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
8	Tingkat hunian akomodasi	%	44,88	30,32	31,74	54,01	57,11
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	15,37	10,17	7,96	14,13	15,50

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2024

### c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pada tahun 2023 indikator-indikator kinerja urusan pilihan pertanian yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026 secara umum tercapai dengan baik dengan rata-rata capaian 380,86%. Dari enam indikator, lima indikator dapat tercapai bahkan dengan capaian di atas 100%, yaitu: (1) Produktivitas pertanian per ha per tahun; (2) Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular; (3) Jumlah Kawasan pertanian perkotaan; (4) Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT; dan (5) Sentra produk unggulan pertanian. Pada beberapa indikator juga apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan seperti presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus penyakit hewan menular dengan signifikan, hal ini dikarenakan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak. Namun pada tahun 2023 wabah dapat diatasi dengan baik dan terjadi penurunan jumlah kasus sehingga nilai capaian indikator menjadi sangat tinggi. Selain itu, beberapa indikator yang memiliki capaian yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada jumlah kawasan pertanian perkotaan, presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT dan sentra produk unggulan pertanian. Adapun satu indikator yang tidak dapat mencapai target adalah presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan produksi hasil peternakan dari yang ditargetkan 35.922 ton, mencapai 38.104,59 ton, atau berhasil mencapai target sejumlah 106,08%. Namun capaian tahun 2023 menurun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 4%. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah produksi susu dan telur. Produksi susu menurun akibat dampak dari wabah penyakit menular strategis yang terjadi pada tahun 2022 dimana jumlah populasi ternak sapi perah menurun dan pada ternak sapi perah yang terkena wabah tidak dapat lagi memproduksi susu akibat gangguan reproduksi. Dampak lain yang terjadi dari wabah penyakit tersebut adalah beralihnya usaha peternak dari komoditas sapi perah menjadi komoditas ternak sapi potong ataupun kambing sehingga berdampak pada turunnya jumlah produksi susu. Sementara untuk komoditas telur, penurunan produksi pada tahun 2023 terjadi akibat berkurangnya jumlah populasi ternak ayam petelur yang disebabkan mahalannya harga bibit ayam (DOC) dan harga pakan ayam.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan produksi hasil peternakan dari yang ditargetkan 35.922 ton, mencapai 38.104,59 ton, atau berhasil mencapai target sejumlah 106,08%. Namun capaian tahun 2023 menurun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 4%. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah produksi susu dan telur. Produksi susu menurun akibat dampak dari wabah penyakit menular strategis yang terjadi pada tahun 2022 dimana jumlah populasi ternak sapi perah menurun dan pada ternak sapi perah yang terkena wabah tidak dapat lagi memproduksi susu akibat gangguan reproduksi. Dampak lain yang terjadi dari wabah penyakit tersebut adalah beralihnya usaha peternak dari komoditas sapi perah menjadi komoditas ternak sapi potong ataupun kambing sehingga berdampak pada turunnya jumlah produksi susu. Sementara untuk komoditas telur, penurunan produksi pada tahun 2023 terjadi akibat berkurangnya jumlah populasi ternak ayam petelur yang disebabkan mahalannya harga bibit ayam (DOC) dan harga pakan ayam. Berikut kinerja terkait penyelenggaraan urusan pertanian.

**Tabel 2.64.**  
**Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang)	9.492	10.285	9.902	10.108	10.186
2	Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok)	19 (gapoktan)	24 (gapoktan)	24 (gapoktan)	27 (gapoktan)	214 kelompok
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	66	91	104	124	177 kelurahan
4	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	37.347	35.045	33.254,34	39.690,27	38.104,59
5	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam Ton)	51.696	51.379	53.527,47	58.065,88	52.512,85
6	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (Sertifikat NKV)	14	19	22	29	15
7	Produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) per hektar per tahun	NA	6,38 ton/ha/tahun	6,38 ton/ha/tahun	6,96 ton/ha/tahun	7,09 ton/ha/tahun
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	NA	44,44%	44,49%	(7.108) %	-88,21%
9	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	NA	3 Kawasan	4 Kawasan	4 kawasan	5 kawasan

*Sumber: Dinas Pertanian, 2024*

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pilihan Pertanian antara lain Ketersediaan prasarana pertanian yang masih kurang, serta banyak prasarana yang ada kondisinya memerlukan perbaikan/rehabilitasi, Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease (LSD)* yang masih menjadi ancaman di tahun 2023. Wabah yang ada menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para peternak karena menurunkan produksi dan produktivitas ternak bahkan juga menyebabkan kematian ternak sehingga menurunkan pendapatan peternak, Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih terus terjadi menyebabkan keterbatasan lahan untuk produksi sehingga produksi tanaman pangan menurun dari tahun ke tahun, serta Kualitas kelembagaan petani yang masih rendah Dimana dari 432 kelompok tani yang ada hanya 29 kelompok (6,71%) yang kualitasnya tinggi (berada pada kelas madya dan utama). Selain itu Tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relatif sangat rendah Dimana pada Sebagian besar kelompok tani hanya beberapa anggota saja yang berperan aktif.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dapat ditunjukkan diantaranya dengan prestasi mendapatkan Penghargaan Daerah Tertib Ukur 2022 yang diperoleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang. Penghargaan Daerah Tertib Ukur diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dua kriteria penilaian. Pertama, kriteria utama yang terdiri atas dua indikator yaitu Indeks Unit Metrologi Legal (UML) dan Indeks Tertib Ukur. Kedua, kriteria penunjang

yang terdiri atas dua indikator yaitu Indeks Pemahaman Masyarakat dan Indeks Inovasi Pelayanan.

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang dari tahun ke tahun berfluktuasi. Nilai ekspor Kota Semarang kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 2.030.563.943 US\$. Realisasi ekspor tahun 2023 berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dan terhitung meningkat bila dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 1.334.629.083 US\$ karena didukung oleh seringnya dilakukan kegiatan promosi dan pameran dagang baik taraf nasional maupun internasional serta dilakukan kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang yang produknya masuk dalam produk unggulan dengan metode cost sharing kerjasama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI)

Permasalahan yang terjadi di tahun 2023 yaitu Ada beberapa perusahaan yang jenis produknya berkurang sehingga jumlah Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diawasi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.65.**

**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70,08%	66,29%	72,96%	67,32%	76.00%
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	80,67%	83,33%	86,67%	76,00%	69.00%
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90,01	79,87	NA	84,00	NA
5	Nilai Ekspor kota Semarang	1.101.478.622 US\$	3.084.439.326,82 US\$	1.117.549.543 US\$	1.334.629.083 US\$	2.130.728.975 US\$

Sumber: Dinas Perdagangan, 2024

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Pertambahan jumlah sentra IKM dari (target 2022: 21 sentra IKM dari total target 25 sentra) meningkat menjadi 22 sentra di tahun 2023. Dengan capaian ini diharapkan meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Dan Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 0,98% lebih rendah dari capaian pada tahun 2022 yang sebesar 1,23%. Selain itu, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan di tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 11,77% lebih kecil dari capaian pada tahun 2022 yang sebesar 11,87%.

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) masih tahap Review Naskah akademis sekaligus penyusunan ranperda RPIK karena menyesuaikan Nomenklatur baru sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan menyesuaikan kondisi *up to date*. Tahun 2024 akan diupayakan untuk proses ranperda RPIK menjadi Perda RPIK.

**Tabel 2.66.**

**Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	27,44	28,64	28,65	28,85	28,78
2	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHK)	25,64	26,20	26,25	26,23	25,82
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	3.570	3.587	3.638	3683	3719
4	Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil	2790	2.805	2840	2885	2921
5	Jumlah kluster industri	10	10	10	10	10
6	Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial	20 sentra	20 Sentra	20 Sentra	21 Sentra	22 Sentra
7	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	NA	0,48%	0,50%	1,23%	0.98%
8	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	NA	0,00%	10,00%	11,87%	11,77%
10	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	0	0	0	1	1
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	NA	0,00%	0,00%	12,50%	11,11%
<b>Indikator SDGs</b>						
12	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	27,43	28,56	28,65	28,85	28,78

Sumber: Dinas Perindustrian, 2024

#### 2.1.3.4. Unsur Pendukung

##### a. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Kota Semarang selama tahun 2023, diantaranya : Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dengan nilai 71,32 lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 70,35. Realisasi tahun 2018-2021 masih dengan predikat B, meski secara angka absolut setiap tahunnya terjadi peningkatan. Dan ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat. Selain itu Pemerintah Kota Semarang memperoleh penghargaan sebagai peringkat satu Pemerintah Daerah berkinerja terbaik di Indonesia kategori Pemerintah Kota.

Pada tahun 2023 terdapat kinerja yang pencapaiannya melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,72 dari target yang ditetapkan sebesar 88,00 dan lebih tinggi dari realisasi IKM tahun 2022 yang sebesar 88,63. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kota Semarang selalu meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat.

Kinerja pada bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah pada tahun 2023 menghasilkan sebanyak 10 Peraturan Daerah Kota Semarang yang merupakan inisiatif Eksekutif, 80 Peraturan Walikota Semarang, dan 619 Keputusan Wali Kota Semarang. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penyediaan dan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah yaitu jumlah Raperda yang disetujui DPRD belum sesuai target dikarenakan pembahasan raperda tergantung keaktifan perangkat daerah pengusul dan Regulasi yang selalu berubah dari pemerintah pusat pada tahun berjalan.

**Tabel 2.67.**

**Realisasi Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah  
Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP)	Predikat	B 68,12	B 68,52	B 69,44	BB 70,35	BB 71,32
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,81	86,68	87,35	88,63	90,72
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	69,46	69,78	71,03	72,68	84,14
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,414/ST	3,439/ST	3,44/ST	3,44/ST	3,53/ST
5	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
6	Jumlah Produk Hukum: ● Peraturan Daerah ● Peraturan Wali Kota ● Keputusan Wali Kota	Perda, Perwal, SK Wali kota	8 73 420	5 94 426	13 124 533	8 77 620	10 80 619
7	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	Kasus	35	28	23	28	51
8	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	Raperda	8 (dari target 15 Raperda)	5 (dari target 16 Raperda)	13 (dari target 10 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

#### b. Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, kinerja DPRD diantaranya ditunjukkan dengan belum tercapainya pemenuhan target penetapan dari 16 Perda yang direncanakan pada tahun 2023. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8 Raperda dari 15 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dan saat ini terdapat 4 (empat) raperda yang masih dalam pembahasan, yaitu: Raperda tentang Perizinan dan Non Perizinan, Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2022 -2052. Selain itu kurang optimalnya realisasi penetapan Raperda, berimbas pula pada penyerapan honor narasumber dan transport peserta hearing yang di siapkan setiap kali pembahasan raperda.

Kinerja lain terkait nomenklatur program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran DPRD telah termuat dalam RPJMD maupun RKPD di tahun 2023 sebesar 100%, sesuai nomenklatur Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.68.**  
**Kinerja Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	8 (dari target 15 Raperda)	5 (dari target 16 Raperda)	13 (dari target 10 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	10 (dari target 16 Raperda)

Sumber: Sekretariat DPRD, 2024

### 2.1.3.5. Unsur Penunjang

#### a. Perencanaan

Kinerja pada unsur penunjang Perencanaan dapat ditunjukkan diantaranya dengan diraihnya penghargaan Kota Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kota Terbaik III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 tingkat Nasional. Kinerja lain yang merupakan koordinasi lintas sektor ditandai dengan terbitnya regulasi terkait Dokumen Perencanaan Tahunan (Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan RKPD Tahun 2024).

Capaian kinerja pada Urusan Penunjang Perencanaan pada tahun 2023 diukur dari Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan sebesar 100%, dan Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan sebesar 100%. Capaian ini cenderung konsisten dari tahun sebelumnya.

Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya: Pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Lintas OPD, Musrenbang Kota, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan.

**Tabel 2.69.**

**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu	2	2	2	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	97,80	94,16	100,00	100,00	100,00
4	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	75,14	75,70	79,44	81,50	82,30
5	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	2	2	2	2	2
6	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda, 2024

#### b. Keuangan

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2023 sesuai dengan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Desember 2023 Nomor 900.1.15.3/6602.BSKDN diperoleh Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi" Kota Semarang memperoleh rangking 1 dengan Indeks total 81,881 Peringkat Baik. Selain itu, Kota Semarang masuk dalam 8 besar tertinggi kategori

Kota dalam pencapaian Persentase Belanja Daerah tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, penyusunan APBD, serta Realisasi Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir maka pada tanggal 21 Juni 2023 Kepala Daerah telah mengirimkan Surat Permohonan Pembahasan untuk mendapat Persetujuan Bersama DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Ketepatan waktu penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Telah dilakukan pembahasan bersama dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Semarang sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Desember 2023.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per 31 Desember 2023, Belanja Daerah Kota Semarang tercatat mencapai 93,05%. Hal tersebut dapat dicapai atas kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang, DPRD Kota Semarang dan Masyarakat yang terus memberikan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2023 Aset Tetap Kota Semarang sebesar Rp 20.294.230.122.526 dan Aset Lainnya sebesar Rp 225.217.689.308 sehingga jumlah aset tetap dan aset lainnya sebesar Rp 20.519.447.811.834. Nilai aset yang belum dikelola sebesar Rp 300.101.637.404 antara lain tuntutan ganti kerugian, aset lain-lain, dan aset yang dikuasai namun belum ditentukan penggunaannya. Sehingga diperoleh nilai aset yang dikelola mencapai 98,54%. Pemanfaatan aset Pemerintah Kota Semarang yang optimal dapat menambah pendapatan asli daerah sehingga program prioritas di Kota Semarang dapat terlaksana.

**Tabel 2.70.**

**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	45,29%	46,01%	49,47%	52,03%	52,96%
2	Persentase Silpa Terhadap APBD	1,65%	6,50%	5,17%	6,02%	5,08%
3	Persentase pengelolaan keuangan daerah	98,31%	98,11%	96,42%	97,79%	97,88%
4	Persentase nilai aset yang dikelola	NA	NA	89,51%	98,55%	98,54%

*Sumber: Tahun 2024 LRA dan Neraca Unaudited BPK masih dalam proses pemeriksaan BPK*

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer dari yang ditargetkan 100% mencapai 97,73%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun

2022 sebesar 97,50%. Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah) mengalami peningkatan sebesar 0,93% menjadi 52,96% di tahun 2023 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.835.135.544.867 dan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 5.352.856.675.779. Persentase realisasi PAD selalu meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

### c. Kepegawaian

Kinerja pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian dapat ditunjukkan salah satunya dengan diraihinya Penghargaan Bangkom Jateng Award Tahun 2023 dengan tema “Akselerasi Pengembangan Kompetensi (Bangkom) untuk Smart ASN dan Kinerja Berdampak” dengan peringkat I tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Kota Semarang pada tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BKN menyebutkan bahwa nilai IP ASN adalah sebesar 85,40, indeks ini meningkat dibandingkan realisasi di tahun 2022 yang sebesar 83,84. Selain itu, Indeks Sistem Merit juga mengalami peningkatan sebesar 0,07 menjadi 0,73 di tahun 2023. Akan tetapi, terdapat realisasi yang mengalami penurunan yaitu Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian di tahun 2023 sebesar 91,11 menurun sebesar 0,77 dari tahun 2022.

Beberapa isu terkait pembinaan kepegawaian dapat dilihat dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam unsur penunjang kepegawaian terutama dalam *assessment* pegawai untuk pemetaan kompetensi, belum optimalnya pengintegrasian database kepegawaian di daerah dengan *database* kepegawaian pusat, dan masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki.

**Tabel 2.71.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian**  
**Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	78,42	82,28	83,84	83,84	85,40
2	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	NA	NA	91,79	91,88	91,11
3	Indeks Sistem Merit	NA	NA	0,44	0,66	0,73
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	39,44%	65,41%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2024

### d. Pendidikan dan Pelatihan

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan jumlah yang lulus sebesar 37 orang, meningkat dari tahun 2022 yang hanya 5 orang yang lulus. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 404 orang menjadi sebesar 711 orang di tahun 2023. Permasalahan dalam penyelenggaraan unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi yang maksimal dalam pelaksanaan diklat serta sarana prasarana yang kurang terkadang mengalami kendala.

**Tabel 2.72.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2019-2023**

NO	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	67 Orang (Lulus 100%)	74 Orang (Lulus 100%)	60 Orang (Lulus 100%)	5 Orang (Lulus 100%)	37 Orang (Lulus 100%)
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	372 Orang	397 orang	397 Orang	404 Orang	711 Orang
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	NA	5,60%	16,15%	18,68%	43,27%
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	NA	100,00%	100,00%	39,44%	65,41%
5	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	NA	85,00%	85,00%	21,00%	24,00%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2024

**e. Penelitian dan Pengembangan**

Kinerja pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan diantaranya ditunjukkan dengan diraihnya Penghargaan Kota Terinovatif pada Gelaran Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Kinerja lainnya yaitu diraihnya Indeks Inovasi Daerah, dimana pada tahun 2022 Kota Semarang meraih nilai 65,8. Nilai ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan nilai tahun tahun 2021 sebesar 57,49 dan tahun 2022 sebesar 60,79. Adapun jika dilihat dari persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah, dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif, dimana pada tahun 2022 mencapai 47,06%, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 64,71%.

**Tabel 2.73.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	N/A	21,57	25,49	47,06	64,71
3	Indeks Inovasi Daerah	N/A	1423 (DO lama)	57,49	60,79	65,8

Sumber : BRIDA, 2024

Jumlah kajian yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 20 kajian, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 9 kajian. Kedua puluh kajian tersebut adalah:

1. Kajian Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang;
2. Kajian Strategi Pemberdayaan Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan dalam Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat;
3. Kajian Faktor Penyebab Pengangguran dan Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka di Kota Semarang;
4. Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan atas Pembangunan Infrastruktur Kota Semarang;

5. Kajian Strategi Pemanfaatan Aset untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6. Kajian Strategi Optimalisasi Retribusi Sektor Perdagangan Kota Semarang;
7. Kajian Strategi Pengelolaan Perparkiran Kota Semarang;
8. Kajian Kelayakan Ekonomi Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang;
9. Kajian Evaluasi Implementasi Pemasangan Pipa Resapan Horisontal di Wilayah Kota Semarang;
10. Kajian Pemetaan Potensi Pemasangan Pipa Resapan Horisontal sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Semarang;
11. Kajian Upaya Pengendalian Banjir di Kawasan Meteseh, Tembalang, dan Sekitarnya;
12. Kajian Desain Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang;
13. Kajian Sosial Budaya Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tirang Kota Semarang;
14. Kajian Efektivitas TPS 3R Pedalangan Bersinar;
15. Kajian Potensi Ekonomi Pertanian Perkotaan Kota Semarang;
16. Kajian Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Sosial Kota Semarang;
17. Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penataan Ruang Publik dan Fasilitas Pejalan Kaki;
18. Kajian Optimalisasi Pelayanan Trans Semarang;
19. Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Kota Lama Sebagai Ruang Publik Budaya;
20. Kajian Analisis Daya Dukung dan Keberlanjutan Kawasan Wisata Pantai Tirang Kota Semarang;

#### **2.1.3.6. Unsur Pengawas**

##### **a. Inspektorat Daerah**

Kinerja Inspektorat Daerah dapat terlihat dari diperolehnya Peringkat pertama Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2023 dari KPK RI dengan nilai 98,62 Kategori Pemerintah Kota.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Semarang sebesar 3,086 (Terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kota Semarang telah memperoleh WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak Tahun 2016.

Selanjutnya sebagai upaya mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektorat Kota Semarang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023 telah melakukan pengawasan internal.

Tingkat kapabilitas pengawasan intern seringkali terkait dengan struktur tata kelola organisasi. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya APIP. Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2023 telah sepenuhnya berada pada level 3 (integrated).

Berdasarkan laporan BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah terkait penetapan hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023 Indeks Penerapan Manajemen Risiko memenuhi kriteria pada tingkat “Repeatable” atau level 2 dengan skor sebesar 2,860. Adapun target yang diharapkan adalah dapat mencapai level 3 pada tahun 2024 sesuai surat edaran BPKP Perwakilan Prov. JATENG Nomor S-619/PW11/3.1/2021 Perihal Atensi kebijakan Pembinaan SPIP dan MR tahun 2020-2024.

Hambatan atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Urusan Pengawasan yaitu banyaknya *mandatory* dari pusat untuk Inspektorat Daerah yang diluar kebijakan pengawasan yang tidak direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

**Tabel 2.74.**

**Realisasi Kinerja Unsur Pengawas Inspektorat Daerah Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	NA	NA	2,025	2,820	2,860
3	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	NA	3	2	3	3
4	Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3
5	Nilai Survey penilaian Integritas (SPI)	NA	NA	78,21	74,1	74,8

Sumber: Inspektorat, 2024

### 2.1.3.7. Unsur Kewilayahan

#### a. Kecamatan

Sebagai unsur Kewilayahan, 16 Kecamatan di Kota Semarang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara umum kinerja kecamatan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dimana pada tahun 2023 terealisasi sebesar 97,32%, sedangkan kinerja dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diukur dengan persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) yang realisasinya sebesar 93,90%, pada fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Umum diukur dari persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat pelanggaran perda di kewilayahan sebesar 17,16%, sedangkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur dari Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang terealisasi sebesar 90,50%.

Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE); Persentase Tingkat partisipasi masyarakat; Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan Wawasan Kebangsaan ditingkat kewilayahan; dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Dimana keempat indikator tersebut mempunyai capaian positif pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

Disisi lain perangkat daerah kecamatan selalu memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis (lintas sektor) Pemerintah Daerah di wilayahnya, seperti halnya keberlanjutan Program Urban Farming, Percepatan Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Operasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Bencana.

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kewilayahan tahun 2023 adalah:

1. Pada tahun 2023 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara capaian prestasi ditingkat Nasional meraih penghargaan Kampung Iklim (Proklim) Kategori Utama (Kecamatan Semarang Utara).
2. Juara 1 Lomba Puskesmas TerGermas Tingkat Prov Jateng yang diperoleh Bank sampah alamanda Kelurahan Mangunsari dan Puskesmas Gunungpati Kampung KB Kokolaka Penerimaan Satya Lancana Gubernur Jawa Tengah Tingkat Nasional Th. 2023 (Kecamatan Gunungpati).
3. Juara Nasional Proklim Aksi Mitigasi dan Adaptasi Setara Nasional Th. 2023 (Kecamatan Gunungpati).
4. Juara 1 Lomba KTT Berprestasi Tk. Jawa Tengah Th. 2023 Juara I Kampung KB Tk. Provinsi Jateng 2023 (Kecamatan Gunungpati).
5. Juara 1 Lomba Kelompok Tani Tk Jateng 2023 (Kecamatan Gunungpati).
6. Juara 1 Lomba Vidio BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong bersama Masyarakat) Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Kecamatan Candisari).
7. Program Kampung Iklim Kategori Lestari (Nasional), Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada RW 3 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik telah melaksanakan Program Kampung Iklim (Proklim) secara berkelanjutan dan mereplikasi kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) ke lokasi lain (Kecamatan Tembalang).
8. Pemenang II Kategori Kota Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Kepada Pos Pelayanan Terpadu Balita Ria Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (Kecamatan Tembalang).

Adapun capaian pada tahun 2023 secara rata-rata dari 16 kecamatan sesuai dari indikator terbut sebagai berikut:

**Tabel 2.75.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	82,17%	87,50%	90,11%	94,27%	94,17%
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	NA	82,50%	84,34%	89,94%	90,50%
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	NA	85%	91%	92,65%	93,90%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	NA	95%	95%	95%	97,32%

Sumber: 16 Kecamatan, 2024 (Data diolah)



### 2.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

#### a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai dalam pengukuran indeks demokrasi yang ditargetkan 72,40 indeks tercapai 94,96 indeks sehingga mampu mencapai hasil yang ditargetkan atau berhasil mencapai tercapai 131,16%. Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kota Semarang yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), serta Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Jika dibandingkan dengan pengukuran indeks demokrasi tahun 2023, hasil tersebut turun sebesar 0,17 angka indeks – atau sekitar 0,18%. Hal ini disebabkan pada aspek III Lembaga Demokrasi terkait Alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan yang idealnya adalah 40% dari total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023 hanya dianggarkan sebesar 28,88% total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023.

Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) pada tahun 2023 mencapai 83,63 indeks yang ditargetkan 73,50 indeks atau berhasil mencapai target 113,78%. Hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana capaian tahun 2022 sejumlah 82,13 indeks. Indeks tersebut mengalami peningkatan dikarenakan komitmen kuat dalam mengimplementasikan Gerakan pembumian nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa gerakan kebijakan, diantaranya sebagai berikut: Fun game, Kota Pelopor Implementasi Buku Pendidikan Pancasila, Proyek Penguatan Profil Pancasila, Dialog Kebangsaan, Peran Ulama dalam Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan kebangsaan, Partisipasi Ormas dalam penguatan Pancasila dan Wawasan kebangsaan, Partisipasi KODIM, kampung Pancasila, dan Bela negara. Beberapa gerakan tersebut sudah diterapkan pada masyarakat Kota Semarang. Sejauh ini hasil dari penerapan kegiatan tersebut cukup baik - terutama dalam penguatan Pancasila dan Wawasan kebangsaan.

Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila pada tahun 2023 dari yang ditargetkan 2.1 indeks tercapai 3.204 indeks atau berhasil tercapai 152,57%. Jika dibandingkan pengukuran tahun 2022 hasil yang dicapai mengalami peningkatan 0,001. Hasil tersebut dapat dicapai karena Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membentuk pembumian Pancasila dan Wawasan kebangsaan dengan memberikan Pendidikan Bela Negara, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan serta Penguatan Karakteristik dan Jiwa Patriotik Generasi Muda kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Instansi Vertikal dan DPRD Kota Semarang.

**Tabel 2.76.**

#### **Realisasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Demokrasi	Indeks	NA	72,00	72,00	95,35	95,18
2	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	NA	72,50	72,50	82,13	83,63

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kebebasan sipil dari yang ditargetkan 64,00 angka indeks mencapai 98,20 atau berhasil mencapai target 153,44%. Hasil tersebut konsisten dengan hasil yang

dicapai tahun 2022. Kebebasan sipil meliputi kebebasan untuk mengemukakan pendapat (free speech), kebebasan press (free press), kebebasan untuk berserikat (assembly), dan kebebasan untuk berkeyakinan/beribadah (worship). Masyarakat telah diberikan ruang dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam proses pembangunan di Kota Semarang.

Capaian Indeks Kebebasan Sipil tetap atau konsisten karena Pemerintah Kota Semarang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan serikat dan kebebasan berkeyakinan. Hal ini terbukti pada tahun 2023 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan FGD pendidikan politik, FGD toleransi beragama, FGD dalam hal penanganan ATHG dan FGD Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu pemerintah memberikan kebebasan berserikat hal ini dapat dilihat pada tahun 2023 masyarakat yang mengajukan rekomendasi pendirian organisasi masyarakat mengalami peningkatan sejumlah 88 ormas. Indeks Kebebasan Sipil terdapat juga variabel kebebasan berkeyakinan selama ini tidak terdapat ancaman atau tuntutan kepada masyarakat Kota Semarang untuk menganut agama tertentu dan masyarakat diberikan kebebasan dalam beribadah.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Indeks Kinerja Ormas dari yang ditargetkan 57,00 mencapai 66,10 atau berhasil mencapai target 115,96%. Hasil capaian 2023 jika dibandingkan hasil capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,287 angka indeks - atau 3,58%. Tumbuhnya Organisasi Kemasyarakatan secara masif dengan beragam platform yang sering kali menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat memunculkan tuntutan untuk mengawal kemerdekaan berserikat/ berkumpul tersebut. Mencermati berbagai fenomena tersebut maka perlu dilakukan sebuah tindakan konstruktif oleh Pemerintah karena meskipun kebebasan untuk berserikat/berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*) adalah hak fundamental yang telah dijamin oleh negara melalui konstitusi, akan tetapi Pemerintah perlu melakukan pengawalan agar tumbuh dan berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan yang secara masif tersebut dapat mengambil peran positif dalam pembangunan Bangsa dan Negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik antar Organisasi Kemasyarakatan maupun mempermudah pelaksanaan kemitraan oleh Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks kerukunan umat beragama dari yang ditargetkan 70,50 mencapai 81,73 atau berhasil mencapai target 115,93%. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,69 angka indeks - atau 2,11%. Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama terdapat tiga unsur menjadi variabel utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama dari masing masing dimensi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimensi yang mengalami peningkatan terbesar adalah dimensi toleransi dengan capaian pada tahun 2022 sejumlah 80,89 dan capaian 2023 sejumlah 84,00.

### **2.1.2 Aspek Daya Saing Daerah**

#### **1. Kemampuan Ekonomi Daerah**

PDRB per kapita Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita di tahun 2023 yaitu sebesar 146,87 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dengan asumsi kesenjangan tidak tinggi.

**Tabel 2.77.****Realisasi Kinerja Kemampuan Ekonomi Daerah 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	105,93	114,18	123,04	135,33	146,87
2	Nilai Ekspor	US\$	1.101. 478.621,82	3.084. 439.326,82	1.117. 549.543,14	1.242. 337.131	2.130. 728.974,6 1

Sumber: Bappeda Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

## 2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.

### a. Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Wali kota sepanjang 839,901 km. Jalan dengan kondisi baik pada tahun 2023 yaitu sepanjang 304,998 km (36,31%), kondisi sedang sepanjang 476,143 km (56,69%), kondisi rusak ringan sepanjang 23,588 km (2,81%) dan kondisi rusak berat sepanjang 35,172 km (4,19%)
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Untuk tahun 2020 di Bandara Achmad Yani dilakukan sebanyak 17.681 kali penerbangan kedatangan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.948.569 orang dan 17.673 kali penerbangan pemberangkatan. Dengan jumlah penumpang sebanyak 1.919.405 orang, serta penumpang transit sebanyak 21.144 orang. Jumlah penumpang penerbangan domestik di tahun 2023 sebesar 2.100.836 orang dengan 1.048.649 penumpang kedatangan, 1.042.434 penumpang keberangkatan, dan 9.753 penumpang transit. Jumlah penerbangan kedatangan di tahun 2023 sebanyak 8.585 kali, jumlah penerbangan pemberangkatan sebanyak 9.072 kali, dan 14 kali penerbangan LOK, sehingga jumlah total penerbangan di tahun 2023 sebanyak 17.671 kali. Sedangkan, untuk penerbangan internasional di tahun 2023 telah dilakukan 576 kali dengan 532 kali penerbangan kedatangan dan 44 penerbangan pemberangkatan. Jumlah penumpang internasional pada penerbangan kedatangan sebanyak 2.262 orang dan penerbangan keberangkatan sebanyak 2.605 orang. Sehingga jumlah total penumpang penerbangan internasional pada tahun 2023 sebanyak 4.867 orang.
- 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang, ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas

yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Jumlah penumpang kapal di tahun 2023 sebesar 373.826 orang.

- 4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus di dalam kota, antar kota bahkan antar provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Terminal Penumpang Tipe A Mangkang (kewenangan Pusat) berlokasi di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Terminal Penumpang Tipe B Penggaron (kewenangan Provinsi) berlokasi di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan, Terminal Penumpang Tipe C (kewenangan Pemerintah Kota Semarang) ada 3 (tiga) yaitu Terminal Cangkiran yang berlokasi di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen, Terminal Gunungpati yang berlokasi di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati dan Terminal Terboyo berlokasi di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk. Jumlah penumpang di terminal sebesar 238.621 orang dan pengguna jasa layanan BRT sebesar 12.077.433 orang di tahun 2023.
- 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol. Jumlah penumpang kereta api pada tahun 2023 sebesar 10.343.505 orang.

Rasio Konektivitas kota berhasil sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 0.92. Angka ini menunjukkan bahwa 92% trayek angkutan umum sudah terlayani guna mendukung pergerakan masyarakat dalam beraktifitas.

**Tabel 2.78.**  
**Realisasi Kinerja Fungsi Aksesibilitas Daerah 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	NA	0,56	0,57	0,58	0,92

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

#### **b. Penataan Wilayah**

Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata/rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan

pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota.

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu dari angka 44,21% pada tahun 2020, meningkat menjadi 45,05% tahun 2023. Selain itu indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 100% berdasarkan jumlah permohonan KRK yang sesuai Tata Ruang.

Realisasi kesesuaian tata ruang tidak lepas dari Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sudah terdigitalisasi melalui aplikasi Tata Ruang Pro Investasi. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan memberikan kemudahan investasi terutama kepastian lokasi bagi investor, sehingga permohonan KRK yang diajukan investor sudah dapat diinformasikan secara pasti ketetapan terkait kesesuaian tata ruangnya, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

**Tabel 2.79.**

**Realisasi Kinerja Fungsi Penataan Wilayah 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	NA	44,21	44,67	44,82	45,05
2	Kesesuaian tata ruang	%	NA	95,89	100	100	100

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

### c. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2021 sebanyak 177.929 pelanggan, meningkat menjadi 181.705 pelanggan pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 186.091 pelanggan. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air mengalami peningkatan pada tahun 2023 masing-masing menjadi sebesar 54.300.837 m<sup>3</sup> dan Rp. 300.316,83 juta (Data November 2023). Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.80.**

**Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pelanggan	174.584	176.042	177.929	181.705	186.091
2.	Pemakaian Air (Ribun m <sup>3</sup> )	53.739,007	51.155,716	51.100,925	54.058,365	54.300.837
3.	Penjualan Air (Juta Rp)	257.636,22	276.735,11	293.638,47	301.868,88	300.316,83 (Data November 2023)

Sumber: PDAM Kota Semarang 2024

### d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2021 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2015 sebanyak 345 buah menjadi 1.568 buah di tahun 2021 dan semakin meningkat pada tahun 2022

menjadi 1.675 buah. Selain itu jumlah hotel juga bertambah dari tahun 2015 sebanyak 124 buah menjadi 182 buah di tahun 2021, dengan rincian hotel berbintang sebanyak 92 buah dan hotel non bintang 90 buah. Jumlah hotel di Kota Semarang pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 186 buah. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.

### 3. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

#### a. Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2023 angka kriminalitas sebesar 1293 kejadian, menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2022 yang sebesar 1335 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Pada tahun 2023 diarahkan pada kegiatan penyelesaian kasus dan aduan dari berbagai media social. Penyelesaian kasus yang diawali dengan adanya deteksi dini pada indikator “Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan” dengan target 120 kasus, pada tahun 2023 pencapaian 100%. Sesuai dengan data tersebut sebesar 96 kasus telah diselesaikan sesuai SOP dan sesuai dengan angka yang telah di targetkan pada indikator “tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017)”.

Pada tahun 2023 pencapaian pada indikator persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban naik menjadi sebesar 11,66%, yang terdiri dari 1.663 angka gangguan keamanan dan ketertiban, dan 1.290 angka kriminalitas di Kota Semarang. Angka kriminalitas ini juga mengalami peningkatan di tahun 2022.

**Tabel 2.81.**

#### **Realisasi Kinerja Fungsi Ketentraman dan Ketertiban 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.151	1.330	1.253	1335	1290
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	15	12,37	11,47	10,46	11,66

Sumber: Satpol PP Kota Semarang 2024

#### b. Kemudahan Perijinan

Sampai dengan tahun 2023, Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah: berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Tentunya dalam masa peralihannya, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan perijinan tersebut. Dan sampai dengan saat ini telah dilakukan integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem juga mengajukan ijin kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS, serta tetap mengoperasikan SIIMUT bagi perijinan dan Non perijinan yang tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018.

Pada tahun 2022 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,08% melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%. Namun, capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yang sebesar 95,63%.

**Tabel 2.82.**

**Realisasi Kinerja Fungsi Kemudahan Perijinan 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	98,20	98,70	99,33	95,63	95,69

Sumber: DPMPSTP Kota Semarang 2024

#### 4. Sumber Daya Manusia

##### a. Kualitas Tenaga Kerja

Sejak tahun 2010 hingga 2020, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik ditahun 2010 sampai dengan tahun 2020, komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 70,66%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 31,90% yang berada di bawah 50%. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas, dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2019 sampai dengan 2023 bergerak fluktuatif. TPAK mengalami peningkatan hingga tahun 2020 dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 69,41%. Namun, pada tahun 2022 TPAK mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,96%. Selanjutnya, di tahun 2022 TPAK kembali turun menjadi 69,42%.

Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2019-2023 mengalami perubahan secara fluktuatif. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66,25%, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 75,00%, dan kembali menurun sebesar 2,26% menjadi 72,74% di tahun 2022. Selanjutnya, persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 77,00%.

**Tabel 2.83.**

**Realisasi Kinerja Fungsi Kualitas Tenaga Kerja 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,87	69,89	69,41	70,96	69,42
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	66,25	74,00	75,00	72,74	77,00
3	Rasio Ketergantungan Penduduk (Data Disdukcapil)	%	NA	41,15	41,10	40,66	41,25



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dispendukcapil Kota Semarang, 2023

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD 2022 dan Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)**

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2022 ditunjukkan dengan capaian indikator program pembangunan Tahun 2022 yang terkompilasi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama periode Evaluasi Hasil terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, yang dikelompokkan dalam beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2017, sebagaimana berikut:

- a. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target RKPD tahun 2022 sampai (\*) memiliki status:**
  - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% ( $X > 90\%$ );
  - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75 % sampai dengan 90% ( $90\% \geq X > 75\%$ );
  - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ( $75\% \geq X > 65\%$ );
  - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ( $65\% \geq X > 50\%$ ); dan
  - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ( $X \leq 50\%$ ).
- b. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target akhir RPJMD Tahun 2026 (\*\*) memiliki status:**
  - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 36% ( $X > 36\%$ );
  - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 30% sampai dengan 36% ( $36\% \geq X > 30\%$ );
  - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 24% sampai dengan 30% ( $30\% \geq X > 24\%$ );
  - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 20% sampai dengan 24% ( $24\% \geq X > 20\%$ ); dan
  - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 20% ( $X \leq 20\%$ )
- c. Untuk Identifikasi Capaian pada periode akhir RPJMD (\*\*\*)**
  -  Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) lebih besar atau sama dengan 100 % ( $100\% \geq X$ );



-  Akan Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) untuk capaian nilai sampai dengan atau diatas 40% hingga kurang dari 100% ( $100\% > X \geq 40\%$ ) besar atau sama dengan 100 % ( $100\% > X$ );
-  Perlu Upaya Keras, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) kurang dari 40% ( $X < 40\%$ ).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Program Terhadap Target Tahun 2022 dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026.

## **A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Wajib Pendidikan**



Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2023 pada urusan wajib Pendidikan dalam kategori baik. Kondisi ini berdasarkan 12 indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan, dengan semua indikator dalam predikat sangat tinggi. Sedangkan terhadap target akhir periode RPJMD, dari 12 indikator yang ada, sebanyak 8 indikator telah tercapai, sedangkan 4 indikator lainnya dalam status akan tercapai.

Beberapa indikator capaiannya perlu ditingkatkan karena memiliki persentase belum mencapai 100% dibandingkan target tahun 2023 yaitu APK SD/MI; APK SMP/MTs; APK PAUD 5-6 tahun. Sedangkan, Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV memenuhi target, namun dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD, perlu ditingkatkan. Diperlukan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan PAUD karena masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pada jenjang ini perlu kontribusi dari pemerintah Kota Semarang karena berimplikasi peningkatan literasi dan kualifikasi pendidikan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu guru terutama guru SD agar melanjutkan S1/D-IV. Hal ini penting karena kualitas guru berpengaruh pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.84.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023**  
**dan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026**  
**Urusan Pendidikan**



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s...d. Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	111,71	109,88	98,36%	ST	111,75	109,88	98,33%	ST		Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs	%	115,62	114,95	99,42%	ST	115,65	114,95	99,39%	ST		Dinas Pendidikan
	APK PAUD 5-6 tahun	%	85,87	85,87	100,00%	ST	86,39	85,87	99,40%	ST		Dinas Pendidikan
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	%	8,00	5,00	62,50%	R	14,00	5,00	35,71%	T		Dinas Pendidikan
Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	135,00	135,00%	ST	100,00	135,00	135,00%	ST		Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	89,50	89,50	100,00%	ST	90,70	89,50	98,68%	ST		Dinas Pendidikan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s...d. Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pendidikan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

1. Masih terdapat kekurangan guru dan tenaga kependidikan ASN sehingga dipenuhi dengan guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non ASN, bahkan GTK yang berstatus paruh waktu yang dibiayai dengan dana BOS;
2. Terdapat kendala dalam pemenuhan GTK ASN melalui mekanisme GTK Non ASN terkait dengan regulasi untuk penambahan jumlah maupun rekrutmennya (apakah harus melalui mekanisme tenaga alih daya/*outsourcing*);
3. Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat personal kepada siswa miskin masih menggunakan skema bansos yang mengacu pada DTKS yang berubah setiap bulan;
4. Masih terjadinya tindak kekerasan dan juga pelecehan seksual kepada warga satuan pendidikan;
5. Sarana prasarana di satuan pendidikan, terutama di tingkat Sekolah Dasar yang masih belum tercukupi;
6. Masih terdapat guru PAUD yang belum merupakan lulusan S-1;
7. Masih terdapat anak yang tidak sekolah;
8. Masih rendahnya tingkat literasi dan numerasi pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Upaya rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Memenuhi kekurangan GTK dengan pemenuhan GTK Non ASN dengan berkoordinasi dengan BKPP Kota Semarang untuk mekanisme pemenuhannya, serta dengan TAPD untuk pemenuhan anggarannya;
2. Berkoordinasi dengan Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinsos, Bagian Hukum untuk mekanisme penyaluran beasiswa bagi warga miskin, termasuk miskin ekstrem yang lebih tepat sasaran dan optimal;
3. Mengupayakan pemberian penghargaan bagi insan berprestasi baik guru, tenaga kependidikan maupun siswa-siswi;
4. Mengoptimalkan peran RDRM, serta TPPKS di masing-masing satuan pendidikan serta melakukan koordinasi secara lebih intens dengan para *stakeholder*, salah satunya melalui Ngopi Bareng (Ngobrol Penting bersama

- Stakeholder* Pendidikan Kota Semarang) sehingga harapannya dapat meminimalisasi tindak kekerasan dan pelecehan seksual;
5. Mengupayakan tambahan anggaran untuk sarpras melalui sumber pendanaan lain seperti APBN (DAK), APBD Provinsi (Bankeu), serta sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai prioritas;
  6. Berkoordinasi dan bersinergi dengan *stakeholder* untuk menaikkan jumlah guru PAUD yang bersertifikasi minimal S-1;
  7. Memaksimalkan Aplikasi Bergerak Bersama Membantu Anak Putus Sekolah (BAMBU APUS), melakukan pendataan dan penanganan ATS yang bekerjasama dengan *stakeholder* seperti UPZ, OJK, Kemenag, Pemprov serta mengoptimalkan pemberian beasiswa dan hibah berupa sekolah swasta gratis;
  8. Meningkatkan pentingnya pendidikan berkarakter yang dimulai dari jenjang PAUD dengan menjadikan PAUD sebagai kewajiban bagi anak yang ingin bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar.


## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan dalam Urusan Kesehatan diantaranya ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan sebagai penyedia fasilitas kesehatan terbaik yang diraih oleh Rumah Sakit Daerah (RSD) K.R.M.T Wongsonegoro. Di sisi lain pencapaian kinerja pada Urusan Kesehatan terlihat dari realisasi kinerja program RKPD dan RPJMD pada tahun 2023 baik, kondisi ini terlihat dari 9 indikator program terhadap target akhir RKPD 2023, terdapat 7 indikator kategori capaian Sangat Tinggi dan 2 sisanya dengan predikat Tinggi. Indikator yang capaiannya dibawah 100% yaitu Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar dan Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar.

Sedangkan, pencapaian kinerja dari 9 indikator program terhadap target akhir RPJMD terdapat 7 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan karena persentase capaian targetnya terhadap target tahun 2023 kurang dari 100% yaitu, Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar sehingga kedepan perlu ditingkatkan upaya pencapaian indikator SPM. Selain itu, Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar juga perlu ditingkatkan dari pemenuhan standar dan penyediaan barang yang berlaku.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut

**Tabel 2.85.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Kesehatan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kabupaten/ Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehatan, RSWN
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehatan
	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	RSUD KRMT WONGSO NEGORO
	Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	RSUD KRMT WONGSO NEGORO
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	%	96,00	100,00	104,17%	ST	98,00	100,00	102,04%	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehatan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

1. Perubahan masalah kesehatan yang ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk (transisi demografi), transisi epidemiologi dan transisi risiko akibat perubahan pola hidup, peningkatan UHH dan perubahan iklim;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah orang tua murid dan pihak sekolah terkait pemeriksaan kesehatan anak dan masih beranggapan bahwa kebutuhan pemeriksaan hanya kebutuhan puskesmas saja;
3. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro ditunjuk oleh Kemenkes RI Sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas Kanker Jantung Stroke Urologi Kepmenkes No HK.01.07.MENKES-1337-2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker. Saat ini, RSUD K.R.M.T Wongsonegoro berada di strata madya. Untuk melangkah pada strata utama, diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai dengan strata utama;
4. Kinerja BLUD pada tahun 2023 mencapai angka 86,37 dengan predikat AA atau baik. Akan tetapi, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022;
5. Target pendapatan retribusi dari RSD K.R.M.T Wongsonegoro yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Upaya rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Penguatan *screening* pada masyarakat dengan intervensi personal MENTARI SEHAT NUSANTARA yaitu upaya untuk mendeteksi adanya gejala, potensi dan tanda-tanda dari suatu penyakit tertentu, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan penanganan secara dini melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau *medical check up*;
2. Intervensi masalah kesehatan tidak lagi berbasis program melainkan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup;
3. Pembangunan gedung unit layanan kanker terpadu beserta sarana, prasarana dan alat kesehatan, serta menambahkan atau mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan profesi yang dibutuhkan dalam pengembangan pelayanan radioterapi;
4. Meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan agar sesuai dengan standar indikatornya;
5. Meningkatkan penghasilan dengan optimalisasi aset dan efisiensi perbelanjaan.

### **3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kinerja dibidang penanganan luas kawasan permukiman kumuh dengan kriteria luasan dibawah 10 Ha pada tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar 23,38% dari target yang ditetapkan sebesar 48,00%. Sedangkan terkait Rumah Tangga yang telah terlayani air minum sebesar 99,67%, meningkat sebesar 0,73% dari tahun 2022 dimana penanganannya disinergikan melalui APBD Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Bantuan keuangan) dan APBD (DAK Fisik).

Pada tahun 2023 capaian persentase rumah tangga bersanitasi adalah sebesar 99,03% dari target 90,86%. Capaian ini diperoleh melalui pembangunan sarana sanitasi di Kota Semarang berupa pembangunan tangki septik skala individual perdesaan di Kelurahan Barusari, Semarang Selatan;

Kelurahan Jomblang, Candisari; Kelurahan Karanganyar Gunung, Candisari; Kelurahan Ngadirgo, Mijen; Kelurahan Purwoyoso, Ngaliyan; Kelurahan Sendangmulyo, Tembalang; Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari; Kelurahan Tegalsari, Candisari; Kelurahan Terboyo Kulon, Genuk serta Pembangunan dan perbaikan MCK Muktiharjo Kidul.

Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2023 urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target RKPD Tahun 2022 maupun target akhir RPJMD dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 15 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah.

Pencapaian target akhir RPJMD penyelenggaraan urusan PUPR tergolong baik, terdapat 12 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD, dan 1 indikator yang perlu upaya keras untuk mencapai. Indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan adalah persentase capaian targetnya terhadap target tahun 2023 kurang dari 100% yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut.


**Tabel 2.86.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana	%	97,86	97,86	100,00%	ST	98,75	97,86	99,10%	ST	▶	Dinas Pekerjaan Umum



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	pengendali banjir dan rob											
	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	%	69,69	99,67	143,02%	ST	59,84	99,67	166,56%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	90,86	99,03	108,99%	ST	92,75	99,03	106,77%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	65,00	65,00	100,00%	ST	68,00	65,00	95,59%	ST	▶	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	%	48,00	59,45	123,85%	ST	100,00	59,45	59,45%	ST	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	74,50	74,50	100,00%	ST	75,75	74,50	98,35%	ST	▶	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Izin usaha jasa konstruksi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang






Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026				OPD	
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
	yang dikeluarkan											
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang dan perizinan bangunan gedung masih belum optimal. Hal ini dikarenakan luas wilayah yang harus ditangani tidak sebanding dengan jumlah SDM di Dinas Penataan Ruang.
2. Spesifikasi material yang terlalu tinggi, sehingga kualitas pekerjaan menjadi tidak optimal;
3. Pemberian bantuan sanitasi untuk individu yang mengalami kenadala aturan pemberian hibah/bansos.

Upaya rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

1. Usulan pemberian kewenangan pada kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Dinas Penataan Ruang dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan bangunan gedung;
2. Koordinasi dengan Pemprov Jateng sebelum pengesahan RKO untuk menentukan lokus pekerjaan karena anggaran bersumber dana Bankeu;
3. Penyesuaian spek teknis atau material pekerjaan sesuai dengan kondisi lokus dan pertimbangan biaya serta peralatan;
4. Perlu disusun Perwal aturan pemberian bantuan sanitasi skala individu.

#### 4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi penanganan rumah layak huni pada tahun 2023 sebesar 98,79%. Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100% sesuai target yang dicapai. Capaian ini diperoleh dari terealisasinya sebanyak 16 perumahan yang telah menyerahkan PSUnya.

Kinerja terkait persentase Ruang Terbuka Hijau adalah sebesar 44,36%,

Jika dilihat dari capaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2023 urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap target RKPD Tahun 2023 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya dalam kategori capaian sangat tinggi.

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tergolong baik, terdapat 6 indikator yang telah mencapai target, dan sebanyak 2 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.87.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya fasilitas kebutuhan perumahan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	99,15	98,79	99,64%	ST	100,00	98,79	98,79%	ST	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	44,31	44,36	100,11%	ST	44,46	44,36	99,78%	ST	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

- a. Pengentasan kawasan permukiman kumuh belum optimal, karena penanganannya masih sektoral;
- b. Data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang, baik milik pribadi maupun swasta belum tersedia;
- c. Belum terselesaikannya pengadaan lahan akibat penolakan oleh warga masyarakat;

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

- a. Melakukan koordinasi antar lintas Perangkat Daerah untuk memetakan kebutuhan dan solusi tepat untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh;
- b. Melakukan inventarisasi data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang, baik milik pribadi maupun swasta;
- c. Sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukannya rencana pengadaan lahan makam. Mencari alternatif lahan di lokasi lain untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga Kota Semarang.


## 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2023 urusan wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap target RKPD Tahun 2023 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 8 diantaranya dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 kategori tinggi, dan 2 kategori sangat rendah yaitu Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran.



Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam kategori baik, sebanyak 6 indikator telah tercapai, sebanyak 3 indikator dengan kategori akan tercapai, dan 2 indikator kategori perlu upaya keras. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.88.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026  
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026				OPD	
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPd Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPd 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	99,31	99,31%	ST	100,00	99,31	99,31%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		SatPol PP
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	10,00	10,00	100,00%	ST	10,00	10,00	100,00%	ST		SatPol PP
Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	%	13,00	45,50	350,00%	ST	27,00	45,50	168,52%	ST		BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DAMKAR
	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100,00	3,48	3,48%	SR	100,00	3,48	3,48%	SR		DAMKAR
	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan	%	100,00	35,90	35,90%	SR	100,00	35,90	35,90%	T		DAMKAR


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD	
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	proteksi kebakaran												
	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DAMKAR	
	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100,00	88,55	88,55%	T	100,00	88,55	88,55%	ST		DAMKAR	

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, antara lain:

- Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran rendah;
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi sehingga dapat mempengaruhi *response time* petugas;
- Kurangnya sarana prasarana dalam melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban bencana;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Semarang;
- Belum optimalnya personil perlindungan masyarakat yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian terhadap pelanggaran Perda.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana di Dinas Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi sembari mengajukan anggaran ke TAPD untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana;
- c. Publikasi yang menyeluruh tentang kanal-kanal aduan yang dapat digunakan masyarakat agar memudahkan mereka saat melaporkan kejadian pelanggaran atau kejadian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban.

## 6. Urusan Sosial


Capaian kinerja Urusan Wajib Sosial untuk indikator kinerja Angka Kemiskinan pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,23% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,25% sesuai dari Data BPS Kota Semarang. Berbanding terbalik jika melihat dari jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin pada Tahun 2022 berjumlah 79,87 ribu orang dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin Kota Semarang kembali mengalami kenaikan menjadi 80,53 ribu orang.

Pada indikator kinerja persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%, untuk indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota capaian target juga sama dengan tahun 2023 yaitu 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2023 pada Urusan Sosial menunjukkan kinerja yang baik. Terlihat dari 7 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, semua indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan sosial dari sebanyak 7 indikator kinerja, sebanyak 6 indikator kategori telah mencapai target akhir dan sebanyak 1 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan sosial disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.89.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Sosial**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Sosial
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	%	78,00	100,00	143,16%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	%	69,85	97,50	139,58%	ST	71,96	97,50	135,49%	ST	▶	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Sosial

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan sosial antara lain :

- Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya fakir miskin;



- b. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berada dirumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan masalah sosial;
- e. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha/CSR yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial yang ada di Indonesia;
- f. Validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki Dinas Sosial.

Untuk rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan verifikasi dan validasi data PPKS;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Sosial;
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan banyak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan memberikan pelatihan baik *in house training* atau pelatihan dalam daerah maupun luar daerah;
- d. Mengadakan sosialisasi mengenai prosedur pelayanan publik kepada masyarakat.

## **7. Urusan Tenaga kerja**

Terjadi penurunan dalam jumlah angkatan kerja sebanyak 146.813 orang dari Tahun 2022, yang sebelumnya mencapai 1.075.827 orang, menjadi 929.014 orang pada Tahun 2023. Di sisi lain, tercatat penurunan jumlah penganggur sebesar 26.080 orang dari Tahun 2022, yaitu dari 81.736 orang menjadi 55.656 orang pada Tahun 2023. Analisis data tersebut memberikan gambaran terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2023, yang dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kota Semarang pada Tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan, yakni sebesar 1,61%, turun dari 7,60% pada Tahun 2022 menjadi 5,99%. Penurunan TPT ini mencerminkan peningkatan lapangan kerja, menghasilkan dampak positif pada pendapatan masyarakat dan berhubungan positif dengan peningkatan tingkat kesejahteraan. Lebih lanjut, perubahan ini juga berpotensi memperkuat struktur ekonomi di wilayah Kota Semarang.

Dengan penurunan angka pengangguran, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menekan tingkat kriminalitas dan kejadian kejahatan di Kota Semarang. Hal ini menggambarkan peran penting data ekonomi dalam membentuk kebijakan yang berdampak positif pada masyarakat dan perkembangan wilayah.

Terdapat penurunan signifikan dalam jumlah angkatan kerja sebanyak 146.813 orang di Kota Semarang, mengurangi total angkatan kerja dari 1.075.827 orang pada tahun 2022 menjadi 929.014 orang pada tahun 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang mengukur persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, menunjukkan penurunan sebanyak 1,54% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,96% menjadi 69,42% pada tahun 2023. Penurunan TPAK ini mengindikasikan bahwa pasokan tenaga kerja di Kota Semarang berkurang, dan hal ini dapat










berdampak langsung pada roda perekonomian kota tersebut. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mengakibatkan pengurangan potensi kontribusi ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan bisnis, dan memengaruhi keberlanjutan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen yang efisien dalam menciptakan lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi yang sesuai.

Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada Tahun 2023 telah mengalami peningkatan sebanyak 4,26% dari Tahun 2022 sebanyak 72,74% menjadi 77% pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kota Semarang semakin banyak yang memiliki keterampilan tertentu dan sudah diuji di depan pengujian keterampilan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensi dan harapannya. Peningkatan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi lokal. Tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan, industri, dan sektor ekonomi lainnya di Kota Semarang. Sebagai hasilnya, upaya untuk terus meningkatkan kualifikasi tenaga kerja perlu terus didorong, baik melalui pelatihan, pendidikan formal, maupun program sertifikasi kompetensi.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan tenaga kerja menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang dievaluasi, seluruhnya dalam kategori pencapaian sangat tinggi. Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja termasuk dalam kategori baik, terdapat 6 indikator termasuk kategori telah tercapai dan sebanyak 1 indikator kategori akan tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan tenaga kerja disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.90.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Tenaga Kerja**



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	65,00	80,95	124,54%	ST	80,00	80,95	101,19%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	77,00	77,00	100,00%	ST	80,00	77,00	96,25%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	66,00	75,80	114,85%	ST	72,00	75,80	105,28%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5,30	66,94	1263,02 %	ST	5,70	66,94	1174,39%	ST		Dinas Tenaga Kerja

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja, antara lain:

- Kendala dalam pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas kerja antara lain masih kurangnya implementasi teknologi digital pada proses pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang dan belum semua Perusahaan yang ada di Kota Semarang melakukan pengesahan kontrak pemagangan dalam negeri melalui Dinas Tenaga Kerja;
- Kendala dalam pelaksanaan program penempatan tenaga kerja melalui *job fair* yaitu lowongan pekerjaan yang tersedia kurang diminati oleh pencari.
- Kendala dalam pelaksanaan program hubungan industrial antara lain terdapat perusahaan yang tidak bersedia untuk dikunjungi oleh Disnaker dikarenakan alasan internal perusahaan maupun karena kunjungan yang dilakukan secara berulang dari Disnaker meskipun dengan tujuan yang berbeda.

Untuk rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

- Melatih Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk lebih cakap dalam menggunakan teknologi digital, untuk nantinya agar dapat diimplementasikan pada setiap pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan oleh UPTD BLK Kota Semarang, serta mendorong Perusahaan yang ada di Kota Semarang melakukan pengesahan kontrak pemagangan dalam negeri melalui Disnaker guna memastikan kesesuaian

antara kebutuhan kompetensi dunia kerja dengan tenaga kerja agar nantinya pencari kerja lebih mudah terserap dalam dunia kerja dan pemberi kerja lebih mudah mendapatkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan;

- b. Melakukan komunikasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan pada berbagai sektor untuk dapat saling memahami kompetensi yang dibutuhkan perusahaan serta minat dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja Kota Semarang;
- c. Menyusun *timeline* agar kegiatan kunjungan ke Perusahaan tidak dilakukan secara terpisah masing-masing bidang. Kegiatan kunjungan ke Perusahaan dapat diikuti oleh perwakilan bidang yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga kunjungan menjadi lebih efisien dan mengurangi alasan penolakan dari Perusahaan.

### 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator program yang di evaluasi, masih terdapat 1 indikator dengan capaian sangat rendah, sedangkan 8 indikator lainnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.







Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam kategori baik, dari sebanyak 9 indikator program, terdapat 8 indikator termasuk kategori telah tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras, yaitu Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.91.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	14,00	25,08	20,86%	SR	10,00	25,08	-50,80%	SR		DP3A
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,01	0,03	300,00%	ST	0,01	0,03	300,00%	ST		DP3A

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya:

- Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan;
- Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

- Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga di setiap Kelurahan di Kota Semarang;
- Peningkatan kualitas layanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan tindak kekerasan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

## 9. Pangan

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2023 pada urusan Pangan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya memiliki kinerja sangat tinggi.

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan pangan termasuk dalam kategori baik, kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator program, terdapat 7 indikator termasuk kategori telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Pangan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.92.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Pangan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi / Kapita	Kkal/Kapita	3.057,00	3.057,00	100,00%	ST	3060,00	3.057,00	99,90%	ST	▲	Dinas Ketahanan Pangan
	Presentase Cakupan Distribusi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang											
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,00	3,40	115,00%	ST	1,00	3,40	-140,00%	SR	▼	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	81,50	98,31	120,63%	ST	83,00	98,31	118,45%	ST	●	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan yaitu pada tahun 2023, BMKG mencatat 63,00% wilayah Indonesia terdampak El Nino, salah satunya Kota Semarang. El Nino adalah fenomena alam saat suhu permukaan air di Samudera Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya, sehingga dapat terjadi perubahan aliran angin dan distribusi suhu di atmosfer. Hal ini berdampak pada sektor pertanian seperti:

- Gangguan musim tanam: peningkatan suhu dan curah hujan yang menyebabkan penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas tanam dan gagal panen;
- Penurunan kualitas pangan: suhu yang tinggi dan kekurangan air menyebabkan tanaman yang tumbuh menjadi tidak ideal dan ukurannya lebih kecil dan rasanya menjadi kurang enak;
- Ketidakstabilan pasar: jumlah panen yang berkurang atau gagal menyebabkan pasokan bahan pangan menjadi berkurang dan terjadi kenaikan harga pangan dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.
- Secara keseluruhan, berbagai hal di atas dapat mempengaruhi petani, pedagang dan konsumen yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketahanan pangan.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

- Kota Semarang bukan termasuk daerah produsen pangan sehingga dengan adanya dampak El Nino, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengambil Langkah strategis berupa Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan konsep *Business to Business*. Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai fasilitator antara Badan Usahan Milik Petani (BUMP) Lumpangsemar Sejahtera Kota Semarang dengan BUMP/Gapoktan di wilayah produsen. Selama tahun 2023 telah melakukan KAD dengan



BUMP di Kabupaten Grobogan, 3 Gapoktan di Kabupaten Klaten, Gapoktan di Kabupaten Sukoharjo dan Gapoktan di Kabupaten Cilacap. Melalui kerjasama tersebut telah menyumbang pasokan bahan pangan sebanyak 223,92 Ton untuk Kota Semarang.


- b. Dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan di Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan rutin melakukan Gerakan Pangan Murah Melalui Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman di 133 titik lokasi. Konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaan Pak Rahman menjadi respon cepat saat terjadi fluktuasi harga pangan di Kota Semarang.
- c. Sebagai upaya mendekatkan akses pangan kepada masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang membentuk jejaring Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar). Pada tahun 2023 telah terbentuk 16 Lumpangsemar Kecamatan dan 64 Lumpangsemar Kelurahan di Kota Semarang serta berhasil menyalurkan 124 ton bahan pangan kepada masyarakat. Terjadinya kuantitas dan kualitas pangan akibat El Nino menyadarkan masyarakat akan pentingnya Stop Boros Pangan sejalan dengan program Badan Pangan Nasional. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menginisiasi Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (Garang Asem) dan Penggunaan Pangan Lokal melalui kegiatan Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi (Pisang Legi) yang telah dilegalisasi melalui Surat Edaran Wali Kota Semarang.

## 10. Pertanian

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian, dalam memberikan dukungan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana ditargetkan seluruh tanah sudah bersertifikat di tahun 2025. Menyikapi hal tersebut di tahun 2023 Kota Semarang meluncurkan Sertifikat Elektronik Dan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah. Peningkatan kinerja lain didapatkannya prestasi dan penghargaan, juara 1 pengelolaan penataan ruang kabupaten/kota terbaik se-Jawa Tengah.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2023 pada urusan Pertanian menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan dari sebanyak 7 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, semua indikator memiliki status pencapaian sangat tinggi. Sedangkan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD semuanya sebanyak 6 indikator telah mencapai target akhir RPJMD dan sebanyak 1 indikator akan mencapai target. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan pertanian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.93.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pertanian**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota Semarang	%	100,00	91,63	91,63%	ST	100,00	91,63	91,63%	ST		Dinas Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Penetapan Tanah Ulayat	Terselesaikannya penetapan tanah ulayat	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Terkelolanya izin membuka tanah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Pernetagunaan Tanah	Terselesaikannya penatagunaan tanah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yaitu:

- Permasalahan pada Urusan Wajib Bidang Pertanahan lebih pada pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dalam membangun digitalisasi data pertanahan masih tergantung pada Kantor Pertanahan, sedangkan kebijakan Satu Peta menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang sebagai walidata geospasial, sehingga perlu adanya sinkronisasi data pertanahan antara peta bidang tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan dengan Peta Dasar Kota Semarang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.
- SiLPA Dinas Penataan Ruang pada Urusan Pertanahan yang besar berasal dari SiLPA Hibah PTKL. Tidak optimalnya serapan anggaran ini disebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan PTKL karena target kinerja dan target anggaran yang ditentukan oleh penerima hibah yaitu Kantor Pertanahan melalui proposal APBD Murni 2024 tidak tercapai. Jika diuraikan secara singkat target SHAT sebanyak 25.000 bidang hanya tercapai 8.181 bidang saja, sedangkan permohonan anggaran hibah



sebesar Rp 15.292.438.000, hanya dapat terserap Rp 5.972.002.987 atau 39,05% saja.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat MoU atau Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait *sharing* data pertanahan, dengan harapan kebijakan Satu Peta akan terwujud yang secara umum akan berdampak pada keberhasilan Reforma Agraria dan redistribusi tanah.
- b. Menyusun kajian Evaluasi pelaksanaan PTSL dan PTKL di tahun anggaran 2024.

## **11. Urusan Lingkungan Hidup**

Kinerja penyelenggaraan pada urusan lingkungan hidup salah satunya ditandai dengan diraihnya penghargaan Sekolah Adiwiyata baik tingkat nasional maupun provinsi, dan juga adanya penghargaan kampung iklim (Proklam) Tingkat Nasional. Pada urusan lingkungan hidup, juga dilakukan program strategis untuk menunjang peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang di antaranya adalah pembatasan penggunaan plastik, secara periodik dilaksanakan *Car Free Day*, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampai dengan saat ini terdapat 225 unit bank sampah di masyarakat, juga Rumah kompos, dan TPS3R.

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator tujuan dari penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup juga meningkat kinerjanya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 56,84 sedangkan IKLH pada tahun 2022 sebesar 51,32. Adapun nilai Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 46,00 berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan di 61 titik pengamatan di 33 sungai baik hulu maupun hilir. Sedangkan nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 80,55 yang datanya diambil dari hasil pantauan pada 4 titik yang mewakili area transportasi, permukiman, perkantoran dan industri. Sedangkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKTL) mencapai 31.63 yang merupakan hasil perbandingan jumlah luas tutupan dengan total luas wilayah di Kota Semarang.

Dalam mendukung upaya pengelolaan sampah Kota Semarang melakukan penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yaitu suatu instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah untuk mengukur keberhasilan daerah dalam mengelola sampah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah. Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana pengangkutan sampah, penganggaran dan proses dalam pengelolaan sampah (sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pemahaman serta implementasi). Dari data diatas menunjukkan bahwa Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) tahun 2022 sebesar 65,40% dari target sebesar 64,38 %.

Berdasarkan hasil laporan Dinas Lingkungan Hidup pengurangan sampah di Kota Semarang mencapai 26,40% pada tahun 2023 terutama pada sampah rumah tangga dan sejenisnya. Ke depan, target akan ditetapkan lebih tinggi lagi pada tahun mendatang yaitu sebesar 3,60% dalam Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) tahun 2023-2025. Hal ini didukung dengan adanya pengadaan acara kegiatan yang diselenggarakan yaitu “Lampah Kita” yang merupakan lomba berbasis video mengenai pengelolaan sampah secara




berkelanjutan. Pada timbulan sampah yang muncul dari setiap kegiatan menjadi latar belakang Dinas Lingkungan Hidup membuat *roadmap* sampah dari timbulan kegiatan Masyarakat dan bagaimana cara pengelolaan sampah dari awal muncul.

Pada tahun 2023 persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA terealisasi sebesar 91%, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 90,50%. Berdasarkan data tahun 2022, timbulan sampah yang dihasilkan Kota Semarang per harinya sebesar 1.300 ton/hari. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah penyumbang terbanyak ada pada sampah rumah tangga sebesar dengan jumlah persentasepampah rumah tangga yang sudah ditangani sebesar 72,10% dari target awala sebesar 72,00%.

Berdasarkan hasil capaian kinerja indikator program terhadap target RKPD tahun 2023 melalui beberapa program yang telah dilaksanakan hal ini berdampak pada kondisi lingkungan sekitar salah satu nya yaitu ada nya perubahan presentase perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca yang masih mengalami peningkatan dengan target awal sebesar 2,00 dan hasil realisasi nya sebesar 21,69. Pada beberapa program yang telah diciptakan hal ini bertujuan untuk menanggulangi beberapa permasalahan lingkungan. Mayoritas program yang telah disusun masih belum mencapai target yang telah di tentukan, Namun dibalik program kerja yang masih belum mencapai target ada hasil presentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan target awal 50,00 dan dengan hasil realisasi nya sebesar 58,00 pada hasil ini sudah tergolong sangat tinggi karna dengan adanya semua program yang ada peran keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam pelaksanaan untuk mencapai target yang dituju.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.94.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Lingkungan Hidup**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Disperkim
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Disperkim
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD	
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	Keuangan SKPD												
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	DLH	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	DLH	
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	59,00	78,07	132,32%	ST	93,00	78,07	83,95%	ST	▶	DLH	
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	87,00	86,15	99,02%	T	66,00	86,15	130,53%	ST	●	DLH	
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha	20,00	24,25	121,25%	ST	50,00	24,25	48,50%	ST	▶	DLH	
	Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	2,00	22,00	1100,00 %	ST	2,00	22,00	1100,00%	ST	●	DLH	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	DLH	

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
man Hayati (Kehati)	man hayati (kehati) di											
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	56,00	53,70	95,89%	ST	62,00	53,70	86,61%	ST		DLH
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85,40	88,23	103,31%	ST	86,00	88,23	102,59%	ST		DLH
	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	50,00	58,00	116,00%	ST	58,00	58,00	100,00%	ST		DLH
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	11,50	17,28	150,26%	ST	13,00	17,28	132,92%	ST		DLH
Program Penanganan Pengaduan	Persentase jumlah pengaduan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Lingkungan Hidup	masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti											
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	91,00	91,00	100,00%	ST	92,00	91,00	98,91%	ST		DLH
	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	27,00	27,10	100,37%	ST	32,00	27,10	84,69%	ST		DLH
	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	72,00	72,10	100,14%	ST	69,00	72,10	104,49%	ST		DLH

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

: Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup:

- Belum optimalnya resiliensi peningkatan terhadap bencana dan perubahan iklim;
- Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya air yang terpadu;
- Belum optimalnya pelestarian dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan akses sanitasi yang memadai.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Mewujudkan peningkatan resiliensi peningkatan terhadap bencana dan perubahan iklim;
- Melaksanakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air yang terpadu;
- Meningkatkan pelaksanaan pelestarian dan perlindungan RTH;
- Meningkatkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

## 12. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menunjukkan hasil persentase program yang telah di susun dengan target capaian yang menunjukkan hasil persentase yang masih fluktuatif, Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP- el maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2023 adalah 99,57% atau, sedangkan sebanyak 0,43% sebanya. Merupakan penduduk yang belum memiliki KTP-el merupakan penduduk yang belum malkukan perekaman KTP-el ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum terekam KTP-el.

Pada hasil persentase anak yang memiliki KIA sebesar 66,38 dengan target sebesar 71,00 hal ini menunjukan adanya ketidak ketercapaian target. Pada semua jenis program yang terbagi ke beberapa indikator kinerja menunjukan bahwa pada program pendaftaran penduduk dan program pencatatan sipil yang perlu adanya pembahasan lanjut mengenai target dengan hasil realisasi yang ada. Hal ini menunjukan bahwa hasil realisasi yang ada perlu adanya solusi dan penanganan untuk mencapai target selanjutnya.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2023 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 10 indikator yang dievaluasi, sebanyak 10 indikator termasuk pada kategori pencapaian sangat tinggi, dan 1 indikator dengan capaian tinggi. Indikator yang capaiannya tinggi yaitu Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 4 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.95.**

### **Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil
	Tersedianya sarana dan prasarana	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD	
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	perkantoran SKPD												
	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil	
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,40	99,57	100,17%	ST	99,70	99,57	99,87%	ST	▶	Dispenduk Capil	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	71,00	66,38	93,49%	ST	80,00	66,38	82,98%	ST	▶	Dispenduk Capil	
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	97,20	98,25	101,08%	ST	98,00	98,25	100,26%	ST	●	Dispenduk Capil	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil	
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil	

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▶: Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼: Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terdapat kendala dan permasalahan yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

a. Belum optimalnya capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) belum dapat mencapai target dari target tahun 2023 sebesar 71% tercapai 66,45%.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terdapat Upaya



yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah :

- a. Melaksanakan pelayanan terintegrasi Akta Kelahiran, KK dan KIA bagi bayi yang baru lahir untuk meningkatkan capaian KIA;
- b. Bekerjasama dengan SMP Swasta (bagi anak kelas VII s/d IX) dan SMA Swasta (bagi anak kelas X) yang ada di Kota Semarang untuk inovasi penerbitan KIA yaitu KIA *goes to school*;
- c. Pendaftaran KIA dapat dilakukan melalui IKD (Identitas Kependudukan Digital) atau aplikasi SiD'nOK dan dicetak secara mandiri Kios Adminduk di Dinas dan 16 TPDK Kecamatan;
- d. Kerjasama pemanfaatan KIA dengan 9 mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Dengan menunjukkan KIA akan mendapatkan diskon menarik di 9 Mitra KIA tersebut.

### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu kinerja dalam penyelenggaraan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditandai dengan adanya lomba kelurahan mandiri yang menjadi wadah evaluasi dan mendorong serta memberi motivasi kepada pemerintahan kelurahan. Pada pelaksanaan lomba ini melibatkan 15 kelurahan dan 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2023

Upaya untuk peningkatan tertib administrasi kelurahan, telah dilakukan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa melalui pelatihan penyusunan profil kelurahan kepada peserta yang berasal dari 177 Kelurahan. Selain itu dilakukan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.


Sedangkan salah satu bentuk dukungan pemanfaatan TTG dimasyarakat, Pemerintah Kota Semarang mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Tahun 2023 di Lingkungan Perkotaan yang merupakan Upaya pemeratakan dan meningkatkan Pembangunan di seluruh Indonesia. Pada Pembangunan Masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai mutu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang adil dan Sejahtera.

Berdasarkan hasil tabel evaluasi yang sudah dilaksanakan bahwa hasil dari program yang sudah disusun menunjukkan bahwa semua target dan reliasasi nya sudah terlaksana sesuai target dengan status Sangat Tinggi (ST). Sehingga dari hasil relisasi yang ada akan terus dipertahankan di tahun kedepannya

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.96.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Administrasi	Persentase Kelurahan yang	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD	
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
Pemerintahan dan Desa	menerapkan sistem informasi												
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	DP3A	

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Masih dijumpai kendala dalam penyelenggaraan kegiatan, di antaranya masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan. Adapun tindak lanjut yang akan ditempuh adalah dengan peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

#### 14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





Pada tabel hasil evaluasi capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan jumlah 4 program dengan jumlah 6 indikator kinerja yang hasil realisasinya masih terus mengalami naik turun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan 3 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Pada indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini dilakukan agar tidak terjadinya over population sehingga perlu adanya control dan sosialisai terkait jumlah keturunan di setiap anggota keluarga yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan setiap keluarga.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97.

#### Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPDP Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Disdalduk KB
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Disdalduk KB


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Disdalduk KB
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,31	138,00%	ST	0,50	0,31	62,00%	ST		Disdalduk KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,00	1,75	87,50%	T	2,00	1,75	87,50%	ST		Disdalduk KB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	60,12	69,51	115,62%	ST	60,42	69,51	115,04%	ST		Disdalduk KB

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Pemasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB diantaranya:

- Masih adanya keyakinan di masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki dan adanya keyakinan bertentangan dengan norma agama;
- Masih adanya keyakinan di masyarakat bahwa KB pria berdampak pada penurunan keperkasaan pria;
- Masyarakat masih menunda untuk mengikuti KB pasca salin karena menunggu masa nifas selesai;
- Penyelenggaraan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan UPPKA) masih dirasakan;
- Kualitas kampung KB belum semuanya masuk klasifikasi berkelanjutan;
- Sekolah siaga kependudukan belum maksimal, untuk SMP diampu oleh Kota dan SMA diampu oleh provinsi.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- Pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan memperkuat kerjasama dengan mitra;
- Meningkatkan edukasi terkait KB pria dan menjadikan akseptor KB pria sebagai *role model*;
- Meningkatkan edukasi melalui tenaga kesehatan yang melayani persalinan dan pendampingan pasca salin;
- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, UPPKA;
- Meningkatkan kolaborasi dan intervensi ke kelurahan secara berkala;
- Meningkatkan kolaborasi dengan provinsi dan melibatkan *genre* dalam pelaksanaan sekolah siaga kependudukan.

## 15. Urusan Perhubungan

Pada data terakhir pertengahan tahun 2023 yang menyebutkan bahwa adanya peningkatan jumlah penumpang BRT sebesar 4.903.878 orang dengan 112 armada bus pada 12 koridor dan sebanyak 235 unit bus serta feeder yang beroperasi dengan 8 rute perjalanan, 45% coverage pelayanan, 210 km Panjang rute yang ditempuh dan 333 jumlah halte eksisting.

Tingkat intensitas kendaraan bermotor Kota Semarang bertambah ribuan kendaraan atau sekitar 6-10 persen per tahun. Hal ini berpengaruh dengan adanya kemacetan di jam-jam tertentu hingga munculnya perlintasan sebidang pada perlintasan kereta api. Berbeda dengan kondisi di Tengah kota yang bisa mencapai 10%, pinggiran 6% yang Dimana pada tahun 2023 salah satu contohnya yaitu di Jalan Pandanaran sebanyak 3.000 kendaraan per jam yang melintas

Pada hasil evaluasi dari tabel capaian kinerja indikator urusan perhubungan menghasilkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 mengalami peningkatan pada target yang telah ditentukan hal ini akan terus dilanjutkan untuk RPJMD ditahun yang akan datang. Pada urusan perhubungan ini menjadi salah satu tolak ukur sebagaimana efektivitas dan kondisi sistematis dari program dan indikator kinerja yang telah di dilaksanakan dalam upaya pengintegrasian aksesibilitas yang mampu selaras dengan kondisi eksisting yang ada. Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.98.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perhubungan**



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perhubungan
	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perhubungan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perhubungan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Persentase pelaksanaan manajemen	%	64,22	69,32	107,94%	ST	68,15	69,32	101,72%	ST	●	Dinas Perhubungan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Angkutan Jalan (Llaj)	dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota											
	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	%	88,00	90,06	102,34%	ST	94,00	90,06	95,81%	ST	▶	Dinas Perhubungan
	Jml trayek BRT	trayek	13,00	12,00	92,31%	ST	15,00	12,00	80,00%	ST	▶	Dinas Perhubungan
	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	%	33,00	31,68	104,00%	ST	30,00	31,68	94,40%	ST	▶	Dinas Perhubungan
	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	%	7,00	5,23	74,71%	S	7,00	5,23	74,71%	ST	▶	Dinas Perhubungan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

: Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya rute baru pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang sebagai efek positif meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal dalam aktivitas sehari-hari;
- Meningkatnya aktivitas ekonomi di jalan mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah:

- Penambahan pelayanan BRT pada ruas jalan yang belum terlayani angkutan umum massal;
- Pemasangan perlengkapan jalan dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

## 16. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, ditandai diantaranya dengan diterimanya penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Pemerintahan Kota Semarang memperoleh nilai tertinggi sejumlah 99,63 dalam kategori Informatif Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan laporan yang masuk selama tahun 2023 melalui kanal-kanal yang tersedia telah diterima laporan sebanyak 6.129 laporan dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.99.**  
**Laporan melalui Kanal-Kanal yang Diterima**

<b>NO</b>	<b>SUMBER</b>	<b>JUMLAH</b>
1	<i>Website</i>	667
2	SMS	8
3	Android SP4N	31
4	Datang Langsung	0
5	<i>WhatsApp</i>	3.068
6	Instagram	159
7	Twitter	169
8	<i>Mobile App</i> SAPA MBAK ITA	956
9	LAPORGUB	1.071
<b>TOTAL JUMLAH INPUTAN</b>		<b>6.129</b>

Dengan lima terbesar OPD yang sering mendapatkan Laporan adalah Dinas Perhubungan, Dinas pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman, PDAM Tirta Moedal, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dari seluruh laporan tersebut sebagian besar telah selesai ditangani. Berdasarkan tabel laporan melalui kanal-kanal yang diterima bahwa jumlah sumber sebanyak 9 sumber dengan total jumlah inputan 6.129 yang menjadi sarana penghubung dan fasilitas untuk wadah dalam komunikasi dan informatika.

Selain publikasi kebijakan pemerintah, pada tahun 2023 juga dilaksanakan pengelolaan Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang, Kampanye #darurat112aja, pengadaan kamera CCTV RT sejumlah 8.734 kamera, juga Terlaksananya launching Aplikasi Klepon.in dan Semarangkota.CSIRT serta launching Indigospace SDK Semarang untuk pembinaan dan memfasilitasi pengembangan ekosistem digital, termasuk startup, komunitas kreatif, dan UMKM.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2023 termasuk dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang dimiliki, semua indikator sebanyak 6 indikator termasuk padan kategori capaian sangat tinggi. Namun jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 2 indikator telah tercapai dan 4 indikator lainnya belum mencapai target akhir RPJMD.

Hasil capaian secara kuantitatif yang sudah masuk ke status Sangat Tinggi (ST) dengan jumlah hasil yang sudah memenuhi target yaitu 100,00 yang sudah terlaksana. Sehingga pada evaluasi RPJMP ditahun mendatang jumlah target akan akan terus di pertahankan dan dilanjutkan nilai nya dikarenakan urusan komunikasi dan informatika yang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi seluruh Masyarakat untuk melakukan interaksi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100.

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ ).

Pemasalahan yang ditemui di antaranya:

- Perlunya kebutuhan pengelolaan fasilitas fisik pendukung pusat data dan layanannya;
- Layanan internet monitoring CCTV RT belum terpenuhi untuk semua RT di Kota Semarang;
- Free Wifi di ruang publik banyak yang error jaringannya;
- Belum maksimalnya penanganan hoax di Kota Semarang;
- Terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang;
- Ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti: *hacking*, *phising*, *deface* dan sebagainya;
- OPD tidak memahami proses bisnis dan tidak memiliki dokumentasi saat berkeinginan membuat aplikasi sehingga menyulitkan proses develop sistem;
- OPD tidak mau untuk melakukan update baik informasi maupun sistem yang telah dibangun sebelumnya meskipun fungsi OPD sebagai Pengelola dan Produsen Data.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan fasilitas fisik pendukung pusat data dan layanannya;
- b. Pemenuhan Layanan internet monitoring CCTV RT secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada;
- c. Pemeliharaan *free wifi* di ruang publik dilaksanakan secara rutin;
- d. Belum maksimalnya penanganan hoaks di Kota Semarang;
- e. Perlunya koordinasi yang insentif dengan badan vertikal di Kota Semarang terkait pelayanan informasi;
- f. Melakukan Test sistem secara periodik (*pentest* dan *vulnerability test*) serta menerapkan pengamanan disisi jaringan *router* penggunaan VPS dan *firewall* pada *data center*;
- g. Melakukan inventarisasi sekaligus dokumentasi terkait data dan informasi SPBE dan *smart city*, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat optimal untuk pelayanan publik dan peningkatan indeks;
- h. Melakukan integrasi sistem pemkot dan juga mendorong penerapan *single sign on* serta aplikasi umum serta melakukan optimasi layanan sistem aplikasi khusus untuk mendukung program pembangunan dan kegiatan *smart city* dan SPBE melalui *rebranding* dan pengelolaan manajemen database yang terstruktur dan sistematis.

## **17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung program inovasi berupa pembiayaan melalui kredit wibawa bagi Koperasi dan pelaku UMKM serta melaksanakan Fasilitasi kemitraan antara koperasi dan UMKM dan melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha bersama Gerai Oleh-oleh Bandara A.Yani Semarang, Hotel santika, Carrefour, Superindo, Pangan Mart dan SRC(Sampoerna Retail Community) untuk memperluas akses jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

Di samping itu juga dikembangkan sebuah system pendataan UMKM di kota Semarang melalui SI-UMI (Sistem Informasi Usaha mikro) untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan UMKM di Kota Semarang.

Pada beberapa jenis koperasi yang dibedakan mulai dari Koperasi Produsen, Koperasi Konseumen dan Koperasi Simpan Pinjam yang tersebar di Kota Semarang menunjukan bahwa adanya aktivitas perekonomian yang beragam dengan jumlah yang terus bertambah dengan fungsi yang akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat.

Dengan meningkatnya persentase Koperasi yang Berkualitas berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset serta meningkatnya persentase koperasi aktif, diharapkan mampu mewujudkan koperasi yang mandiri, Akuntabel, sehat dan berkesinambungan serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya guna pemerataan pembangunan perekonomian. Demikian pula dengan meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha dan meningkatnya persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, diharapkan akan mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan dampaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Melalui pengawasan koperasi yang dilakukan pada tahun 2023 diharapkan pengelolaan Koperasi di Kota Semarang akan semakin baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku serta meningkatkan Akuntabilitas koperasi dan meningkatkan kepercayaan anggotanya terhadap kinerja koperasi sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya Koperasi yang Sehat sebesar 56,25% dirasa mampu mendorong koperasi lainnya menjadi kategori sehat dari aspek permodalan, manajemen, efisiensi, likuiditas dan kemandirian, sehingga akan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi serta berperan dalam Perekonomian Daerah.

Demikian pula pelaku usaha mikro yang dibina dan berhasil meningkatkan omsetnya (sebesar 47,89%) akan memperluas akses pemasaran pelaku usaha mikro Kota Semarang baik secara *online* maupun *offline* sehingga dapat meningkatkan omset usahanya serta mendorong usaha mikro yang meningkat. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.101.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	3,00	0,58	19,33%	SR	3,00	0,58	19,33%	SR	▼	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengawasan	Persentase pemeriksaan	%	50,00	50,68	101,36%	ST	50,00	50,68	101,36%	ST	●	Dinas Koperasi



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Dan Pemeriksaan Koperasi	dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi											dan Usaha Mikro
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	31,00	50,75	163,71%	ST	35,00	50,75	145,00%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10,00	45,52	454,20%	ST	10,00	45,77	457,70%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	%	1,00	2,10	210,00%	ST	2,00	2,10	105,00%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	26,00	27,43	105,50%	ST	30,00	27,43	91,43%	ST	▶	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	3,00	6,02	200,67%	ST	3,00	6,02	200,67%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Umkm	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20,00	32,45	162,25%	ST	25,00	32,45	129,80%	ST	●	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM, masih dijumpai beberapa permasalahan, diantaranya:

- Masih rendahnya skala usaha, produktivitas dan daya saing koperasi;
- Masih banyaknya produk usaha mikro yang belum memiliki sertifikasi produk seperti PIRT, Halal dan HAKI;
- Belum optimalnya pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan media sosial atau *marketplace* sebagai media pemasaran, serta pemanfaatan manajemen usaha dalam pengelolaan usaha;

- d. Masih terbatasnya informasi pembiayaan dan akses kemitraan, baik pemasaran maupun pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

- d. Meningkatkan fasilitasi akses koperasi terhadap permodalan, Penerapan teknologi dan inovasi serta kemitraan untuk pengembangan usaha koperasi;
- e. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi PIRT, Halal, HAKI produk usaha mikro secara berkelanjutan;
- f. Melaksanakan *workshop* dan pelatihan manajemen kewirausahaan serta pemasaran online bagi pelaku usaha mikro;
- g. Meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi kemitraan pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro.

## 18. Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Semarang Kembali menggelar event tahunan Semarang Bussiness Forum atau SemBiz yang berkolaborasi dengan Bank Jateng pada acara ini Kota Semarang menawarkan beragam potensi investasi di Kota Semarang berdasarkan data DPM-PTSP Kota Semarang nilai investasi yang tercatat 26,50 triliun capaian terbanyak dalam 4 tahun terakhir pasca pandemi. Pada kemudahan perizinan membuat investasi di Kota Semarang mengalami peningkatan. Selain itu posisi Kota Semarang yang startegis karena berada di Tengah pulau Jawa.

Pada catatan investor yang sudah menanamkan modal nya di Kota Semarang dalam bentuk hote, mal, dan pusat perbelanjaan, serah tahun depan akan adanya rencana sinergitas dan kolaborasi dengan oerorganisasi peragkat daerah (OPD) yang akan mamu mendorong peluang investasi di Kota Semarang, Selanjutnya adalah rencana investasi yang bergerak pada sektor UMKM yang akan mampu mendongkrak produk UMKM dengan bentuk kolaborasi yang kan menambah daya jual.

kembali memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Predikat “A” Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian PAN-RB, Peringkat Pertama *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Kategori Perizinan Pemerintah Kota Tingkat Nasional dan Peringkat Pertama Publikasi Standar Pelayanan Terbanyak Tingkat Nasional.

Nilai investasi Kota Semarang yang terus meningkat di setiap tahunnya, pada hasil investasi ini memapu menarik peluang yang menjadi dorongan serta dukungan dalam kegiatan dan pembangunan Kota Semarang.

Hasil Kinerja pada Urusan penanaman modal diukur dari pertumbuhan maupun nilai investasi di Kota Semarang. Berikut nilai investasi Kota Semarang dari tahun 2020 sampai dengan 2023:

**Tabel 2.102.**  
**Nilai Investasi Kota Semarang Tahun 2019-2023**

Nilai Investasi Kota Semarang (Rp)			
2020	2021	2022	2023
18.209.772.344.035	22.538.063.406.487	24.662.877.213.739	27.205.700.000.000

Sumber: DPMPTSP, 2024

Nilai investasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kembali meningkat pasca pandemi. Pada tahun 2023 nilai investasi telah mencapai Rp27.205.700.000.000,-.

Pada hasil tabel capaian kinerja indikator program yang dengan hasil realisasinya sudah melebihi dari jumlah target yang telah ditentukan hasil ini juga didukung dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam Upaya sarana pendukung dengan yang sebanyak 6 kegiatan pada program ini menjadi sarana dalam mendorong Tingkat penanaman modal yang akan di investasikan di Kota Semarang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.103.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Penanaman Modal**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas PM dan PTSP
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas PM dan PTSP
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas PM dan PTSP
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas PM dan PTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	Penanam Modal	3,691,00	4,513,00	122,27%	ST	3744,00	4,513,00	120,54%	ST	●	Dinas PM dan PTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	492,00	556,00	113,01%	ST	654,00	556,00	85,02%	ST	▶	Dinas PM dan PTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ijin Terbit sesuai SP	%	95,00	95,00	103,16%	ST	96,00	98,00	102,08%	ST	●	Dinas PM dan PTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	2,00	2,00	100,00%	ST	2,00	2,00	100,00%	ST	●	Dinas PM dan PTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	%	96,00	100,00	104,17%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas PM dan PTSP

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Adanya isu aksesibilitas lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang berada di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kota sementara pelayanan perizinan dan investasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:




- a. Penyelenggaraan pelayanan keliling guna memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di kecamatan, kelurahan, pasar tradisional dan rumah sakit;
- b. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara masif;
- c. Mengajukan permohonan usulan lokasi Mal Pelayanan Publik Kota Semarang yang strategis dekat dengan pusat ekonomi, perdagangan dan jasa.

### 19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan pemuda dan olahraga tahun 2023 baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi. Jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 5 indikator telah tercapai sesuai target, dan 2 indikator lainnya akan mencapai target.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.104.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	35,00	35,00	100,00%	ST	50,00	35,00	70,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	jumlah Atlet prestasi	Jumlah	1.197,00	1.466,00	122,47%	ST	1.334,00	1.466,00	109,90%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	Lapangan	5,00	5,00	100,00%	ST	5,00	5,00	100,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka	Kegiatan	47,00	47,00	100,00%	ST	58,00	47,00	81,03%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

: Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, antara lain:

- Sarana dan prasarana yang belum maksimal, sehingga masih ada beberapa cabang olahraga yang harus mencari tempat latihan guna meningkatkan skill SDM atlet;
- Kekurangan data terkait wirausaha muda;
- Pindahnya beberapa atlet Kota Semarang ke kota lain;
- Belum adanya *homebase* organisasi kepemudaan atau komunitas kepemudaan di Kota Semarang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:


- Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Semarang secara berkala;
- Pembentukan kelompok wirausaha muda di masing-masing kecamatan di Kota Semarang;
- Peningkatan kesejahteraan atlet di Kota Semarang;
- Mengaktifkan kembali ruang-ruang di Gor Manunggal Jati guna kegiatan organisasi kepemudaan.

## 20. Statistik

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan statistik tahun 2023 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator kinerja mempunyai kategori capaian sangat tinggi, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dapat mencapai target akhir RPJMD. Dalam penyelenggaraan Urusan Statistik, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya: Belum terpenuhinya kapastitas SDM dalam menangani pengelolaan data statistik sektoral di tiap perangkat daerah; dan Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya dalam Portal Satu Data.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan statistik disajikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.105.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPd Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Statistik**


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPd Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPd 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan statistik, diantaranya:

- Belum tersedianya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Daerah;
- Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya ke Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang;
- Belum optimalnya kapasitas SDM masing-masing OPD terkait tugas dan fungsinya sebagai walidata pendukung dan produsen data statistik sektoral;
- Belum optimalnya penyusunan metadata data statistik sektoral masing-masing OPD dan belum optimalnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistik.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antaranya adalah:


- Menyusun landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Daerah;
- Melakukan integrasi data melalui aplikasi yang tersedia atau yang dimiliki oleh produsen data/OPD dengan Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- Optimalisasi kapasitas SDM pengelola data melalui Bimbingan Teknis;
- Pendampingan dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik.

## 21. Urusan Persandian

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Persandian, khususnya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan: Kegiatan Launching Semarangkota CSIRT dan Terbentuknya Tim CISRT Tingkat Kota Semarang, Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan persandian tahun 2023 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 1 indikator telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan persandian disajikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.106.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Persandian**


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026				OPD	
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Persandian, diantaranya adalah belum adanya lisensi keamanan informasi yang handal dan masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM bidang persandian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengadaan lisensi keamanan informasi yang handal dan pengiriman pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM bidang persandian.

## 22. Urusan Kebudayaan

Sebagai indikator tujuan pada urusan kebudayaan adalah meningkatnya Kearifan Budaya Lokal, dimana pada tahun 2023 mempunyai capaian kinerja sebesar 70.49%, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 62,41%. Komposit dari indikator ini adalah tingkat Pelestarian warisan budaya dengan kinerja sebesar 78.93% dan Tingkat Apresiasi terhadap kesenian budaya lokal sebesar 62.06%.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan kebudayaan tahun kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator dalam kategori sangat tinggi.

Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD dari 7 indikator sebagai alat ukur kinerja, terdapat 6 indikator yang sudah mencapai target akhir, sedangkan 1 indikator dalam kategori akan tercapai sesuai dengan tahapan prosesnya. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.107.

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kebudayaan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	%	20,00	40,99	204,95%	ST	35,00	40,99	117,11%	ST	●	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	%	20,00	46,36	231,80%	ST	35,00	46,36	132,46%	ST	●	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	%	77,85	78,93	101,39%	ST	100,00	78,93	78,93%	ST	▶	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Wajib Kebudayaan antara lain sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemasaran kebudayaan yang menyasar masyarakat dari wilayah Kedungsepur yang *notabene* masyarakat dari wilayah tersebut merupakan pangsa pasar yang sering berkunjung ke Kota Semarang.
- Belum optimalnya kolaborasi antara kampung tematik sebagai daya wisata dengan perintisan wisata baru;



- c. Belum optimalnya pengeluaran wisatawan untuk pembelian atraksi wisata, termasuk di dalamnya seni budaya;
- d. Belum optimalnya tata kelola daya tarik wisata yang dikelola masyarakat;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat upaya yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Perlunya pengembangan pasar melalui sosial media dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
- b. Sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang untuk perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata;
- c. Pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata;
- d. Peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan;
- e. Peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.

### **23. Urusan Perpustakaan**

Kinerja pada urusan perpustakaan dapat ditunjukkan oleh Nilai Tingkat Gemar Membaca Kota Semarang pada tahun 2023 yakni di angka 69,17%. Adapun angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi dengan interval sebagai berikut: 0-20 (Sangat rendah); 20,01-40 (Rendah); 40,01-60 (Sedang); 60,01-80 (Tinggi); 80,01-100 (Sangat Tinggi). Adapun survei dilakukan dengan mengambil sampel masyarakat kota Semarang dengan rentang usia 15-68 tahun. Adapun variable tingkat Gemar Membaca terdiri dari Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet. Indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang tahun 2023 sebesar 70,87.

Keberhasilan kinerja tersebut di atas didukung oleh kegiatan diantaranya: pembinaan Perpustakaan Sekolah sebanyak 90 lokasi perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang diharapkan bersama-sama dalam hal peningkatan literasi. Dari aspek peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan diselenggarakan Bimtek pustakawan, pengembangan Bahan Pustaka dengan penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan sebanyak 200 eksemplar melalui hibah, kerjasama, CSR, hingga pengadaan. Kegiatan lainnya berupa Nonton Bareng Komunitas Sahabat Mata, Inovasi SiBuca (Sistem Informasi Buku Bercerita), Sosialisasi/Bimtek tentang naskah kuno dan lainnya.

Pencapaian kinerja RKPD urusan perpustakaan pada tahun 2023 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, 4 indikator dalam capaian sangat tinggi dan 1 indikator dalam capaian tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator telah mencapai target, dan 1 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.108.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan**  
**Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026**  
**Urusan Perpustakaan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	86,19	86,19%	T	100,00	86,19	86,19%	T		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1,00	0,93	93,00%	ST	1,00	0,93	93,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

: Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi oleh Urusan Wajib Perpustakaan adalah belum adanya tenaga perpustakaan tingkat kelurahan dan kecamatan sesuai standar yang menyebabkan perpustakaan pada tingkat kelurahan dan kecamatan tidak dapat dikelola sesuai standar nasional perpustakaan. Selain itu, akreditasi pada perpustakaan di Kota Semarang belum dilakukan secara menyeluruh. Pada perpustakaan tingkat kelurahan dan kecamatan belum menganggarkan bahan bacaan.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 berupa memberikan surat edaran terkait pelaksanaan akreditasi perpustakaan, mengusulkan kebutuhan pegawai pengelola perpustakaan tingkat kelurahan dan kecamatan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.


#### 24. Urusan Kearsipan

Kinerja pada urusan kearsipan dapat ditunjukkan capaian tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban pada tahun 2023 adalah mencapai 59,80%. Selain itu adalah tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah di angka 80,76%. Dukungan yang dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut diantaranya adalah peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan manfaat memudahkan untuk masyarakat ataupun pemerintah itu dalam hal penggunaan manfaat arsip.

Untuk mencapai kinerja di atas, upaya lain yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan persentase jumlah arsip musnah sebesar 100%, dimana sebelumnya dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun. Selain itu juga dilaksanakan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator terawatnya dan terjaganya arsip yang bernilai guna sekunder. Arsip yang bernilai guna sekunder memiliki peran dalam memberikan edukasi pendidikan, bahan untuk penelitian serta pengambilan keputusan. Berkaitan dengan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tentang standar operasional prosedur penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Hal ini penting dilakukan karena arsip yang bersifat tertutup merupakan arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip, serta menjadi pedoman pengelola arsip dalam penerbitan izin terhadap akses arsip yang bersifat tertutup. Sehingga terdapat batasan-batasan terhadap akses arsip yang dinilai dapat membahayakan kestabilan negara serta meminimalisir penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan arsip.

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Kearsipan pada tahun 2023 dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD, semuanya telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada tahun 2023 urusan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.109.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	persentase jumlah arsip musnah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	60,00	78,20	130,33%	ST	90,00	78,20	86,89%	ST	●	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi pada urusan bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

- Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih belum menganggarkan sarana prasarana guna mendukung kegiatan pengolahan kearsipan;
- Aplikasi SRIKANDI masih belum efektif dikarenakan server yang ada masih memiliki kendala yang menyebabkan penciptaan arsip masih mengalami keterlambatan dalam pendistribusian surat;
- Dalam penyampaian arsip statis melalui JIKN terkendala dikarenakan aplikasi tersebut masih mengalami perbaikan.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, akan dilakukan tindak lanjut:

- Untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan tidak dianggarkannya sarana prasarana kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang akan menerbitkan Surat Edaran Tentang Penganggaran sarana dan prasarana kearsipan;
- Dikarenakan aplikasi SRIKANDI hanya memiliki server terpusat, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang berupaya melakukan kordinasi dengan ANRI dan Kemenkominfo untuk menyelesaikan permasalahan pada aplikasi SRIKANDI;
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang akan berupaya menciptakan aplikasi penyampaian arsip statis guna mengatasi kendala pada aplikasi JIKN.

## 25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2023 kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 3055,90 Ton, meningkat dibandingkan tahun 2022, sehingga diasumsikan Kesejahteraan Nelayan meningkat dengan bertambahnya hasil tangkapan sehingga pendapatan nelayan meningkat. Kinerja lainnya adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya mencapai 3.845,95 Ton, selain itu juga penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan dari yang ditargetkan 4 kasus dengan realisasi 0 kasus, hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha perikanan memiliki tingkat kesadaran yang semakin baik dari sebelumnya untuk mentaati peraturan perikanan yang berlaku. Produksi ikan olahan mencapai 17.557,29 Ton/Thn, hal ini mengindikasikan dengan meningkatnya produksi perikanan dimungkinkan bertambah pula jumlah pelaku usaha pengolah perikanan dan hasil olahan ikan dan juga dengan meningkatnya konsumsi ikan berarti kesadaran masyarakat semakin lebih baik untuk mengkonsumsi ikan sebagai kebutuhan untuk mencegah stunting dan gizi buruk.

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 baik, kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu juga disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator telah mencapai target akhir RPJMD dan 4 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Yaitu Peningkatan Kapasitas SDM, Produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya dan Produksi ikan olahan dimana capaiannya terhadap target RPJMD bernilai <80%. Kondisi kinerja ini dimungkinkan karena tahun 2023 merupakan tahun kedua untuk mencapai target akumulasi selama 5 tahun periode RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan kelautan dan perikanan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.110.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Kelautan dan Perikanan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perikanan
	Peningkatan Kapasitas SDM	%	30,00	30,00	100,00%	ST	100,00	30,00	30,00%	S	▼	Dinas Perikanan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perikanan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	3.055,90	3.067,45	100,38%	ST	15.557,91	3.067,45	19,72%	SR	▼	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	3.845,95	3.896,25	101,31%	ST	19865,96	3.896,25	19,61%	SR	▼	Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	kasus	4.00	0,00	200,00%	ST	1,00	0,00	200,00%	ST	●	Dinas Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi ikan olahan	ton	17.557,29	211.622,47	1.205,33%	ST	88.477,00	211.622,47	238,18%	ST	●	Dinas Perikanan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Cuaca ekstrem pada tahun 2023 mengakibatkan debit air yang kurang, perubahan suhu ekstrem antara siang dan malam sehingga menyebabkan banyak kematian pada ikan dan banyak timbul penyakit ikan akibat stres pada ikan;
- b. Cuaca ekstrem menyebabkan hasil tangkapan ikan oleh nelayan menurun, sehingga pendapatan nelayan juga menurun;
- c. Pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan tidak bisa mengakomodasi seluruh nelayan yang ada di Kota Semarang;
- d. Sebagian pengolah mengalami kendala dalam memasarkan hasil olahan ikan yang sudah diproduksi.

Tindaklanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya:

- a. Memberikan himbauan untuk penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dengan menjaga kualitas air media budidaya serta penggunaan obat ikan dengan bijak;
- b. Bantuan sembako untuk nelayan;
- c. Pemberian bantuan secara bergantian;
- d. Dilakukan pelatihan pemasaran online, serta dilakukan pelatihan pengemasan yang baik dan bernilai jual.

## 26. Urusan Pariwisata

Hasil kinerja Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun 2023 dapat ditunjukkan diantaranya dengan jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (5.405.696 orang), Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (9.282 orang), Tingkat Hunian Akomodasi (57,04%), Lama Tinggal Wisatawan (1,49 hari).

Hal ini didukung dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata melalui pelayanan prima untuk pelaku wisata dan penatausahaan kelembagaan serta pengelolaan desa wisata. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung oleh Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Aktivitas yang dilakukan yaitu bimbingan teknis *citytour guide* untuk pemandu wisata, bintek pelayanan prima untuk pelaku wisata dan bintek penatausahaan kelembagaan untuk pokdarwis.

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.




Aktivitas yang dilakukan yaitu apresiasi pokdarwis Jawa Tengah, gelar desa wisata Jawa Tengah, lomba pokdarwis, pelatihan digitalisasi: branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, *homestay*, kuliner, souvenir dan fotografi, pelatihan pemandu geowisata, pelatihan pemandu wisata budaya, pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi wisata, pembinaan pokdarwis, pembuatan aplikasi SIEMPOK dan sosialisasi *branding* kepariwisata.

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan pariwisata pada tahun 2023 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang pariwisata, semuanya sebanyak 3 indikator termasuk kategori sangat tinggi. Demikian pula jika disandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator program telah



tercapai target dan 1 indikator yang akan tercapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.111.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pariwisata**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	%	70,00	72,03	102,90%	ST	100,00	72,03	72,03%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pilihan Pariwisata antara lain sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemasaran yang dilakukan pada masyarakat Kedungsepur yang *notabene* kunjungan wisata di Kota Semarang juga disokong oleh masyarakat pada daerah tersebut;
- Belum optimalnya kolaborasi antara kampung tematik sebagai daya tarik wisata dengan perintisan wisata baru;
- Belum optimalnya pengeluaran wisatawan untuk pemberian atraksi wisata, termasuk di dalamnya seni budaya.
- Belum optimalnya tata kelola daya tarik wisata yang dikelola masyarakat;
- Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

- Mengadakan jasa konsultasi dengan menyusun kajian target pasar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Semarang;
- Mendorong kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya untuk berkarya atau tampil pada penyelenggaraan atraksi wisata di desa wisata dan di daya tarik wisata;
- Memfasilitasi menciptakan paket wisata dan berkolaborasi antar daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan;
- Lebih banyak melibatkan masyarakat dalam menawarkan produk paket wisata kepada Biro Perjalanan Wisata supaya masyarakat lebih berkolaborasi dalam kepariwisataan;

e. Menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

## 27. Urusan Pertanian

Mendasarkan pada Perwal No. 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, Program Urban Farming telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, baik pada skala gedung pemerintahan, industri, sampai dengan pemanfaatan pekarangan & lahan kosong yang bersifat privat. Dan dampak yang dirasakan telah memberikan pengaruh positif terhadap berbagai isu ketahanan pangan, inflasi, penanganan stunting, bahkan pada pengurangan kemiskinan ekstrem di wilayah.

Kinerja pertanian terkait Produktivitas pertanian per ha per tahun (6,85 ton/ha); jumlah kawasan pertanian perkotaan (177 kelurahan); presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (100%); dan jumlah sentra produk unggulan pertanian (5 kawasan) pada tahun 2023 menunjukkan kinerja positif.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah produksi hasil peternakan yang mencapai 38,104.59 ton, dimana permintaan daging meningkat sehingga mendorong peningkatan pemotongan sapi, ayam, maupun babi. Meskipun hasil produksi pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada tahun 2022, indikator ini tetap telah mencapai target RKPDP 2023. Sedangkan indikator produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada tahun 2023 berhasil meningkat mencapai 52,512.85 ton, sedangkan produktivitas pertanian per ha mencapai 6.85 ton/ha.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama dari yang ditargetkan 28 kelompok mencapai 28 kelompok, dibandingkan relisasi tahun 2022 sebesar 27 kelompok.

Pencapaian kinerja RKPDP urusan pertanian pada tahun 2023 termasuk pada kondisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 8 indikator program telah mencapai target akhir RPJMD dan sebanyak 1 indikator belum mencapai target yaitu indikator jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan pertanian disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.112.**

### **Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPDP Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Pertanian**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Pertanian
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Pertanian



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	perkantoran SKPD											
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	produksi hasil peternakan	Ton	35.922,00	38.104,59	106,08%	ST	36.822,00	38.104,59	103,48%	ST	●	Dinas Pertanian
	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	50.647,76	52.512,85	103,68%	ST	51.284,00	52.512,85	102,40%	ST	●	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton	6,38	6,85	107,37%	ST	6,38	6,85	107,37%	ST	●	Dinas Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5,00	-88,21	1.764,20 %	ST	5,00	-88,21	1.764,20 %	ST	●	Dinas Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	75,00	100,00	133,33%	ST	85,00	100,00	117,65%	ST	●	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	Kelompok	28,00	29,00	103,57%	ST	36,00	29,00	80,56%	ST	▶	Dinas Pertanian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian di antaranya adalah:

- a. Ketersediaan prasarana pertanian yang masih kurang, serta banyak prasarana yang ada kondisinya memerlukan perbaikan/rehabilitasi;
- b. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang masih menjadi ancaman di tahun 2023. Wabah yang ada menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para peternak karena menurunkan produksi dan produktivitas ternak bahkan juga menyebabkan kematian ternak sehingga menurunkan pendapatan peternak;
- c. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih terus terjadi menyebabkan keterbatasan lahan untuk produksi sehingga produksi tanaman pangan menurun dari tahun ke tahun;
- d. Kualitas kelembagaan petani yang masih rendah di mana dari 432 kelompok tani yang ada hanya 29 kelompok (6,71%) yang kualitasnya tinggi (berada pada kelas madya dan utama). Selain itu Tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relative sangat rendah di mana pada Sebagian besar kelompok tani hanya beberapa anggota saja yang berperan aktif;
- e. Rantai pemasaran produk pertanian perkotaan belum terbentuk sehingga produksi dari kelompok-kelompok tani perkotaan belum dapat dipasarkan dengan optimal;
- f. Adanya fenomena iklim el nino yang menyebabkan bulan kering berlangsung lebih lama di Sebagian besar wilayah Indonesia. Adanya fenomena iklim ini menyebabkan curah hujan menurun dengan signifikan sehingga persediaan air untuk pertumbuhan tanaman menjadi berkurang bahkan pada beberapa kasus tanaman mengalami kekeringan dan gagal tanam. Hal ini berakibat pada penurunan produktivitas tanaman secara total dan berimbas pada pendapatan petani;
- g. Penurunan kualitas tanah sebagai akibat penggunaan bahan kimia yang terus-menerus. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan dosis anjuran pemakaian dapat menyebabkan tertumpuknya residu yang berakibat pada pengerasan struktur tanah. Hal ini menyebabkan produktivitas lahan menjadi berkurang.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud, adalah:

- a. Meningkatkan prasarana pertanian melalui Pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi terutama prasarana penyediaan air irigasi dan jalan pertanian.
- b. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pengendalian penyebaran wabah PMK dan LSD melalui upaya-upaya preventif maupun kuratif antara lain melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) bersama pihak-pihak terkait vaksinasi, biosecurity kandang ternak, pengawasan lalu lintas ternak dan pengobatan ternak.
- c. Optimalisasi lahan pekarangan, lahan kosong maupun lahan yang belum dimanfaatkan serta mengembangkan budidaya pertanian di lahan sempit.
- d. Meningkatkan kapasitas petani maupun kelembagaan petani dengan mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kelompok tani.
- e. Mengembangkan pemasaran produk-produk hasil petani melalui pemasaran online, dan fasilitasi MoU antara petani dengan pelaku usaha BUMS, maupun Koperasi Petani yang dapat bertindak sebagai offtaker yang akan menyerap hasil panen petani.
- f. Antisipasi fenomena iklim ekstrim elnino melalui: (a) melakukan pemetaan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan untuk kemudian dirumuskan penyelesaian yang tepat, (b) menyiapkan adaptasi kekeringan melalui penerapan teknologi seperti penggunaan benih tahan kering, melakukan buka tutup saluran irigasi sebagai upaya penghematan air

irigasi, memperbanyak daerah-daerah pemanenan air di hulu, (c) mendorong petani untuk mengakses KUR yang merupakan asuransi usaha tani untuk mengantisipasi kerugian petani akibat adanya gagal panen.

- g. Meningkatkan Kesehatan dan mengembalikan kesuburan tanah melalui praktek-praktek pertanian berkelanjutan (pertanian organik, pertanian regenerative, pertanian terintegrasi) sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian.

## 28. Urusan Perdagangan

Indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yang belum mencapai target adalah persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif.

Kinerja lainnya dilakukan kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dengan melaksanakan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaporkan pada sistem yang terintegrasi secara elektronik serta memenuhi target prosentase alat UTTP bertera-tera ulang.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan perdagangan pada tahun 2023 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator keberhasilan pembangunan bidang perdagangan, sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan 2 indikator berpredikat Tinggi. Jika disandingkan terhadap pencapaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 6 indikator program yang telah memenuhi target akhir RPJMD dan 3 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator dengan capaian Sangat Rendah pada tahun 2022 adalah Nilai ekspor non migas dengan capaian terhadap target hanya sebesar 37,97%, namun pada tahun 2023 indikator ini mengalami peningkatan pencapaian Sangat Tinggi dengan persentase 118,2%. Hal ini salah satunya dikarenakan pada tahun 2023 perekonomian telah pulih dan dampak permintaan ekspor negara Eropa meskipun perang Ukarina dengan Rusia masih terjadi. Realisasi ekspor tahun ini mengalami peningkatan bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.113.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perdagangan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Persentase tersedianya sarana	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	prasarana perkantoran											
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	22,00	18,00	81,82%	T	28,00	18,00	64,29%	R	▶	Dinas Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3,99	40,19	1.007,27%	ST	3,80	40,19	1.057,63%	ST	●	Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	Milyar dollar	1.615.736.908,00	2.130.728.974,61	131,87%	ST	1.817.484.281,00	2.130.728.974,61	117,24%	ST	●	Dinas Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	76,00	83,75	110,20%	ST	91,00	83,75	92,03%	ST	▶	Dinas Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	%	30,00	30,00	100,00%	ST	60,00	30,00	50,00%	SR	▶	Dinas Perdagangan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 38\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan diantaranya:

- Kurangnya pemahaman para pedagang tentang aset barang milik daerah;
- Perkembangan teknologi dan permintaan pasar membuat alat-alat ukur digital dari luar berkembang sangat pesat sehingga menggeser penggunaan alat-alat ukur produksi dalam negeri (timbangan mekanik);
- Berkurangnya potensi UTTP (meter taksi) yang saat ini tergantikan dengan transaksi berdasarkan aplikasi (online);
- Kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran di beberapa kota terdapat kendala kurangnya jumlah pengunjung disebabkan beberapa faktor diantaranya cuaca hujan dan bersamaan dengan pameran sejenis di lokasi lain;
- Kegiatan operasi pasar yang dianggarkan sebesar Rp.4.900.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena Dinas Perdagangan tidak mempunyai juklak

juknis dan dasar hukum untuk melakukan penjualan langsung barang kebutuhan pokok bersubsidi.

Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan:

- a. Perlunya sosialisasi (pembinaan pedagang) bahwa gedung pasar yang telah dibiayai dengan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara pedagang, pengelola pasar dan Pemerintah untuk memelihara bangunan tersebut;
- b. Mendorong produsen alat ukur untuk dapat mengikuti perkembangan pasar;
- c. Berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi terkait dengan penggunaan meter taksi online sebagai dasar pengenaan tarif;
- d. Promosi dagang difokuskan pada kegiatan promosi yang berskala internasional dan bersinergi dengan pelaku usaha untuk lebih meningkatkan daya saing produk serta memberikan pelatihan bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan kampanye produk dan pelatihan dasar ekspor;
- e. Dalam rangka pengendalian harga telah disusun aplikasi untuk melakukan pemantauan harga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah sehingga informasi tentang harga kebutuhan pokok dapat di informasikan secara *realtime*, serta bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan stabilisasi harga dan penetrasi pasar jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran.

## **29. Urusan Perindustrian**

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2023 termasuk baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 6 indikator pada kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan 2 indikator kategori akan mencapai target akhir RPJMD. Tidak ditemukan adanya usaha keras untuk meraih target kinerja.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian meneruskan usahanya di tahun kemarin yaitu mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industri yang memadai dapat memberikan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM sebesar 88%.

Hal ini didukung dengan ketercapaian pertambahan IKM sebanyak 26 IKM atau 0,71% dengan target 0,5%. Dengan capaian ini diharapkan usaha terus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah, serta optimalisasi Sentra IKM. Memperluas konektivitas alur pemasaran/penjualan produk sehingga dapat meningkatkan daya saing bagi para pelaku IKM. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan perindustrian disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.114.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Urusan Perindustrian**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
	Persentase tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
	Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	%	88,00	88,00	100,00%	ST	100,00	88,00	88,00%	ST	▶	Dinas Perindustrian
	Persentase Pertambahan IKM	%	0,50	0,71	142,00%	ST	0,50	0,71	142,00%	ST	●	Dinas Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	%	4,00	2,73	68,25%	S	4,00	2,34	68,25%	ST	▶	Dinas Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Informasi Industri	%	0,50	1,85	370,00%	ST	0,50	1,85	370,00%	ST	●	Dinas Perindustrian

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▶ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Urusan Prindustrian di antaranya:

- a. Pelaku IKM yang masih kesulitan dalam pemasaran produknya;
- b. Keterampilan teknik produksi dan manajemen yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku IKM;
- c. Adanya Pelaku IKM yang belum peduli untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk dalam menjalankan usahanya;

- d. Pelaku Industri belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, di antaranya adalah:


- Memberikan fasilitasi galeri yang memadai sebagai tempat pameran produk dan pemasaran, sekaligus tempat berproduksi bersama;
- Memberikan fasilitasi link and match dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan digital marketing untuk mendukung pemasaran produk IKM;
- Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan Pelaku IKM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memproduksi produk yang berkualitas;
- Memberikan sosialisasi dan monitoring legalitas secara berkala sehingga pelaku industri tergerak untuk mendapatkan legalitas usahanya sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya legalitas usaha ini maka pengusaha merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus;
- Memberikan sosialisasi dan melakukan monitoring data industri untuk mendorong pelaku industri memberikan data yang memadai terkait usahanya sehingga Dinas Perindustrian bisa memberikan pembinaan secara baik dan tepat.

### 30. Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja RKPD sekretariat daerah pada tahun 2023 termasuk cukup baik, namun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari kategori pencapaian OPD dengan 13 indikator keberhasilan dengan 7 indikator kategori sangat tinggi, 3 indikator kategori tinggi, dan 3 indikator kategori sedang. Jika disandingkan dengan target kinerja RPJMD 8 indikator telah mencapai target akhir dan akan tercapai sebanyak 4 indikator. Namun, diperlukan usaha keras untuk meningkatkan 1 indikator berupa angka indeks pelayanan publik. Peningkatan yang signifikan terjadi pada OPD melakukan survey kepuasan masyarakat, dari target 39 (tahun 2022) meningkat menjadi 51 (tahun 2023) dengan ketercapaian sejumlah 41 atau 80,39%. Jika disandingkan dengan target RPJMD, telah melebihi jumlah tersebut. Melihat status akhir yang cukup turun dari tahun sebelumnya, diperlukan adanya stabilitas pengadaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan sarana prasarana. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada sekretariat daerah disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.115.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Sekretariat Daerah**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	75,00	75,00%	S	100,00	75,00	75,00%	ST		Bagian Rumah Tangga

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Administrasi Pemb
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Keuangan
	Peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian TU
	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	OPD	51,00	41,00	80,39%	T	39,00	41,00	105,13%	ST	●	Bagian Organisasi
	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	%	100,00	75,00	75,00%	S	100,00	75,00	75,00%	ST	▲	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Pelayanan Publik	%	118,00	105,00	88,98%	T	90,00	105,00	116,67%	ST	●	Bagian Organisasi
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial masyarakat	Kegiatan	9,00	7,00	77,78%	T	9,00	7,00	77,78%	ST	▲	Bagian Kesra
	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah dan Kepala Daerah	%	40,00	45,00	112,50%	ST	20,00	45,00	225,00%	ST	●	Bagian Otda dan Kerjasama
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Tapem
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	ST	1,00	1,00	100,00%	ST	●	Bagian Administrasi Pemb
	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata,	%	100,00	75,00	75,00%	S	100,00	75,00	75,00%	ST	▲	Bagian Pengadaan BJ



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa											
	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Perekonomian dan SDA

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah diantaranya:

- Jumlah Raperda yang disetujui DPRD belum sesuai target dikarenakan pembahasan raperda tergantung keaktifan perangkat daerah pengusul
- Regulasi yang selalu berubah dari pemerintah pusat pada tahun berjalan
- Adapun rencana tindak lanjut atas permasalahan tersebut diantaranya:
- Bagian Hukum aktif melakukan pendampingan dalam proses pembahasan secara efektif agar dapat mengakomodir semua usulan raperda untuk dapat dibahas dan disetujui.
- Selalu berupaya berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah lain guna optimalisasi pelaksanaan regulasi.

### 31. Sekretariat DPRD

Pencapaian kinerja RKPD sekretariat DPRD pada tahun 2023 termasuk baik. Kondisi ini dilihat dari peningkatan status indikator yang hampir seluruhnya telah mencapai target akhir RPJMD. Berdasarkan target kinerja RPJMD terdapat 5 indikator dalam capaian kinerja, didapatkan 4 indikator kategori sangat tinggi telah mencapai dan 1 indikator kategori tinggi akan tercapai yaitu Jumlah Raperda yang disetujui DPRD.

Dari sebanyak 16 Perda yang direncanakan, terdapat 14 Perda yang terealisasi dan mendapatkan persetujuan DPRD. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari 53,33% pada tahun 2022 menjadi 93,33% pada tahun 2023 terhadap target akhir RJPMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada Sekretariat DPRD disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.116.**

#### **Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Sekretariat DPRD**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
	persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	Raperda	16,00	14,00	87,50%	T	15,00	14,00	93,33%	ST		Sekretariat DPRD

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

: Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD diantaranya:

- Kurangnya kesiapan materi dari pengusul;
- Adanya perubahan per undang-undangan dari tingkat pusat;
- Padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Adapun rencana tindak lanjut atas permasalahan tersebut diantaranya:

- Meningkatkan kuantitas pembahasan raperda dengan melibatkan lebih banyak lagi narasumber dan transport publik hearing yang disiapkan setiap kali pembahasan raperda dan lebih mengikuti perkembangan informasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
- Mengantisipasi kondisi yang berkembang melalui peningkatan kecermatan dalam proses kegiatan sehingga dapat lebih baik dalam pencapaian tingkat kinerja serapan anggaran;
- Mengkoordinasikan penjadwalan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang.

### 32. Unsur Penunjang Perencanaan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Perencanaan pada tahun 2023 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator program yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan unsur penunjang Perencanaan, dimana seluruh indikator program memiliki capaian sangat tinggi. Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya adalah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah, serta Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada unsur penunjang perencanaan disajikan pada tabel berikut ini.




**Tabel 2.117.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Perencanaan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	%	100,00	99,83	99,83%	ST	100,00	99,83	99,83%	ST		Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	99,17	99,17%	ST	100,00	99,17	99,17%	ST		Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	101,40	101,40%	ST	100,00	101,40	101,40%	ST		Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,25	100,25%	ST	100,00	100,25	100,25%	ST		Bappeda

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*) : Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )  
 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain: diluncurkannya SIPD-RI untuk perencanaan tahun 2024 yang masih dalam proses pengembangan, serta menerapkan beberapa perubahan nomenklatur yang berpeluang mengakibatkan inkonsistensi antara dokumen strategis dengan dokumen operasionalnya. Permasalahan lainnya adalah terkait rangkaian persiapan penyusunan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dimana pedoman Penyusunan RPJPD dari Pemerintah Pusat belum keluar sampai dengan akhir tahun 2023. Selain itu, dengan dilaksanakannya Pilkada serentak pada tahun 2024 harus dilakukan percepatan pencapaian kinerja, mengingat periode pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 akan habis pada tahun 2025, sehingga diperlukan skala prioritas dalam penganggaran pembangunan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi rencana tindak lanjut diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun SIPD-RI Kemendagri secara intensif, mengadakan sosialisasi proses entry SIPD-RI serta pendampingan bagi seluruh perencana OPD.
- b. Terkait penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 akan menggunakan rujukan yang sudah ada terlebih dulu, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ataupun draft Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan RPJPD; melakukan koordinasi secara aktif dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah; mengadakan Workshop penyusunan RPJPD; serta melaksanakan FGD Series RPJPD.
- c. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pencapaian target indikator OPD dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

### 33. Unsur Penunjang Keuangan

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Perencanaan pada tahun 2023 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan unsur penunjang keuangan dengan indicator sangat tinggi, tinggi, dan sangat rendah. Jika disandingkan dengan target RPJMD 6 indikator kategori sangat tinggi telah tercapai, 1 kategori tinggi akan tercapai, dan 1 kategori rendah butuh usaha lebih. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan dengan presentase ketercapaian 20% dari target RPJMD menjadi 100%, khususnya pada program penunjang urusan pemerintahan daerah. Namun, masih perlu peningkatan kinerja pada program pengelolaan keuangan daerah, karena masih jauh dari target akhir RPJMD. Meskipun begitu, pendapatan asli daerah telah mencapai 97% dari target total Rp 2,19 triliun baik dari pajak, retribusi, maupun dana transfer. Evaluasi dapat dilakukan dalam skema penerimaan PAD, khususnya optimalisasi sektor retribusi, sebab sebagai besar sektor pendapatan telah memenuhi target.

Pada APBD Perubahan Kota Semarang, pendapatan tercatat sebesar Rp 5,4 triliun dan belanja Rp 5,7 triliun sehingga ada defisit Rp266 miliar, namun langsung ditutup dengan surplus pembiayaan. Surplus itu didapatkan dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp318 miliar dikurangi pengeluaran

pembiayaan Rp52 miliar sehingga terdapat pembiayaan netto Rp266 miliar. Diakuinya, pada APBD Perubahan tahun ini terdapat sejumlah pergeseran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, terutama menghadapi musim kemarau dampak dari fenomena El Nino. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan keuangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.118.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Keuangan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,22	5,08	-216,39%	SR	0,62	5,08	-780,65%	SR		BPKAD
	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	%	100,00	97,73	97,73%	ST	100,00	97,73	97,73%	ST		BPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	%	80,48	100,00	124,25%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	7,56	75,60%	T	10,00	7,56	75,60%	ST		BAPENDA

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

: Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan di tahun anggaran 2023, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya yaitu :

- a. Dikarenakan Standar Harga Satuan (SHS) disusun pada tahun anggaran sebelumnya maka beberapa komponen menjadi tidak relevan harganya pada saat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- b. Sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Belanja Daerah, ASB Non Fisik menjadi penting demi mencapai perencanaan Belanja Daerah yang efektif dan efisien. Akan tetapi, belum semua komponen atau paket belanja ditetapkan dalam peraturan ASB Non Fisik mengingat komponen yang

akan dianalisis tersebut tidak fleksibel dan terlalu kompleks. Selain itu, penyusunan Peraturan Wali Kota ASB Non Fisik membutuhkan proses yang sangat panjang salah satunya yaitu perlunya dilakukan kajian lebih mendalam.

- c. Adanya perubahan sistem SIPD dari monolitik menjadi *microservices* menyebabkan perubahan proses penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan pemanfaatan KKPD untuk mempercepat pencairan dan mengurangi *idle cash* belum optimal karena adanya kendala-kendala teknis yang harus diwadahi dalam penatausahaan KKPD dalam SIPD RI.
- e. Dalam rangka inventarisasi tanah dan bangunan belum terdapat petunjuk teknis yang memadai tentang pelaksanaan sensus barang menyebabkan pengurus barang mengalami kesulitan Ketika menghadapi permasalahan di lapangan.
- f. Tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Reklame disebabkan oleh adanya pembatasan pemasangan reklame di tengah kota (selain *videotron*); banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan reklame *videotron*; makin banyaknya reklame yang dipasang di daerah pinggiran kota yang nilainya lebih kecil dibandingkan pemasangan di tengah kota; banyaknya titik reklame yang terpasang yang termasuk dikecualikan dalam pengenaan pajak reklame (alat peraga kampanye); rendahnya nilai sewa reklame (NSR) yang lebih dari satu dasawarsa tidak mengalami perubahan.
- g. Tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena belum maksimalnya proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan khususnya Pajak Penerangan Jalan PLN disebabkan Pemerintah Kota Semarang belum memiliki akses langsung untuk monitoring data Objek Pajak maupun jumlah pemakaiannya.
- h. Tidak tercapainya penerimaan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) disebabkan oleh BPHTB bersifat transaksional, sehingga apabila belum ada transaksi atau penandatanganan akta maka BPHTB belum dapat dibayarkan; Terdapat transaksi oleh wajib pajak Pakuwon yang belum melaksanakan transaksi jual beli tahun 2023 secara keseluruhan dengan realisasi 13 objek pajak dari 71 objek pajak; Adanya perubahan kebijakan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebelum tahun 2023 objeknya adalah peralihan hak, namun untuk program PTSL tahun 2023 sesuai dengan kebijakan BPN berubah menjadi pengakuan hak sehingga apabila atas objek tersebut berupa tanah yasan tidak ada peralihan hak dan atau tidak ada perubahan (nama pemilik tanah) maka tidak ada pembayaran BPHTB.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, solusi pemecahan dan rencana tindak lanjutnya diantaranya yaitu:

- a. Melakukan perbandingan harga melalui survei lapangan maupun melihat harga di *e-commerce* dilanjutkan dengan penyesuaian SHS.
- b. Melakukan pendataan dan pemilahan komponen belanja yang mendesak dan banyak digunakan oleh SKPD sehingga rincian penganggaran bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan seragam.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar menu-menu dalam SIPD RI dapat terfasilitasi secara optimal sesuai kebutuhan.
- d. Melakukan desk, sosialisasi terhadap SKPD terkait pelaksanaan dan pembayaran KKPD serta koordinasi intensif dengan Bank Jateng dan Bank BNI.



- e. Untuk inventarisasi peralatan dan mesin akan disusun petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi BMD yang memadai.
- f. Dengan berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 akan dilakukan penyesuaian tarif NSR sehingga terdapat kenaikan potensi dari sektor pajak reklame.
- g. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 bahwa ada kenaikan tarif yang mengakibatkan bertambahnya potensi pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan atau yang saat ini dikenal sebagai PBJT Tenaga Listrik Tahun 2024 yang mempunyai potensi kenaikan sebesar 32% pada Tahun 2024.
- h. Rencana tindak lanjut sektor BPHTB adalah akan mendorong BPN untuk mempercepat proses penyerahan sertifikat PTSL dan akan mengkomunikasikan dengan pihak PPAT dan Pakuwon untuk mempercepat proses transaksi jual beli.

### 34. Unsur Penunjang Kepegawaian

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara hasil penilaian mandiri tahun 2023 telah mencapai target RPJMD yaitu di angka 83 dan tahun ini telah mencapai di angka 85,40 dengan aspek penilaian Kualifikasi (21,35), Kompetensi (34,16), Kinerja (25,62), dan Disiplin (4,27). Disisi lain Nilai Sakip BKPP Kota Semarang ditargetkan mencapai angka 82, realisasi yang terjadi hingga akhir tahun 2023 telah mencapai angka 78,21, sehingga diperlukan peningkatan ekstra untuk mencapai angka tersebut mengingat RPJMD berakhir di tahun 2025. Dalam mendukung keberlangsungan tenaga kerja, seluruh jabatan fungsional diharapkan dapat bersertifikat kompetensi, hal ini dibuktikan dengan angka rasio yang masih 77% di tahun 2023.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang kepegawaian pada tahun 2023 tergolong baik, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, dengan rata-rata memiliki ketercapaian tinggi hingga sangat tinggi dan 1 indikator rendah pada rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, hanya 2 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 8 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada unsur penunjang kepegawaian disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.119.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Kepegawaian**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja	%	100,00	78,00	78,00%	T	100,00	78,00	78,00%	ST		BKPP




Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPd Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPd 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	perangkat daerah											
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	82,00	82,00%	T	100,00	82,00	82,00%	ST		BKPP
	Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	%	100,00	90,00	90,00%	T	100,00	90,00	90,00%	ST		BKPP
Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	239,43	145,20	60,64%	R	300,00	145,20	48,40%	ST		BKPP
	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	%	100,00	97,94	97,94%	ST	100,00	97,94	97,94%	ST		BKPP
	Persentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	99,00	100,00%	ST	99,00	99,00	100,00%	ST		BKPP
	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	99,00	99,97	100,98%	ST	99,00	99,97	100,98%	ST		BKPP
	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	%	81,00	81,00	100,00%	T	82,00	81,00	98,78%	ST		BKPP
	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	19,19	55,00	286,61%	ST	25,00	55,00	220,00%	ST		BKPP
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	100,00	100,00%	T	100,00	100,00	100,00%	ST		BKPP

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$



\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )  
 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Secara umum permasalahan utama dalam pencapaian program dan kegiatan yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama tahun 2023 adalah dinamisnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menunggu petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan.

Terkait permasalahan tersebut di atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait aturan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini urusan kepegawaian melalui Konsultasi, rapat-rapat koordinasi baik langsung atau melalui daring.


### 35. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2023 telah menyelenggarakan pengembangan sumber daya aparatur didukung dengan pengembangan kompetensi teknis sebanyak 4 kali dan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sebanyak 1 kali. Hal ini didukung dengan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mencapai target yaitu 100% (37 orang) dan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebanyak 711 orang di tahun 2023.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang pendidikan dan pelatihan pada tahun 2023 tergolong cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, mempunyai capaian sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, 1 indikator yang menjadi ukuran kinerja memiliki kinerja akan mencapai target akhir RPJMD. Secara status tidak terjadi perubahan dari tahun sebelumnya, namun pada presentase akhir terjadi peningkatan dari tahun 2022 yaitu saat 63,64%.

**Tabel 2.120.**



**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	%	40,00	40,00	100,00%	ST	55,00	40,00	72,73%	ST		BKPP

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Secara umum permasalahan utama dalam pencapaian program dan kegiatan yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama tahun 2023 adalah dinamisnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menunggu petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan.

Terkait permasalahan tersebut di atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait aturan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini urusan kepegawaian melalui Konsultasi, rapat-rapat koordinasi baik langsung atau melalui daring.


### 36. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari aspek Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Inovasi dan Teknologi. Dalam pencapaian kegiatan berupa presentase pemenuhan penelitian dan pengembangan pada bidang-bidang terkait telah memenuhi target di akhir tahun 2023 sejumlah 100%. Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator dimaksud telah mencapai target akhir RPJMD.

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.121.**



**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelibngan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq :100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan di tahun anggaran 2023, terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut di antaranya terkait hambatan dalam pengumpulan data untuk penilaian Indeks Inovasi Daerah, yaitu belum terdapat payung hukum inovasi daerah yang terintegrasi, belum lengkapnya pendokumentasian (data-data administrasi) terkait inovasi daerah, belum disusunnya pedoman teknis dan SOP dari setiap inovasi daerah.

Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan di tahun anggaran 2023, yaitu terkait hambatan dalam pengumpulan data untuk penilaian Indeks Inovasi Daerah sebagaimana tersebut di atas, solusi pemecahan dan rencana tindak lanjutnya yaitu penyusunan *draft* payung hukum inovasi daerah yang terintegrasi, koordinasi pendokumentasian (data-data administrasi) inovasi OPD dan koordinasi penyusunan pedoman teknis dan SOP inovasi OPD. Ketiga solusi pemecahan dan rencana tindak lanjut tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan melibatkan OPD yang melaksanakan inovasi daerah.

### **37. Unsur Penunjang Pengawasan**

Kinerja fungsi pengawasan di daerah, diantaranya dapat ditunjukkan dengan Tingkat Maturitas SPIP, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Level Kapabilitas APIP, dan Indeks Manajemen Risiko yang berdampak pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Daerah. Peran pengawasan ini berhasil meraih penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2022 kali ketujuh berturut-turut dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Capaian) tingkat maturitas SPIP Tahun 2023 berhasil menyentuh angka 3,01 dari target 3,04 (levelling) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun tanpa dokumentasi yang memadai. Nilai maturitas ini tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2023 mempertahankan level dari tahun sebelumnya yaitu pada level 3 (integrated). Selanjutnya, penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan “Persentase Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) berhasil menyumbangkan 2,82 indeks.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang pengawasan pada tahun 2023 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 6 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya sebanyak 6 indikator semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, seluruhnya telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.122.**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Pengawasan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d. Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Inspektorat
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Inspektorat
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Inspektorat
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	leveling	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST	●	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,04	3,01	99,01%	ST	3,00	3,01	100,33%	ST	●	Inspektorat

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD ● : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ ) ▲ : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

▼ : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Dalam pelaksanaan Unsur Penunjang Pengawasan terdapat permasalahan yang dihadapi, di antaranya banyaknya *mandatory* dari pusat untuk Inspektorat Daerah yang di luar kebijakan pengawasan yang tidak direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

Rencana tindak lanjut terhadap hambatan serta permasalahan yang ada, adalah Inspektorat Kota Semarang menyikapi dengan memasukkan *mandatory* dari pusat pada PKPT 2024.

### 38. Unsur Kewilayahan

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2023 pada unsur kewilayahan baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua

indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 3 indikator akan mencapai target akhir RPJMD dengan angka diatas 90%.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.123.**



**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Kewilayahan**


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	99,57	99,57%	ST	100	99,57	99,57%	ST		16 Kecamatan
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	99,55	99,55%	ST	100	99,55	99,55%	ST		16 Kecamatan
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	99,75	99,75%	ST	100	99,75	99,75%	ST		16 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	92	94,83	103,08%	ST	91,06	94,83	104,21%	ST		16 Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	98	98,38	100,39%	ST	96,38	98,38	102,08%	ST		16 Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	15	20,37	135,79%	ST	10	20,37	200,00%	ST		16 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	73,56	91,06	123,79%	ST	90	91,06	101,18%	ST		16 Kecamatan

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq : 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Jika terjadi cuaca ekstrim, dengan kondisi geografis dan topografi yang bervariasi, berpotensi terjadinya pohon tumbang, bencana tanah longsor, banjir dan genangan air, bervariasi di wilayah kecamatan;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanganan bencana banjir maupun bencana lainnya;
- c. Kondisi Jalan yang naik turun, rusak mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan bahkan rawan kecelakaan;
- d. Dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Covid-19 dan terjadinya kenaikan inflasi mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat menurun sehingga kemampuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga menurun;
- e. Masih adanya balita stunting, kemiskinan ekstrem, dan disabilitas di wilayah yang memerlukan penanganan;
- f. Masih perlu adanya peningkatan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Kurangnya kesetaraan gender, berdampak pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan mayoritas diikuti oleh peserta perempuan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis melakukan pemangkasan pohon secara berkala, normalisasi sungai dan saluran serta pembangunan talud di wilayah rawan longsor, Polsek untuk dapat mengatur lalu lintas khususnya di pagi hari karena intensitas laju kendaraan yang padat;
- b. Kegiatan jemput bola pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Penerapan bapak asuh untuk balita stunting, sosialisasi pola asuh anak dalam rangka pencegahan stunting dan pemberian bantuan secara berkala kepada bayi penderita stunting;
- d. Adanya pembinaan aparatur ataupun bimbingan teknis meningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Upaya koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan pelebaran jalan, selain itu dengan pemasangan rambu larangan melintas pada waktu tertentu;
- f. Meningkatkan Mengadakan sosialisasi untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat agar dapat sigap dalam menangani bencana;
- g. Perlu adanya rencana aksi agar dalam kegiatan pelatihan bisa seimbang peserta laki-laki dan perempuan, misalnya dengan memilih waktu dan tempat yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan agar partisipasi laki-laki dan perempuan meningkat, pemilihan materi kewirausahaan yang tepat dengan memperhatikan isu gender, penetapan proporsi peserta laki-laki perempuan, penetapan narasumber yang sesuai

### **39. Unsur Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan melalui Indeks Demokrasi (95,18), Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) (83.63), Indeks Pengamalan Pancasila 3,204, Indeks Kebebasan Sipil 98,20, Indeks Kinerja Ormas 66,098, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama 81,73.



Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2023 pada unsur kewilayahan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, seluruh indikator telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada Fungsi Pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.124.**

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik**



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026				OPD	
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)		Status ***)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks	2,00	3,20	160,00%	ST	2,00	3,20	160,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil	%	64,00	98,20	153,44%	ST	70,00	98,20	140,29%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	57,00	66,10	115,96%	ST	60,00	66,10	110,17%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	71,00	81,73	115,11%	ST	72,00	81,73	113,51%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan	Persentase kemampuan	%	82,00	95,35	116,28%	ST	85,00	95,35	112,18%	ST		Badan Kesatuan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2023	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2023	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbud hankam											Bangsa dan Politik

Sumber: eMonev Perencanaan 2024

\*) ST:  $X > 90\%$ ; T:  $90\% \geq X > 75\%$ ; S:  $75\% \geq X > 65\%$ ; R:  $65\% \geq X > 50\%$ ; dan SR:  $X \leq 50\%$

\*\*\*) ST:  $X > 36\%$ ; T:  $36\% \geq X > 30\%$ ; S:  $30\% \geq X > 24\%$ ; R:  $24\% \geq X > 20\%$ ; dan SR:  $X \leq 20\%$

\*\*\*): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ( $X \geq 100\%$ )  : Akan Tercapai ( $100\% > X \geq 40\%$ )

 : Perlu Upaya Keras ( $X < 40\%$ )

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2023 masih menemui beberapa permasalahan, antara lain:

- Lunturnya nilai-nilai kebangsaan akibat terpaan arus globalisasi;
- Perlunya pemetaan situasi dan kondisi wilayah tentang potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG);
- Pendidikan politik guna pengembangan kehidupan demokrasi belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat. .

Adapun langkah-langkah yang direncanakan guna menangani permasalahan dimaksud antara lain:

- Pembumih nilai-nilai kebangsaan dengan cara-cara yang lebih menarik melalui kegiatan *outdoor* dan permainan;
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemetaan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) melalui pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- Penyelenggaraan pendidikan politik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan cara mengikutsertakan kelompok-kelompok komunitas masyarakat.

Dari sejumlah 297 indikator program yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, jika dibandingkan terhadap target RKPD pada tahun 2023 terdapat 273 indikator atau sebesar 91,93% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi ( $90\% < X$ ), terdapat 12 indikator atau sebesar 4,04% dengan predikat kinerja Tinggi ( $75\% < X \leq 90\%$ ), terdapat 5 indikator atau sebesar 1,68% dengan predikat kinerja Sedang ( $65\% < X \leq 75\%$ ), terdapat 2 indikator atau sebesar 0,67% dengan predikat kinerja Rendah ( $50\% < X \leq 65\%$ ), dan terdapat 5 indikator atau sebesar 1,68% dengan predikat kinerja Sangat Rendah ( $X \leq 50\%$ ).

Sedangkan jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026), dari sejumlah 297 indikator program yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, jika dibandingkan terhadap target RPJMD 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 terdapat 287 indikator atau sebesar 96,63% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi ( $90\% < X$ ), 2 indikator atau sebesar 0,67% dengan predikat Tinggi ( $90 \geq X > 75$ ), 1 indikator atau sebesar 0,34% dengan predikat Sedang ( $75 \geq X > 60$ ), dan terdapat 7 indikator atau sebesar 2,36% dengan predikat kinerja Sangat Rendah ( $X \leq 50\%$ ).

Indikator kinerja dengan capaian Sangat Rendah terhadap target RKPD tahun 2023 tersebut adalah:

- Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;



- b. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran;
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan;
- d. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- e. Persentase SILPA terhadap APBD.

Secara makro, progres capaian 11 indikator tujuan dan 38 indikator sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2023, diperoleh rata-rata capaian untuk indikator tujuan sebesar 104,03% dengan predikat Sangat Tinggi (ST), dan rata rata capaian untuk 38 indikator sasaran sebesar 122,65% dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Jika dibandingkan terhadap target tahun 2023, sebanyak 9 indikator tujuan atau sebesar 81,82% termasuk pada kategori kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 2 indikator tujuan atau sebesar 18,18% termasuk pada kategori kinerja Tinggi (T).

Sedangkan dari sebanyak 38 indikator sasaran, terdapat 34 indikator atau sebesar 89,47% memiliki kinerja dengan kategori kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 indikator atau sebesar 5,26% memiliki kinerja dengan kategori kinerja Tinggi (T), 1 indikator atau sebesar 2,63% kinerja dengan kategori kinerja Rendah (R) yaitu nilai ekspor, dan 1 indikator atau sebesar 2,63% kinerja dengan kategori kinerja Sangat Rendah (SR) yaitu pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet.

Rendahnya capaian nilai ekspor sebesar US\$ 2.130.728.974,61 dari target US\$ 3.403.172.949,10 disebabkan diantaranya karena harga bahan baku beberapa komoditi meningkat sehingga menyebabkan beberapa komoditi mengalami kenaikan harga dan menyebabkan penurunan volume permintaan ekspor.

Rendahnya capaian pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 0 titik dari target 3 titik disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi di jalan mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas. Lokasi rawan kemacetan pada tahun 2023 tercatat 3 lokasi yaitu Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Jl. Siliwangi. Sejauh ini Pemerintah Kota Semarang telah berupaya melakukan penanganan di ketiga ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas meski belum optimal menurunkan kepadatan. Dan karena ketiga ruas jalan dimaksud termasuk ke dalam kewenangan Provinsi dan Nasional sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan penanganan.

Jika dibandingkan target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator tujuan memiliki kinerja telah mencapai target akhir RPJMD, dan 9 indikator tujuan akan mencapai target akhir RPJMD. Sementara itu pada indikator sasaran, sebanyak 20 indikator sasaran telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 17 indikator sasaran akan mencapai target akhir RPJMD, dan 1 indikator sasaran perlu upaya keras dalam mencapai target akhir RPJMD. Berikut disajikan secara rinci capaian dari 11 indikator Tujuan dan 38 indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023.

**Tabel 2.125.**

**Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2023**

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian		
				2023	2023	%	2026	2023		
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	<b>Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>poin</b>	<b>83,60 - 84,00</b>	<b>84,43</b>	<b>100,51%</b>	<b>84,80 - 85,20</b>	<b>99,56%</b>	
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,58	15,55	99,81%	15,64	99,42%
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,59	10,81	102,08%	10,65	101,50%
				Angka Harapan Hidup	Tahun	77,49	77,90	100,53%	77,62	100,36%
		<b>Tingkat Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Persen</b>	<b>55,17</b>	<b>71,94</b>	<b>130,40%</b>	<b>72,50</b>	<b>99,23%</b>	
		2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	55,17	71,94	130,40%	72,50	99,23%
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		<b>Persen</b>	<b>8,30 - 8,60</b>	<b>5,99</b>	<b>130,35%</b>	<b>5,90 - 6,20</b>	<b>103,39%</b>	
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	92,84	95,80	103,19%	96,68	99,09%
		4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,10	69,42	99,03%	70,00	99,17%
				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	77,00	77,09	100,12%	80,00	96,36%
		<b>Angka Kemiskinan</b>		<b>Persen</b>	<b>4,04 - 4,24</b>	<b>4,23</b>	<b>100,24%</b>	<b>3,51 - 3,74</b>	<b>86,90%</b>	
		5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,50 - 15,80	9,68	138,73%	14,60 - 14,90	137,55%
		6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,81	100,00	100,19%	100,00	100,00%
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>ST</b>	<b>5,60 - 6,10</b>	<b>5,79</b>	<b>103,39%</b>	<b>5,90 - 6,60</b>	<b>98,14%</b>	
		7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.403.172.949,10	2.130.728.974,61	62,61%	3.828.106.736,21	55,66%
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	6,00	21,52	200,00%	6,00	200,00%

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian		
				2023	2023	%	2026	2023		
	8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rupiah)	7% (25.684.059 juta Rp)	10,31% (27.205.700 juta Rp)	147,29%	7 (31.326.856 juta Rp)	147,29%	
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	103,54	146,87	141,85%	146,87	139,09%		
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,77	29,88	103,86%	29,88	103,11%		
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,70	28,78	100,28%	28,78	100,07%		
<b>4</b>	<b>Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan</b>	<b>Indeks Demokrasi</b>		<b>Nilai</b>	<b>72,40</b>	<b>95,18</b>	<b>131,46%</b>	<b>73,60</b>	<b>129,32%</b>	
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumihian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	73,50	83,63	113,78%	75,00	111,51%
		<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>		<b>Nilai Indeks</b>	<b>95,70</b>	<b>95,96</b>	<b>100,27%</b>	<b>95,96</b>	<b>99,97%</b>	
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	75,10	73,93	98,44%	75,50	97,92%
		<b>Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban</b>		<b>Persen</b>	<b>10,52</b>	<b>11,66</b>	<b>89,16%</b>	<b>8,85</b>	<b>68,25%</b>	
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.290	1.290	100,00%	1176	90,31%
<b>5</b>	<b>Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>Persen</b>	<b>67,01</b>	<b>56,84</b>	<b>84,82 %</b>	<b>67,52</b>	<b>84,18%</b>	
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	52,34	46,00	87,74%	53,00	86,79%
				Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	95,60	80,55	84,26%	96,20	83,73%

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	
				2023	2023	%	2026	2023	
	sumberdaya alam	Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	155.619,35	1.162.164,00	200,00%	198.965,07	200,00%	
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	72,00	72,10	100,14%	69,00	104,49%	
		Persentase ruang terbuka hijau	Persen	45,05	44,48	98,73%	45,83	97,05%	
	<b>Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur</b>		<b>Nilai</b>	<b>78,49</b>	<b>84,46</b>	<b>107,61%</b>	<b>85,00</b>	<b>99,36%</b>	
	13 Meningkatkan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	68,00	69,13	101,66%	79,00	87,51%	
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	74,00	73,85	99,80%	84,00	87,92%	
		Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,32	3,43	96,69%	3,00	114,33%	
	14 Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	97,50	99,57	102,12%	100,00	99,57%	
		Persentase rumah layak huni	Persen	99,15	98,84	99,69%	100,00	98,84%	
	15 Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	85,00	98,33	115,68%	91,00	108,05%	
	16 Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,00	103,49	106,77%	105,00	101,44%	
	17 Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,58	0,85	146,10%	0,60	141,67%	
		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	3	3	100,00%	0	-200,00%	
<b>6</b>	<b>Terwujudnya reformasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>Nilai Indeks</b>	<b>74,00</b>	<b>84,14</b>	<b>113,70%</b>	<b>79,20</b>	<b>91,77%</b>

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
					2023	2023	%	2026	2023
birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	>74,00/ BB	71,32/ BB	96,38%	>80/A	89,15%
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	WTP	100,00%
	19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,00	85,40	102,89%	85,00	100,47%
			Indeks SPBE	Skor 0-5	4,20	3,89	92,62%	5,00	77,80%
			Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,46/ ST	3,53/ ST	102,02%	>3,49/ ST	101,15%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88,00	90,72	103,09%	90	100,80%

Sumber: Data Bappeda Kota Semarang (diolah), 2024

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Semarang secara umum dapat terpilah dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; pembangunan yang masih diprioritaskan di wilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah; daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat; masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan; pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, disamping diperlukan juga strategi penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 diberbagai sektor.

#### 2.1.3 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024

Permasalahan pembangunan di Kota Semarang diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Semarang. Yang menjadi catatan, gambaran umum di Kota Semarang tidak semua mencerminkan penurunan capaian namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Semarang dengan dasar bahwa Kota Semarang adalah kota metropolitan yang tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti halnya angka kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi minor lainnya, apalagi pasca pandemi menunjukkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meskipun posisi Kota Semarang saat ini untuk beberapa indikator makro ekonomi masih diatas rata-rata Jawa Tengah bahkan tingkat nasional.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kualitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:  
Kendala dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja antara lain masih kurangnya implementasi teknologi digital pada proses pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang dan belum semua Perusahaan yang ada di Kota Semarang melakukan pengesahan kontrak pemagangan dalam negeri melalui Disnaker
- b. Tingkat perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:  
Tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak dan perempuan. Namun, hal ini juga karena besarnya kemauan dan kesadaran warga Kota Semarang untuk melaporkan adanya kekerasan.
- c. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:  
Belum optimalnya penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin; masih perlunya optimalisasi lembaga sosial untuk perlindungan masalah sosial; masih perlunya penguatan jaring pengaman sosial; serta kualitas lingkungan permukiman yang masih perlu ditingkatkan.
- d. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:  
Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan peningkatan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) utamanya pada capaian mutu minimal layanan dasar, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal; kualitas sarpras pendidikan, masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan, masih terdapat balita stunting; masih tingginya angka pengangguran (diatas provinsi dan nasional) ; serta masih perlu ditingkatkannya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.
- e. Pembangunan yang masih diprioritaskan diwilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah, dengan akar permasalahan yaitu:  
Akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menurun, utamanya dari aspek Indeks Kualitas Air dan Tutupan Lahan; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan.
- f. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu:  
Belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, penguatan kelembagaan dan pemenuhan standar baku ekspor bagi UMKM dan IKM, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE. Jangkauan Akses pemasaran pelaku usaha mikro yang masih terbatas dan masih bersifat konvensional.

- g. Masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan, dengan akar permasalahan yaitu:  
Ketersediaan akses pangan yang belum optimal dan perlunya mengurangi ketergantungan pada sumber bahan pangan tertentu, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan tidak produktif untuk meningkatkan pemenuhan gizi keluarga, Perluasan dan keberlanjutan urban farming dengan mengoptimalkan potensi yang ada diwilayah. Gangguan musim tanam berupa peningkatan suhu dan penurunan curah hujan menyebabkan penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas tanam, dan gagal panen. Selain itu, tanaman yang tumbuh, memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak ideal serta rasanya kurang enak. Gagal panen mengakibatkan pasokan bahan pangan berkurang sehingga terjadi kenaikan harga pangan dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.
- h. Masih perlunya upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dengan akar permasalahan yaitu:  
Cuaca ekstrem yang mengakibatkan debit air kurang, perubahan suhu ekstrim antara siang dan malam sehingga menyebabkan banyak kematian pada ikan, banyak timbul penyakit ikan karena stres pada ikan. Cuaca ekstrem juga menyebabkan hasil tangkapan ikan oleh nelayan menurun sehingga pendapatan nelayan juga menurun.
- i. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan, dengan akar masalah:  
Masih adanya genangan banjir dan rob serta tanah longsor; pohon tumbang; minimnya sistem peringatan dini kebencanaan, pemenuhan resptime kebencanaan serta upaya pengurangan resiko bencana yang masih rendah.
- j. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu:  
Belum optimalnya akses, kemudahan dan sarana prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu peningkatan kualitasnya terkait dengan terbitnya regulasi yang sangat berpengaruh pada struktur keuangan, penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai ketentuan dan pengawasan internal daerah, dan perlunya menekan gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas menjelang Pilkada serentak.

Selain memperhatikan permasalahan yang dirumuskan dari data dan informasi yang sudah ada, perumusan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2024 juga harus memperhatikan isu-isu sebagai berikut:

### **Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Semarang serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:  
Menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan lingkup cara menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; meningkatkan perlindungan sosial melalui kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin dengan cara penguatan kelembagaan dan penguatan kampung tematik.
- 2) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:

- Meningkatkan kualitas pendidikan dan angka partisipasi sekolah dengan lingkup pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusi dan pendidikan non-formal (kesetaraan);
  - Meningkatkan layanan kesehatan dengan lingkup pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan masyarakat, pencegahan serta penanganan stunting, penurunan unmet need dan kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun;
  - Menurunkan angka pengangguran dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan jaringan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja, terutama untuk lanjutan penerima manfaat Kartu Pra Kerja
  - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan daerah dengan lingkup cara penguatan pemberdayaan gender serta penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kesenjangan wilayah, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: membangun konektivitas pusat-pusat ekonomi dengan lingkup cara peningkatan akses wilayah di pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi titik dan simpul kemacetan, serta meningkatkan kawasan strategis dan infrastruktur wilayah.
- 4) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, di prioritaskan pada upaya-upaya untuk:  
Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana , PIRT, sertifikasi halal , HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.
- 5) Kedaulatan pangan dan energi, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:  
Melakukan penguatan ketahanan pangan dengan lingkup cara Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan yang difokuskan pada peningkatan produksi, penguatan ketersediaan dan distribusi pangan, Perluasan dan keberlanjutan urban farming dengan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah, serta penanganan daerah rawan pangan.
- 6) Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:  
Menanggulangi kejadian bencana dengan lingkup cara mengatasi rob, banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi Kota Semarang, serta peningkatan upaya dalam mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana, selain itu juga pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi energi maupun barang yang bernilai ekonomi lebih.
- 7) Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan birokrasi yang profesional dengan cara meningkatkan efektifitas kelembagaan perangkat daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur (Indeks Profesionalitas ASN); peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan sadar hukum; serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan penerapan *smart city* serta penguatan akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan.



- Memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan kemudahan investasi di Kota Semarang.

#### 2.4. Inovasi Daerah

Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah dilingkupi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.126.**  
**Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan**

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
1	Alokasi anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (dedicated) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga proses partisipatif dari hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.
2	Gerbang Hebat	Gerbang Hebat adalah kependekan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat. Gerbang Hebat merupakan gerakan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada.
3	Situation room	Situation room digunakan untuk memantau situasi Kota Semarang. Di ruangan tersebut terdapat smart table, ruang diskusi, Call Center, dan ruang monitoring CCTV.
4	Kampung Tematik	Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
5	Smart City	Untuk pengembangan menuju Kota Cerdas, telah disusun Rencana Induk Semarang Kota Cerdas yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan. Semarang Smart City dapat diakses pada portal <a href="http://smartcity.semarangkota.go.id">smartcity.semarangkota.go.id</a> .
6	SiPU (SIM Jalan)	Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan di Kota Semarang, dikembangkan SIM Jalan yang memuat data jalan dan historis pembangunan/rehabilitasi jalan yang ada. Data disajikan dalam bentuk visual, tabular dan berbasis spasial (peta).
7	SiPU (SIM Pedestrian Jalan)	Untuk melihat kondisi eksisting serta rencana pengembangan pedestrian jalan, dikembangkan SIM Pedestrian yang memuat data visual, peta (spasial) dan data teknis.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
8	One Map Semarang	Website yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang dapat diakses dan diunduh publik sebagai data spasial dasar yang wajib digunakan oleh seluruh stakeholder terkait di Kota Semarang.
9	Aplikasi Satu Data	Aplikasi yang akan menjadi sumber rujukan data-data penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang.
10	Pangripta	Inovasi Sistem informasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang
11	Jurnal Riptek	Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
12	Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)	Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor air minum dan sanitasi mulai dari pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM dan non perpipaan yang berasal dari program Pamsimas, DAK, Bankeu, dan APBD Kota Semarang, kemudian pelayanan air limbah skala permukiman dan layanan persampahan dari hulu sampai hilir dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.
13	Website Siaga Corona	Website yang berisi mengenai berbagai informasi terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Mulai dari perkembangan kasus harian, informasi bantuan sosial, jadwal penyemprotan disinfektan, monitoring bahan pokok, ketersediaan alat kesehatan, dan informasi terkait lainnya.
14	E-Sarapan	Sebagai sarana untuk penyampaian aspirasi dari Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan lebih cepat, dan Terbuka. Hal ini berkaitan juga dengan realisasi program Parlemen Modern, dimana salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan informasi / Transparansi Publik.
15	Kredit Wibawa	Kredit Wibawa adalah kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawa. Kredit Wibawa merupakan kredit tanpa agunan untuk usaha mikro dengan bunga 3% per tahun.
16	Call Center 112	Untuk kedaruratan, warga Kota Semarang dapat menghubungi 112 untuk mendapatkan layanan kedaruratan.
17	Kebijakan cashless pada layanan publik	Untuk mendukung terwujudnya <i>cashless society</i> , maka dikembangkan Kartu Semarang Hebat yang bisa digunakan untuk transaksi non tunai dengan diskon di berbagai merchant dan layanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Pembayaran non tunai juga dikembangkan untuk bis Trans Semarang dengan berbagai vendor penyedia (OVO, GoPay, TCash, Yap!)
18	Universal Health Coverage	Pemerintah Kota Semarang memberikan jaminan kesehatan gratis rawat inap di Rumah Sakit kelas 3 bagi seluruh warga Kota Semarang.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
19	Konsultasi Dokter Gratis	Konter adalah sistem pemberian informasi kesehatan secara gratis kepada masyarakat melalui telepon dan WhatsApp.
20	Ambulans dan Motor Hebat	Untuk kegawatdaruratan, warga Kota Semarang dapat mengakses layanan Ambulans Hebat dan Motor Hebat secara Gratis.
21	Co-Working Space gratis	Untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Semarang mengembangkan Semarang Digital Kreatif (SDK) yang merupakan co-working space yang dapat dimanfaatkan secara gratis untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif.
22	Integrasi CCTV sampai ke RT	Pengadaan dan pemasangan 1 CCTV untuk 1 RT di seluruh wilayah Kota Semarang yang terintegrasi dengan situation room secara realtime.
23	Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Jaringan Online)	Aplikasi cetak mandiri Salinan PBB, BPHTB serta tanda lunas PBB.
24	LAYANAN SIAGA (SIAP KAWAL KELUARGA)	Layanan SIAGA merupakan layanan Gratis yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan belum ada sebelumnya. Layanan ini terintegrasi dengan Puskesmas dan Call Center 1500-132 dengan Aplikasi PERIKSA-IN (Pelayanan Resiko Kesehatan Intervensi). Adapun jenis layanan yang diberikan antara lain Home Care, Penjemputan Pasien, Intervensi Lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Merujuk, P3K dan Pengobatan Gratis.
25	PUSTAKA (Puskesmas Tanpa Antrian)	Fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk berobat ke Puskesmas tanpa harus menunggu antrian. Masyarakat hanya cukup melakukan pendaftaran melalui SMS/WA ke Nomor Puskesmas yang dituju, Pasien selanjutnya akan mendapatkan nomer antrian dan jam kedatangan. Pada hari yang di tentukan, pasien menuju <i>Customer Services</i> untuk melakukan konfirmasi kedatangan dan langsung menuju poliklinik pemeriksaan.
26	GIAT (GERAKAN IBU ANAK SEHAT)	dengan pendekatan "5 SEKAWAN" merupakan upaya bergerak bersama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, untuk mencegah kematian ibu anak di Kota Semarang, dengan melibatkan: 1. Masyarakat; 2. Organisasi Profesi; 3. Puskesmas; 4. Rumah Sakit; 5. Lintas Sektor/Swasta.
27	KOMUKKU (Komunikasi Kesehatan Ibu)	Merupakan upaya promotif dan preventif penurunan Kematian Ibu di Kota Semarang melalui pendekatan <i>Service Oriented</i> dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Media Dalring (Dalam Jaringan), yang terdiri dari: 1) Aplikasi Sayang BUnda; 2) Jawil Bumil/Bufas dengan WhatsApp; 3) Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/Nifas melalui media sosial Instagram dan Youtube.
28	Si Lampah	Aplikasi pelaporan masyarakat khususnya mengenai sampah yang terjadi di lokasi sekitar masyarakat yang melapor. Secara khusus aplikasi ini memanfaatkan geo tagging yang melekat dalam smartphone.
29	LEGO Digital	Legalisasi Online Digital Dokumen Kependudukan.
30	Lumpia (Layanan Urus Mandiri Paket Integrasi Administrasi Kependudukan) Dukcapil	Penyelenggaraan layanan pengurusan, penerbitan dan digitalisasi dokumen kependudukan dengan sistem paket (satu kali pengurusan, dokumen mendapatkan 2, 3, atau 4 dokumen terkait).

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
31	Klinik "APEL" (Anak, Perempuan dan Lansia) (RSWN)	merupakan bentuk implementasi pendekatan Whole of Government (WoG) dimana fungsi-fungsi pelayanan diintegrasikan satu atap secara koordinatif dan heterarkis.
32	"Si Kingkong"	Solusi Kesenambungan Asuhan Pasien Pasca Rawat Inap Dan Percepatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan.
33	JEMPOL TIGER JAPRI (Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif)	Penyelenggaraan layanan adminduk berbasis JEMPUT BOLA yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) dan Tim Gerak Cepat (TIGER CEPAT) Disdukcapil kepada penduduk berkebutuhan khusus (difabel, panti jompo, panti sosial dan orang sakit) atas pelaporan dan permohonan dari pihak keluarga dan instansi terkait yang berwenang.
34	Sistem Informasi Geografis Lampu Jalan (PJU)	Peralatan inventarisasi dan pemantauan aset titik lampu dan KWH meter PJU di Kota Semarang.
35	Lapor PJU	Pengaduan lampu jalan di lingkungan masyarakat dan jalan protokol dan ditindaklanjuti dengan SOP 2 hari kalender.
36	KB Perusahaan	Meningkatkan pelayanan KB kepada buruh pabrik agar mendapatkan pelayanan KB tanpa meninggalkan tempat kerja.
37	KB Online	Memberikan informasi pelayanan KB melalui media Online.
38	Puskesmas 7G	Layanan puskesmas yang Gak Ribet (buka sampai sore), Gak Antri (dengan layanan PUSTAKA), Gesit (paperless), Gratis (bagi masyarakat dengan KTP Kota Semarang), dan Go Cashless bayar (pembayaran non tunai), Gemati (indeks kepuasan masyarakat), Gak lemot (layanan sesuai SOP dan telemedicine)
39	Si Imut (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu)	Merupakan sebuah sistem informasi berupa aplikasi berbasis web yang mengelola proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada pada Pemerintah Kota Semarang, dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan dengan mudah dan praktis, dilayani oleh sistem dimanapun dan kapanpun. Beberapa persyaratan perizinan yang sama juga dapat disatukan dengan prinsip berbagi data dan dokumen juga memfasilitasi berbagi data instansi yang terkait dengan perizinan di Pemerintah Kota Semarang.
40	Paket Perizinan Investasi Reklame dan IMB Pertandaan (PARI MESEM)	Merupakan sebuah layanan percepatan paket perizinan, dalam hal ini perizinan reklame dan IMB pertandaan, layanan percepatan paket ini dituangkan dalam sistem informasi/aplikasi berbasis web yang terintegrasi pada aplikasi SI IMUT. Layanan ini menyederhanakan beberapa persyaratan yang terdapat pada perizinan reklame dan IMB pertandaan, sehingga persyaratan tersebut lebih sedikit dan sederhana, dengan cara berbagi pakai data dan dokumen digital diantara 2 (dua) izin yang berbeda. Layanan penyederhanaan ini difasilitasi dalam aplikasi SI IMUT.
41	Buka Invest Semarang Bisniz (SEMBIZ)	Merupakan sistem informasi berupa aplikasi berbasis web yang membantu investor maupun pelaku usaha untuk dapat saling menemukan peluang berusaha atau berinvestasi. Para pelaku usaha dapat menampilkan produk yang dijual maupun yang disewakan, sehingga investor dapat mencari dan memilih pelaku usaha untuk berinvestasi.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
42	Pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin)	Inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 4 kWp yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selanjutnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) ini digunakan sebagai laboratorium.
43	Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Land Fill Gass	Dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, dimana Kota Semarang merupakan satu dari 12 kota yang ditunjuk untuk menjalankan proyek tersebut. Berlokasi di TPA Jatibarang, dengan estimasi nilai investasi 2,2 T, jumlah sampah yang diolah 1000 ton/hari, dan kapasitas energi yang dihasilkan 19 MW.
44	Converter Kit CNG untuk Bus Trans Semarang	Pemasangan converter kit yang bisa menjadikan bahan bakar bus menjadi hybrid yang mengatur komposisi bahan bakar 70% CNG dan 30% solar yang lebih rendah emisi.
45	SAN PIISAN (SAyaNgi dan damPIngi Ibu dan Anak Kota SemarANG)	Upaya promotif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Stunting di Kota Semarang melalui keterlibatan masyarakat, pengusaha dan Rumah Sakit, yang terintegrasi dengan inovasi kesehatan lainnya (Ambulans HEBAT, UHC, Jampersal), serta Aplikasi Sayang Bunda, Jawil Bumil/ Bufas dengan WhatsApp, Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/ Nifas melalui media Sosial Instagram dan Youtube.
46	Smart Lighting	Inovasi untuk mengatur penggunaan lampu PJU melalui sistem informasi.
47	Pemasangan panel surya di instansi Pemerintah Kota	Inisiatif untuk menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga listrik di kantor instansi pemerintah.
48	Kawasan kuliner Jalan Depok	Pengembangan Kawasan di Jalan Depok sebagai lokasi kuliner di malam hari.
49	e-retribusi PKL dan Pedagang Pasar	Pembayaran retribusi jasa pada pedagang di pasar dan PKL yang terdaftar melalui non tunai.
50	Si Pariem	Inovasi ini dilakukan untuk merubah pembayaran tunai menjadi non tunai dan terintegrasi dengan data perizinan pedagang yang ada di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Bentuknya adalah penggunaan e-money untuk pembayaran retribusi pedagang setiap harinya. Pedagang membayar menggunakan kartu yang kemudian dibayarkan menggunakan EDC yang disediakan oleh petugas di lapangan.
51	SEMARisk	Sistem informasi kebencanaan berbasis web dan android yang merupakan bagian dari manajemen bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat agar siap siaga terhadap situasi dan waktu yang tepat berdasarkan informasi dari EWS secara online.
52	GEBER SEPTI (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying)	Memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan mental anak dan remaja berbasis teknologi dengan menyediakan layanan konseling online dan edukasi mengenai bullying kepada peserta didik, orang tua dan stakeholder sekolah.
53	SAMPOKONG (SANtri Milenial PONDok Pesantren KOTA SemaraNG)	Memberikan layanan pendidikan kesehatan untuk keluarga (preventif, promotif) dan Home Care. Kemudahan akses pelayanan kesehatan yang diberikan pada inovasi Sampokong ini dapat meningkatkan pencegahan penyakit, memulihkan kesehatan, memaksimalkan kemandirian serta meminimalkan dampak penyakit.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
54	SECCON (Semarang Creative Content)	Inovasi dalam rangka pengembangan ekosistem industri kreatif, yang memperkuat jejaring kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku industri kreatif, khususnya pada sektor konten, animasi, dan game di Kota Semarang. SECCON memiliki rencana pengembangan yang terstruktur setiap tahun untuk menuju tujuan inovasi yaitu membangun ekosistem industri kreatif.
55	TUNGGAL DARA	Inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD di Kota Semarang sehingga dapat menekan angka kejadian DBD di Kota Semarang. Bentuk inovasi ini dimulai pada pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan DBD, misalnya siswa sekolah (Sicentik), PKK, dan kader kesehatan lingkungan. Serta diperkuat dengan sistem informasi DBD yang terintegrasi untuk mempercepat respon dan pengambilan keputusan.
56	ASIKK PAK (Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)	Pemkot Semarang melalui DP3A melihat peluang melalui perkembangan teknologi informasi untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perlindungan perempuan dan anak mulai dari pelaporan, pengaduan, pendampingan dan pencatatan serta evaluasi bahkan sebagai bahan sosialisasi/pencegahan dalam satu aplikasi kasus tindak kekerasan di Kota Semarang.
57	ATM Beras	Terobosan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
58	Urban Farming Corner (UFC)	UFC bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh masyarakat Kota Semarang sebagai pusat edukasi dan informasi, juga tempat konsultasi mengenai pertanian perkotaan Kota Semarang. Pelatihan di UFC ini tidak hanya berisi penyampaian materi saja namun juga diikuti kegiatan lomba praktek penanaman sayur organik oleh para peserta.
59	YANKESTRAD (Pelayanan Kesehatan Tradisional)	RSUD KRMT Wongsonegoro menjadi Rumah Sakit pertama di Jawa Tengah yang memiliki program pengobatan tradisional. Konsep ini diangkat karena pengobatan tradisional Indonesia dengan berbagai ramuan herbalnya diyakini memiliki khasiat yang tidak kalah dengan obat-obatan lainnya. Pelayanannya meliputi akupunktur, akupresure, pijat anak, konsultasi obat herbal, pijat refleksi, dan pijat relaksasi.
60	GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro Lokal online Asli Semarang)	Inovasi layanan pemasaran online dalam bentuk aplikasi katalog produk yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Katalog Produk ini meliputi: produk kuliner, craft, fashion, dan ekonomi kreatif.
61	Pelangi Nusantara	Pelayanan kesehatan terkait gizi buruk bagi masyarakat Kota Semarang dengan pendekatan Continuum of Care 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kegiatannya meliputi Wisata Edukasi Gizi dan Pelayanan Kesehatan bagi Balita Gizi Buruk dan Stunting
62	Layar Semar	Merupakan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk mempermudah pengajuan penerbitan SP2D secara online. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran secara digital.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
63	Akselerasi Smart City melalui IOT CCTV Analitik Kota Semarang	Merupakan inovasi digital dalam hal penggunaan IOT dalam CCTV sebagai sumber data dalam big data.
64	Semarang Satu Data Menuju Big Data	Tindak lanjut Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan mengintegrasikan semua sistem melalui Portal Satu Data Kota Semarang pada data.semarangkota.go.id
65	Big Data Analitik Penggunaan Masker dan Kerumunan Bebas CCTV Analytics	Inovasi berupa sistem aplikasi pemantauan kerumunan massa dan pemakaian masker berbasis CCTV sebagai upaya mitigasi pandemi covid-19.
66	Streaming CCTV DPU Kota Semarang	Pengembangan aplikasi mobile smart infrastruktur Kota Semarang berupa fitur Live Streaming CCTV.
67	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
68	SI LINTAS (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang )	Pelayanan sistem keterbukaan informasi kepada masyarakat terutama penyandang difabel untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Semarang.
69	Strong	STRONG atau Integrasi Data Warehouse Penanganan Covid Kota Semarang adalah aplikasi covid yang merupakan integrasi pengelolaan data penanganan dengan memanfaatkan ICT sebagai basisnya.
70	<i>Integrated Smart System Platform (ISSP)</i> untuk Smart City Kota Semarang	Merupakan dokumen perencanaan dalam bentuk masterplan dan roadmap
71	APIK KERJAKU	Merupakan Akselerasi Pengurangan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui penyusunan grand design pelayanan ketenagakerjaan yang diintegrasikan dalam sistem informasi dan komunikasi (TIK)
72	Lunpia: Smart Tourism Penggerak Kepariwisata di Kota Semarang	Digital platform pariwisata untuk mempermudah wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkeliling Kota Semarang
73	E-Surat Aplikasi Surat Menyurat berbasis Tanda Tangan Elektronik	E-Surat Merupakan Aplikasi berbasis web yang berguna untuk mengelola Surat Menyurat antar OPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang
74	Opera Semarang	Penerapan teknologi digital barcode sebagai alat bantu untuk memberikan orientasi kepada pasien yang dapat diakses secara mandiri kapanpun pasien/keluarga membutuhkan informasi.
75	Dodolan E-Commerce e Wong Semarang (Dolan E-Semar)	Pemanfaatan teknologi E-Commerce analytics berupa kumpulan data berbagai marketplace melalui aplikasi ekonomi digital Dolan-e Semar.
76	E Fungsional	Pelayanan kepada seluruh pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang berbasis sistem melalui aplikasi "E-Fungsional" dengan mengintegrasikan ke dalam wadah layanan kepegawaian yaitu SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia).
77	E-PENDAWA	E-PANDAWA atau Aplikasi Penataan Penetapan Perijinan Pendapatan dan Pengawasan dalam pengelolaan pasar tradisional di Kota Semarang

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
78	Siimoet	SI IMOET (Sistem Informasi Monitoring Emergency On Time) merupakan inovasi pelayanan untuk memberikan informasi dan pesan kepada pasien dan keluarga secara on time terkait pelayanan pasien di IGD
79	Sitrelo	Inovasi berupa aplikasi online untuk menunjang efisiensi komunikasi dan koordinasi pada proses pelaporan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
80	Becak Kayu	Kegiatan rutin terapi bermain pada pasien anak untuk mengurangi tingkat kecemasan hospitalisasi setiap dua kali seminggu dan pemberian edukasi kesehatan bagi anak.
81	SI AMAN (Sistem Aplikasi Arsip Mandiri)	Aplikasi berbasis mobile untuk memantau Arsip tersimpan, Pengajuan, Pemusnahan, dan Peminjaman secara efektif tanpa perlu datang ke Dinas Arsip.
82	SATRIA BIRU	Inovasi terkait dengan pelayanan pertolongan dan penyelamatan masyarakat melalui "RANGER BIRU".
83	SIMKD	SIMKD yaitu Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Digital yang dapat diakses masyarakat luas melalui website <a href="http://simkd.semarangkota.go.id">http://simkd.semarangkota.go.id</a> untuk mencari IMB (ijin mendirikan bangunan), KRK (Keterangan Rencana Kota), HO (surat ijin Gangguan) yang tersimpan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
84	Sitampan	SITAMPAN (Sistem Pangan Perkotaan) dengan melakukan reviu Rancangan Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) melalui pengkajian pada sektor teknologi pada industri agro, peternakan, dan perikanan dalam mencukupi kebutuhan konsumsi daerah.
85	Portal Siaga Corona Pemerintah Kota Semarang berbasis Website	Inovasi dalam proses komunikasi publik melalui peluncuran kanal <a href="http://siagacorona.semarangkota.go.id">siagacorona.semarangkota.go.id</a> terhadap permasalahan COVID-19 di Kota Semarang.
86	Aman Bertransportasi Umum di Semarang	Sistem pelayanan transportasi umum yang memastikan keamanan dan protokol kesehatan, memudahkan pengguna jasa mengetahui rute dan lokasi armada bus melalui Aplikasi Trans Semarang, dan penerapan transaksi non tunai.
87	Ramah Anak Semarang Selatan	Merupakan pelayanan berupa penyediaan Perpustakaan Mini atau Pojok Baca dan Pembuatan Taman Ramah Anak di Lingkungan Kecamatan Semarang Selatan diikuti dengan pemberian bimtek kepada petugas pelayanan.
88	Integrasi Server Cloud Pemerintah Kota Semarang	Cloud Computing (komputasi awan) merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi.
89	Tiker Mateng	Inovasi untuk mengatasi masalah kebersihan di Kota Semarang dengan membentuk tim yang terdiri dari seluruh petugas kebersihan di Kelurahan yang dinamai TIKER MATENG atau Tim Orange. Caranya dengan melakukan pelaporan pada sosial media Kecamatan ataupun call center (WA dan Telepon).
90	Quick Response Barcode (QR Code) Menuju Masyarakat Cerdas Kota Semarang	Quick Response Barcode (QR Code) sebagai program untuk meningkatkan minat membaca/ literasi di Kota Semarang melalui pemanfaatan media sosial untuk memudahkan masyarakat luas khususnya generasi milenial.



No	Inovasi	Gambaran Inovasi
91	Minapolitan	Pengembangan perikanan terpadu menjadi konsep pengembangan kawasan Minapolitan untuk meningkatkan produksi perikanan air tawar di Kota Semarang, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga setempat, serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
92	<i>E-legal drafting</i>	<i>E-Legal Drafting System</i> hadir untuk meningkatkan pelayan penyusunan produk hukum daerah dengan berbasis elektronik ( <i>smartphone</i> ) yang akan memudahkan bagi para legal drafter dalam hal mengurus produk hukum secara lebih efektif dan efisien.
93	BOT Instagram - Monitoring dan Filter Keluhan di Kolom Komentar	Aplikasi BOT Instagram - Monitoring dan Filter Keluhan di Kolom Komentar Instagram Walikota Semarang dapat mengetahui lebih awal keluhan masyarakat khususnya Kecamatan Gajah Mungkur yang disampaikan dengan tujuan agar komentar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait
94	BOT Whatsapp - Pelaporan Foto Kegiatan secara Otomatis dan Real Time	BOT Whatsapp - Pelaporan Foto kegiatan secara otomatis dan real time merupakan aplikasi pelaporan foto kegiatan kepada Camat Gajah Mungkur Kota Semarang secara cepat dan realtime sehingga tidak memudahkan dalam hal pelaporan kegiatan.
95	Anjungan dan Flyer Persyaratan Pelayanan Kantor Kecamatan Gajahmungkur	Anjungan dan Flyer Persyaratan Pelayanan Kantor Kecamatan Gajah Mungkur dapat memberikan kemudahan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan publik melalui flyer yang menarik, informatif, singkat, dan padat di Kantor Kecamatan Gajah Mungkur.
96	Pakde Semar	Mobile Pakde Semar merupakan aplikasi yang dapat mewujudkan pelayanan pajak yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan mobilephone sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak.
97	DJ Biker	Minimnya lowongan kerja bagi disabilitas maka hadirlah DJ Biker (Disabilitas Job Bisa Kerja) merupakan fitur baru yang ada pada aplikasi Smartnaker yang memiliki tujuan untuk membantu disabilitas dalam mencari lowongan pekerjaan di Kota Semarang
98	Tarif Difabel	Tarif Bus Rapid Transit (BRT) yang pada awalnya hanya dibedakan menjadi 2 kategori yaitu tarif umum dan tarif khusus, lalu pada tahun 2019 klasifikasi tarif diubah menjadi tarif umum Rp 3.500 dan tarif lanjut usia, tarif veteran, tarif mahasiswa, KIA dan penyandang disabilitas sebesar Rp 1.000.
99	SI KEPO (Sistem Informasi Ketetapan Pajak Daerah <i>On Line</i> )	SI KEPO (Sistem Informasi Ketetapan Pajak Daerah Online) hadir untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat Kota Semarang dalam pelayanan perpajakan daerah secara digital serta untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah
100	Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang	Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang adalah sistem informasi yang diperuntukan sebagai platform pendataan bagi pelaku 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang serta sebagai media informasi ekosistem pendukung ekonomi kreatif lainnya.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
101	Pelayanan Informasi Administrasi melalui Whatsapp Costumer Service dan Linktree di Kelurahan Wonosari	Pelayanan Informasi Administrasi melalui Whatsapp Costumer Service dan Linktree di Kelurahan Wonosari digunakan untuk memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi secara online serta memanfaatkan media sosial facebook, twitter, dan instagram untuk menyampaikan keluhan dan penyampaian pelayanan.
102	Mas Awan Sigap (Masyarakat Relawan Siaga dan Tanggap)	Mas Awan Sigap (Masyarakat Relawan Siaga dan Tanggap) untuk memaksimalkan relawan sebagai garda terdepan informasi kedarifatan di Kota Semarang dengan menggunakan teknologi aplikasi kedaruratan, realtime dan tidak hoax, serta penanganan kedaruratan dapat dengan cepat diatasi.
103	Sistem Aplikasi QR Code Komunitas Digital	Sistem Aplikasi QR Code untuk pendataan komunitas digital pada ruang Semarang Digital Kreatif (SDK) (Apik Dadi Komunitas Semarang) merupakan aplikasi penyediaan data real komunitas dan anggota komunitas dalam pemanfaatan ruang digital Semarang Digital Kreatif.
104	SI RINDU (SISTEM INFORMASI HARIAN TERPADU)	SI RINDU (Sistem Informasi Harian Terpadu) merupakan aplikasi yang ditunjukan kepada keluarga/ penanggung jawab pasien agar keluarga pasien mendapatkan informasi tentang kondisi terkini pasien yang dirawat di ruang perawatan RSWN
105	Simentel	SI MENTAL (Sistem Informasi Menara Telekomunikasi) Kota Semarang merupakan website yang memudahkan para investor telekomunikasi yang masuk di Kota Semarang bisa dengan mudah mengurus perijinannya dan dalam waktu singkat
106	PEMANIS (PERSALINAN MENYENANGKAN, AMAN DAN NYAMAN DI RUANG ISOLASI)	PEMANIS (Persalinan Menyenangkan, Aman, dan Nyaman di Ruang Isolasi) merupakan inovasi RSWN untuk pasien maternal Covid 19 yang harus dirawat di ruang isolasi dengan memberikan perawatan dan pijak Effleurage yang bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan otot abdomen, dan meningkatkan relaksasi fisik dan mental, serta memberikan rasa nyaman dan mengurangi kecemasan selama proses persalinan.
107	TERPESONA (TABEL EWSS, RESIKO JATUH , PERKEMBANGAN, ALERGI OBAT, DO NOT RESUSITATE)	Merupakan inovasi dalam bidang kesehatan berupa kumpulan dokumen pada status pasien sebagai alat pengkajian yang kemudian di rangkum dalam tabel berupa Paparan Bergambar dan diinformasikan di papan TERPESONA RSWN.
108	PARU KRONIS - PENYARING UDARA (HEPAFILTER) MURAH DAN EKONOMIS	Paru Kronis (Penyaring Udara (Hepafilter) Murah dan Ekonomis) merupakan inovasi alat untuk memurnikan udara dalam ruangan agar terhindar dari paparan virus covid-19 dengan harga yang lebih terjangkau.
109	SIP (Sistem Informasi Parkir)	Inovasi pengelolaan perparkiran berbasis aplikasi online. Melalui SIP (Sistem Informasi Parkir) menggunakan GIS (Geographical Information System) untuk memantau kinerja parkir umum.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
110	SI JAHE DAN PUTRI MAYANG (Sisa Jahe dan Putih Telur Dibuang Sayang)	Merupakan inovasi dengan pemanfaatan sisa jahe dan putih telur menjadi produk yang bernilai dan dapat di konsumsi kembali.
111	COMPRESSED NATURAL GAS (CNG) PADA ARMADA FEEDER TRANS SEMARANG	Pemasangan CNG ( <i>Compressed Natural Gas</i> ) pada Armada BRT Trans Semarang dan Feeder untuk mengurangi emisi gas buang, menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara, serta sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah dalam Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Pemasangan converter kit menjadikan bahan bakar bus menjadi hybrid yang mengatur komposisi bahan bakar 70% CNG dan 30% solar yang lebih rendah emisi.
112	Eco-Edu Wisata Pantai Mangunharjo	Merupakan inovasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kecamatan Tugu. Eco-Edu Wisata Pantai Mangunharjo memiliki konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mendasarkan pada prinsip pembangunan ekowisata, yaitu mengkombinasikan kepentingan industri pariwisata dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk pelibatan masyarakat setempat.
113	JARUM SI KENANG (Jejaring Komunitas Musisi Keroncong Semarang)	JARUM SI KENANG merupakan salah satu inovasi sekaligus komunitas yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Komunitas ini merupakan wadah bagi para musisi keroncong di Kota Semarang yang bertujuan untuk melestarikan musik keroncong yang saat ini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, keberadaan komunitas ini juga diharapkan menjadi daya tarik kunjungan pariwisata di Kota Semarang melalui parade dan even musik keroncong yang diselenggarakan.
114	Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata	Masih terkait sektor pariwisata, program Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata merupakan program kerja Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengembangan potensi-potensi lokal untuk menjadi daya tarik wisata melalui giat pariwisata seperti pelatihan wisata, diskusi, transfer ilmu, best practices, dan lain-lain. Pelibatan berbagai sektor kalangan mulai dari akademisi, pelaku wisata, pemerintah, sektor bisnis, dan warga masyarakat menjadi kunci dalam giat pariwisata ini. Diharapkan program kerja tersebut dapat menginisiasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang belum berkembang atau sedang dalam tahap rintisan.
115	PAK RAHMAN (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman)	PAK RAHMAN merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk berkomitmen bersama untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi, khususnya di situasi pasca pandemi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung tagline "50-ewu iso blonjo werno-werno", PAK RAHMAN diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
116	SEMAR MRANTASI (Semangat Bergerak Bersama Mewujudkan Kota Semarang Tangguh Pangan dan Gizi)	Pandemi Covid-19 telah mengajarkan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Sistem logistik pangan yang sempat terganggu karena aktivitas masyarakat yang terbatas membuat pemerintah harus meningkatkan kualitas ketahanan pangan untuk kondisi-kondisi yang tidak terduga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan mengembangkan Semar Mrantasi, suatu sistem informasi berbasis web yang menyajikan informasi seputar pangan di Kota Semarang, termasuk perkembangan terkini harga-harga komoditas pokok
117	Layanan Home Care Pertanian	Layanan Home Care Pertanian merupakan program Dinas Pertanian Kota Semarang yang meliputi konsultasi, visitasi, edukasi, dan penanganan secara langsung di sektor pertanian. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat Kota Semarang dengan datang secara langsung di pojok konsultasi Urban Farming Corner (UFC). Jika diperlukan, petugas dari Dinas Pertanian Kota Semarang akan melakukan pengamatan dan penanganan langsung terhadap tanaman yang bermasalah ke lokasi pemohon layanan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun
118	E-Pendawa (Aplikasi Penataan Penetapan Perijinan Pendapatan Dan Pengawasan)	E-Pendawa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk untuk melakukan proses seleksi dalam rangka penataan dan penempatan kembali pedagang pasar sesuai kriteria yang ditentukan. Dengan melakukan registrasi dan penginputan berkas seperti KTP, KK, SIPTD, dan dokumen pendukung lain, para pedagang dimudahkan dalam memperoleh ijin berdagang di pasar-pasar di Kota Semarang. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat dalam penataan kembali para pedagang di Pasar Johar yang sempat direlokasi di tempat lain selama proses pembangunan
119	APIK KERJAKU (Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu)	Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu (APIK KERJAKU) adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Salah satu jenis layanan adalah mempertemukan antara pemberi kerja (pengusaha/perusahaan) dengan pencari kerja. APIK KERJAKU dapat diakses baik oleh perusahaan/pengusaha maupun pencari kerja melalui website <a href="http://siker.semarangkota.go.id">siker.semarangkota.go.id</a> .
120	Tata Ruang Pro Investasi	Pemerintah terus mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia melalui perbaikan sistem kemudahan berinvestasi yang dapat menjadi momentum untuk peningkatan optimism and awareness terkait reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung kemudahan berusaha. Di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melahirkan inovasi Tata Ruang Pro Investasi yang gawangi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang bertujuan untuk melakukan percepatan, peningkatan pelayanan, dan kemudahan akses kepada masyarakat dan calon investor dalam hal perizinan keruangan dengan pendayagunaan data spasial dan teknologi GIS (Geographic Information System). Sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada calon investor tentang diizinkan atau tidaknya suatu jenis investasi tanpa harus datang ke kantor pelayanan sampai dengan menganalisa secara otomatis ketentuan-ketentuan tata ruang terhadap rencana-rencana investasi/pembangunan dari para investor/masyarakat dan instansi-instansi lainnya dalam sekali klik.
121		

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
	Dolan E-Semar (Dodolan E-Commerce e Wong Semarang)	Di era digital saat ini, data berperan penting dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Hasil analisis data yang tepat dapat membantu pemerintah termasuk di Kota Semarang untuk memperoleh informasi mengenai industri, UMKM, pariwisata, potensi daerah, dan informasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merencanakan strategi pembangunan daerah serta mewujudkan visi dan misi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang atau Diskominfo memanfaatkan teknologi E-commerce analytics untuk meningkatkan kesejahteraan paran pelaku usaha. E-commerce analytics merupakan big data dari berbagai marketplace yang diolah dan dianalisa untuk keperluan tertentu seperti membuat keputusan (decision making), prediksi, juga menggugah masyarakat untuk beralih dari bisnis konvensional ke digital. Diskominfo Kota Semarang mengembangkan platform analisa ekonomi digital yang berbasiskan analisis transaksi, informasi potensi daerah, serta analisis produk top UMKM yang keseluruhannya terangkum dalam 1 platform yang disebut dengan Dolan E-Semar (Dodolan E-Commerce Wong Semarang)
122	SI LINTAS (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang)	Kebutuhan akan data dan informasi sudah menjadi hajat masyarakat dewasa ini. Namun seringkali masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengelolaan informasi publik termasuk di Kota Semarang mulai dari pelayanan permintaan data dan informasi yang membutuhkan waktu cukup lama serta bersifat ketat dan terbatas sampai dengan kurangnya pengawasan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh perangkat daerah dan BUMD terhadap publik. Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih sering terjadi, Pemerintah Kota Semarang melalui Diskominfo menghadirkan inovasi Si Lintas, Sistem Pelayanan Informasi Publik berbasis website di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya menuju keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan informasi publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, pelayanan informasi di Pemerintah Kota Semarang menjadi lebih mudah, cepat, cermat, transparan, akuntabel, proporsional serta dapat mendorong partisipasi masyarakat umum tak terkecuali masyarakat difabel dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
123	PANDANARAN (Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang)	PANDANARAN (Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang) dikembangkan karena banyaknya aduan masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan tetapi membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan, terutama kelompok rentan yaitu ibu hamil, disabilitas, orang sakit dan lansia. Prosedur pengaduan dari inovasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui Laporan Gubernur, Laporan Hendi, Hotline UHC, Instagram, Facebook dan Twitter, maupun secara langsung melalui petugas di Loker UHC. Inovasi ini menggunakan aplikasi SIM UHC yang mengintegrasikan segenap pemangku kepentingan seperti Dispendukcakil, BPJS Kesehatan, dan Rumah Sakit di Kota Semarang, sehingga proses penyelesaian aduan masyarakat terkait program UHC menjadi lebih cepat.
124	WARAK NGENDOG (Lawan Corona Virus Kota Semarang dengan Dukungan Integrasi Program dan Bergerak Bersama)	Penanganan penyakit menular berpotensi wabah di Kota Semarang sebelumnya tidak berjalan maksimal. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat di tahun 2019 terdapat 213.715 kasus ISPA. Pengendalian yang belum didukung oleh pelaporan secara digital menyebabkan penanganan belum berjalan cepat dan tepat. Hal ini ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap berbagai sektor, terutama kesehatan dan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		<p>ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang menginisiasi WARAK NGENDOG yang mempunyai dampak signifikan terhadap pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Case Fatality Rate (CFR) Covid-19 di Kota Semarang di tahun 2020 sebesar 8,4% menurun pada tahun 2022 menjadi 2,7%. WARAK NGENDOG menunjukkan kemampuan pemerintah untuk melakukan mitigasi pandemi didukung oleh platform digital STRONG dan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat, sehingga penanganan Covid-19 terlaksana dengan tepat, cepat, dan akurat sehingga dampak pandemi bisa diantisipasi dengan baik.</p>
125	PALAWA (Sistem Pelayanan Laboratorium Melalui Whatsapp)	<p>Transformasi digital telah mengubah cara berkomunikasi, termasuk antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan aplikasi terpopuler seperti Whatsapp-pun dilihat sebagai salah satu pilihan terbaik. Menanggapi hal tersebut, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang membentuk inovasi pelayanan publik melalui program “PALAWA” atau Pelayanan Laboratorium Melalui Whatsapp yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar layanan laboratorium lingkungan seperti informasi terkait biaya pengujian, konsultasi mengenai hasil pengujian serta informasi untuk keperluan pendidikan serta penelitian. Dengan adanya inovasi ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat, tepat, mudah, dan fleksibel.</p>
126	Program Sosialisasi Promosi dan Publikasi	<p>Program Sosialisasi Promosi dan Publikasi yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui UPTD Laboratorium Lingkungan berisi kegiatan presentasi ke beberapa kawasan industri di Kota Semarang dalam rangka mengenalkan dan mempromosikan pelayanan yang ada di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang. Beberapa manfaat dari program ini diantaranya memudahkan kerjasama antara UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang, lebih jauh diharapkan dapat terbentuk kesepakatan kerjasama antara pihak UPTD dan perusahaan-perusahaan yang dikunjungi. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini yakni mendapatkan respon positif dari para badan usaha di Kota Semarang yang linear dengan penambahan pendapatan daerah.</p>
127	APROKLIM TAPAK (Aplikasi Pemberdayaan Proklam Tingkat Tapak)	<p>Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan salah satu strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan mendorong kerjasama multipihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Dengan hadirnya inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini diharapkan Proklam dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terarah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam merealisasikan rencana kegiatan di setiap periode waktu sesuai tahapan yang direncanakan. Aplikasi ini juga menjadi instrumen yang akan memandu rencana tahapan pelaksanaan Proklam untuk dapat bersinergi dengan berbagai kegiatan terkait sehingga mampu memberikan gambaran titik awal dan akhir dalam rangka menyukseskan target capaian program secara keseluruhan</p>

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
128	Pemetaan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kota Semarang	Perkembangan teknologi berbasis spasial dan smartphone saat ini sudah hampir menjangkau semua sektor. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai salah satu alternatif pemetaan sebaran maupun pemantauan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pemetaan penghasil limbah B3 berbasis WebGIS online di aplikasi smartphone yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengawasan dan pemantauan limbah B3 di Kota Semarang
129	Percepatan Pemrosesan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan di Kota Semarang	Inovasi Percepatan Pemrosesan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dimana setiap pelayanannya dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program penyederhanaan SOP ini ditujukan untuk dapat meningkatkan percepatan dan kualitas layanan di bidang perizinan lingkungan atau persetujuan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta untuk mewujudkan good governance melalui prosedur kerja yang efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel yang akan mengantarkan Pemerintah Kota Semarang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.
130	eLING (Elektronik Legal Drafting)	eLING (Elektronik Legal Drafting) merupakan aplikasi online yang digunakan dalam mengusulkan Produk Hukum dari masing-masing Perangkat Daerah kepada Bagian Hukum. Setiap Perangkat Daerah wajib menginputkan dan mengupload draft Produk Hukum yang diusulkan melalui aplikasi ini, sehingga Bagian Hukum dapat merevisi dan menyetujui Produk Hukum yang diusulkan. Dengan menggunakan Aplikasi eLING ini proses verifikasi Produk Hukum bisa dilakukan secara online sehingga lebih efektif dan efisien tanpa harus berkunjung ke Bagian Hukum. Penyusunan Manual Book (Buku Panduan), Bimtek legal drafter, Sosialisasi, Publikasi dan pendampingan penggunaan Eling System pada jangka pendek.
131	MPP (Mall Pelayanan Publik) Metaverse	MPP (Mall Pelayanan Publik) Metaverse merupakan inovasi Teknologi Informasi dengan penerapan <i>Augmented Reality</i> dan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pelayanan Publik yang strategis di Kota Semarang. Inovasi ini diciptakan sebagai upaya untuk menjadikan pelayanan yang lebih murah, mudah dan cepat bagi masyarakat Kota Semarang. Melalui inovasi ini, masyarakat di domisilinya masing-masing dapat melakukan akses dan mendapatkan produk pelayanan tanpa harus berkunjung secara langsung.
132	Ruang Warga (Rembug Bareng Warga)	Ruang Warga atau RembUg bAreNG Warga merupakan inovasi berbasis digital bagi lembaga kemasyarakatan. Inovasi ini digunakan sebagai sistem pelaporan digital berbasis aplikasi android untuk pelaporan kinerja lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LPMK) di Kota Semarang secara transparan, mudah, informatif, <i>up to date</i> . Inovasi ini berfungsi untuk memudahkan pelaporan kinerja lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Kota Semarang.
133	Kado Mbak Ita (Kanugrahan Dokumen Baru Kagem Penduduk Pitulas Tahun)	Kado Mbak Ita (Kanugrahan Dokumen Baru Kagem Penduduk Pitulas Tahun) merupakan inovasi pelayanan publik melalui pengiriman secara langsung KTP elektronik. KTP elektronik akan dikirimkan ke rumah penduduk Kota Semarang saat ulang tahun ke 17, dan sudah melakukan perekaman KTP sebelum usia 17 tahun.
134	Roberto Carlos (Bergerak Bersama)	Bergerak Bersama Cegah Risiko Stunting Sejak Hamil, merupakan inovasi bidang kesehatan yang bertujuan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
	Cegah Risiko Stunting Sejak Hamil)	untuk menurunkan angka stunting melalui intervensi ibu hamil. Intervensi dilakukan dengan kelas ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Anemia, edukasi dan konseling ibu hamil, senam hamil, coocing class, dan pembuatan PMT ibu hamil. Inovasi ini dijalankan secara kolaborasi antara bidan, nutrisionis, dokter Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang.
135	Rumah Pelita	Rumah Pelita merupakan inovasi bidang kesehatan yang dirancang sebagai upaya penanganan stunting sejak hulu sampai hilir. Penanganan stunting terhadap balita dilakukan dengan daycare dengan memberikan pola asuh, penanganan gizi maupun sanitasi yang didukung oleh dokter anak, pengasuh, psikolog, dan juru masak, Selain itu Rumah Pelita juga mewadahi pelayanan bagi ibu hamil yang mengalami anemia dan KEK (Kekurangan Energi Kronis).
136	Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari	Pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari pada pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan secara serentak oleh 16 (enam belas) Kecamatan se-Kota Semarang dan OPD terkait yang telah ditunjuk. Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari merupakan program Walikota Semarang yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Tugas Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang adalah melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar kegiatan Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari dapat terselenggara secara baik dan manfaat pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang.
137	Smart Park	Smart Park merupakan inovasi berbentuk taman kota dengan berbagai fasilitas modern pendukung antara lain bebas akses wifi, toilet bagi disabilitas, penyiraman tanaman secara otomatis yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, tempat isi baterai handphone (charging station), dan noozel.
138	Pemasangan Pipa Resapan Horisontal sebagai Upaya Pengendalian Banjir	Pemasangan Pipa Resapan Horisontal merupakan inovasi yang dibuat sebagai salah satu usaha dalam upaya pengendalian banjir. Pemasangan pipa yang berfungsi untuk meresapkan air permukaan ke dalam tanah dan dipasang secara orizontal. Peresapan air ke dalam tanah sebanding dengan tinggi tekanan hidrolis.
139	Garang Asem (BerGerAk beRsama dalam aksi sayANG pangaAn kota SEMarang)	BerGerAk beRsama dalam aksi sayANG pangaAn kota SEMarang adalah Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (food waste and food loss) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.
140	Sekolah Gratis	Sekolah Gratis merupakan Inovasi program pendidikan sebagai dasar pembangunan manusia. Inovasi ini dilakukan dengan menggratiskan biaya pendidikan tidak hanya sekolah negeri, namun bagi siswa sekolah swasta.
141	Jaminan Mutu Keamanan Pangan Menuju Semarang Semakin Hebat (Jamu Sehat)	Pembentukan pasar rakyat percontohan yang sudah terjamin mutu dan Keamanan pangan yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dibidang pangan.
142	Lambung Pangan Kota Semarang (Lumpang Semar)	Lumpang Semar merupakan inovasi sistem jaringan akses pangan masyarakat melalui lambung pangan. Inovasi ini dilaksanakan dengan masyarakat di Kota Semarang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan.
143	Detektif pangan	Detectif Pangan merupakan inovasi bidang ketahanan pangan dengan menargetkan siswa Sekolah Dasar (SD) yang terpilih, sebagai pengawas makanan di lingkungan sekolah. Siswa SD yang terpilih sebagai detectif pangan menjadi role model dan melakukan edukasi kepada teman



No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		temannya dalam membawa bekal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Selain itu detectif pangan juga dapat melakukan pengawasan terhadap jajan di sekitar sekolah yang mencurigakan.
144	Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi	Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi dalam inovasi ini dimaknai sebagai kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, subsistem konsumsi, dan subsistem keamanan pangan dengan menyesuaikan kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Melalui inovasi ini diharapkan setiap kelurahan dapat memenuhi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.
145	Eco-Enzym	Bank Eco Enzym Semarang Hebat diinisiasi oleh Komunitas Eco Enzym Nusantara bersama warga Kelurahan Plombokan. Eco enzym memiliki fungsi utama sebagai bahan penjernih air dan penghilang bau air serta dapat mengurangi timbunan sampah. Eco Enzym merupakan inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan limbah sampah organik (sisa sayuran, buah, maupun kulit buah) supaya memiliki nilai guna lebih. Melalui proses fermentasi limbah sampah organik, cairan Eco Enzym dimanfaatkan sebagai karbol, sabun cuci, penjernih udara, maupun hand sanitizer.
146	Sidaksos (Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial)	Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial Kota Semarang merupakan inovasi pelayanan public yang bertujuan untuk memaparkan sekaligus memvisualisasikan data terkini tentang warga masyarakat kurang mampu (miskin) di Kota Semarang. Melalui visualisasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan bantuan social dan penanganan fakir miskin. Melalui inovasi tersebut akhirnya pengambilan keputusan dan pemberian bantuan terkait hal tersebut lebih tepat sasaran dan kebutuhan.
147	Janaka	Sistem Informasi Jejaring dan Pendataan Perpustakaan Berbasis Website. Aplikasi ini mendata sekaligus memverifikasi dan memberikan sertifikat bagi seluruh perpustakaan di Kota Semarang, dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, taman baca dan rumah pintar serta perpustakaan lainnya. Dengan adanya system ini akan meningkatkan literasi baik digital dan memperkaya wawasan daya kritis masyarakat
148	Si Kembang Asem (sinergitas ekosistem kesenian gambang semarang)	Merupakan inovasi di bidang seni yang dilakukan sebagai upaya pelestarian pemajuan kebudayaan kearifan lokal di Kota Semarang. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan supaya terlaksana kegiatan Gambang Semarang secara berkala dan Kesenian Gambang Semarang masuk dalam kurikulum Pendidikan.
149	Kopi Jarik's (Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang)	Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang merupakan inovasi yang bertujuan menjadi jembatan kolaborasi antarpelaku usaha pariwisata khususnya di sektor hotel dan resto terutama dalam bidang MICE (Meeting, Incentives, Conventions, dan Exhibitions).
150	BACARAD (Baca barcode Radiologi)	Memberikan informasi hasil pemeriksaan pasien radiologi melalui website sehingga mempermudah pasien untuk menyimpan hasil pemeriksaan radiologi, dapat diakses darimana saja. Pasien tidak repot membawa foto X-Ray yang lumayan besar fisiknya.
151	SIKEREN (Sistem Informasi Kemoterapi RSWN)	Memberikan informasi tentang jadwal kemoterapi yang akan dijalani pasien, segera setelah DPJP memberikan surat perintah kemoterapi sehingga mempermudah petugas dalam penjadwalan kemoterapi, memberikan informasi penjadwalan kemoterapi pasien segera setelah pasien diijinkan DPJP untuk dilakukan kemoterapi, mempermudah masyarakat/pasien untuk mengakses

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		jadwal kemoterapi, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.
152	SI MENI PEDI (Sistem Peningkatan Informasi Berbasis Peta Digital dengan Menggunakan <i>Avenza Maps</i> dan <i>ArcGis</i> )	Aplikasi untuk melakukan sosialisasi dan mempermudah pengawasan yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terhadap titik lokasi yang dilarang dan diperbolehkan untuk aktivitas hiburan dan berjualan di Kota Semarang berdasarkan Perda, Perwal dan Surat Keputusan Wali Kota Semarang
153	Anjungan Tenaga Kerja Mandiri (ATM) Disnaker Kota Semarang	Anjungan tenaga kerja yang digunakan untuk mengakomodasi masyarakat yang membutuhkan layanan tenaga kerja secara mandiri tanpa bertemu dengan petugas. Adapun layanan yang diberikan di antaranya layanan antar kerja, layanan pendaftaran pelatihan kerja hingga layanan mandiri terkait dengan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
154	SISWI (Sistem Integrasi <i>Walk in Interview</i> )	<i>Platform</i> bagi pencari kerja dalam mengikuti kegiatan rekrutmen tenaga kerja yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Fitur di dalam <i>platform</i> ini di antaranya seperti fitur untuk mendaftar, daftar ulang, <i>WhatsApp Blast</i> terkait kegiatan rekrutmen. <i>Platform</i> ini dapat diakses pada <a href="http://smg.city/siswi">smg.city/siswi</a>

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2025 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan nasional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global dan domestik, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global, telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kota Semarang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

##### **3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional**

Kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Ketidakpastian global tersebut dipicu oleh dinamika negara-negara maju yang berdampak ke global, seperti Amerika Serikat yang masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya seperti di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19 dan Eropa yang kondisinya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Selain masalah ekonomi, kondisi geopolitik juga menunjukkan resiko yang makin tinggi. Perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan *downside risk* terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan dipengaruhi yang akan menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar yang akan menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global. Di sisi lain prospek

pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah seperti yang disampaikan oleh lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh *International Monetary Fund* (IMF) menjadi hanya 3% dan oleh Bank Dunia hanya 2,1%. Tingkat inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8% lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Dari sisi kegiatan manufaktur, terlihat 69,6% negara berada di zona kontraksi seperti Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sementara 30% negara lainnya berada di zona ekspansi, termasuk Indonesia. Artinya banyak negara yang tadinya berharap setelah pandemi *recover* dan kegiatan manufakturnya tumbuh kuat, ternyata tidak mengalami situasi pemulihan dan pertumbuhan manufaktur. Jadi dalam konteks ini, Indonesia termasuk dalam kategori ekonomi dan kegiatan manufakturnya resiliensi atau tetap bisa bertahan positif dan ekspansif.

Dari sisi harga komoditas, volatilitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi *supply* dan *demand*, namun juga dipengaruhi oleh faktor politik dan perang yang ikut mengambil peran. Secara keseluruhan, beberapa komoditas yang penting bagi ekonomi Indonesia menunjukkan koreksi yang cukup signifikan. Sejak awal tahun 2023, Batu Bara turun 63%, minyak turun 14,6%, natural gas atau gas alam turun bahkan 43,7%, *Crude Palm Oil* (CPO) turun 14,8%, gandum turun 23,4%, kedelai turun hampir 5%, dan beras turun 6,5%. Barang-barang tersebut merupakan komoditas yang penting pengaruhnya di dalam perekonomian Indonesia dan semuanya dalam kondisi penurunan *year to date*.

Perekonomian Indonesia sampai triwulan IV tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dan terus berlanjut ditengah prospek penurunan ekonomi global. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,1% (YoY) sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat meskipun sedikit tertahan. Selain itu, dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sejalan dengan adanya aktivitas partai politik menjelang pemilu, penyerapan anggaran pemerintah pada akhir tahun, serta investasi proyek pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan mampu tumbuh tinggi, serta memiliki kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan. Industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan tumbuh solid, meskipun berada dibawah pertumbuhan ekonomi.

### **3.1.2. Kondisi Perekonomian Regional**

Perekonomian Jawa Tengah pada Tahun 2023 tumbuh 4,98% (YoY). Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terbesar pada sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal tetap Bruto. Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang memiliki andil terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif sejalan dengan daya beli masyarakat yang mulai stabil akibat inflasi yang terkendali. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang mencerminkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih berada pada level optimis (>100).

Namun demikian, terdapat beberapa komponen yang menahan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yaitu investasi dan net ekspor luar negeri. Pada Tahun 2023,

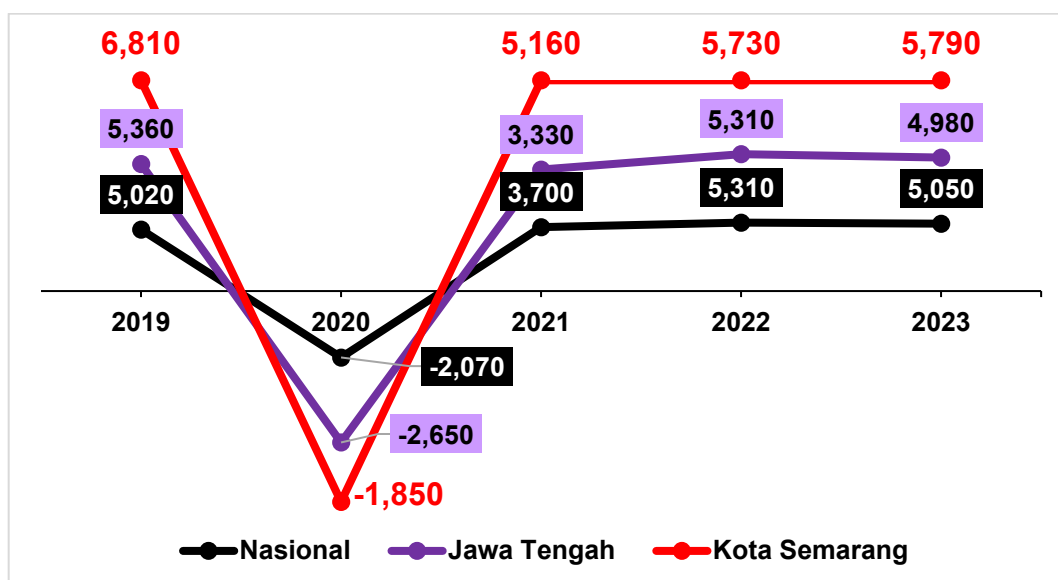
komponen investasi terkontraksi karena beberapa proyek investasi sudah terealisasi pada semester I 2023, serta adanya kendala pembangunan PSN Jalan Tol Semarang – Demak seksi I akibat pembebasan pembangunan pelabuhan Jetty di KIT Batang yang rencananya akan dimulai pada Triwulan III 2023 karena faktor perizinan. Di sisi lain, kinerja ekspor pada tahun 2023 juga masih menghambat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi. Ekspor Jawa Tengah tercatat masih terkontraksi. Hal ini disebabkan oleh kinerja ekspor luar negeri yang masih terkontraksi, seiring dengan perlambatan permintaan barang ekspor dari mitra dagang utama (Amerika Serikat dan Eropa). Sejalan dengan hal tersebut, impor Jawa Tengah juga masih terkontraksi dikarenakan penurunan impor bahan baku dan barang modal, meski impor barang konsumsi meningkat.

Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terbesar PDRB tahun 2023 masih berasal dari industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor utama industri pengolahan tercatat tumbuh positif, seiring dengan permintaan domestik yang masih kuat. Kenaikan kinerja industri pengolahan ini antara lain juga tercermin dari perbaikan Indeks Penjualan Riil (IPR) dan penjualan kendaraan bermotor.

Pada tahun 2023, inflasi gabungan kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami tren penurunan dan telah kembali ke rentang sasaran inflasi  $3\pm 1\%$ . Inflasi tahunan terendah terjadi di Kota Purwokerto, sementara inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal.

Ke depan, pemulihan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan terus berlanjut dengan didukung perbaikan dari sisi domestik. Saat ini peningkatan ekspor luar negeri diperkirakan masih terkendala oleh moderasi perekonomian global akibat inflasi global yang masih tinggi dan *heatwave* yang berdampak pada peningkatan harga komoditas, terutama pangan. Di sisi domestik, kinerja investasi diperkirakan masih tetap tumbuh kuat. Prospek Jawa Tengah yang memiliki kawasan industri terpadu serta berbagai kawasan peruntukan industri, diharapkan mampu terus menjadi daya tarik bagi investor untuk merelokasi industri maupun berinvestasi. Selanjutnya, peran stimulus fiskal dan realisasi program pemerintah akan berkontribusi positif sebagai penyangga pemulihan ekonomi.

Pada level Kota Semarang, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 5,79%. Untuk tahun 2025, dengan mengusung tema pembangunan “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara Berkesinambungan”, Pemerintah Kota Semarang menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 – 6,50% dengan fokus pada peningkatan ekonomi lokal terutama pada UMKM/IKM. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah tumbuh tinggi di tahun 2023 (5,79%) dari basis yang rendah di tahun 2020 (-1,85%), di tahun 2024 dan 2025 Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk tetap bisa menjaga momentum dan mempertahankan pertumbuhan positif tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengentasan kemiskinan terutama pada masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem menjadi fokus pemerintah Kota Semarang dengan target angka kemiskinan menurun hingga 3,98-3,74%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

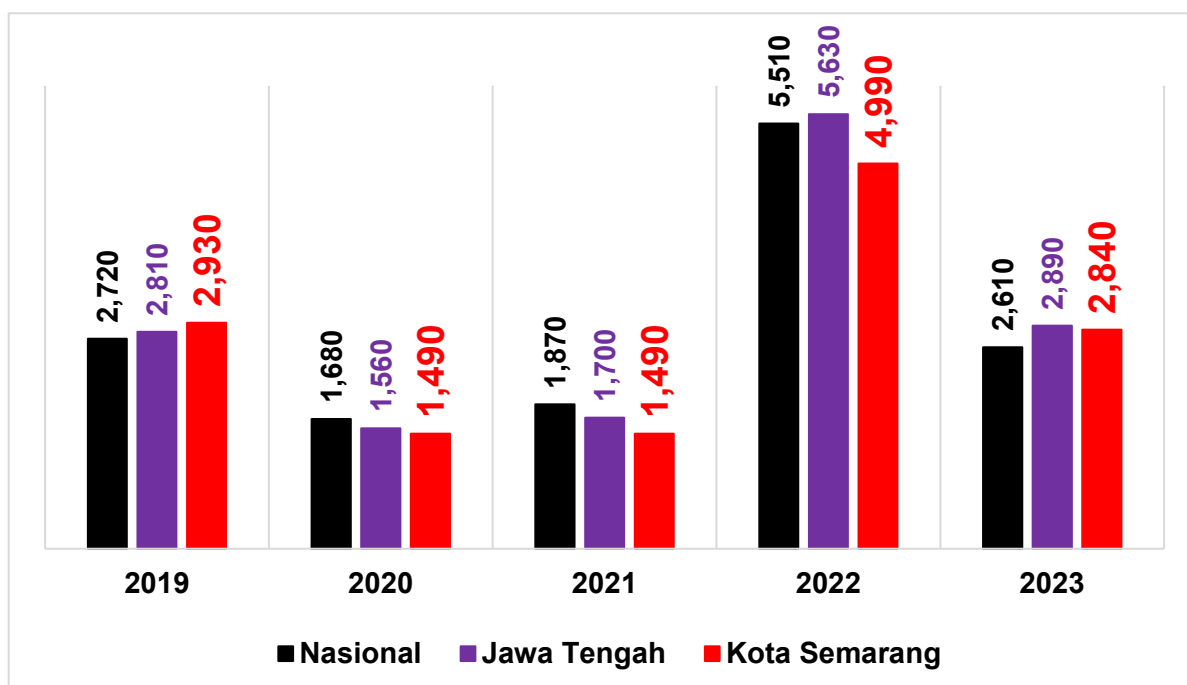
**Gambar 3. 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Dengan rata-rata 4,84%, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada periode 2019 sampai dengan 2023 selalu berada di atas level pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini cukup relevan karena Kota Semarang selama ini selalu menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK Jawa Tengah. Struktur perekonomian Semarang tersebar pada lima sektor ekonomi utama, sehingga terhindar dari ketergantungan pada satu sektor spesifik. Berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha, sektor terbesar di Kota Semarang pada tahun 2023 (angka masih sangat sementara), masih didominasi oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2024 dan 2025 ditargetkan optimis di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Prospek perekonomian Kota Semarang pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan mengalami percepatan seiring dengan peningkatan ekonomi pasca Pandemi yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Semarang dan keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani dampak Inflasi.

Selain perbaikan infrastruktur, upaya lain yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yakni kemudahan perizinan sebagai daya tarik para investor untuk berinvestasi di Kota Semarang. Iklim investasi di Kota Semarang khususnya di sektor perdagangan dan jasa terbukti mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat dengan meningkatnya banyaknya pembangunan berbagai pusat-pusat perbelanjaan dan infrastruktur yang akan meningkatkan perekonomian di Kota Semarang. Berbagai inovasi juga terus dilakukan, salah satunya dengan cara bersinergi dengan para pelaku UMKM agar produk unggulannya bisa menjadi produk ekspor yang diminati pasar internasional, serta melakukan kerjasama dengan toko retail modern untuk pemasaran produk UMKM. Proyeksi 2025 dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi masih disokong oleh konsumsi pemerintah yang masih tinggi. Sedangkan ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan makin tingginya permintaan ekspor.

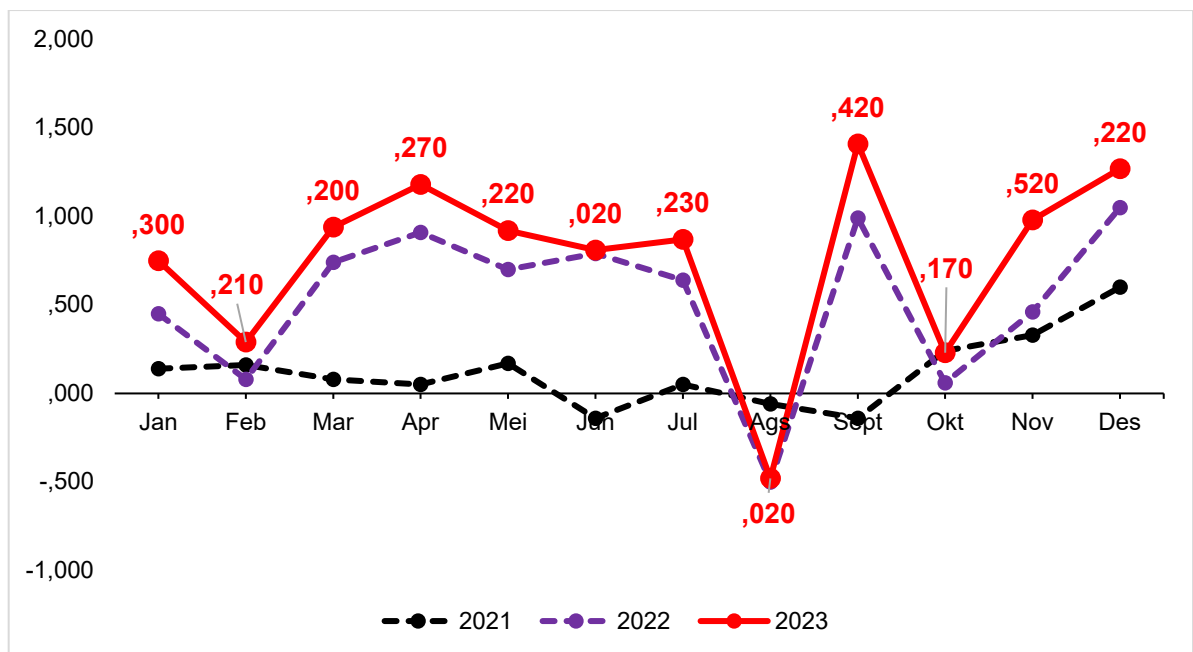
Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Inflasi nasional mengalami penurunan dari 5,51% di tahun 2022 menjadi 2,61% di tahun 2023, sejalan dengan penurunan inflasi di tingkat Jawa Tengah dari 5,63% di tahun 2022 menjadi 2,89% di tahun 2023. Di sisi lain, inflasi Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 2,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menahan laju inflasi pada saat pasca pandemi berdampak positif.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 3. 2**  
**Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Nilai inflasi bulanan Kota Semarang di tahun 2023 tercatat cukup fluktuatif dan cenderung meningkat memasuki akhir tahun. Peperangan antara Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia mengakibatkan naiknya harga bahan kebutuhan pokok yang memicu lonjakan inflasi di penghujung tahun 2023. Inflasi tertinggi berturut-turut terjadi pada bulan September (0,42%), Juli (0,23%), dan April (0,27%), dengan pendorong utama inflasi adalah komoditas umum seperti makanan, minuman dan tembakau, dan komoditas Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Oktober (0,17%), Agustus (0,02%) dan Februari (0,21%). Perkembangan inflasi bulanan pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Semarang, 2024

**Gambar 3. 3**  
**Inflasi Bulanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2023**

Proyeksi pengendalian inflasi Kota Semarang pada tahun 2025 diharapkan pada kisaran 2,3 $\pm$ 1 persen. Hal ini dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan komoditas umum masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok. Yang perlu menjadi perhatian lebih adalah isu nasional terkait kenaikan harga BBM yang berdampak pada peningkatan harga bahan dan kebutuhan pokok. Selain itu, ketersediaan dan kecukupan komoditas kesehatan, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya juga harus dapat dipertahankan sehingga ekspektasi positif masyarakat akan terjaga.

### 3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Kondisi perekonomian daerah tahun 2025 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Isu perubahan iklim

Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut transformasi *green economy* oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Hal ini berdampak pada perlunya kebijakan dan strategi mendukung *green economy investment* yang masih perlu ditingkatkan implementasinya di Kota Semarang, khususnya pada sektor IKM dan UMKM. Perubahan iklim juga dapat berpengaruh terhadap penurunan kondisi infrastruktur di Kota Semarang. Pengembangan ekonomi sirkular dan penguatan ketahanan pangan juga menjadi perhatian di tahun 2025.

b) Isu terkait ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina

Konflik antara Rusia dan Ukraina diindikasikan akan berdampak terhadap terganggunya pasokan pangan global yang mendorong peningkatan harga pangan global sehingga mengakibatkan krisis pangan dunia. Hal ini karena Rusia dan Ukraina adalah negara eksportir gandum/terigu terbesar di dunia. Krisis pangan akan sangat berdampak terhadap negara berpenghasilan rendah, negara dengan konsumsi gandum yang tinggi, dan mendorong substitusi komoditas



pangan di berbagai negara. Selain itu, kondisi perang dagang dan perebutan pengaruh antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia (Amerika Serikat dan Tiongkok) menjadi hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan di tahun 2025.

- c) Isu meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*)  
Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/*supply* yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan. Harga komoditas energi seperti gas alam dan batu bara masih persisten tinggi sejak perang di Ukraina, sedangkan harga minyak mentah turun setelah pengumuman *supply cut* oleh *Organization of The Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Harga komoditas pangan seperti kedelai dan jagung kembali naik karena faktor cuaca dan geopolitik, serta harga *Crude Palm Oil* (CPO) sedikit kembali naik sedangkan harga gandum turun. Kenaikan pada harga komoditas pangan dan energi tersebut memicu tekanan inflasi di banyak negara yang kemudian mendorong pengetatan kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga *The Fed* yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain isu-isu tersebut, pertumbuhan perekonomian tahun 2024-2025 juga masih dibayangi oleh beberapa risiko dan tantangan lainnya, antara lain:

- 1) Pemulihan Ekonomi pasca pandemi Covid-19  
Pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian terutama bagi UMKM lokal. Pencabutan status pandemi dan berubah menjadi endemi merupakan peluang bagi sektor UMKM untuk kembali pulih seperti kondisi sebelum Covid-19.
- 2) Inovasi disruptif  
*Disruptive innovation* merupakan suatu inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan dapat secara drastis mengubah pasar, seperti fenomena kecerdasan buatan yang berpotensi menghilangkan pekerjaan tertentu yang bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Hal ini dapat disikapi sebagai tantangan, namun juga bisa menjadi potensi usaha baru bagi generasi muda yang lebih kreatif. Inovasi disruptif yang didominasi oleh perkembangan teknologi informasi ini tidak dapat dihindari karena masyarakat akan lebih memilih kemudahan dalam setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan mendukung seluruh pengusaha baik yang berplatform *online* maupun *offline* agar tetap dapat berkompetisi di pasar domestik maupun global.
- 3) Ancaman Inflasi  
Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/*supply* yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan yang memicu tekanan inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun inflasi di Kota Semarang sepanjang tahun 2023 relatif terkendali, namun kewaspadaan terhadap potensi inflasi tetap harus diperhatikan.
- 4) Pemilu dan Pilkada serentak 2024  
Adanya Pilkada dan Pemilu serentak pada tahun 2024 menyebabkan kerawanan bagi dunia usaha sebagai akibat dari ketidakstabilan politik pada tahun tersebut, namun berdasarkan hasil riset dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat justru akan mengalami kenaikan.

Di sisi lain, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Semarang di tahun 2025 antara lain:

- 1) Semarang memiliki potensi dari sisi lokasinya yang berada di tengah jalur nasional dan regional. Jalur masuknya pun lengkap, mulai dari Pelabuhan Tanjung Emas, Tol Trans Jawa, Stasiun Kereta Api, serta Bandara Ahmad Yani, termasuk adanya akses penerbangan langsung dari Kota Semarang ke IKN melalui Balikpapan;
- 2) Adanya PP No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Peraturan ini mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan pembangunan diluar APBD;
- 3) Adanya Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang. Peraturan ini dapat meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pertumbuhan investasi;
- 4) Adanya *Major Project* di Provinsi Jawa Tengah seperti Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan KSPN Borobudur yang diharapkan akan ikut memberikan dampak pada perekonomian Kota Semarang sebagai *hub* kawasan-kawasan tersebut.
- 5) Pengembangan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas terus dilakukan di Kota Semarang, sehingga dukungan terhadap pertumbuhan investasi dapat terjaga untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri;
- 6) Pemerintah Daerah Kota Semarang berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang keterampilan sehingga menopang berbagai kegiatan bisnis dalam skala kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini termasuk pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan kinerja bisnis dan mengakses sumber pendanaan dan *market place*;
- 7) Inflasi yang relatif terkendali dan terhitung stabil. Laju inflasi tahun 2023 sebesar 2,84%, ini termasuk angka yang bagus ditengah gonjang ganjing adanya perang geopolitik, terlebih di tahun sebelumnya Kota Semarang mengalami peningkatan inflasi. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, Kota Semarang tidak termasuk tinggi inflasinya. Justru yang tertinggi ada di Tegal dengan inflasi 3,28%.

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Semarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 maka prospek perekonomian daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang** Tahun 2025 ditargetkan antara **5,80 – 6,50%**.
- Sedangkan **tingkat inflasi** tahun 2025 ditargetkan akan berada di kisaran **2,3±1%** dengan asumsi Pemerintah Kota Semarang mampu menjaga harga komoditas dasar di tingkat domestik.
- **Nilai Investasi** akan naik dari sisi PMTB dan perubahan inventori seiring dengan membaiknya kondisi pasca Pandemi Covid-19.
- Dengan optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, maka **Angka Kemiskinan** 2025 ditargetkan turun menjadi **3,98 – 3,74%**. Target tersebut juga turun jika dibandingkan target pada tahun 2024 sebesar **3,84 – 4,04%**.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di tahun 2025 ditargetkan **5,61 – 5,31%** dari total seluruh angkatan kerja di Semarang. Target tersebut turun jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang berkisar antara **7,70 – 8,00%**.

**Tabel 3. 1**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Semarang**  
**Tahun 2024 dan 2025**

No	Indikator	Realisasi			Rerata	2024	2025
		2021	2022	2023		Target RKPD	Target RKPD
1	LPE (%)	5,16	5,73	5,79	5,56	5,70 – 6,20	5,80 – 6,50
2	Inflasi (%)	1,49	4,99	2,84	3,10	2,4 ± 1	2,3 ± 1
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN (juta rupiah)	22.538.063	24.662.877	27.205.700	24.802.213	27.362.089	29.277.435
4	Kemiskinan (%)	4,56	4,25	4,23	4,35	3,84 - 4,04	3,98 – 3,74
5	TPT (%)	9,54	7,60	5,99	7,71	7,70 - 8,00	5,61 – 5,31

*Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024*

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2021-2026. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar daerah lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan pemantauan dan evaluasi guna menjaga sinergitas kebijakan fiskal nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan

RPJMD tahun 2025, yaitu keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2025 melalui peningkatan penerimaan daerah, penajaman alokasi belanja, dan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suatu daerah yang kemampuan keuangannya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Gambaran realisasi dan proyeksi keuangan daerah serta kerangka pendanaan kemampuan keuangan Daerah Kota Semarang tahun 2022 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3. 2**  
**Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2022 s/d 2025**

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024	TA 2025
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Un-Audited)	INDUK	TARGET RKPD
PENDAPATAN DAERAH								
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>2.853.408.000.000</b>	<b>2.533.643.457.802</b>	<b>2.545.975.944.029</b>	<b>2.865.712.538.632</b>	<b>2.884.216.349.076</b>	<b>2.818.391.526.068</b>	<b>3.161.678.857.823</b>	<b>3.826.262.515.007</b>
Pajak Daerah	2.227.149.000.000	1.937.950.180.074	1.956.376.326.258	2.190.083.500.000	2.200.262.872.393	2.134.352.914.529	2.389.028.620.494	3.040.722.250.000
Retribusi Daerah	140.698.000.000	110.704.628.900	100.975.888.363	149.306.250.120	152.519.479.211	128.678.256.968	666.461.818.551	688.841.797.729
<i>a. Retribusi Non BLUD</i>				149.306.250.120	152.519.479.211	128.607.457.248	218.359.266.726	217.603.523.168
<i>b. Retribusi BLUD</i>				-	-	-	448.102.551.825	471.238.274.561
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	49.725.000.000	66.717.312.156	66.717.372.156	73.297.199.962	76.956.408.922	73.271.009.532	79.688.418.778	84.386.062.278
Lain - lain PAD yang Sah	435.836.000.000	418.271.336.672	421.906.357.252	453.025.588.550	454.477.588.550	482.089.345.039	26.500.000.000	12.312.405.000
<i>a. BLUD</i>							-	-
<i>b. Selain BLUD</i>							26.500.000.000	12.312.405.000
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.484.519.420.000</b>	<b>2.485.202.948.535</b>	<b>2.423.149.928.403</b>	<b>1.962.790.329.000</b>	<b>2.552.233.158.470</b>	<b>2.518.799.801.912</b>	<b>2.069.914.957.000</b>	<b>1.694.400.957.687</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.858.391.420.000	1.889.301.980.458	1.843.884.236.636	1.380.790.329.000	1.891.887.390.670	1.909.953.819.905	1.487.914.957.000	1.463.165.372.486
Dana Perimbangan	1.813.043.834.000	1.835.050.618.458	1.789.632.874.636	1.371.841.248.000	1.877.271.611.670	1.895.338.040.905	1.456.961.374.000	1.463.165.372.486
Dana Insentif Daerah (DID)	45.347.586.000	54.251.362.000	54.251.362.000	8.949.081.000	14.615.779.000	14.615.779.000	30.953.583.000	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	626.128.000.000	595.900.968.077	579.265.691.767	582.000.000.000	660.345.767.800	608.845.982.007	582.000.000.000	231.235.585.201
Pendapatan Bagi Hasil	626.128.000.000	563.887.968.077	551.844.602.271	582.000.000.000	623.502.767.800	577.657.021.099	582.000.000.000	231.235.585.201
Bantuan Keuangan	-	32.013.000.000	27.421.089.496	-	36.843.000.000	31.188.960.908	-	-
<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hibah	-	-	294.866.952	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>5.337.927.420.000</b>	<b>5.018.846.406.337</b>	<b>4.969.420.739.384</b>	<b>4.828.502.867.632</b>	<b>5.436.449.507.546</b>	<b>5.337.191.327.980</b>	<b>5.231.593.814.823</b>	<b>5.520.663.472.694</b>
BELANJA DAERAH								
<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.325.311.416.434</b>	<b>4.052.284.946.533</b>	<b>3.813.525.640.923</b>	<b>3.932.024.402.000</b>	<b>4.484.934.176.183</b>	<b>4.245.427.420.301</b>	<b>4.185.641.689.236</b>	<b>4.453.844.798.258</b>
Belanja Pegawai	1.932.415.819.173	1.625.302.485.043	1.569.996.280.372	1.629.553.033.842	1.758.299.040.212	1.687.443.670.696	1.799.293.800.988	2.081.351.009.497
Belanja Barang dan Jasa	2.200.559.049.261	2.239.785.538.226	2.079.211.268.876	2.184.824.451.158	2.497.716.928.786	2.342.130.388.344	2.242.762.248.006	2.279.017.847.402
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024	TA 2025
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Un-Audited)	INDUK	TARGET RKPD
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000
Belanja Hibah	183.996.692.000	181.157.067.264	158.850.512.925	110.017.617.000	221.288.907.185	208.797.961.261	134.203.895.712	78.360.841.359
Belanja Bantuan Sosial	8.339.856.000	6.039.856.000	5.467.578.750	7.629.300.000	7.629.300.000	7.055.400.000	5.881.744.530	11.615.100.000
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.163.915.612.566</b>	<b>1.152.919.989.803</b>	<b>1.048.844.590.189</b>	<b>981.957.166.912</b>	<b>1.206.866.061.806</b>	<b>1.089.216.796.768</b>	<b>1.190.512.552.452</b>	<b>1.028.765.432.253</b>
Belanja Modal Tanah	96.718.275.429	79.733.021.616	63.702.048.900	38.803.972.800	37.488.639.117	35.823.835.646	122.576.913.626	1.214.101.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.984.080.439	268.642.192.971	248.668.073.407	137.024.522.897	330.540.229.212	305.303.201.965	219.367.539.349	146.146.924.520
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.993.931.843	349.836.308.178	307.769.407.374	356.771.811.988	311.947.815.903	266.933.266.612	365.060.747.645	310.582.781.526
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	478.433.122.484	441.856.731.647	416.883.937.675	443.856.041.286	510.441.436.665	465.608.870.162	481.544.087.026	569.186.931.799
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.926.202.371	12.001.735.391	11.446.554.185	5.339.589.831	16.406.350.619	15.509.604.883	823.392.542	480.248.612
Belanja Modal Aset Lainnya	860.000.000	850.000.000	374.568.648	161.228.110	41.590.290	38.017.500	1.139.872.264	1.154.444.796
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>13.091.366.523</b>	<b>9.341.768.995</b>	<b>69.839.913.090</b>	<b>11.116.363.820</b>	<b>5.182.995.600</b>	<b>84.458.933.581</b>	<b>76.553.242.183</b>
Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000	13.091.366.523	9.341.768.995	69.839.913.090	11.116.363.820	5.182.995.600	84.458.933.581	76.553.242.183
<b>Belanja Transfer</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>5.544.227.029.000</b>	<b>5.218.296.302.859</b>	<b>4.871.712.000.107</b>	<b>4.983.821.482.002</b>	<b>5.702.916.601.809</b>	<b>5.339.827.212.669</b>	<b>5.460.613.175.269</b>	<b>5.559.163.472.694</b>
<b>Surplus / (Defisit) Belanja Daerah</b>	<b>(206.299.609.000)</b>	<b>(199.449.896.522)</b>	<b>97.708.739.277</b>	<b>(155.318.614.370)</b>	<b>(266.467.094.263)</b>	<b>(2.635.884.689)</b>	<b>(229.019.360.446)</b>	<b>(38.500.000.000)</b>
PEMBIAYAAN DAERAH								
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>291.474.609.000</b>	<b>279.624.896.522</b>	<b>279.624.248.290</b>	<b>270.790.614.370</b>	<b>318.939.094.263</b>	<b>318.939.094.263</b>	<b>296.341.360.446</b>	<b>100.000.000.000</b>
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	291.474.609.000	279.624.896.522	279.624.248.290	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	296.341.360.446	100.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024	TA 2025
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Un-Audited)	INDUK	TARGET RKPD
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>88.762.000.000</b>	<b>80.175.000.000</b>	<b>58.175.000.000</b>	<b>115.472.000.000</b>	<b>52.472.000.000</b>	<b>42.972.000.000</b>	<b>67.322.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	81.175.000.000	80.175.000.000	58.175.000.000	111.472.000.000	52.472.000.000	42.972.000.000	63.322.000.000	57.500.000.000
<i>PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera</i>	<i>7.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	-	<i>11.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	-	-	<i>4.000.000.000</i>
<i>PDAM Tirta Moedal</i>	<i>30.675.000.000</i>	<i>30.675.000.000</i>	<i>30.675.000.000</i>	<i>48.972.000.000</i>	<i>18.972.000.000</i>	-	<i>37.322.000.000</i>	<i>30.000.000.000</i>
<i>PD BPR Bank Pasar</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	-	<i>2.000.000.000</i>	-
<i>PD BPR BKK</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>500.000.000</i>
<i>PT Taman Satwa</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>	-	<i>25.000.000.000</i>	<i>5.000.000.000</i>	-	-	-
<i>Bank Jateng</i>	<i>21.000.000.000</i>	<i>25.000.000.000</i>	<i>25.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	-	<i>24.000.000.000</i>	<i>23.000.000.000</i>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
<i>Dana bergulir</i>	<i>4.000.000.000</i>	-	-	<i>4.000.000.000</i>	-	-	<i>4.000.000.000</i>	<i>4.000.000.000</i>
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>206.299.609.000</b>	<b>199.449.896.522</b>	<b>221.449.248.290</b>	<b>155.318.614.370</b>	<b>52.472.000.000</b>	<b>275.967.094.263</b>	<b>67.322.000.000</b>	<b>38.500.000.000</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	-	-	319.157.987.567	-	-	273.331.209.574	229.019.360.446	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2024

Retribusi pada struktur tahun 2024 menggunakan nomenklatur sesuai UU no 1 tahun 2022

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan instrumen yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dinilai melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui belanja daerah tidak terlepas dari kapasitas fiskal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
  - Penerapan rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sudah menetapkan tarif baru sesuai perhitungan berdasarkan objek pajak dan retribusi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan
  - Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak berbasis IT (e-tax), peningkatan ketaatan wajib pajak, dan peningkatan SDM untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak, termasuk di dalamnya peningkatan basis data pajak dengan menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung;
  - Mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi melalui optimalisasi objek retribusi yang belum maksimal pendapatannya dengan bekerjasama dengan pihak di luar Pemerintah Kota Semarang, termasuk dari Kejaksaan dan Kepolisian.
- 2) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden kepada Pemda atas Penyertaan Modal perusahaan milik daerah, antara lain dari PDAM, PT. BPS, Perusda Bank Pasar, Perusda BPR/BKK, PT. Taman Satwa, dan PT. Bank Jateng;
- 4) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 5) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Corporate Social Responsibility (CSR). Di tahun 2025 diharapkan KPBU Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik akan dapat terealisasi, selain KPBU SPAM Semarang Barat yang sudah berjalan.

Arah kebijakan pendapatan daerah memperhatikan target yang tertuang dalam RPJMD serta menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah sebagai berikut:

- 1) Target Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2025 sebesar Rp. 5.520.663.472.694,-;



- 2) Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 3.826.262.515.007,-;
- 3) Dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 3.040.722.250.000,-; Retribusi Daerah sebesar Rp. 688.841.797.729,-; yang terdiri dari Retribusi Non BLUD sebesar Rp. 217.603.523.168,- dan Retribusi BLUD sebesar Rp. 471.238.274.561,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 84.386.062.278,-; serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 12.312.405.000,-.

**Tabel 3. 3**

**Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2025**

<b>SUMBER PAD</b>		<b>Target RKPD 2025</b>
<b>PAJAK DAERAH</b>		<b>3.040.722.250.000</b>
1	Pajak Hotel	231.000.000.000
2	Pajak Restoran	275.000.000.000
3	Pajak Hiburan	40.270.000.000
4	Pajak Parkir	30.770.000.000
5	Pajak Tenaga Listrik	372.750.000.000
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	182.400.000
7	Pajak Reklame	42.339.000.000
8	Pajak Air Tanah	26.810.000.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	850.000
10	Pajak BPHTB	777.000.000.000
11	PBB Pedesaan & Perkotaan	704.600.000.000
12	OPSEN PKB	390.000.000.000
13	OPSEN BBNKB	150.000.000.000
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>688.841.797.729</b>
<b>I. NON BLUD</b>		<b>217.603.523.168</b>
1	Dinas Perdagangan	40.809.383.600
2	Dinas Lingkungan Hidup	55.000.000.000
3	Dinas Perhubungan	27.288.329.500
4	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.089.640.000
5	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	11.808.513.525
6	Dinas Penataan Ruang	62.100.119.427
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	83.000.000
8	Dinas Tenaga Kerja	5.150.000.000
9	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6.300.000.000
10	Bagian Rumah Tangga Setda	373.025.625
11	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000
12	Dinas Pendidikan	810.350.124
13	Dinas Perikanan	281.266.367
14	Dinas Pekerjaan Umum	278.380.000
15	Dinas Pertanian	392.012.000
16	Dinas Perindustrian	52.560.000
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.500.000.000
18	Kecamatan	236.943.000
<b>II. BLUD</b>		<b>471.238.274.561</b>
1	RSUD KRMT Wongsonegoro	347.858.052.749
2	Dinas Perhubungan (BLUD BRT)	40.500.000.000
3	Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas)	82.880.221.812
<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>		<b>84.386.062.278</b>
1	PDAM	33.737.514.300
2	HOLDING CO. PT. BPS	382.267.830

<b>SUMBER PAD</b>		<b>Target RKPD 2025</b>
3	PERUSDA BANK PASAR	896.690.074
4	PERUSDA BPR/BKK	890.590.074
5	PT. TAMAN SATWA	360.000.000
6	PT. BANK JATENG	48.119.000.000
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		<b>12.312.405.000</b>
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000.000
2	Badan Pendapatan Daerah	3.000.000.000
3	RSUD KRMT Wongsonegoro	7.312.405.000
4	Dinas Perdagangan	1.000.000.000
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>3.826.262.515.007</b>

Sumber : Bappeda, Bapenda Kota Semarang, 2024

Retribusi pada struktur tahun 2025 menggunakan nomenklatur sesuai UU no 1 tahun 2022

- 4) Pendapatan Transfer tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.694.400.957.687, lebih rendah dibandingkan APBD Induk 2024 yang tercatat sebesar Rp. 2.069.914.957.000,-. Target ini juga lebih rendah dari realisasi 2023 sebesar Rp. 1.895.338.040.905,- dan belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang akan mengalokasikan target Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif daerah (DID), serta Bantuan Keuangan (Bankeu) setelah ada kepastian anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan daerah Kota Semarang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari data APBD Induk di tahun 2022 – 2024, berdasarkan struktur keuangan PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menempati porsi terbesar dalam kontribusi rata-rata terhadap pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 57,75%, diikuti Pendapatan Transfer sebesar 42,25% dan disusul sektor Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,00%. Sedangkan untuk proyeksi RKPD Tahun 2025, porsi Pendapatan daerah ditargetkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 69,31%, Pendapatan Transfer mengalami penurunan dari tahun 2024 dengan porsi 30,69%, dan tidak terdapat pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya masuk ke dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpindah ke pos Dana Transfer, khususnya pada pos DAK non fisik.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2022 s/d 2024), Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu lebih besar daripada Pendapatan Transfer dengan perbandingan rerata antara PAD : Pendapatan Transfer : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah 57,75 : 42,25 : 0,00. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Semarang memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Di rencana tahun 2025, rasio kemandirian fiskal daerah ini diperkirakan berada di 69,31%. Porsi Pendapatan Transfer yang lebih kecil menunjukkan rendahnya celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Secara lengkap, persentase sumber pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 4**  
**Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2022-2024 dan Proyeksi 2025**

KEUANGAN DAERAH	2022	2023	2024	Rerata	2025
	APBD Induk	APBD Induk	APBD Induk		Proyeksi RKPD
Pendapatan Asli Daerah / PAD (%)	53,46	59,35	60,43	57,75	69,31
Pendapatan Transfer (%)	46,54	40,65	39,57	42,25	30,69
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2024*

**Tabel 3. 5**  
**Rincian Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2022-2024 dan Proyeksi 2025**

KEUANGAN DAERAH	APBD Induk 2022	APBD Induk 2023	APBD Induk 2024	Rerata	Proyeksi RKPD 2025
	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)		Kontribusi (%)
1) Pajak Daerah	78,05	76,42	75,56	76,68	79,47
2) Retribusi Daerah	4,93	5,21	21,08	10,41	18,00
3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1,74	2,56	2,52	2,27	2,21
4) Lain-lain PAD yang Sah	15,27	15,81	0,84	10,64	0,32
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	74,80	70,35	71,88	72,34	86,35
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	25,20	29,65	28,12	27,66	13,65
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1) Hibah	-	-	-	-	-
2) Dana Darurat	-	-	-	-	-
3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2024*

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dari sisi APBD Induk, alokasi Belanja Daerah Kota Semarang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024) didominasi oleh Belanja Operasi dengan rerata 77,85%, disusul kemudian oleh belanja modal dengan rerata 20,83% dan belanja tidak terduga dengan rerata 1,31% dari belanja daerah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 6**  
**Persentase Pembentuk Belanja Daerah**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dan Proyeksi 2025**

KEUANGAN DAERAH	2022	2023	2024	Rerata	2025
	APBD Murni	APBD Murni	APBD Murni		Proyeksi RKPD
Belanja Operasi (%)	78,01	78,90	76,65	77,85	80,12
Belanja Modal (%)	21,00	19,70	21,80	20,83	18,51
Belanja Tidak terduga (%)	0,99	1,40	1,55	1,31	1,38
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

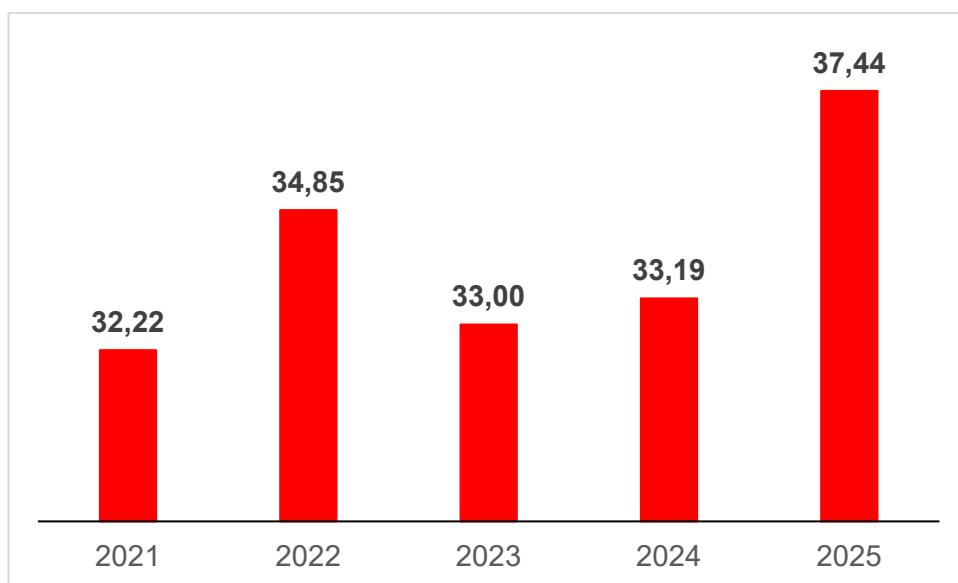
Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2024

Alokasi Belanja Daerah RKPD tahun 2024 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD tahun 2025 adalah:

- 1) Proyeksi struktur keuangan Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren porsi realisasi 3 (tiga) tahun terakhir, namun tetap memperhatikan besaran belanja wajib/mengikat dan kebutuhan prioritas di tahun berjalan. Pada proyeksi RKPD 2025, proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 80,12%, proporsi belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 18,51%, dan proporsi belanja tidak terduga terhadap belanja daerah sebesar 1,38%.
- 2) Belanja Daerah tahun 2025 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
  - a. Pemenuhan *mandatory spending* seperti pengalokasian anggaran minimal pada sektor Pendidikan dan Kesehatan.
  - b. Penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - c. Pemenuhan program prioritas Wali Kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.
  - d. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah.
  - e. Mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi daerah.
  - f. Pengembangan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar wilayah. Oleh Karena itu, Kota Semarang mengalokasikan anggaran bagi kelurahan-

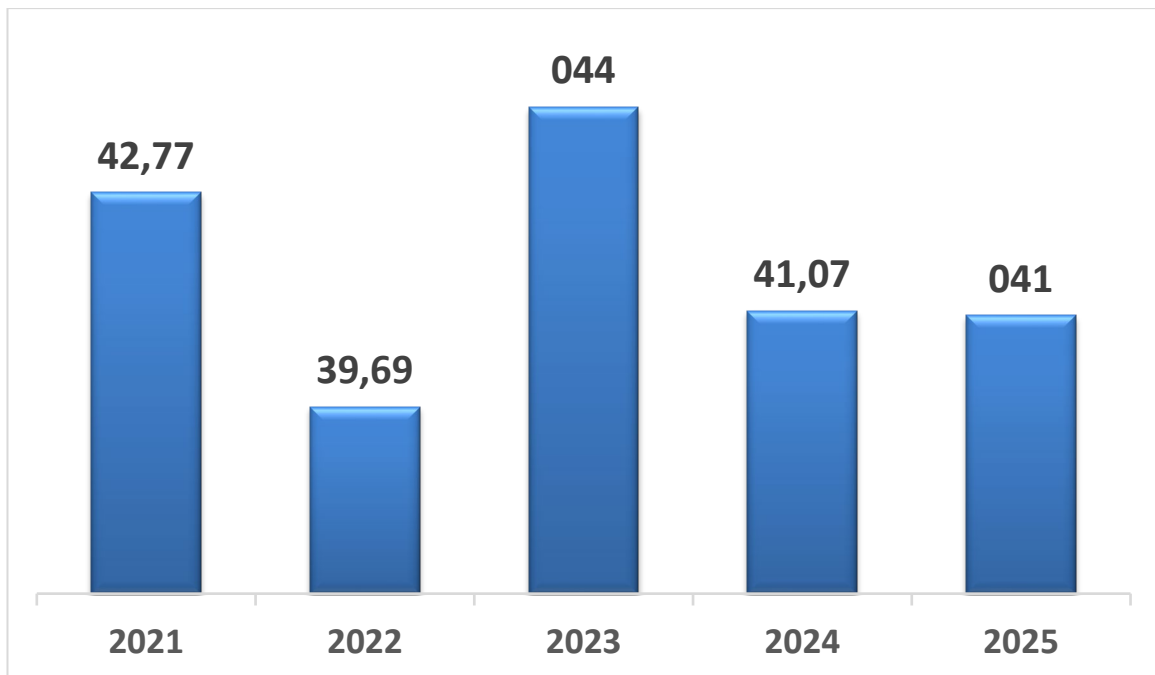
kelurahan melalui fasilitasi musrenbangkelmsebagai anggaran pendamping selain anggaran kelurahan yang bersumber dari DAU.

- g. Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu yang terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, *stunting*, dan pengendalian inflasi.
- 3) Belanja pegawai pada target RKPD 2025 meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara tanpa memperhitungkan belanja pegawai yang dianggarkan melalui DAK. Perhitungan gaji dan tunjangan tersebut berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS, tambahan penghasilan bagi Ketua Tim Pokja, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam rancangan belanja pegawai tahun 2025, pemberian TPP diperhitungkan sebanyak 14 kali. Rerata porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah pada APBD Induk dari tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah 34,01%, dan dengan memperhitungkan kebutuhan di tahun 2025, diperkirakan porsinya naik menjadi 37,44% dari belanja daerah. Tren peningkatan porsi Belanja Pegawai tersebut akan terus dikurangi untuk menekan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah hingga mencapai kondisi ideal yang diterapkan pemerintah yaitu maksimal 30%. Secara nominal, anggaran untuk belanja pegawai di tahun 2025 meningkat dibandingkan di tahun 2024 karena adanya pengangkatan PNS dan PPPK, pengangkatan Non ASN menjadi P3K, serta pemberian tambahan penghasilan bagi ketua tim pokja.



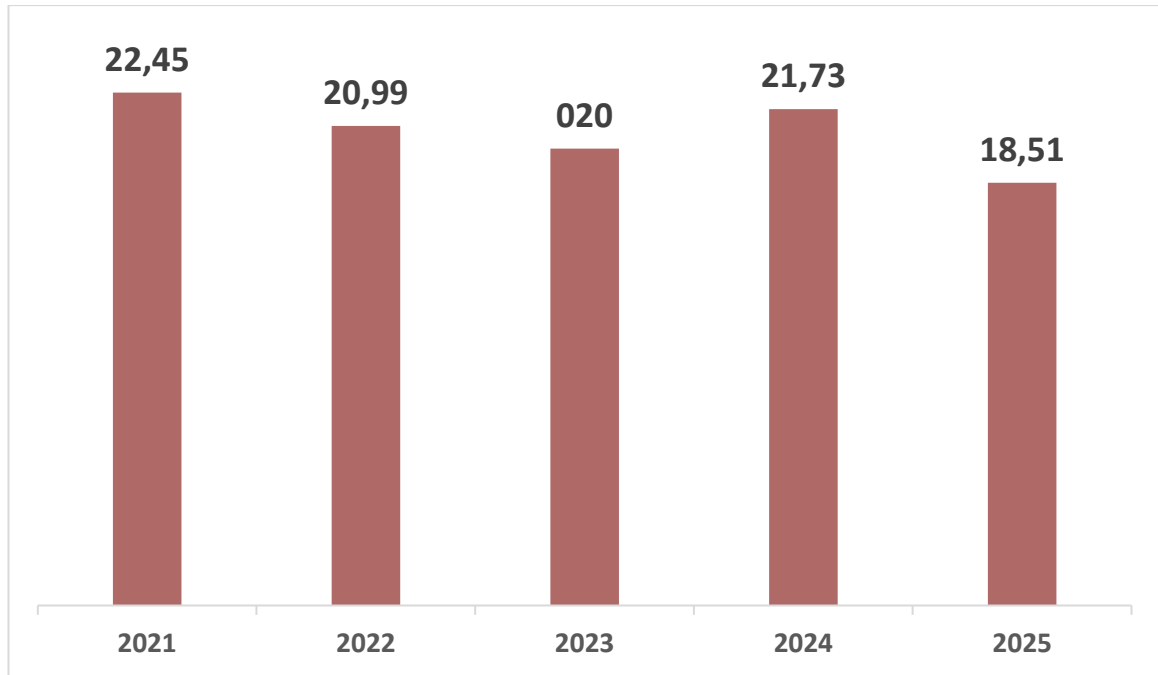
**Gambar 3. 4**  
**Porsi APBD Murni Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah (%)**

- 4) Rasio belanja barang dan jasa digunakan untuk mengukur porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah. Jika melihat APBD Murni 2021-2024, porsi alokasi belanja barang dan jasa Kota Semarang yang relatif tinggi melebihi batas minimal penganggaran barang dan jasa paling sedikit 40% perlu dikaji ulang efektivitasnya, karena bisa jadi mengindikasikan pemborosan di anggaran. Hal ini mengingat belanja barang dan jasa sifatnya mendukung kegiatan dan pemeliharaan. Pada RKPD 2025 porsi alokasi belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar 41,00% dari belanja daerah, yaitu sebesar Rp 2.279.017.847.402,-. Alokasi ini sedikit lebih tinggi dari alokasi belanja barang dan jasa APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 2.242.762.248.006.



**Gambar 3. 5**  
**Porsi APBD Murni Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah (%)**

- 5) Belanja hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan pada RKPD 2025 sudah tidak lagi memperhitungkan pemberian Hibah Ke KPU dan Bawaslu. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 6) Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Proyeksi belanja modal pada RKPD 2025 adalah sebesar Rp. 1.028.765.432.253,- atau 18,51% dari pagu belanja daerah. Kedepan Pemerintah Kota Semarang akan berupaya untuk memenuhi proporsi belanja modal ideal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah.



**Gambar 3. 6**  
**Porsi APBD Murni Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah (%)**

- 7) Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Semarang. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. Sebagai antisipasi terhadap hal tersebut, BTT pada RKPD Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 76.553.242.183,- atau 1,38% dari total belanja daerah.

**Tabel 3. 7**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2022 s/d 2025**

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024	TA 2025
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Un-Audited)	INDUK	TARGET RKPD
BELANJA DAERAH								
<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.325.311.416.434</b>	<b>4.052.284.946.533</b>	<b>3.813.525.640.923</b>	<b>3.932.024.402.000</b>	<b>4.484.934.176.183</b>	<b>4.245.427.420.301</b>	<b>4.185.641.689.236</b>	<b>4.453.844.798.258</b>
Belanja Pegawai	1.932.415.819.173	1.625.302.485.043	1.569.996.280.372	1.629.553.033.842	1.758.299.040.212	1.687.443.670.696	1.799.293.800.988	2.081.351.009.497
Belanja Barang dan Jasa	2.200.559.049.261	2.239.785.538.226	2.079.211.268.876	2.184.824.451.158	2.497.716.928.786	2.342.130.388.344	2.242.762.248.006	2.279.017.847.402
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000
Belanja Hibah	183.996.692.000	181.157.067.264	158.850.512.925	110.017.617.000	221.288.907.185	208.797.961.261	134.203.895.712	78.360.841.359
Belanja Bantuan Sosial	8.339.856.000	6.039.856.000	5.467.578.750	7.629.300.000	7.629.300.000	7.055.400.000	5.881.744.530	11.615.100.000
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.163.915.612.566</b>	<b>1.152.919.989.803</b>	<b>1.048.844.590.189</b>	<b>981.957.166.912</b>	<b>1.206.866.061.806</b>	<b>1.089.216.796.768</b>	<b>1.190.512.552.452</b>	<b>1.028.765.432.253</b>
Belanja Modal Tanah	96.718.275.429	79.733.021.616	63.702.048.900	38.803.972.800	37.488.639.117	35.823.835.646	122.576.913.626	1.214.101.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.984.080.439	268.642.192.971	248.668.073.407	137.024.522.897	330.540.229.212	305.303.201.965	219.367.539.349	146.146.924.520
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.993.931.843	349.836.308.178	307.769.407.374	356.771.811.988	311.947.815.903	266.933.266.612	365.060.747.645	310.582.781.526
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	478.433.122.484	441.856.731.647	416.883.937.675	443.856.041.286	510.441.436.665	465.608.870.162	481.544.087.026	569.186.931.799
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.926.202.371	12.001.735.391	11.446.554.185	5.339.589.831	16.406.350.619	15.509.604.883	823.392.542	480.248.612
Belanja Modal Aset Lainnya	860.000.000	850.000.000	374.568.648	161.228.110	41.590.290	38.017.500	1.139.872.264	1.154.444.796
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>13.091.366.523</b>	<b>9.341.768.995</b>	<b>69.839.913.090</b>	<b>11.116.363.820</b>	<b>5.182.995.600</b>	<b>84.458.933.581</b>	<b>76.553.242.183</b>
Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000	13.091.366.523	9.341.768.995	69.839.913.090	11.116.363.820	5.182.995.600	84.458.933.581	76.553.242.183
<b>Belanja Transfer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>5.544.227.029.000</b>	<b>5.218.296.302.859</b>	<b>4.871.712.000.107</b>	<b>4.983.821.482.002</b>	<b>5.702.916.601.809</b>	<b>5.339.827.212.669</b>	<b>5.460.613.175.269</b>	<b>5.559.163.472.694</b>

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2024



### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan APBD Murni, alokasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang dari tahun 2021-2024 sebagian besar bersumber dari SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir). Besaran penyertaan modal mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang dan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pada RKPD Tahun 2025 memperhitungkan alokasi penerimaan pembiayaan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp. 100.000.000.000,- yang berasal dari Silpa. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dikeluarkan sementara direncanakan sebesar Rp. 61.500.000.000,- yang dialokasikan untuk Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) sebesar Rp. 4.000.000.000,- Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp. 30.000.000.000,- Penyertaan Modal Perusda BPR / BKK sebesar Rp. 500.000.000, Penyertaan Modal Bank Jateng sebesar Rp. 23.000.000.000,- dan Penyertaan Modal PT. BPS (holding company) sebesar Rp. 4.000.000.000.

**Tabel 3. 8**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2022 s/d 2025**

URAIAN	TA 2022			TA 2023			TA 2024	TA 2025
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Un- Audited)	INDUK	TARGET RKPD
PEMBIAYAAN DAERAH								
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>291.474.609.000</b>	<b>279.624.896.522</b>	<b>279.624.248.290</b>	<b>270.790.614.370</b>	<b>318.939.094.263</b>	<b>318.939.094.263</b>	<b>296.341.360.446</b>	<b>100.000.000.000</b>
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	291.474.609.000	279.624.896.522	279.624.248.290	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	296.341.360.446	100.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>85.175.000.000</b>	<b>80.175.000.000</b>	<b>58.175.000.000</b>	<b>115.472.000.000</b>	<b>52.472.000.000</b>	<b>42.972.000.000</b>	<b>67.322.000.000</b>	<b>61.500.000.000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	81.175.000.000	80.175.000.000	58.175.000.000	111.472.000.000	52.472.000.000	42.972.000.000	63.322.000.000	-
<i>Penyertaan Modal PT. BPS (holding company)</i>	<i>7.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	-	<i>11.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>	-	-	<i>4.000.000.000</i>
<i>PDAM Tirta Moedal</i>	<i>30.675.000.000</i>	<i>30.675.000.000</i>	<i>30.675.000.000</i>	<i>48.972.000.000</i>	<i>18.972.000.000</i>	-	<i>37.322.000.000</i>	<i>30.000.000.000</i>
<i>PD BPR Bank Pasar</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	<i>2.500.000.000</i>	-	<i>2.000.000.000</i>	-
<i>PD BPR BKK</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>500.000.000</i>
<i>PT Taman Satwa</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>	-	<i>25.000.000.000</i>	<i>5.000.000.000</i>	-	-	-
<i>Bank Jateng</i>	<i>21.000.000.000</i>	<i>25.000.000.000</i>	<i>25.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	<i>24.000.000.000</i>	-	<i>24.000.000.000</i>	<i>23.000.000.000</i>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
<i>Dana bergulir</i>	<i>4.000.000.000</i>	-	-	<i>4.000.000.000</i>	-	-	<i>4.000.000.000</i>	<i>4.000.000.000</i>
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>206.299.609.000</b>	<b>199.449.896.522</b>	<b>221.449.248.290</b>	<b>155.318.614.370</b>	<b>266.467.094.263</b>	<b>275.967.094.263</b>	<b>229.019.360.446</b>	<b>38.500.000.000</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2024

Dari uraian tersebut di atas, maka proyeksi struktur Keuangan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 9**  
**Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Tahun 2025**

KODE			URAIAN	TA 2025 TARGET RKPD
4			PENDAPATAN DAERAH	
<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>3.826.262.515.007</b>
4	1	1	Pajak Daerah	3.040.722.250.000
4	1	2	Retribusi Daerah	688.841.797.729
			<i>a. Retribusi Non BLUD</i>	217.603.523.168
			<i>b. Retribusi BLUD</i>	471.223.274.561
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	84.386.062.278
4	1	4	Lain - lain PAD yang Sah	12.312.405.000
			<i>a. BLUD</i>	-
			<i>b. Selain BLUD</i>	12.312.405.000
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.694.400.957.687</b>
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.463.165.372.486
4	2	1 1	Dana Perimbangan	1.463.165.372.486
4	2	1 2	Dana Insentif Daerah (DID)	-
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.235.585.201
4	2	2 1	Pendapatan Bagi Hasil	231.235.585.201
4	2	2 2	Bantuan Keuangan	-
<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>-</b>
4	3	1	Hibah	-
4	3	2	Dana Darurat	-
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
			<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>5.520.663.472.694</b>
5			BELANJA DAERAH	
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.453.844.798.258</b>
5	1	1	Belanja Pegawai	2.081.351.009.497
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.017.847.402
5	1	3	Belanja Bunga	-
5	1	4	Belanja Subsidi	3.500.000.000
5	1	5	Belanja Hibah	78.360.841.359
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	11.615.100.000
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Modal</b>	<b>1.028.765.432.253</b>
5	2	01	Belanja Modal Tanah	1.214.101.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.146.924.520
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.582.781.526
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	569.186.931.799
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	480.248.612
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.154.444.796
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>76.553.242.183</b>
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	76.553.242.183
			<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>5.559.163.472.694</b>
			<b>Surplus / ( Defisit ) Belanja Daerah</b>	<b>(38.500.000.000)</b>
6			PEMBIAYAAN DAERAH	
<b>6</b>	<b>1</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>100.000.000.000</b>
6	1	1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6	1	6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-

KODE			URAIAN	TA 2025
				TARGET RKPD
			<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>100.000.000.000</b>
<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	57.500.000.000
			<i>Penyertaan Modal PDAM</i>	30.000.000.000
			<i>Penyertaan Modal Bank Pasar</i>	-
			<i>Penyertaan Modal Bank Jateng</i>	23.000.000.000
			<i>Penyertaan Modal PT. BPS (holding company)</i>	4.000.000.000
			<i>Penyertaan Modal PT. Taman Satwa</i>	-
			<i>Penyertaan Modal Perusda BPR/BKK</i>	500.000.000
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000
6	2	5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
			<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>61.500.000.000</b>
			<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>38.500.000.000</b>
6	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	-

Sumber : Bappeda, Bappenda, dan BPKAD Kota Semarang, 2024

Retribusi pada struktur tahun 2024 menggunakan nomenklatur sesuai UU No. 1 Tahun 2022

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dan Prioritas Pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2025. Prioritas Daerah yang teruang dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2025 didasarkan pada:

1. Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Prioritas RPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
3. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026;
4. Rancangan Awal RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045; dan
5. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kota Semarang tahun 2025 digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. 1  
Komponen Penyusunan RKPD Kota Semarang 2025**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Target tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 harus selaras dan sinergis dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2021-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, (2) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, dan (3) Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”**. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia unggul, produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- Misi 4. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**Gambar 4. 2**  
**Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026**

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, meningkatkan nilai investasi, menuntaskan rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut melalui semangat seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Kota Semarang tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangunan pada RPJMD 2021-2026 yaitu **“Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Secara Berkesinambungan”** sebagai penuntasan target-target RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Di tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, sehingga di tahun 2025 juga merupakan tahun penguatan landasan transformasi menuju pelaksanaan transformasi di tahun 2025-2045.



**Gambar 4. 3**  
**Tema Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Semarang**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.1. Target di tahun 2025 merupakan target di RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dilakukan sinkronisasi dengan target Provinsi Jawa Tengah pada forum Rapat Kerja Teknis.

**Tabel 4. 1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025**

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	
MISI 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL						
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	84,80 – 85,80	
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,62
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,63
				Angka Harapan Hidup	Tahun	77,59
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	66,20
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	66,20		
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	5,61 – 5,31	
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	95,73
				4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen			79,00
Angka Kemiskinan			Persen	3,98 – 3,74		



Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	
		5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,90 – 15,20
		6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,93
<b>MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA</b>						
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,80 – 6,50	
		7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.680.871.861,74
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	6,00
		8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rp)	7 (29.277.435)
				PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	104,80
				Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,91
				Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,74
<b>MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN</b>						
4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi		Nilai	73,20	
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,50
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Nilai Indeks	95,90	
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	75,30
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban		Persen	9,28	
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.213
<b>MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung KEMAJUAN Kota</b>						
5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Persen	67,35	
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	52,63
				Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	96,00
				Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	183.278,54
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	70
				Persentase ruang terbuka hijau	Persen	45,64

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur		Nilai	82,75	
		Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	79	
	13		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	84	
			Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,04	
		Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	99,00	
	14		Persentase rumah layak huni	Persen	99,70	
		Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	89	
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	107	
		Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5935	
	17		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	1	
MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA						
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai Indeks	78,00	
		18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	>78/BB
				Opini BPK	Opini	WTP
		19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	84,00
				Indeks SPBE	Skor 0-5	4,4
				Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,48/ST
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	89,00

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

#### 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

**Tabel 4. 2**  
**Tema Pembangunan Tahun 2025**

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kota Semarang 2025
Akselerasi pertumbuhan <b>ekonomi</b> yang inklusif dan berkelanjutan.	Peningkatan <b>perekonomian</b> daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter.	Keberlanjutan capaian pembangunan <b>ekonomi</b> , sosial, dan budaya secara berkesinambungan.

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

#### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Adapun penekanan Tema RKP Tahun 2025 adalah:

##### 1. Infrastruktur Berkualitas

Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

###### a) Transformasi Ekonomi

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Penguatan infrastruktur digital;
- Pengembangan infrastruktur transisi energi;
- Percepatan infrastruktur IKN.

###### b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

##### 2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

###### a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

###### b) Pengembangan skema graduasi bansos;

###### c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;

###### d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;

###### e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;

###### f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;

###### g) Peningkatan produksi industri pengolahan;

###### h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;

###### i) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

##### 3. SDM Berkualitas

SDM berdaya saing dan produktif

###### a) Transformasi Sosial

- Penetapan wajib belajar 13 tahun;
- Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
- Penetapan pelayanan primer dan penuntasan *stunting*;
- Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif;
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*.

- b) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
  - Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan, antara lain:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
  - a) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua;
  - b) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata;
  - c) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
  - a) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
  - b) Penerapan Ekonomi Hijau;
  - c) Transformasi Digital;
  - d) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
  - e) Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
  - a) Bidang pelayanan publik berfokus pada transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
  - b) Bidang proses bisnis dan kelembagaan;
  - c) Bidang manajemen Aparatur Sipil Negara berfokus pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara serta perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
  - d) Bidang pengawasan Pembangunan;
  - e) Bidang partai politik berfokus pada penguatan integrasi partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang berintegritas dalam mendukung terwujudnya demokrasi substansial.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:
  - a) Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial;
  - b) Stabilitas ekonomi makro;
  - c) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
  - a) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
  - b) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
  - c) Lingkungan Hidup Berkualitas;
  - d) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
  - e) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
  - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjada konsivitas daerah;
  - b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
  - c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjada kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI, pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur serta kompensasi;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
  - a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatkan kualitas pembelajaran berbasis *soft skill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana, pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
  - b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan, penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang

- terhubung dengan sistem layanan provinsi, identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan, pemerataan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta, revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga, serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet;
  - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
  - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
  - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform* digital;
  - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
  - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jenjang penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemai air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan epatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
  - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
  - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk di dalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset yang didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
  - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
3. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60 persen.

#### **4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang**

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan

tahun 2025. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, yang dirangkum pada uraian di bawah ini:

### **1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi**

- a. Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
- b. Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
- c. Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;
- d. Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
- e. Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
- f. Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
- g. Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran Kota Semarang;
- h. Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.

### **2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan**

- a. Pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha;
- b. Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sudah kuliah;
- c. Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu;
- d. Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program gratis pembuatan dokumen kependudukan, gratis layanan *homecare* bagi warga lanjut usia yang mobilitasnya terbatas hingga gratis pemakaman dan santunan kematian;
- e. Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan *Universal Health Coverage (UHC)*;
- f. Meningkatkan kualitas layanan dan tenaga medis serta fasilitas rawat inap di Puskesmas;
- g. Fokus pada kelurahan yang kasus stuntingnya mengalami peningkatan;
- h. Penambahan armada *Ambulance Hebat*;
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, terutama terkait fasilitas tenaga medis;
- j. Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah agar lebih terbuka dan mendalam;
- k. Menyediakan berbagai program pembukaan lapangan kerja dan bekerja sama dengan berbagai sektor masyarakat;
  - l. Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran;
- m. Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga;
- n. Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.

### **3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP;
- b. Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah;
- c. Memperbanyak beasiswa untuk masuk perguruan tinggi;
- d. Penambahan program pelatihan operator EMIS (*Education Management Information System*) bagi para guru Madrasah Diniyah;



- e. Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Fokus dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui simplikasi kurikulum, penguatan BOS, program guru penggerak, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan juga transformasi tata kelola guru.

#### **4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung**

- a. Perbaiki jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton;
- b. Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air;
- c. Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar;
- d. Perlu pemeriksaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah;
- e. Peningkatan infrastruktur dalam pengendalian banjir, melakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS);
- f. Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan;
- g. Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang;
- h. Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian;
- i. Melakukan percepatan dan pemerataan PJU di daerah-daerah pinggiran, utamanya pada beberapa titik lokasi rawan kejahatan;
- j. Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH);
- k. Peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang;
- l. Perlu bantuan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balai RT yang telah rusak dan belum ada;
- m. Memperhatikan ruang publik terbuka hijau dan tempat bermain di setiap kelurahan di Kota Semarang;
- n. Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;
- o. Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah;
- p. Perlu rekonstruksi ulang bagi halte BRT yang keberadaannya kurang representatif juga menonjol dibahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan
- q. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik;
- r. Perlu menambah CCTV di setiap RT dan tempat publik.

#### **5. Peningkatan tata kelola pemerintahan**

- a. Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana. Karena Kota Semarang masuk daerah rawan bencana alam yaitu banjir, longsor, dan angin topan;
- b. Hendaknya pemerintah membuat aturan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor yang diakibatkan alih fungsi lahan serta dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi;
- c. Realisasi anggaran dari seluruh kegiatan untuk dipastikan sudah berjalan;
- d. Pemkot Semarang untuk memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota;
- e. Pemkot Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini bisa positif;

- f. Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak;
- g. Mendorong aparat terkait, polisi, dan jajaran mengadakan patroli agar mengurangi kejahatan dan masyarakat merasa nyaman di jalanan, hal itu mengingat kejadian kriminalitas di jalanan terutama di malam hari;
- h. Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak;
- i. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
- j. Perlu pengawasan terus-menerus pada setiap kantor atau unit layanan masyarakat di Pemerintah Kota Semarang;
- k. Pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang;
- l. Pemerintah Kota Semarang diminta untuk menggenjatkan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan terutama di daerah pinggiran. Agar warga masyarakat yang tinggal di perkotaan pada umumnya dan yang tinggal di pinggiran khususnya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang;
- m. Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;
- n. Agar Pemerintah Kota Semarang dapat memperbaiki pelayanan publik/ masyarakat agar lebih baik, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah.

#### 4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, perkiraan capaian di tahun 2024 serta isu-isu strategis di tahun 2025.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah **“Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan **infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, dan penurunan **kemiskinan**;
- Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Percepatan **penyediaan infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
  - a. Penanganan genangan banjir dan rob;
  - b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
  - c. Penataan kawasan strategis perkotaan;
  - d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
  - e. Penanganan kawasan kumuh.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa;
  - b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;
  - c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah;
  - d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, dan penurunan **kemiskinan**, dengan fokus pada:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
  - b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;
  - c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
  - d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;
  - b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
  - c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
  - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2025 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 4.3.

**Tabel 4. 3**  
**Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025**

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
<b>Kota Semarang</b>	5,80 – 6,50%	84,80 – 85,80	3,98 – 3,74%	5,61 – 5,31%
<b>Prov. Jateng</b>	4,80 – 5,60%	73,99	9,28 – 8,08%	5,20 – 4,60%
<b>Pusat</b>	5,30 – 5,60%	73,99 – 74,02	7,00 – 8,00 %	4,50 – 5,00%

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Dalam penyusunan prioritas RKPD Tahun 2025 digunakan juga pendekatan teknokratik untuk memberikan gambaran penentuan kegiatan prioritas berdasarkan kaidah teknokratik melalui kajian-kajian dan studi-studi. Pada tahun 2025, salah satu alat bantu yang juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan prioritas adalah melalui metodologi *Capital Investment Planning* (CIP) yang merupakan *tool* yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan Kota Semarang sebagai salah satu *pilot* penerapannya. Tiap usulan kegiatan prioritas, terutama yang bersifat strategis dengan kebutuhan anggaran yang besar akan dianalisa dengan CIP melalui serangkaian kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan untuk mengetahui usulan kegiatan mana yang memiliki dampak paling optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Hasil CIP menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan prioritas apa yang perlu didorong pada penyusunan RKPD Tahun 2025 ini.

Perumusan prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah serta permasalahan pembangunan/isu strategis Kota Semarang. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

**1) Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang**

Sebagaimana penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025 secara nasional dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan sasaran pada masing-masing Prioritas Nasional. Keterkaitan sasaran indikator pembangunan daerah Kota Semarang dalam RKPD 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional RKP 2025 dapat dijelaskan dalam tabel 4.4.

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2025 yang berjumlah 5 prioritas selaras dengan 7 prioritas nasional dan 4 prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang dengan prioritas nasional RKP tahun 2025 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

**2) Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis**

Permasalahan pembangunan Kota Semarang telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kota Semarang memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pengembangan/isu strategis telah tertuang pada bab II, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4. 4**  
**Keselarasn Prioritas Pembangunan Kota Semarang dengan**  
**Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2025	PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	
<p><b>Prioritas Nasional 5.</b> Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p><b>Prioritas Nasional 6.</b> Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p>	<p><b>Prioritas Provinsi 1.</b> Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.</p>	<b>P1</b>	<p>Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan genangan banjir dan rob;</li> <li>b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah;</li> <li>c. Penataan kawasan strategis perkotaan;</li> <li>d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;</li> <li>e. Penanganan kawasan kumuh.</li> </ol>
<p><b>Prioritas Nasional 1.</b> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p> <p><b>Prioritas Nasional 2.</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p>	<p><b>Prioritas Provinsi 1.</b> Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.</p>	<b>P2</b>	<p>Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa</li> <li>b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro;</li> <li>c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah; dan</li> <li>d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.</li> </ol>
<p><b>Prioritas Nasional 3.</b> Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing</p> <p><b>Prioritas Nasional 4.</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p>	<p><b>Prioritas Provinsi 3.</b> Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.</p>	<b>P3</b>	<p>Percepatan pengurangan pengangguran, dan penurunan kemiskinan, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;</li> <li>b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;</li> <li>c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja; dan</li> <li>d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.</li> </ol>

PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2025	PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	
<p><b>Prioritas Nasional 3.</b> Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing</p> <p><b>Prioritas Nasional 4.</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p>	<p><b>Prioritas Provinsi 2.</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.</p>	<b>P4</b>	<p>Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas; dan</li> <li>b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.</li> </ol>
<p><b>Prioritas Nasional 7.</b> Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p>	<p><b>Prioritas Provinsi 4.</b> Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.</p>	<b>P5</b>	<p>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;</li> <li>b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;</li> <li>c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara; dan</li> <li>d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.</li> </ol>

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

**Tabel 4. 5**

**Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2025**

<b>Isu Strategis</b>	<b>Prioritas Nasional</b>		<b>Prioritas Provinsi Jawa Tengah</b>		<b>Prioritas Daerah Kota Semarang</b>	
Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha	PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PD.1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	PD.2	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
Kemiskinan	PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.	PD.3	Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PN.3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.	PD.4	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif.
	PN.4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				
Kesenjangan wilayah; Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya; Kedaulatan pangan dan energi	PN.5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	PD.3	Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.	PD.1	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup.
	PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Tata kelola pemerintahan	PN.7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PD.4	Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.	PD.5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

**Tabel 4. 6**  
**Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025**

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025				
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,62 Tahun	<b>P4</b>	<p>1. Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:</p> <p>a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;</p> <p>b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.</p>	<p><b>Prioritas Nasional 3.</b> Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing</p> <p><b>Prioritas Nasional 4.</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p> <p><b>Prioritas Provinsi 2.</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.</p>
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,63 Tahun			
		Angka Harapan Hidup	77,59 Tahun			
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	66,20%			
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	95,739%			
4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,20%			
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	79,00%			
5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	14,90 - 15,20%	<b>P3</b>	<p>1. Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b>, dan penurunan <b>kemiskinan</b>, dengan fokus pada:</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;</p> <p>b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;</p> <p>c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;</p>	<p><b>Prioritas Nasional 2.</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <p><b>Prioritas Provinsi 3.</b> Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.</p>
6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	99,93%			



SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT				
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2025						
					d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.				
7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$ 3.680.871.861,74	<b>P2</b>	1. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas <b>ekonomi</b> yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada: a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa; b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro; c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah; d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.	<b>Prioritas Nasional 1.</b> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan  <b>Prioritas Provinsi 1.</b> Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.			
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00%						
8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7% (29.277.435 juta rupiah)						
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	104,80 juta rupiah						
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	28,91%						
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	28,74%						
9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	74,50				<b>P4</b>	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif, dengan fokus pada: a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas; b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama	<b>Prioritas Nasional 3.</b> Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing <b>Prioritas Nasional 4.</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan  <b>Prioritas Provinsi 2.</b>

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025				
					untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.
10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,30	<b>P4</b>	<p>1. Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:</p> <p>a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas;</p> <p>b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.</p>	<p><b>Prioritas Nasional 3.</b> Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.</p> <p><b>Prioritas Provinsi 2.</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.</p>
11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.213 kejadian	<b>P3</b>	<p>1. Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b>, penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;</p> <p>b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin;</p> <p>c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;</p> <p>d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.</p>	<p><b>Prioritas Nasional 7.</b> Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.</p> <p><b>Prioritas Provinsi 2.</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata.</p>

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025				
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,63	<b>P1</b>	<p>1. Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:</p> <p>a. Penanganan genangan banjir dan rob;</p> <p>b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah;</p> <p>c. Penataan kawasan strategis perkotaan;</p> <p>d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;</p> <p>e. Penanganan kawasan kumuh.</p>	<p><b>Prioritas Nasional 5.</b> Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar.</p> <p><b>Prioritas Nasional 6.</b> Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.</p> <p><b>Prioritas Provinsi 1.</b> Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.</p> <p><b>Prioritas Provinsi 3.</b> Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.</p>
		Indeks Kualitas Udara	96,00			
		Penurunan Emisi CO2	183.278,54 Ton CO2e			
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	70%			
		Persentase ruang terbuka hijau	45,64%			
13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	79%			
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	84%			
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,04%			
14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	99,00%			
		Persentase rumah layak huni	99,70%			
15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	89%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025				PRIORITAS RKPD TAHUN 2025	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025				
16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	107			
17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5935			
		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	1 titik/ruas			
18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>78/BB	<b>P5</b>	<p>1. Peningkatan <b>tata kelola pemerintahan</b> yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:</p> <p>a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;</p> <p>b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;</p> <p>c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;</p> <p>d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.</p>	<p><b>Prioritas Nasional 7.</b> Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.</p> <p><b>Prioritas Provinsi 4.</b> Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.</p>
		Opini BPK	WTP			
19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	84,00			
		Indeks SPBE	4,4			
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,48/ST			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00			

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

**Tabel 4. 7**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Program Unggulan pada**  
**Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA		PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
1	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	1	Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan	1	Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur	
				2	Peningkatan sarana prasarana olahraga	Optimalisasi pemanfaatan Stadion Citarum ( <i>home base</i> PSIS)
				3	Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata	Underground Simpang Lima
						Semarang <i>Expo and Convention Center</i>
						Semarang Technopark
		4	Pengembangan kawasan strategis cagar budaya	Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo		
		5	Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik	Revitalisasi Semarang Lama		
		2	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan	6	Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota	Masjid Raya Semarang
						Rintisan Semarang <i>Outer Ring Road</i> (Mangkang-Mijen) dan <i>Middle Ring Road</i> (Jalan Gajah)
						Pembangunan Akses Perguruan Tinggi (Sronol-Sekaran, UNDIP-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)
				7	Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi	<i>Tetenger</i> Kota
8	Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel			Transportasi Massal Terintegrasi		
9	Peningkatan sarana prasarana angkutan barang	Pembangunan Trem				
10	Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon	Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas				
11	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan				
3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Stimulus Pembangunan Wilayah				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH	
			12	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bedah Rumah Tuntas
			13	Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh	Kampung vertikal Kawasan Kumuh
			14	Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			15	Pemenuhan lahan permakaman umum	
		4	16	Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh	Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
					<i>Rooftop solar panel</i> (Bangunan Milik Pemkot Semarang)
					Pembangkit Listrik Tenaga Air
			17	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik	<i>Vertical and Roof garden/ farming</i>
					Pembangunan Taman Tematik
					Penghijauan Sempadan Sungai Semarang
			18	Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Pengelolaan Persampahan Terpadu
					Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
			19	Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana	
		5	20	Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu	Konservasi sumber daya air
			21		Pendayagunaan sumber daya air
			22		<i>Smart Water Management</i>
					Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage)
		6	23	Penguatan ketahanan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
			24		Peningkatan kapasitas mitigasi bencana
			25		Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
			26		Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
					Layanan JAGA (Jemput-Antar Pasien Warga Miskin)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA		PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
2	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan	7	Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah	27	Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor	PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu
						Fasilitasi Industri Rumah Tangga
						Klinik Hak Kekayaan Intelektual
						Micro Library UMKM
						Link and Match UKM dengan Swalayan / Mall
						Food Street Festival – Kawasan Kuliner
		28	Pengembangan kewirausahaan baru	28	Pengembangan kewirausahaan baru	Pemberdayaan Startup lokal
						Semarang Creative Makerspace
						Pembangunan Coworking Space UKM
		29	Peningkatan peran dan fungsi koperasi	29	Peningkatan peran dan fungsi koperasi	
		8	Peningkatan nilai investasi	30	Pelaksanaan promosi investasi	Temu Bisnis Internasional
						Unit Kerja Promosi Kota
		9	Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal	31	Pemberian insentif dan kemudahan perijinan	Paket Investasi Daerah
						32
Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland)						
Open Rooftop Double Decker Bus						
Amphibi Bus						
33	Pengembangan wisata MICE	33	Pengembangan wisata MICE	Semarang Zoo bertaraf Internasional		
				Pengembangan Sportourism		
10	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi	34	Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa			
				35	Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi	Sentra PKL
				36	Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayah.	Festival Angkringan
				Arena Nobar Kecamatan batas wilayah		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA		PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
		11	Pengembangan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> )	37	Peningkatan nilai dan produk ekspor	
				38	Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular	
				39	Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan	Pengembangan <i>Urban Farming</i> Gelar Hidroponik Kawasan Empon-Empon Kawasan Wisata Minapolitan
		12	Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah	40	Penguatan ketahanan pangan	Lumbung Pangan Kelurahan
				41	Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan	
		3	Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	13	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	42
43	Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin					
44	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin					Layanan JAGA (Jemput-Antar Pasien Warga Miskin) Jumat Berkah
45	Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan					Gerakan Bersama Forum CSR Forum Perguruan Tinggi Abdimas
46	Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin					Pelatihan spesifik PMKS
				47	Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
15	Peningkatan upaya perlindungan sosial			48	Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan	
				49	Peningkatan bantuan untuk PPKS	Tim Reaksi Cepat Layanan PMKS
16	Pengembangan Kampung Tematik produktif			50	Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif	Crisis Center PGOT Kampung Tematik Produktif
				51	Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk	



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA		PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
					pengembangan Kampung Tematik produktif	
		17	Pengembangan kesatuan sistem <i>demand and supply set</i> tenaga kerja	52	Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Sertifikasi bahasa asing TKI
	53			Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja		
	54			Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja	Sertifikasi / lisensi ketrampilan khusus pencaker	
	55			Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Kabar Loker (kebiasaan baru) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah Magang Tematik	
4	<b>Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif</b>	18	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	56	Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan	
				57	Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi	Kurikulum pembelajaran berbasis IT
						Pembelajaran Daring dan Luring (kebiasaan baru)
						<i>E-Library</i> di seluruh area <i>free wifi</i> Akses Terbitan Ilmiah Online Gratis
				58	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP	Pembangunan TK dan SMP Negeri berbasis zonasi
				59	Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan	Lulusan TK, SD dan SMP Bersertifikat Khusus
						Muatan Lokal Kurikulum Cinta Negara dan Daerah
				60	Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi	Penyediaan Broadband Learning Center (BLC)
Penguatan Pendidikan Non Formal (PNF)						
61	Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat					
62	Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah	Beasiswa warga miskin/berprestasi				
		Pengembangan Sekolah Swasta Gratis (TK, SD, SMP dan yang sederajat))				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
				Bapak Angkat Anak Sekolah tidak mampu
		19	Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i>	63 Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara terintegrasi
			64 Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan	
			65 Peningkatan layanan kesehatan rujukan	Layanan Puskesmas Malam Hari
			66 Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama	Pemerataan akses layanan Kesehatan
				Bus Layanan Kesehatan / Hospital Bus
			67 Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat	Rating Kelurahan Sehat
		20	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	68 Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			69 Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan	Gerakan Dasawisma Hebat
				Musrenbang perempuan
				Penguatan peran PKK
				Daycare Gratis
			70 Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia	Semarang Kota Inklusif
		21	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	71 Peningkatan kualitas layanan KB
				72 Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
		22	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	73 Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
				Semarang Community Center
				Kompetisi Inovasi Usaha bagi Pemuda
				Nojar (Nongkrong Bareng) Komunitas
			74 Peningkatan prestasi olahraga	Fasilitasi atlet berprestasi
			75 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi	Penghargaan Warga Berprestasi Kota Semarang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH	
			kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat		
				Paguyuban Relawan Kota	
			76 Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM	Kota Ramah HAM	
			77 Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial	<i>Religion center</i>	
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel	23	78 Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah		
			79 Optimalisasi barang milik daerah	Optimalisasi Aset-Aset Kota	
		24	Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan	80 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Informasi Tata Ruang dan Pajak Bumi Bangunan
				81 Pengembangan alternatif pembiayaan	Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD
				82 Optimalisasi BUMD	
				25	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan
		Robot Layanan (Industry 5.0)			
		Layanan Terpadu Malam Hari			
		Layanan Publik Akhir Pekan			
		Semarang <i>Smart Card</i>			
Pemanfaatan internet pasca jam kerja					
84	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		<i>Single Sign-On</i> Sistem Informasi Manajemen		
			Akselerasi SPBE		
85	Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung <i>decision making system</i>		SOLUSI: Semarang On-Line Untuk Sistem Integrasi		
			Dari Semarang untuk Indonesia (Satu Data dan Satu Peta)		
			Pembangunan Data Center II		
			Pembangunan <i>Big Data Analytics</i>		
86	Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan		Agen Informasi dan Pengaduan		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA		PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH	
		26	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	87	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Omnibus Law Peraturan Kota Semarang	
						Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	
							Talenta Berjejaring
						88	Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
				89	Penguatan Manajemen Risiko	Pengelolaan Manajemen Risiko	
		27	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	90	Pengembangan budaya inovasi di OPD		

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

**Tabel 4. 8**  
**Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025**

PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
1.	Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada: a. Penanganan genangan banjir dan rob; b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah; c. Penataan kawasan strategis perkotaan; d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman; e. Penanganan kawasan kumuh;	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,44	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57,86	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,72	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	64	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75,3	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100	%	DINAS PENATAAN RUANG

PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,7	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,41	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100	Persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100	Persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan	100	%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan		
		Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100	persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100	%	DINAS SOSIAL
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100	%	DINAS PENATAAN RUANG

PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40	Ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,8	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,50	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	28,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			70,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

PRIORITAS RKPd 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH		
		Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan			
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66,82	%	DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92	persen	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jml trayek BRT	15	trayek	DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	31	persen	DINAS PERHUBUNGAN	
			Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7	rasio	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas <b>ekonomi</b> yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada: a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa; b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro; c. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah; d. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75	%	DINAS TENAGA KERJA
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79	%	DINAS TENAGA KERJA
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70	%	DINAS TENAGA KERJA
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,6	%	DINAS TENAGA KERJA
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3.059,00	Kkal / Kapita / Tahun	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Presentase Cakupan Distribusi	100	%	DINAS KETAHANAN PANGAN

PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82,5	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2025	Satuan		
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3	persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20	%	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3.713,00	Penanam Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595	Investor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,5	%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2	Nilai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	99	%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	91,57	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3.169,00	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	4.080,00	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2	Kasus	DINAS PERIKANAN
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17.808,00	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	90	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan	36.519,00	ton	DINAS PERTANIAN
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51.069	ton	DINAS PERTANIAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6	ton/ha	DINAS PERTANIAN

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5	%	DINAS PERTANIAN
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80	%	DINAS PERTANIAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33	kelompok	DINAS PERTANIAN
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26	pasar	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,87	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1.747.581.040	US\$	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	50	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	96	%	DINAS PERINDUSTRIAN
			Persentase Pertambahan IKM	0,5	%	DINAS PERINDUSTRIAN

PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	TARGET Capaian 2025	Satuan	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4	%	DINAS PERINDUSTRIAN
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0,5	%	DINAS PERINDUSTRIAN
3.	Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b> , penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada: a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin; b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin; c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja; d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100	%	DINAS SOSIAL
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100	%	DINAS SOSIAL
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,93	%	DINAS SOSIAL
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,25	%	DINAS SOSIAL
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11	Point	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	TARGET Capaian 2025	Satuan	
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10	%	SATPOL PP
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2	Indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	68	angka indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	0	%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	59	indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	72	indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	TARGET Capaian 2025	Satuan	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84	%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif, dengan fokus pada: a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas; b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115,63	%	DINAS PENDIDIKAN
				APK PAUD 5-6 tahun	86,21	%	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12	lembaga	DINAS PENDIDIKAN
				APK SD/MI	111,73	%	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100	%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	%	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90,29	%	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100	%	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100	%	DINAS PENDIDIKAN
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100	%	RSUD KRMT WONGSONEGORO
				Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100	%	RSUD KRMT WONGSONEGORO
Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100			persentase	DINAS KESEHATAN		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	persen	DINAS KESEHATAN		

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97	persen	DINAS KESEHATAN
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	persen	DINAS KESEHATAN
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,5	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,32	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45	Organisasi Kpemudaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1.273	jumlah	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5	Lapangan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	53	Kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
5.	Peningkatan <b>tata kelola pemerintahan</b> yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada: a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan; b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya; c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara; d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99,6	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,8	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	100	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	Rasio	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	100	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PRIORITAS RKPD 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
				Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Pelayanan Publik	128	100%	SEKRETARIS DAERAH
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9	Kegiatan	SEKRETARIS DAERAH
				Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70	%	SEKRETARIS DAERAH
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100	%	SEKRETARIS DAERAH
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1	dokumen	SEKRETARIS DAERAH
				Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100	%	SEKRETARIS DAERAH
				prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100	%	SEKRETARIS DAERAH
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18	dokumen	SEKRETARIAT DPRD
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100	%	BAPPEDA

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan		
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%	BAPPEDA
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	%	BAPPEDA
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	BAPPEDA
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,82	%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	100	%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	276	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan		
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	82	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	50	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100	%	BAPPEDA
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Leveling	INSPEKTORAT
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3	Nilai	INSPEKTORAT
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	16 KECAMATAN

PRIORITAS RKPD 2025	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2025	Satuan		
		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	2	Angka	KECAMATAN CANDISARI	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	16 KECAMATAN
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	16 KECAMATAN
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	15 KECAMATAN
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.00	Angka	KECAMATAN CANDISARI

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024



#### 4.3 RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKBANG) PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KOTA SEMARANG UNTUK TAHUN 2025

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan nasional diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara efektif. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dilaksanakan dalam rangka menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Hal ini berupa dukungan RKPD terhadap indikator kinerja urusan, penyepakatan target indikator makro pembangunan, serta strategi dan aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya.

Berikut merupakan penyepakatan bersama target indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Urusan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Semarang untuk tahun 2025.

**Tabel 4. 9**  
**Indikator Kinerja Urusan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah**

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Indikator Makro Pembangunan</b>				
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,80 – 6,50	5,80 – 6,50
2	Tingkat kemiskinan	Persentase	3,98 – 3,74	3,98 – 3,74
3	Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT	Persentase	5,61 – 5,31	5,61 – 5,31
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,80 – 85,80	84,80 – 85,80

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

#### 4.4 KONTRIBUSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019 PADA TAHUN 2025

Pemerintah Kota Semarang mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Kota Semarang masuk dalam percepatan Kawasan Kedungsepur. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres No. 79 Tahun 2019**

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi	Sumber Dana	Progres
1	Pembangunan Technopark	75 Milyar	APBN	- KAJIAN (2018) - MASTERPLAN (2019) - ROADMAP (2020) - DED (2020) - AMDAL DAN ANDALALIN (2021)
2	Pembangunan Jembatan Srandol - Sekaran	200 Milyar	APBN	- FS (2007) - LARAP (2007) - DED (2008) - UKL UPL (2016)

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi	Sumber Dana	Progres
				- PEMBEBASAN LAHAN (2021)
3	Pembangunan Fly Over Jalan Setiabudi	200 Milyar	APBN	- FS (2010) - DED (2017)
4	Pembangunan Fly Over Madukoro	200 Milyar	APBN	- DED (2017) - UKL UPL (2020) - ANDALALIN (2020) - LARAP (2020) - PEMBEBASAN LAHAN (2021)
5	Normalisasi Sungai Bringin	100 Milyar	APBN	- MASTERPLAN (2007) - REVIEW DED (2017) - LARAP (APBP-P 2020) - LAHAN KURANG 6 BIDANG (2019 - 2020) - PEMBEBASAN LAHAN TAMBAHAN (2021-2022) - PEMBANGUNAN FISIK (2020 - 2023)
6	Pembangunan Rusun Pekerja	25 Milyar	APBN	- PROPOSAL, DED (2018 DARI PUSAT) - LAHAN ASET PEMKOT (Telah dibangun 1 TB)
7	Pembangunan Underground Simpang Lima	850 Milyar	KPBU	- FS (2017) - MASTERPLAN (2018) - AMDAL (2020) - DED (2021) - LARAP (2021)
8	Pembangunan BRT Dedicated Lane	600 Milyar	KPBU	- STUDI PENDAHULUAN (2017) - FS dibantu PT.SMI (2019-2020) - Kementerian Perhubungan RI telah mengirim surat ke Bappenas terkait Usulan <i>Green Book 2023</i> Sektor Transportasi dengan kegiatan ( <i>National Mass Transit Project Implementation</i> ) Metropolitan Semarang - Kelengkapan <i>Readiness Criteria</i> Dokumen <i>Updating</i> Dokumen <i>Feassibility Study</i> telah selesai disusun oleh PT. Mitra Pembangunan Jaya dan telah diupload sebagai data dukung kegiatan
9	Pengembangan LRT Perkotaan	14,760 Milyar	KPBU	- FS (2017) - KAJIAN TOD (2018) - STUDI PENDAHULUAN KPBU (2018) - OBC (2019) dibantu oleh Dirjen Perkeretaapian
10	Pembangunan Outer Ringroad ( <i>Harbour Toll</i> ) Semarang – Kendal	15,000 Milyar	KPBU	- FS (2019) oleh Pemrakarsa - Telah keluar Rekomendasi terkait trase <i>Harbour Toll</i> dari KKP - Kapasitas SDM terkait rencana LVC

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

#### 4.5 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Target SDGs Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Semarang.

**Tabel 4. 11**  
**Sasaran, Prioritas dan Program Yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Semarang Pada Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya angka kemiskinan</li> <li>- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial</li> <li>- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan</li> <li>- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif</li> <li>- Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b>, penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>g. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>h. Program Pembinaan Keluarga Berencana</li> <li>i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</li> <li>j. Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>k. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>l. Program Penanggulangan Bencana</li> <li>m. Program Pengembangan Perumahan</li> <li>n. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>o. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>p. Program Pencatatan Sipil</li> <li>q. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>r. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li> <li>s. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>t. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>u. Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting</li> <li>v. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>w. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				<ul style="list-style-type: none"> <li>x. Program Pengelolaan Budidaya Ikan</li> <li>y. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>z. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>aa. Program Penyelenggaraan Jalan</li> </ul>
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya angka kemiskinan</li> <li>- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif</li> <li>- Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b>, penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>b. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>g. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li> </ul>
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya angka kemiskinan</li> <li>- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial</li> <li>- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif</li> <li>- Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b>, penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan</li> <li>d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li> <li>f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>g. Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>h. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>i. Program Peningkata Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</li> <li>j. Program Pengendalian Penduduk</li> </ul>
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	- Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b> , penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem	d. Program Informasi dan Komunikasi Publik
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	- Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender - Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	- Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif - Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b> , penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem	a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Pengendalian Penduduk d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Program Peningkatan Peran Partai Politik
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	- Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b> , penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem - Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	a. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum d. Program Pengembangan Perumahan e. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja	- Meningkatnya produk unggulan daerah - Meningkatnya nilai tambah ekonomi	- Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas <b>ekonomi</b> yang	a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Penempatan Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
	yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya angka kemiskinan</li> <li>- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tangguh dan berkeadilan</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>d. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>h. Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>j. Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>k. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>l. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>m. Program Hubungan Industrial</li> <li>n. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</li> <li>o. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>p. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li> </ul>
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan</li> <li>- Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan</li> <li>- Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan</li> <li>- Meningkatnya produk unggulan daerah</li> <li>- Meningkatnya nilai tambah ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</li> <li>d. Program Aplikasi Informatika</li> <li>e. Prgram Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>f. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>g. Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>h. Program Pengembangan Jasa Kontruksi</li> </ul>
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya angka kemiskinan</li> <li>- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial</li> <li>- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b>, penurunan <b>kemiskinan</b> serta penghapusan kemiskinan ekstrem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</li> <li>b. Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>d. Program Hubungan Industrial</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		pendidikan dan kesehatan		
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas</li> <li>- Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan</li> <li>- Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana</li> </ul>	- Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>d. Program Pengembangan Perumahan</li> <li>e. Program Kawasan Permukiman</li> <li>f. Program Pengembangan Permukiman</li> <li>g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</li> </ul>
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	- Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengelolaan Persampahan</li> <li>b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>d. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</li> </ul>
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	- Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li> <li>c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>f. Program Penanggulangan Bencana</li> <li>g. Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>h. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>i. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</li> <li>k. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3</li> <li>l. Pengelolaan Sampah</li> <li>m. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> </ul>
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena kawasan laut menjadi kewenangan Provinsi		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		
16	Mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</li> <li>- Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan <b>tata kelola pemerintahan</b> yang dinamis, efektif dan akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li> <li>b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>e. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>f. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>g. Program Pencatatan Sipil</li> <li>h. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan</li> <li>i. Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>j. Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>k. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</li> <li>- Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan <b>tata kelola pemerintahan</b> yang dinamis, efektif dan akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>d. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>e. Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> </ul>

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

#### 4.6 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Di sisi lain, kelompok tersebut juga merupakan masyarakat yang produktif dan potensial untuk mendukung kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis dan ramah



gender demi kemajuan kota. Upaya yang dilakukan dalam pengarusutamaan gender yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat berbasis gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

Strategi pengarusutamaan gender di Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Sesuai Perda ini, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja yang dilakukan melalui Analisis Gender.

**Tabel 4. 12**  
**Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang Pada Tahun 2025**

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	- Peningkatan <b>tata kelola pemerintahan</b> yang dinamis, efektif dan akuntabel	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A
2		- Peningkatan kualitas dan kapasitas <b>Sumber Daya Manusia</b> yang unggul dan produktif		Program Perlindungan Perempuan	DP3A
3				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3A
4				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP3A
5				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3A
6				Program Perlindungan Khusus Anak	DP3A
7				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	DP3A
8				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DISDALDUK KB
9				Program Pengendalian Penduduk	DISDALDUK KB
10				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKER
11				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	Perangkat Daerah Pengampu
12				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPP
13				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
14				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
15				Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
16				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
17				Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
18				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES RSWN
19				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DISPERKIM
20				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DISPERKIM
21				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DISPERKIM
22				Program Pengembangan Permukiman	DISPERKIM
23				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DISPERKIM

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

#### **4.7 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung PENGARUSUTAMAAN KERENTANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM**

Sesuai Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam tabel tersebut.

**Tabel 4. 13**

**Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kota Semarang Pada Tahun 2025**

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Strategi	Program
1	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas,	Penguatan ketahanan bencana	a. Program penanggulangan bencana
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu	b. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian c. Program penanganan bencana d. Program perencanaan lingkungan hidup e. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan h. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat j. Program Pengelolaan Persampahan

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

**4.8 FASILITASI PERUBAHAN IKLIM**

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terbagi menjadi dua, yaitu upaya mitigasi dan adaptasi. Kota Semarang telah melakukan beberapa kajian terkait mitigasi dan adaptasi, terdiri dari Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim pada tahun 2018, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019, dan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan kajian tersebut, Kota Semarang telah memiliki rencana aksi daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan target penurunan 116.180 ton CO<sub>2</sub>e atau setara dengan 1,9%.

Antisipasi dampak perubahan iklim melalui strategi mitigasi berupa penerapan teknologi budidaya rendah karbon (tingkat emisi gas rumah kaca rendah) dan strategi

adaptasi antara lain melalui penyesuaian irigasi sesuai dengan perubahan sistem hidrologi dan potensi sumberdaya air, pola tanam, jenis tanaman dan varietas, dan sistem pengolahan tanah.

#### **4.9 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, prioritas pembangunan Kota Semarang pada tahun 2025 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kualitas dan kuantitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 14**  
**Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kota Semarang Tahun 2025**

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b> , dan penurunan <b>kemiskinan</b>	Program Pengelolaan Pendidikan
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			
Pendidikan Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD					
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b> , dan penurunan <b>kemiskinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ul>
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal essensial sesuai standar			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>d. Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> </ul>
		Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh pengelolaan air limbah untuk limbah domestik			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pengembangan Permukiman</li> <li>b. Program Kawasan Permukiman</li> <li>c. Program Pengembangan Perumahan</li> </ul>
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			
5	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Percepatan <b>penyediaan infrastruktur</b> yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</li> <li>b. Program Penanggulangan Bencana</li> </ul>
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Percepatan pengurangan <b>pengangguran</b> , dan penurunan <b>kemiskinan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>b. Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>d. Program Penanganan Bencana</li> </ul>
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Program dan kegiatan di tahun 2025 disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan bidang urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

#### **5.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

##### **5.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### **a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program diarahkan pada pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

###### **b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program diarahkan pada penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal.

###### **c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

###### **d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

##### **5.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### **a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

###### **b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Post Market* pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**5.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program iini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**e. Program Pengembangan Permukiman**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

**f. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

**g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

**h. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

**i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

**j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota,

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

#### **5.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

##### **b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

##### **c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

#### **5.1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

##### **b. Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

##### **c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

### **5.1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

#### **b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

#### **c. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

#### **d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

### **5.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

#### **5.2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

#### **b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### **d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

### **5.2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 5.2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

**c. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

### 5.2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**c. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

Program ini diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengelolaan Tanah Ulayat**

Program ini diarahkan pada Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**e. Program Pengelolaan Tanah Kosong**

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.

**f. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Membuka Tanah.

**g. Program Penatagunaan Tanah**

Program ini diarahkan pada Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

#### **5.2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.

**b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

**c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

**i. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sampah.

#### **5.2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

**b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

**c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

**d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program ini diarahkan pada Penyusunan Profil Kependudukan.

**5.2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

**b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.

**5.2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



### **5.2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

### **5.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **b. Program Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **5.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

#### **b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

#### **c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota.

**e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

**g. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

**5.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

**a. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

**c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**5.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

**c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

**5.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

**5.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**5.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini diarahkan pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

**5.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **5.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Program ini diarahkan pada Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, dan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

#### **c. Program Perizinan Penggunaan Arsip**

Program ini diarahkan pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

### **5.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

#### **5.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

##### **b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

##### **c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

##### **d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

#### **5.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

**c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

**5.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

**b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

**e. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

**5.3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

**b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

**c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program ini diarahkan pada Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

**d. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

**f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

**5.3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini diarahkan pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

**c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

**5.4. UNSUR PENDUKUNG**

**5.4.1. SEKRETARIAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah.

**b. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

**5.4.2. SEKRETARIAT DPRD**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini diarahkan pada Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

## **5.5. UNSUR PENUNJANG**

### **5.5.1. PERENCANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

### **5.5.2. KEUANGAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

#### **b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### **5.5.3. KEPEGAWAIAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Kepegawaian Daerah**

Program ini diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

### **5.5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program ini diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

### **5.5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program ini diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

### **5.6. UNSUR PENGAWAS**

#### **5.6.1. INSPEKTORAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

##### **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi.

### **5.7. UNSUR KEWILAYAHAN**

#### **5.7.1. KECAMATAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini diarahkan pada Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

##### **b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

##### **c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

##### **d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

### **5.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

#### **5.8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.



**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu.

**c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

**d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai target indikator program-program pada setiap urusan pemerintahan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum, setiap Perangkat Daerah melaksanakan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat mendukung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator:

- 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan;
- 2) Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN;
- 3) Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD; dan
- 4) Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD.

**Tabel 5. 15**  
**Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah**  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Semarang Tahun 2025**

PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	914.802.496.824
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	509.946.026.895
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO	485.569.456.399
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	380.950.251.641
1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG	134.568.575.574
1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	382.630.132.220
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP	41.836.403.430
1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN	41.228.057.090
1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.080.305.560
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	35.528.133.116
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	22.504.715.366
2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25.157.056.526
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	15.914.391.628
2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	126.920.243.126
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.163.498.764
2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.326.605.062
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	319.515.542.137
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	74.167.345.617
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	25.428.592.490
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.451.360.181
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	58.913.755.080
2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	43.067.706.940
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	17.986.450.300
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	14.296.118.937
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN	37.808.615.375
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN	84.468.162.652
3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN	18.406.507.350
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	248.791.047.927
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	135.966.315.826
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.042.087.872
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	203.521.163.979
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	106.518.898.680
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.134.453.856
5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	10.204.705.877
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	31.472.005.080
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN	42.725.973.630
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA	51.313.567.689
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT	68.036.139.800
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR	45.901.066.036
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH	55.520.892.772
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI	64.176.920.572
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU	35.107.563.241
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN	62.087.257.480
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK	62.468.337.286
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	36.804.736.840
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG	68.622.926.866
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI	34.836.828.344
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK	56.087.752.962
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN	57.687.863.016
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI	35.796.514.330
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN	67.088.998.222
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.612.948.231
<b>JUMLAH</b>	<b>5.559.163.472.694</b>

**Tabel 5. 2**  
**Kompilasi Program Dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah**  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Semarang Tahun 2025**

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			<b>914.802.496.824</b>
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			722.458.568.800
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			123.871.421.424
		APK PAUD 5-6 tahun	86.21 %	
		APK SD/MI	111.73 %	
		APK SMP/MTs	115.65 %	
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12 lembaga	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			685.000.000
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			67.387.506.600
		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.29 %	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			400.000.000
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>			<b>509.946.026.895</b>
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			364.482.429.756

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			144.309.672.619
		Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			581.924.520
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			260.000.000
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00 Persen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			312.000.000
		Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 Persen	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RSUD KRMT WONGSONEGORO</b>			<b>485.569.456.399</b>
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			432.897.114.749
		Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100 persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 persen	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			52.672.341.650

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 persen	
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 persen	
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>			<b>380.950.251.641</b>
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			75.928.469.338
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			51.772.839.454
		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44 Persen	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			144.200.329.938
		Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67.00 Persen	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			109.048.612.911
		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.30 Persen	
<b>1.03.2.10.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENATAAN RUANG</b>			<b>134.568.575.574</b>
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.463.538.375
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			102.457.208.013

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			616.483.389
		Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			537.183.946
		Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			2.411.114.857
		Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			327.300.000
		Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			448.553.274
		Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			240.130.720
		Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			50.094.000
		Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			16.969.000
		Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	
<b>1.04.1.03.2.11.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>382.630.132.220</b>

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.257.150.000
		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86 Persen	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			292.850.000
		Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.641.710.060
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,72%	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1.192.200.000
		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			50.957.658.329
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			6.571.686.600
		Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			17.346.090.000
		Persentase Rumah Layak Huni	99,70%	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			303.370.787.231
		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.41 Persen	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATPOL PP</b>			<b>41.836.403.430</b>

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			32.794.101.015
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP	100%	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP	100%	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			9.042.302.415
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 Persen	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>			<b>41.228.057.090</b>
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.022.043.741
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			6.206.013.349
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persen	
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persen	
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 Persen	



KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persen	
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 Persen	
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			<b>14.080.305.560</b>
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.838.913.390
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			2.241.392.170
		Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>			<b>35.528.133.116</b>
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.656.598.330
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 Persen	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			6.472.822.021
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Sosial (PSKS) yang difasilitasi		
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			30.320.774
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 Persen	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			8.301.760.849
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93 Persen	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.266.929.375
		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71.25 Persen	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			799.701.767
		Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 Persen	
<b>2.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			<b>22.504.715.366</b>
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.215.301.220
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			64.382.763
		persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75.00 Persen	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			3.001.491.850

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79.00 Persen	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.290.811.533
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70.00 Persen	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			932.728.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.60 Persen	
<b>2.08.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>25.157.056.526</b>
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.579.576.516
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.375.000.000
		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1.345.111.720
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11.44 %	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			554.828.200
		Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			282.396.670
		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			1.008.397.480
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			340.000.000
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011 %	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			741.430.730
		Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.930.315.210
		Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>			<b>15.914.391.628</b>
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.025.203.433
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00 Persen	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00 Persen	
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100 Persen	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			25.000.000
		Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100 Persen	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			3.867.360.370
		Ketersediaan Energi / Kapita	3059 Kkal	
		Presentase Cakupan Distribusi	100.00 Persen	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			272.282.200
		Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	0 Persen	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			724.545.625
		Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82.50 Persen	
<b>2.11.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>126.920.243.126</b>
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			49.603.158.547
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			446.546.333
		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 Persen	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			4.491.304.490
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40.00 Ha	
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 Persen	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan	91.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air		
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64.00 Persen	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2.272.702.525
		Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 Persen	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			255.911.774
		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60.00 Persen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			494.046.742
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 Persen	
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan POU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.80 Persen	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.361.345.650
		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			248.195.280
		Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.50 Persen	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			95.866.136
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			66.651.165.649
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70.00 Persen	
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30.00 Persen	
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.70 Persen	
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>21.163.498.764</b>
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.039.946.813
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			340.613.230
		Persentase Perekaman KTP-el	99.60 Persen	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			127.109.720
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.80 Persen	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			521.212.906
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 Persen	
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			134.616.095
		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 Persen	
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>17.326.605.062</b>
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.809.346.697
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00 Persen	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00 Persen	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			1.123.000.000
		Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 Persen	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			4.278.520.565
		Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2 persen	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.115.737.800
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32 Persen	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>319.515.542.137</b>



KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			80.213.655.576
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			239.301.886.561
		Jml trayek BRT	15.00 trayek	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66.82 Persen	
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33 Persen	
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92 Persen	
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.94 Rasio	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>			<b>74.167.345.617</b>
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.597.116.450
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 Persen	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			4.945.556.000
		Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			44.876.263.147
		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 Persen	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			805.000.000
		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 Persen	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			943.410.020
		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 Persen	
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>			<b>25.428.592.490</b>
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.901.894.152
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (dinkop)	100.00 Persen	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkop)	100.00 Persen	
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (dinkop)	100.00 Persen	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			150.000.000
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			504.320.000
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			394.320.000
		Persentase Koperasi sehat	33.00 Persen	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN			601.700.000

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	LATIHAN PERKOPERASIAN			
		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitas Pelatihan	1.00 Persen	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			2.060.280.000
		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28 Persen	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			4.300.294.000
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 Persen	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			3.515.784.338
		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 Persen	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			<b>20.451.360.181</b>
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.254.270.246
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			841.000.000
		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3713.00 Penanam	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.201.874.293
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595.00 Investor	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.900.000.000
		Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50 Persen	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			120.000.000
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			134.215.642
		Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	99.00 Persen	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			<b>58.913.755.080</b>
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.033.082.919
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 Persen	
		presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100 persen	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.750.694.224
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00 Persen	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			38.629.977.937
		Jumlah Atlet prestasi	1273.00 jumlah	
		Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Lapangan	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN			2.500.000.000

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
		Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	53.00 Kegiatan	
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			<b>43.067.706.940</b>
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.998.272.835
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00 Persen	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			7.286.515.538
		Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30.00 Persen	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			749.142.214
		Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30.00 Persen	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			740.040.000
		Pelestarian Warisan Budaya	91.57 Persen	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			11.880.684.360
		Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 Persen	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.513.051.993
		Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 Persen	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			900.000.000

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		SDM Pariwisata	90.00 Persen	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>			<b>17.986.450.300</b>
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.129.191.990
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1.223.190.357
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			199.728.000
		Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 Persen	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			640.981.920
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerintahan berbasis elektronik	100 Persen	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			698.113.023
		Persentase jumlah arsip musnah	100.00 Persen	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			95.245.010
		Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80 Persen	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>			<b>14.296.118.937</b>
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.109.963.900
		Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00 Orang	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00 Persen	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00 Persen	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.643.198.000
		Produksi perikanan tangkap	3169.37 ton	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2.694.439.000
		Produksi perikanan budidaya	4080.17 ton	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			200.000.000
		Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2 Kasus	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1.648.518.037
		Produksi ikan olahan	17808.18 ton	
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>			<b>37.808.615.375</b>
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.095.995.030
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian	100.00 Persen	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			8.950.320.221
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51069.22 ton	
		Produksi hasil peternakan	36519.00 ton	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2.834.200.000
		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			900.044.839
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 Persen	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			203.650.000
		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80.00 Persen	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			824.405.285
		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33.00 kelompok	
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>			<b>84.468.162.652</b>
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.123.125.918
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			85.847.190
		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 Persen	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			38.163.272.070
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26 pasar	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			3.737.910.894
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93 Persen	



KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			497.776.580
		Nilai ekspor non migas	1713153249 US\$	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			1.000.000.000
		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86 Persen	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			860.230.000
		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40 Persen	
<b>3.31.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN</b>			<b>18.406.507.350</b>
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.845.266.200
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Peindustrian	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 Persen	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			5.400.000.000
		Persentase Pertambahan IKM	0.50 Persen	
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	96.00 Persen	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			1.604.881.150
		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 Persen	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			556.360.000
		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>248.791.047.927</b>
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			167.574.016.650
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00 OPD	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			70.986.758.903
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70.00 Persen	
		Indek Pelayanan Publik	128.00 Persen	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			10.230.272.374
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 Persen	
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 Persen	
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>135.966.315.826</b>

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			75.848.274.241
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			60.118.041.585
		Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00 dokumen	
<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>30.042.087.872</b>
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.954.087.872
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			4.510.000.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			11.578.000.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100.00 Persen	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 Persen	
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			<b>203.521.163.979</b>
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			116.866.216.032
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			83.388.887.046
		Persentase SILPA Terhadap APBD	0.82 Persen	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.266.060.901
		Persentase Legalitas Aset	100.00 Persen	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>106.518.898.680</b>
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			76.774.448.308
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100 Persen	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			29.744.450.372
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>33.134.453.856</b>
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.125.034.988
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			7.617.268.130
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50 Persen	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99 Persen	
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	275.50 Persen	
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.88 Persen	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.392.150.738
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	50 Persen	
<b>5.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>			<b>10.204.705.877</b>
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			5.864.888.312

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			4.339.817.565
		Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			<b>31.472.005.080</b>
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.415.818.750
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			4.129.485.320
		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			4.926.701.010
		Nilai Maturitas SPIP	3.09 Nilai	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG SELATAN</b>			<b>42.725.973.630</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			16.978.444.900

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.402.600.000
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22.206.760.830
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			107.467.900
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			30.700.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG UTARA</b>			<b>51.313.567.689</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.890.133.979
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.244.970.760
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			29.896.719.350
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			125.243.600
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			156.500.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG BARAT</b>			<b>68.036.139.800</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25.667.935.950
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.264.604.800
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN			37.984.964.650



KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			38.637.200
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			79.997.200
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG TIMUR</b>			<b>45.901.066.036</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.557.162.933
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.497.272.463
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			24.564.805.090
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI			182.330.000

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			99.495.550
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98.00 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG TENGAH</b>			<b>55.520.892.772</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.192.189.478
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.476.335.436
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			27.736.367.858
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			33.600.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			82.400.000

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG PATI</b>			<b>64.176.920.572</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28.839.718.740
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.059.518.452
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.052.354.023
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			111.129.357
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			114.200.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN TUGU</b>			<b>35.107.563.241</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			14.972.935.350

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.994.373.088
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17.977.014.803
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			75.540.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			87.700.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN MIJEN</b>			<b>62.087.257.480</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.525.188.990
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.660.619.290
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.722.449.200
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			87.000.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			92.000.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KECAMATAN GENUK</b>			<b>62.468.337.286</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.174.756.885
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.808.978.936
		Persentase kepuasan masyarakat dalam	94 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			34.271.974.595
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			109.462.510
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			103.164.360
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN GAJAHMUNGKUR</b>			<b>36.804.736.840</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.831.003.090
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.524.842.750
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	96 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17.172.400.000
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI			194.516.000

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			81.975.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>KECAMATAN TEMBALANG</b>			<b>68.622.926.866</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.332.817.726
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.768.688.740
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			41.365.120.400
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			60.000.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			96.300.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80%	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>KECAMATAN CANDISARI</b>			<b>34.836.828.344</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.741.675.498
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.479.220.086
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			18.488.482.760
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			53.300.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			74.150.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KECAMATAN BANYUMANIK</b>			<b>56.087.752.962</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.186.671.844
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	



KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.484.355.230
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.147.675.888
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			45.450.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			223.600.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>KECAMATAN NGALIYAN</b>			<b>57.687.863.016</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.545.743.316
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN			3.716.382.820

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			32.168.554.050
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			176.082.830
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			81.100.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>KECAMATAN GAYAMSARI</b>			<b>35.796.514.330</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.355.832.121
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.366.177.740
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN			18.847.102.469

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			153.602.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			73.800.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98 Persen	
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>KECAMATAN PEDURUNGAN</b>			<b>67.088.998.222</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.884.304.442
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.269.079.180
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			39.435.010.000
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			479.604.600

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	25 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			21.000.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	50 Persen	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>30.612.948.231</b>
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.246.686.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			5.239.712.760
		Indeks Pengamalan Pancasila	2.30 Indeks	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			6.668.605.000
		Indeks Kebebasan Sipil	68.00 angka	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			2.695.909.260
		Indeks Kinerja Ormas	59.00 indeks	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2.936.000.000

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Indeks kerukunan umat beragama	71.50 indeks	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			3.826.035.211
		Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84.00 Persen	
<b>JUMLAH</b>				<b>5.559.163.472.694</b>

**Tabel 5.3**  
**Matrik Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kota Semarang Tahun 2025**

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
<b>1.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>914.802.496.824</b>	<b>1.254.428.850.894</b>	
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				<b>914.802.496.824</b>	<b>1.254.428.850.894</b>	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100	%	722.458.568.800	790.609.042.111	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100	%			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100	%			
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100	%	162.302.400	1.535.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%			
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	57.525.400	1.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	9.745.900	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	9.418.200	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	9.745.900	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	9.418.200	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	6.855.400	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	9.593.400	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	%	693.086.756.560	758.693.042.111	DINAS PENDIDIKAN
		Pelaporan Keuangan SKPD	100	%			
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667	Orang/bulan	687.197.217.000	751.148.042.111	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokumen	5.859.632.160	7.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	9.932.800	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	19.974.600	22.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100	%	250.023.400	36.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	250.023.400	36.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100	%	2.554.556.400	5.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	135.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	225.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	225.000.000	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	225.000.000	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	125.000.000	950.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.023.636.400	1.450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	595.920.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	382.366.240	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	382.366.240	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	%	22.762.463.800	21.550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	21.255.600.000	20.900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Laporan	1.506.863.800	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	3.260.100.000	2.545.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	214.000.000	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127	Unit	950.000.000	990.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1.516.100.000	420.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	500.000.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	80.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 tahun	86.21	%	123.871.421.424	243.429.408.783	DINAS PENDIDIKAN
		APK SD/MI	111.73	%			
		APK SMP/MTs	115.65	%			
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	12	lembaga			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	%	61.640.348.424	104.920.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit	5.997.960.000	45.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15	Unit	1.743.880.000	2.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	493.880.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	495.250.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16	Paket	1.259.987.000	4.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000	Peserta Didik	1.050.000.000	2.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600	Orang	740.000.000	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	508	Satuan Pendidikan	900.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	508	Orang	290.000.000	325.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500	Paket	565.000.000	325.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20	Ruang	15.293.283.984	12.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	Unit	2.543.880.000	2.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	508	Satuan Pendidikan	1.238.056.000	2.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85	Ruang	11.771.671.440	10.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134000	Peserta Didik	17.257.500.000	20.770.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	%	52.867.665.000	92.749.408.783	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	Unit	7.099.320.000	45.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	Unit	999.320.000	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50	Ruang	4.569.320.000	16.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	2.499.320.000	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7	Paket	199.320.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4568	Peserta Didik	18.486.300.000	13.305.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500	Peserta Didik	1.110.000.000	2.619.408.783	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900	Orang	300.000.000	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230	Satuan Pendidikan	50.000.000	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190	Orang	315.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250	Satuan Pendidikan	1.710.000.000	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30	Ruang	14.965.445.000	4.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	46	Paket	265.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2	Paket	299.320.000	2.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	%	8.635.768.000	42.650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2	Unit	2.197.280.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	Paket	5.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2	Paket	482.280.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2458	Peserta Didik	3.228.600.000	5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5	Orang	200.000.000	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260	Satuan Pendidikan	300.000.000	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit	247.280.000	27.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10	Paket	69.368.000	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	624.320.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2	Paket	208.640.000	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	42563	Satuan Pendidikan	1.035.000.000	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Ruang	38.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100	%	727.640.000	3.110.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450	Peserta Didik	40.000.000	220.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	Orang	100.000.000	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40	Satuan Pendidikan	150.000.000	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	Paket	39.000.000	65.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450	Peserta Didik	175.000.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	223.640.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100	%	685.000.000	4.900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	%			
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100	%	300.000.000	4.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4	Dokumen	50.000.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6585	Buku	150.000.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50	Orang	50.000.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4	Dokumen	50.000.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100	%	385.000.000	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4	Dokumen	60.000.000	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4500	Buku	150.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6	Dokumen	175.000.000	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.29	%	67.387.506.600	214.290.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	%	67.387.506.600	214.290.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18	Dokumen	62.303.506.600	213.890.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7	Laporan	5.084.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100	%	400.000.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100	%			
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%	150.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4	Dokumen	50.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen	100.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%	250.000.000	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15	Dokumen	150.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15	Dokumen	100.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				<b>509.946.026.895</b>	<b>37.921.406.000</b>	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>509.946.026.895</b>	<b>37.921.406.000</b>	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00	Persen	364.482.429.756	37.421.406.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	Persen			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	10	dokumen	131.685.200	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	51.078.400	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	7.468.800	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	Dokumen	8.908.800	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	Dokumen	3.501.600	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.969.600	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	7.758.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	Dokumen	50.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4	dokumen	270.841.159.400	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000	Orang/bulan	270.094.013.000	0	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	Dokumen	731.688.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	Laporan	5.040.400	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	Laporan	5.152.800	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dokumen	5.265.200	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100	persentase	2.123.875.975	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	81.803.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	22.031.340	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	Paket	96.781.579	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	3.840.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Laporan	1.023.792.740	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	895.627.316	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persentase	984.660.947	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	984.660.947	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persentase	2.898.571.501	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan	1.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	Laporan	1.149.294.501	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Laporan	1.748.277.000	0	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100	persentase	4.622.254.921	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	211.765.763	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit	2.392.552.008	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	464.359.350	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	1.500.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	53.577.800	0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	89	persentase	82.880.221.812	37.421.406.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.832.150.000	0	PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.393.479.000	1.393.479.000	PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.681.957.000	2.681.957.000	PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.020.418.000	0	PUSKESMAS BULULOR
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.274.924.000	2.274.924.000	PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	Unit Kerja	1.524.477.000	0	PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.752.646.000	2.752.646.000	PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.437.368.000	0	PUSKESMAS PANDANARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.582.775.000	1.582.775.000	PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	Unit Kerja	1.351.352.000	0	PUSKESMAS KARANG AYU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.761.530.000	1.761.530.000	PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.766.310.000	0	PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.521.400.000	0	PUSKESMAS KROBOKAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.269.502.000	0	PUSKESMAS NGEMLAK SIMONGAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	Unit Kerja	3.229.765.812	0	PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.910.967.000	1.910.967.000	PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.492.750.000	0	PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.024.457.000	2.024.457.000	PUSKESMAS PENGANDAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7	Unit Kerja	1.947.065.000	0	PUSKESMAS GENUK
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	Unit Kerja	4.011.754.000	0	PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	3.682.767.000	3.682.767.000	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	3.403.256.000	0	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	4.460.674.000	4.460.674.000	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.795.088.000	0	PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.932.999.000	1.932.999.000	PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	Unit Kerja	1.970.333.000	0	PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.989.844.000	1.989.844.000	PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.556.062.000	1.556.062.000	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	3.170.097.000	0	PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.642.164.000	2.642.164.000	PUSKESMAS MIJEN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2	Unit Kerja	1.540.073.000	1.540.073.000	PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	Unit Kerja	1.736.677.000	0	PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	3.234.088.000	3.234.088.000	PUSKESMAS NGALYAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.417.028.000	0	PUSKESMAS PURWOYOSO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.456.833.000	0	PUSKESMAS MANGKANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.366.666.000	0	PUSKESMAS KARANG ANYAR
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	Unit Kerja	1.990.208.000	0	PUSKESMAS SEKARAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.748.318.000	0	UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00	Persen	144.309.672.619	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100	persentase	39.505.054.599	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0	Unit	20.916.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	Unit	15.126.548.774	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0	Paket	3.462.505.825	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100	persentase	101.088.199.816	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang	65.700.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang	31.300.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang	23.600.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang	10.750.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang	66.576.950	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1726	Orang	200.658.560	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang	175.550.928	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160	Orang	17.134.157	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160	Orang	17.134.157	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	90	Orang	11.145.701	0	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38490	Orang	208.401.279	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54000	Orang	105.412.300	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	Dokumen	2.670.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	19.200.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	214.078.770	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	155.503.410	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	Dokumen	89.850.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dokumen	188.697.674	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	120	Orang	17.053.431	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	Dokumen	845.510.875	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	78.885.955.300	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	310.164.340	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Dokumen	7.224.164.507	0	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Dokumen	1.500.000.000	0	UPTD Instalasi Farmasi
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Dokumen	500.000.000	500.000.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Laporan Dokumen	500.000.000	0	PUSKESMAS BULUSAN
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39	Unit	32.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	2	Laporan	18.650.000	0	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2	Dokumen	42.275.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	6.685.160.648	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6527	Orang	46.429.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1307	Orang	78.291.321	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45	Orang	31.843.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0	Dokumen	100.008.508	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase faskes (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang telah menyelenggarakan sistem informasi kesehatan sesuai standar	100	persentase	2.121.599.420	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	Dokumen	2.121.599.420	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100	persentase	1.594.818.784	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0	Unit	20.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	Unit	1.119.818.784	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	Dokumen	455.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00	Persen	581.924.520	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	100	persentase	265.306.748	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta	0	Dokumen	22.381.000	0	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0	Orang	80.657.748	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	Dokumen	162.268.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100	persentase	316.617.772	0	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0	Orang	316.617.772	0	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00	Persen	260.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100	persentase	97.476.370	0	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	Dokumen	97.476.370	0	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100	persentase	69.338.290	0	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	Dokumen	69.338.290	0	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100	persentase	93.185.340	0	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0	Unit	93.185.340	0	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00	Persen	312.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100	persentase	162.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	162.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100	persentase	150.000.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	Dokumen	150.000.000	0	DINAS KESEHATAN
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RSUD KRMT WONGSONEGORO</b>				<b>485.569.456.399</b>	<b>0</b>	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>485.569.456.399</b>	<b>0</b>	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	persen	432.897.114.749	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100	persen			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	2	Dokumen	100.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Rumah Sakit	100	Persen	77.626.657.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	632	Orang/bulan	77.626.657.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100	Persen	355.170.457.749	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	355.170.457.749	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100	persen	52.672.341.650	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100	persen			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100	Persen	52.672.341.650	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	Persen			
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	Unit	51.464.051.600	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27	Unit	1.208.290.050	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				<b>380.950.251.641</b>	<b>425.982.000.000</b>	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>380.950.251.641</b>	<b>425.982.000.000</b>	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen	75.928.469.338	81.882.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	137.589.200	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	54.712.400	14.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.764.900	6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.370.900	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.964.100	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.370.900	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12	Laporan	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	9.406.000	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen	49.172.282.100	50.913.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450	Orang/bulan	48.188.684.000	49.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	973.375.700	1.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.359.400	4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	4.942.600	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.920.400	4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	6.037.000	9.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	2.942.200	4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	3.094.800	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	20.000.000	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	15.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen	3.255.637.445	2.459.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	200.000.000	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	1.255.478.043	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	277.133.551	4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	203.625.851	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	694.400.000	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen	545.000.000	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	221.571.203	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	101	Unit	221.571.203	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	18.352.507.442	18.916.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	19.283.000	16.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7.058.247.394	7.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	11.274.977.048	11.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	4.762.844.948	9.375.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121	Unit	2.549.231.478	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1031	Unit	75.000.000	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	422	Unit	239.548.470	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	899.065.000	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5	Ha	1.000.000.000	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.44	Persen	51.772.839.454	66.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	97.42	Persen	49.072.839.454	63.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	13	Unit	2.000.000.000	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4	Unit	28.100.675.000	35.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	85	Unit	15.310.681.739	16.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	100	Unit	720.225.715	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5	KM	1.500.000.000	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4	Dokumen	441.257.000	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	85.50	Persen	2.700.000.000	3.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.3	KM	2.600.000.000	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	67.00	Persen	144.200.329.938	189.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.59	Persen	144.200.329.938	189.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4	Sistem Drainase Perkotaan	97.400.000.000	125.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	208	Unit	9.000.000.000	19.000.000.000	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12	Dokumen	1.617.500.000	1.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	12.588.000.000	15.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	23.594.829.938	29.000.000.000	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	75.30	Persen	109.048.612.911	87.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	88.48	Persen	109.048.612.911	87.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2	Dokumen	455.000.000	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11	Dokumen	1.476.426.000	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	KM	12.500.000.000	10.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2	KM	6.074.424.280	8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	12.500.000.000	8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	10.167.653.229	12.000.000.000	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2	KM	1.360.871.738	2.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5	Jembatan	500.000.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2	Jembatan	6.900.000.000	6.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2	Jembatan	8.492.000.000	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	6	KM	575.317.000	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	KM	35.500.000.000	10.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4	KM	6.640.000.000	15.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.500.000.000	1.500.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.500.000.000	1.500.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.500.000.000	1.500.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	1.406.920.664	1.500.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG				134.568.575.574	109.513.348.853	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				133.485.528.580	108.359.579.165	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	27.463.538.375	28.739.716.349	DINAS PENATAAN RUANG
		Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%	189.146.400	179.683.182	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	88.859.600	39.375.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	7.800.900	8.242.500	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	7.490.900	9.712.500	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	7.800.900	8.242.500	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	7.490.900	9.712.500	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	7.078.200	10.287.165	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	12.625.000	41.611.017	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	52.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	%	24.672.543.386	25.905.065.550	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170	Orang/bulan	24.001.875.000	25.201.968.750	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	655.824.800	671.596.800	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	Laporan	5.114.214	10.500.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	5.114.214	10.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	4.615.158	10.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100	%	109.420.000	115.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	10.000.000	10.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	99.420.000	105.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.332.382.253	1.248.904.319	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	49.996.476	52.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	19.999.314	21.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	140.000.000	147.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	83.893.357	183.750.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	75.000.000	78.750.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	3.359.404	5.250.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Laporan	519.533.208	550.654.319	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	440.600.494	210.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	429.737.237	510.801.787	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6.498.000	6.825.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	61.494.552	78.750.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	361.744.685	425.226.787	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	730.309.099	779.761.511	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	41.905.553	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	Unit	640.705.496	685.355.958	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	52.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00	Persen	102.457.208.013	75.943.719.632	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100	%	102.457.208.013	75.943.719.632	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	10	Bangunan Gedung Cagar Budaya	451.955.000	164.850.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	150	Orang	112.000.000	26.250.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2	Bangunan Gedung	55.886.436.295	47.933.873.710	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3	Bangunan Gedung	17.812.651.982	5.250.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2	Dokumen	434.027.504	157.342.500	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1	Bantuan Teknis	25.000.000	26.250.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8	Dokumen	25.857.626.870	20.418.097.526	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	600	Orang	100.000.000	105.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2400	Dokumen	1.777.510.362	1.862.055.896	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00	Persen	616.483.389	477.050.823	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100	%	616.483.389	477.050.823	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3	Dokumen	616.483.389	477.050.823	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00	Persen	537.183.946	564.043.142	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100	%	537.183.946	564.043.142	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50	Orang	56.846.725	59.689.061	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60	Lembaga	54.980.719	57.729.754	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1	Dokumen	118.934.781	124.881.520	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50	Orang	306.421.721	321.742.807	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00	Persen	2.411.114.857	2.635.049.219	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100	%	1.000.000.000	1.050.000.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3	Dokumen	900.000.000	945.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1	Publikasi	100.000.000	105.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100	%	700.000.000	735.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	2	Peta	200.000.000	210.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40	Orang	200.000.000	210.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	Kegiatan	300.000.000	315.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100	%	409.597.652	525.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1	Dokumen	200.000.000	210.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3	Sistem Informasi	209.597.652	315.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100	%	301.517.205	325.049.219	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	200.000.000	210.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1	Laporan	101.517.205	115.049.219	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				<b>1.083.046.994</b>	<b>1.153.769.688</b>	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00	Persen	327.300.000	343.665.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100	%	327.300.000	343.665.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24	Berita Acara	211.950.000	222.547.500	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	Dokumen	115.350.000	121.117.500	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00	Persen	448.553.274	470.980.938	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	%	448.553.274	470.980.938	DINAS PENATAAN RUANG



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	448.553.274	470.980.938	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00	Persen	240.130.720	268.707.600	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100	%	240.130.720	268.707.600	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	223.630.720	251.382.600	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	16.500.000	17.325.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00	Persen	50.094.000	52.598.700	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100	%	16.500.000	17.325.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1	Laporan	16.500.000	17.325.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100	persen	33.594.000	35.273.700	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	33.594.000	35.273.700	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00	Persen	16.969.000	17.817.450	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100	%	16.969.000	17.817.450	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	16.969.000	17.817.450	DINAS PENATAAN RUANG
<b>1.04.1.03.2.11.01.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>382.630.132.220</b>	<b>0</b>	



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>4.383.910.060</b>	<b>0</b>	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	57.86	Persen	1.257.150.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100	Persen	1.257.150.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5	Titik	1.257.150.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100	%	292.850.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50	SR	292.850.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	9	Unit	200.000.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1	Lembaga	49.175.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	Orang	43.675.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,72	%	1.641.710.060	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.641.710.060	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	11	M <sup>3</sup> /Hari	646.600.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	8	Unit	150.000.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	50	Penyelenggara	41.100.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1	M <sup>3</sup> /Hari	641.710.060	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	125.000.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100	Orang	37.300.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100	%	1.192.200.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100	%	1.192.200.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.192.200.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>378.246.222.160</b>	<b>0</b>	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100	%	50.957.658.329	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100	%			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100	%			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100	%			
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	208.821.026	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	78.301.315	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	7.254.849	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	8.503.599	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	21.296.349	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	8.503.599	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.237.868	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	29.723.447	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100	%	32.326.025.782	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269	Orang/bulan	31.527.649.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Dokumen	780.384.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan#Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200	Dokumen	3.900.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.615.158	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	4.862.466	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	4.615.158	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100	%	518.382.400	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400	Paket	130.536.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	8.100.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	346.621.400	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	33.125.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100	%	1.108.685.988	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	42.928.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	549.313.281	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	213.250.780	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	81.058.664	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	83.792.309	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	27.750.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	95.151.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	15.441.954	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	2.042.624.200	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	16.500.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	872.398.800	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.153.725.400	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	14.753.118.933	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	2.113.674.392	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	8.260.752.725	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	50.853.096	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	3.748.435.814	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	579.402.906	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitas Kebutuhan Perumahan	100	%	6.571.686.600	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	%	400.000.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16	Unit Rumah	400.000.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100	%	4.616.636.600	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05.0001	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100	Laporan	4.616.636.600	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100	%	1.555.050.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	Laporan	1.555.050.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,7	%	17.346.090.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100	%	17.346.090.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16	Unit Rumah	17.346.090.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00	Persen	303.370.787.231	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.41	Persen			

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100	%	303.370.787.231	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dokumen	5.319.200.000	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100	Lokasi	43.076.577.599	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2	Laporan	31.120.608.200	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1	Lokasi	143.788.291.816	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1	Lokasi	78.884.108.600	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	Laporan	1.182.001.016	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATPOL PP</b>				<b>41.836.403.430</b>	<b>43.782.622.234</b>	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>41.836.403.430</b>	<b>43.782.622.234</b>	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	%	32.794.101.015	34.736.308.477	SATPOL PP
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	%			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP	100	%			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP	100	%			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%	178.668.700	163.991.340	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	53.328.800	6.756.600	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.849.020	10.224.510	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.240.840	8.620.420	SATPOL PP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.849.020	5.424.510	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.240.840	7.120.420	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	48.039.760	60.844.880	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	7.120.420	15.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	%	28.483.474.975	28.506.891.840	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265	Orang/bulan	28.229.502.000	28.229.502.000	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	241.076.815	264.330.000	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.512.400	2.198.720	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	9.071.360	9.548.720	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.312.400	1.312.400	SATPOL PP
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100	%	951.702.270	1.155.293.703	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	12.000.000	200.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	285	Paket	442.304.420	427.895.898	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	960	Orang	490.864.050	490.864.050	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	6.533.800	36.533.755	SATPOL PP



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100	%	602.230.595	1.225.841.615	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	10.819.572	39.428.480	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	34.557.540	54.557.540	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	21.898.550	71.894.640	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	13	Paket	31.682.820	71.682.820	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	71.072.000	72.025.000	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	244.819.445	434.218.440	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	187.380.668	482.034.695	SATPOL PP
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	524.532.078	1.288.821.556	SATPOL PP
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	414.826.004	650.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	109.706.074	638.821.556	SATPOL PP
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	%	595.141.080	712.941.080	SATPOL PP
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	235.141.080	250.141.080	SATPOL PP
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	360.000.000	462.800.000	SATPOL PP
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	1.458.351.317	1.682.527.343	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	36.318.180	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	1.061.558.530	981.045.210	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	95.201.049	195.909.108	SATPOL PP



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	201.139.350	351.251.113	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	60.848.785	118.003.732	SATPOL PP
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00	Persen	9.042.302.415	9.046.313.757	SATPOL PP
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	20	%	8.219.304.453	8.403.723.995	SATPOL PP
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	%			
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	Dokumen	331.000.000	331.000.000	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	6.891.308.800	6.922.220.000	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252	Orang	189.790.000	189.790.000	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan#dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen	210.756.870	210.756.870	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	46.755.690	150.264.032	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	80	laporan	204.034.100	204.034.100	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76	Laporan	337.525.166	337.525.166	SATPOL PP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Laporan	8.133.827	58.133.827	SATPOL PP
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ersentase perda dan perkada yang ditegakkan	70	%	701.598.544	517.833.832	SATPOL PP
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Laporan	101.514.755	101.514.755	SATPOL PP
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20	Laporan	320.088.656	136.323.944	SATPOL PP
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80	Laporan	279.995.133	279.995.133	SATPOL PP
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	14	KASUS	121.399.418	124.755.930	SATPOL PP
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	Laporan	121.399.418	124.755.930	SATPOL PP
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>				<b>41.228.057.090</b>	<b>10.974.676.199</b>	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>41.228.057.090</b>	<b>10.974.676.199</b>	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	35.022.043.741	7.634.892.941	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	125.064.700	27.306.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	51.768.000	1.750.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.001.900	6.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.936.900	5.956.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.155.900	4.550.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.480.900	4.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	1.835.700	1.250.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	2.885.400	3.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	28.328.968.610	355.602.546	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294	Orang/bulan	28.032.640.000	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	286.168.000	343.999.013	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan##Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	949.680	1.066.329	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	2.967.690	2.558.766	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.236.400	1.641.420	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	Dokumen	1.459.840	1.724.855	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.685.600	3.546.180	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	861.400	1.065.983	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	3.886.540	4.529.630	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	761.720	719.879	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	1.044.320	1.292.346	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	2.080.500	2.517.405	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	2.345.790	2.892.544	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	441.720	546.629	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12	Dokumen	563.440	686.895	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	1.340.630	1.659.020	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	331.614.652	355.300.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	322.167.632	343.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	9.447.020	12.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	1.191.959.412	1.226.277.832	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	17.533.771	24.945.451	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	746.166.689	710.588.856	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	71.218.364	110.915.200	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	19.082.548	21.721.700	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75	Laporan	44.955.000	49.995.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	293.003.040	308.111.625	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen	1.438.164.276	1.592.800.804	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen			
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	529.869.600	596.103.300	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42	Unit	182.856.128	129.004.913	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195	Unit	24.674.535	27.758.852	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	39.826.800	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	Unit	660.937.213	839.933.739	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen	607.642.200	664.516.035	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	416.202.000	453.885.795	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	191.440.200	210.630.240	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen	2.992.397.561	3.405.667.550	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen			
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	49.454.999	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	Unit	2.469.787.943	2.778.511.435	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	Unit	1.818.000	1.650.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	34.775.223	39.121.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	358.757.550	410.501.990	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95	Unit	83.298.846	126.428.126	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00	Persen	6.206.013.349	3.339.783.258	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persen			
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00	Persen			
		Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00	Persen			
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00	Persen			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100	persen	4.122.962.942	2.698.846.352	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	persen			
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	persen			
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12	Dokumen	400.000.000	600.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300	Laporan	1.729.802.998	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	390	Dokumen	83.489.940	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	5.122.765	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	Dokumen	73.957.320	83.507.985	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7	Desa/Kelurahan	13.661.410	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	173	Unit	1.791.411.882	2.015.338.367	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5	Dokumen	25.516.627	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100	persen	461.200.000	640.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	Dokumen	13.305.268	40.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar	12	Dokumen	447.894.732	600.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100	persen	7.650.960	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	50	Dokumen	7.650.960	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	persen	1.335.166.642	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2400	Orang	348.400.697	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36	Desa/Kelurahan	305.460.625	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	1	Dokumen	681.305.320	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100	persen	279.032.805	936.906	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100	persen			
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1	Dokumen	832.805	936.906	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1	Laporan	278.200.000	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				<b>14.080.305.560</b>	<b>12.787.000.000</b>	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN</b>				<b>14.080.305.560</b>	<b>12.787.000.000</b>	



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	<b>UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	Persen	11.838.913.390	10.522.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	103.408.000	80.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	50.404.400	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	890.000	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	712.000	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	832.000	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	569.600	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	persen	9.529.312.400	7.452.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan	9.318.270.000	7.200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	210.368.000	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	337.200	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	337.200	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100	persen	326.668.875	415.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	19.927.150	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	25.693.246	45.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	43.713.531	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	29.000.000	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	24.562.760	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	13.200.000	15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	149.509.720	170.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	21.062.468	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional	100	%	42.135.600	500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	42.135.600	500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	861.818.400	1.045.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.927.000	5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	237.575.000	290.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	620.316.400	750.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	persen	975.570.115	1.030.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	352.799.985	350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	467.747.466	450.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	55.022.664	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	170.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00	persen	2.241.392.170	2.265.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500	orang	70.000.000	65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	70.000.000	65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5	jenis	947.982.220	825.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5	Unit	150.000.000	400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4	Kawasan	643.940.410	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2	laporan	52.000.000	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1	Kawasan	102.041.810	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12	dokumen	661.409.950	800.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000	Orang	397.545.130	500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000	Orang	263.864.820	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100	orang	562.000.000	575.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2	Kegiatan	410.000.000	275.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	152.000.000	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>				<b>35.528.133.116</b>	<b>0</b>	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>35.528.133.116</b>	<b>0</b>	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	15.656.598.330	0	DINAS SOSIAL
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00	Persen			
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial	100	%	157.331.469	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	78.473.679	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.225.400	0	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.883.600	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.491.800	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.883.600	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	1.567.600	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	20.805.790	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100	%	12.273.063.400	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	11.928.466.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	338.779.600	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8	Dokumen	779.800	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	1.230.400	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.576.200	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.231.400	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100	%	607.595.202	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	6.000.000	0	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	57.539.854	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	7.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket	33.656.500	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	32.400.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	5.760.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74	Laporan	80.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	250.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	135.238.848	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100	%	593.558.570	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	63.688.970	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	529.869.600	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	100	%	141.860.980	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	141.860.980	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100	%	1.566.934.432	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	635.180.155	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	32.292.250	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	740.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	Unit	50.000.000	0	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	136	Unit	69.858.424	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100	%	316.254.277	0	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	316.254.277	0	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100.00	Persen	6.472.822.021	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100	%	60.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2	Dokumen	60.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100	%	6.412.822.021	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260	Orang	5.077.500.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	Orang	350.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Keluarga	45.746.381	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Lembaga	293.565.640	0	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Sertifikat	646.010.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00	Persen	30.320.774	0	DINAS SOSIAL
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	100	%	30.320.774	0	DINAS SOSIAL



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Orang	30.320.774	0	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.93	Persen	8.301.760.849	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	%	2.192.079.680	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Orang	1.200.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Orang	58.569.800	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Orang	418.130	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	33.950.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Orang	534.385.420	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	28.773.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Orang	6.686.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	85	Orang	6.222.330	0	DINAS SOSIAL



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	163.225.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	29.925.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	29.925.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100	%	6.109.681.169	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	416.926.240	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	36.840.905	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5265	Orang	4.800.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Orang	19.008.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	130.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	390.928.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	32.931.424	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	49.855.000	0	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	45.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	33.491.600	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Orang	14.900.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Orang	14.900.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang	14.900.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	Dokumen	110.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71.25	Persen	4.266.929.375	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100	%	131.332.845	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	67.956.655	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	33.334.960	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	30.041.230	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14.15	%	4.135.596.530	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000	Orang	234.335.280	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500	Keluarga	300.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan	50000	Keluarga	3.176.261.250	0	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	425.000.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00	Persen	799.701.767	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	%	517.499.687	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373	Orang	179.498.067	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373	Orang	80.008.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Unit	30.250.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	54.052.000	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	280	Orang	173.691.620	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100	%	282.202.080	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Kampung	145.077.859	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	137.124.221	0	DINAS SOSIAL
<b>2.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>				<b>22.504.715.366</b>	<b>23.119.325.000</b>	
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>22.504.715.366</b>	<b>23.119.325.000</b>	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00	Persen	17.215.301.220	17.919.325.000	DINAS TENAGA KERJA
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00	Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00	Persen			
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100	persen	111.243.634	62.500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	51.245.864	4.500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.494.614	500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.081.139	500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.704.294	500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.081.139	500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	747.474	500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	889.110	500.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100	persen	13.394.308.000	14.029.162.738	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/bulan	13.181.264.000	13.779.162.738	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	213.044.000	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100	persen	1.667.226.562	982.662.262	DINAS TENAGA KERJA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	24.820.488	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	150.821.328	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	Paket	24.998.199	51.662.262	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42	Paket	24.995.647	51.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	Paket	21.362.553	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	Dokumen	5.924.736	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	19.980.000	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390	Laporan	209.556.020	300.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	9.990.888	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19	Dokumen	1.174.776.703	350.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100	persen	216.961.943	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	57	Unit	216.961.943	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100	persen	1.280.420.530	1.450.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	469.606.590	450.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	810.813.940	1.000.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100	persen	545.140.551	1.145.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	292.054.038	450.000.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	57.784.674	260.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	151.341.840	360.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	75.00	Persen	64.382.763	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	dokumen	64.382.763	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50	Orang	64.382.763	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79.00	Persen	3.001.491.850	2.100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	55	persen	2.513.763.850	1.375.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	776	Orang	2.494.763.850	1.125.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	Unit	19.000.000	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	24	persen	317.728.000	575.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25	Lembaga	317.728.000	575.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100	persen	60.000.000	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	25	Perizinan	60.000.000	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program produktivitas	10	perusahaan	30.000.000	55.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	60	Perusahaan	30.000.000	55.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	154267000	Rupiah	80.000.000	65.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	6	Dokumen	80.000.000	65.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	70.00	Persen	1.290.811.533	1.875.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000	orang	612.811.533	825.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000	Orang	225.000.000	325.000.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60	Orang	30.000.000	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15	Orang	23.824.990	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	75	Orang	333.986.543	300.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000	orang	533.000.000	550.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500	Orang	233.000.000	400.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000	Orang	300.000.000	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	50	orang	145.000.000	500.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15	Orang	100.000.000	450.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15	Orang	45.000.000	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.60	Persen	932.728.000	1.175.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	818	perusahaan	327.105.756	470.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50	Perusahaan	43.995.252	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	Laporan	283.110.504	370.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	60	persen	605.622.244	705.000.000	DINAS TENAGA KERJA



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100	Perkara	74.650.504	225.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50	Perkara	27.002.114	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	18	Asosiasi dan Serikat Pekerja	43.845.254	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	460.124.372	330.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>2.08.2.13.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>25.157.056.526</b>	<b>25.905.800.000</b>	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>21.485.310.586</b>	<b>22.115.800.000</b>	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	16.579.576.516	17.170.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100	%			
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100	%			
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27	Dokumen	121.735.400	81.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	53.235.200	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.289.000	3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.744.000	3.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2.530.000	1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.080.000	1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	4.271.200	4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	2.586.000	2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100	%	13.007.994.200	13.255.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/bulan	12.711.239.000	13.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	290.984.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1.348.800	1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	1.500.000	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	2.023.200	2.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	899.200	800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100	%	313.007.210	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	178.752.760	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480	Orang	134.254.450	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	%	1.289.801.460	1.354.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.999.950	7.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	212.673.880	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	37.621.250	32.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	64.789.880	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	26.729.926	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	71.380.500	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	530.882.704	600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	338.723.370	450.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	192.075.024	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	79.775.940	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	97.663.384	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	14.635.700	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	788.523.600	850.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	321.915.600	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	466.608.000	600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100	%	866.439.622	830.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	474.399.969	450.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	59.243.241	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	241.831.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	47.005.413	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100	%	1.375.000.000	1.370.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang	98	Program	170.590.400	270.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	yang sudah dievaluasi melalui analisis gender					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	70.590.400	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	100.000.000	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3	Organisasi	100.000.000	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	100.000.000	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31	Lembaga	1.104.409.600	1.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25	Lembaga	979.409.600	850.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	Dokumen	125.000.000	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11.44	%	1.345.111.720	1.035.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4	Kegiatan	220.000.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	5	Dokumen	220.000.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5	Lembaga	633.611.720	310.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	Orang	633.611.720	310.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	26	Lembaga	491.500.000	475.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	226.500.000	175.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5	Orang	125.000.000	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	140.000.000	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100	%	554.828.200	770.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2	Kegiatan	400.000.000	520.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender	70	Perangkat Daerah	200.000.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		(KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	Dokumen	100.000.000	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	100.000.000	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17	Kegiatan	154.828.200	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Lembaga	154.828.200	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100	%	282.396.670	400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2	Kegiatan	282.396.670	400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Dokumen	85.777.990	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	196.618.680	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100	%	1.008.397.480	1.070.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9	Jejaring	370.000.000	370.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2	Organisasi	20.000.000	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Dokumen	350.000.000	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9	Lembaga	638.397.480	700.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	258.397.480	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	139.919.780	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	110.080.220	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	130.000.000	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011	%	340.000.000	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4	Kegiatan	340.000.000	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	5	Dokumen	340.000.000	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>3.671.745.940</b>	<b>3.790.000.000</b>	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100	%	741.430.730	840.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177	Kelurahan	741.430.730	840.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1	Dokumen	46.307.550	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen	17.987.300	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	177	Orang	80.497.000	80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	Dokumen	55.494.730	80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	541.144.150	600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100	%	2.930.315.210	2.950.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177	Kelurahan	2.930.315.210	2.950.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	Dokumen	147.601.360	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	144.706.650	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6	Dokumen	1.076.275.230	900.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	Laporan	105.988.610	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	106.027.160	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	40	Dokumen	1.349.716.200	1.400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>				<b>15.914.391.628</b>	<b>0</b>	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>15.914.391.628</b>	<b>0</b>	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00	Persen	11.025.203.433	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00	Persen			
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100	Persen			
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD-Ketapang	9	Dokumen	111.009.200	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	50.762.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.475.900	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.700.900	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.475.900	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.700.900	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3.893.600	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	4	Dokumen	8.775.851.200	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang/bulan	8.544.875.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	228.956.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	223.800	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.347.800	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD-Ketapang	100	%	704.603.991	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.999.574	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	28.108.343	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	43.047.474	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	49.997.208	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	31.007.174	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	5.700.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	75.161.360	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	365.675.998	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	100.906.860	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD-Ketapang	100	%	803.045.480	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	187.290.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	615.755.480	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD-Ketapang	100	%	630.693.562	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	445.225.210	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	48.864.749	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	97.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100	Persen	25.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Unit	25.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	Unit	25.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3059	Kkal	3.867.360.370	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Presentase Cakupan Distribusi	100.00	Persen			
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00	Persen			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100	%	1.108.565.350	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	Laporan	106.409.600	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2	Laporan	12.300.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1	Unit	14.911.120	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Keluarga	100.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	Laporan	124.017.760	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	177	Unit	515.279.500	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12	Dokumen	10.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	15.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4	Laporan	16.500.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	Dokumen	174.147.370	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	20.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100	%	1.441.500.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.5	Ton	1.306.500.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10	Ton	135.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88	%	1.317.295.020	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3	Dokumen	861.749.850	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	Laporan	91.645.170	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2	Laporan	363.900.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	0	Persen	272.282.200	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	Buku	50.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	1	Kelurahan	222.282.200	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4	Laporan	75.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	Dokumen	147.282.200	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82.50	Persen	724.545.625	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100	%	724.545.625	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	314.365.311	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	12	Dokumen	100.000.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3	Dokumen	156.680.314	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12	Dokumen	153.500.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>2.11.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>126.920.243.126</b>	<b>139.950.123.700</b>	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>126.920.243.126</b>	<b>139.950.123.700</b>	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	49.603.158.547	54.814.187.203	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.00	Dokumen	105.881.320	108.546.493	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	50.696.192	34.892.697	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	744.900	2.945.910	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	834.900	2.797.410	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	744.900	2.615.910	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	834.900	2.797.410	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	2.025.528	7.497.156	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	Dokumen	24.420.573.910	27.028.257.237	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen			
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	23.457.825.000	25.803.607.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	440.258.970	439.692.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan##Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	521.031.740	777.578.717	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	561.000	2.927.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	448.600	2.803.460	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	1.648.460	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	Persen	1.967.927.492	2.251.533.108	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	45.650.000	50.215.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	Paket	444.123.147	588.384.662	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	111.330.919	122.464.011	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	59.254.700	65.180.170	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	2.055.800	2.510.132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	135.000.000	148.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	448.962.990	455.084.289	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen	721.549.936	819.194.844	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	1.456.976.108	1.721.258.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	820.177.308	902.195.039	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	636.798.800	819.063.161	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	21.651.799.717	23.704.592.165	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	152.903.870	176.518.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	310	Unit	20.209.584.460	22.230.542.906	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	Unit	5.246.748	1.420.658	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	252.150.499	275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	1.031.914.140	1.021.110.501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00	Persen	446.546.333	496.458.804	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	Dokumen	292.628.105	322.938.116	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	Dokumen	192.105.000	211.614.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	Dokumen	100.523.105	111.323.416	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1	Dokumen	153.918.228	173.520.688	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	153.918.228	173.520.688	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40.00	Ha	4.491.304.490	5.108.516.478	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00	Persen			
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00	Persen			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91.00	Persen			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64.00	Persen			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Emisi CO2	8980648.51	Kt	3.500.956.367	3.837.353.494	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150	perusahaan			
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	85	persen			
		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100.00	Persen			
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	Dokumen	892.918.573	1.028.109.920	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12	Dokumen	1.719.152.247	1.893.909.872	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	Dokumen	888.885.547	915.333.702	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2	jenis	522.128.272	756.121.148	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	8	Laporan	522.128.272	756.121.148	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	80	Ha	468.219.851	515.041.836	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80	Ha	468.219.851	515.041.836	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00	Persen	2.272.702.525	1.958.345.466	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3.00	Jenis	2.272.702.525	1.958.345.466	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	Dokumen	1.797.771.026	1.435.621.551	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1	Unit	187.454.656	206.499.388	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Unit	287.476.843	316.224.527	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60.00	Persen	255.911.774	282.998.952	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50.00	Perusahaan	167.370.758	184.855.834	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	94.646.358	104.858.994	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	45	Laporan	72.724.400	79.996.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3	1	Unit	88.541.016	98.143.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan	1	Dokumen	88.541.016	98.143.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya					
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00	Persen	494.046.742	562.737.039	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.80	Persen			
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2.00	Kegiatan	494.046.742	562.737.039	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100.00	Persen			
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45	Dokumen	245.814.957	289.682.075	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105	Laporan Badan Usaha	248.231.785	273.054.964	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56.00	Persen	2.361.345.650	2.616.743.085	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2.00	Kegiatan	2.361.345.650	2.616.743.085	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	Dokumen	433.487.300	488.469.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat	250	Lembaga	1.927.858.350	2.128.273.785	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH					
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.50	Persen	248.195.280	273.762.808	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2.00	Jenis	248.195.280	273.762.808	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70	Entitas	248.195.280	273.762.808	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00	Persen	95.866.136	141.688.379	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60.00	Kasus	95.866.136	141.688.379	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55	Pengaduan	69.466.306	112.648.566	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	Dokumen Perkara	26.399.830	29.039.813	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	70.00	Persen	66.651.165.649	73.694.685.486	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	30.00	Persen			
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.70	Persen			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100.00	Persen	66.651.165.649	73.694.685.486	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	32	Kelompok	1.953.608.400	2.148.969.240	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama	3	Dokumen	4.329.823.417	4.762.805.759	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20	Unit	5.270.569.979	4.702.217.015	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2	Dokumen	98.800.000	108.680.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365	Ton	50.415.044.045	57.163.751.384	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6	Laporan Ton	3.065.833.622	3.139.027.283	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	53	Dokumen	1.517.486.186	1.669.234.805	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>21.163.498.764</b>	<b>24.280.900.000</b>	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>21.163.498.764</b>	<b>24.280.900.000</b>	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	20.039.946.813	19.505.900.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	Persen	55.131.636	14.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	50.000.000	2.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.032.300	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.251.800	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.032.300	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.251.800	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	248.418	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	315.018	2.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	13.688.950.654	13.235.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92	Orang/bulan	13.451.458.000	13.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	236.747.400	230.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	248.418	1.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	248.418	1.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	248.418	1.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00	Persen	156.365.720	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	156.365.720	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	Persen	1.385.579.908	2.044.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	27.774.800	76.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	100.706.220	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	126.466.680	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	328.996.800	264.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	90.159.009	264.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	24.900.000	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	360.656.760	585.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	61.560.000	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	264.359.639	550.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persen	223.961.480	821.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	Unit	101.730.350	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	122.231.130	671.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	3.368.124.616	1.925.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	814.100.000	925.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.554.024.616	1.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	1.161.832.799	1.430.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	291.477.462	350.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200	Unit	14.544.000	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	395	Unit	410.763.497	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	410.650.000	450.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	34.397.840	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.60	Persen	340.613.230	1.694.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	77.00	Persen			
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	432000	Dokumen	235.197.430	1.521.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100	Dokumen	8.659.960	9.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	38.659.960	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323500	Dokumen	187.877.510	1.472.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100.00	Persen	41.119.920	89.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1	Dokumen	16.159.960	32.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12	Dokumen	24.959.960	57.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	Persen	55.635.920	67.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	12	Dokumen	28.225.960	27.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12	Laporan	27.409.960	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100.00	Persen	8.659.960	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	8.659.960	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.80	Persen	127.109.720	327.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45475	Dokumen	68.629.840	225.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45450	Dokumen	32.239.960	90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3	Layanan	13.659.960	27.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1	Dokumen	4.909.960	78.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1	Paket	17.819.960	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	Persen	42.319.920	84.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	Laporan	21.159.960	42.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12	Laporan	21.159.960	42.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	Persen	16.159.960	18.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12	Laporan	16.159.960	18.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00	Persen	521.212.906	2.568.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	Persen			
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.00	Persen	190.542.421	199.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	21.159.960	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	Laporan	169.382.461	184.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100.00	Persen	23.659.960	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12	Dokumen	23.659.960	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	Persen	237.295.750	2.079.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	12	Laporan	8.899.940	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Laporan	12.293.220	316.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12	Dokumen	65.972.120	1.200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6	Laporan	94.116.850	177.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	10	Dokumen	56.013.620	186.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	Persen	69.714.775	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Laporan	16.221.555	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12	Laporan	53.493.220	210.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00	Persen	134.616.095	185.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100.00	Persen	134.616.095	185.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2	Dokumen	134.616.095	185.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>17.326.605.062</b>	<b>18.969.999.499</b>	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>17.326.605.062</b>	<b>18.969.999.499</b>	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00	Persen	10.809.346.697	11.771.059.441	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							KELUARGA BERENCANA
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00	Persen			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00	Persen			
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%	112.677.400	63.945.140	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	51.962.000	2.158.200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900	2.458.390	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.874.900	2.062.390	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900	2.458.390	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.874.900	2.062.390	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	2.495.800	2.745.380	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100	%	7.831.732.600	8.588.275.900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan	7.565.433.000	8.321.976.300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	862.000	862.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	265.437.600	265.437.600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	%	689.370.771	719.866.814	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	21.666.546	20.927.221	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	17.044.255	18.668.961	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	49.351.337	53.333.602	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	146.078.778	160.686.657	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.198.975	38.407.573	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	44.815.000	48.895.000	DINAS PENGENDALIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	375.215.880	378.947.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	2.680.000	2.948.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	2.680.000	2.948.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	902.547.382	1.062.168.116	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	250.465.742	275.512.316	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	652.081.640	786.655.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100	%	1.270.338.544	1.333.855.471	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	41.583.783	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	Unit	776.198.142	815.008.049	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129	Unit	107.156.857	112.514.700	DINAS PENGENDALIAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	347.379.942	364.748.939	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	Persen	1.123.000.000	1.114.983.073	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	%	454.101.400	577.344.310	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4	Kegiatan	130.750.000	85.921.700	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5	Kegiatan	211.601.400	200.768.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	11	Kegiatan	69.750.000	238.024.220	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Kegiatan	42.000.000	52.629.890	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	%	668.898.600	537.638.763	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12	Dokumen	301.569.850	306.403.263	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	Laporan	189.328.750	47.800.000	DINAS PENGENDALIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen	178.000.000	183.435.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	persen	4.278.520.565	4.828.956.985	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.34	%	494.326.000	494.366.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16	Dokumen	494.326.000	494.366.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.34	%	878.811.160	878.811.160	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	177	Organisasi	308.811.160	308.811.160	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	Laporan	570.000.000	570.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	7.52	%	1.836.539.371	2.076.589.371	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4773	Orang	175.000.000	175.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2	Laporan	19.150.000	19.150.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16	Unit	644.549.331	874.434.449	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	Laporan	220.600.000	352.025.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12	Laporan	444.790.040	464.159.922	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30	Orang	62.600.000	63.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1	Kab/Kota	269.850.000	128.220.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.34	%	1.068.844.034	1.379.190.454	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	177	Laporan	182.424.630	404.129.110	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16	Unit	886.419.404	975.061.344	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32	Persen	1.115.737.800	1.255.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32	%	945.687.800	1.080.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	Laporan	120.000.000	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	Laporan	477.000.000	480.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25	Unit	20.000.000	23.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	Laporan	217.687.800	310.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	90	Orang	66.000.000	70.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	16	Kelompok	45.000.000	47.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk					
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.32	%	170.050.000	175.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	Laporan	170.050.000	175.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				<b>319.515.542.137</b>	<b>356.773.652.375</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				<b>319.515.542.137</b>	<b>356.773.652.375</b>	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00	Persen	80.213.655.576	74.977.609.839	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00	Persen			
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100	persen	120.847.200	155.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	55.036.400	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.532.300	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.631.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.532.300	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.751.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	Laporan	3.578.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	1.783.800	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	100	persen	25.092.993.400	22.267.609.839	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212	Orang/bulan	24.559.627.000	20.838.999.839	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	515.295.000	1.353.610.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8.623.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	7.423.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.023.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100	persen	380.343.787	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	Unit	75.802.500	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	Paket	304.541.287	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100	persen	1.676.289.036	1.725.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	88.770.077	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	184.611.315	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	77.109.915	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	117.270.940	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	194.977.738	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	97.500.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	476.341.720	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	439.707.331	750.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100	persen	1.394.889.758	820.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	1.077.421.500	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	6	Unit	41.558.400	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	Unit	45.258.962	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	185.858.400	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	44.792.496	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100	persen	5.315.690.800	4.360.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	48.000.000	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.321.690.800	1.300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.946.000.000	3.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	100	persen	5.732.601.595	4.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116	Unit	3.851.496.702	4.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4	Unit	157.420.853	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.117.481.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3	Unit	48.619.821	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	517.979.616	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100	persen	40.500.000.000	40.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.1.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	40.500.000.000	40.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	15.00	trayek	239.301.886.561	281.796.042.536	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66.82	Persen			
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33	Persen			
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	92	Persen			
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.94	Rasio			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100	persen	496.363.600	440.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5	Dokumen	496.363.600	440.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100	persen	6.500.187.060	8.957.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	17	Unit	2.295.603.448	3.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	385	Unit	1.690.043.335	2.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103	Unit	1.887.367.049	2.202.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82	Unit	627.173.228	755.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	3	unit	1.512.268.523	1.200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	20	Orang	277.616.468	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3	Unit	1.234.652.055	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12	bulan	2.057.313.110	2.450.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya	800	Dokumen	503.056.750	1.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	1.554.256.360	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12	bulan	2.658.202.834	3.673.389.536	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	Unit	1.444.042.252	1.146.389.536	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5300	Dokumen	246.507.519	1.530.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35	Unit	967.653.063	997.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12	bulan	3.375.368.254	3.193.050.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	1.889.074.610	2.668.050.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	1.277.094.460	450.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	209.199.184	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1	tahun	58.040.000	163.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	Laporan	13.790.000	13.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12	Laporan	44.250.000	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12	bulan	1.817.362.070	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	1.817.362.070	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan angkutan	100	persen	220.155.313.820	260.248.153.000	DINAS PERHUBUNGAN
		pendukung pelayanan BRT	100	persen			
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	263.463.820	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	287	Unit	219.891.850.000	260.148.153.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.1.	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	3	kegiatan	202.949.520	370.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.1.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	202.949.520	370.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	kegiatan	55.249.740	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	49.674.740	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	5.575.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	kegiatan	314.502.030	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	43.246.500	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi	1	Dokumen	271.255.530	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	kegiatan	98.766.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	30	Unit	14.796.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	83.970.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>				<b>74.167.345.617</b>	<b>59.287.085.236</b>	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>72.418.935.597</b>	<b>57.587.085.236</b>	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00	Persen	22.597.116.450	21.837.085.236	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100	persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100	Persen			
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6	dokumen	150.919.869	79.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	75.935.101	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.063.154	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.851.699	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.063.154	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.851.699	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	5.155.062	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	19.061.145.420	18.813.987.483	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139	Orang/bulan	18.639.007.000	18.348.035.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	408.704.000	450.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34	Laporan	4.602.904	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35	Laporan	4.478.140	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34	Dokumen	4.353.376	5.452.483	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	persen	337.229.760	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang	337.229.760	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	persen	1.371.407.947	1.153.597.753	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	81.818.160	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	459.120.827	460.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	35.600.000	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15.000.000	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25	Laporan	30.525.000	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	301.638.574	158.597.753	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	417.705.386	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100	persen	109.355.779	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	109.355.779	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	507.700.000	745.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	7.700.000	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	500.000.000	700.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	persen	1.059.357.675	895.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1	Unit	43.959.999	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit	577.705.228	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya##Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2	Unit	63.550.698	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	174.821.750	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	199.320.000	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00	Persen	4.945.556.000	4.750.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100	persen	4.945.556.000	4.750.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000	Permohonan	900.000.000	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	Persentase	199.728.000	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2000	Rekomendasi	1.010.000.000	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100	Persentase	260.000.000	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5	Media	2.226.100.000	1.600.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90	Orang	349.728.000	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terseleenggaranya pengelolaan E-Government	100.00	Persen	44.876.263.147	31.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100	persen	44.876.263.147	31.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	Dokumen	3.532.259.897	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517	Aplikasi	2.569.340.000	2.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517	Aplikasi	13.950.203.250	1.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52	Perangkat Daerah	23.924.460.000	25.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6	Program	900.000.000	1.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>805.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00	Persen	805.000.000	700.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100	persen	805.000.000	700.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34	Orang	270.000.000	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	Persentase	235.000.000	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadana	147	Dokumen	170.000.000	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15	Dokumen	130.000.000	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>943.410.020</b>	<b>1.000.000.000</b>	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terseleenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00	Persen	943.410.020	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100	persen	943.410.020	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	Laporan	943.410.020	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>				<b>25.428.592.490</b>	<b>0</b>	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>25.428.592.490</b>	<b>0</b>	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (dinkop)	100.00	Persen	13.901.894.152	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (dinkop)	100.00	Persen			
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (dinkop)	100.00	Persen			
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9	dokumen	109.849.400	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	51.143.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.891.400	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.290.900	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.179.400	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.458.900	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1.885.800	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	50.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	dokumen	12.075.891.600	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen			
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	Orang/bulan	11.805.218.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	269.664.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	448.600	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1	Laporan	561.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	persen	861.267.355	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	171.784.366	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Paket	22.114.840	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket	40.000.300	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	26.020.437	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1.920.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	409.751.860	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	149.675.552	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	53.101.912	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	7.284.264	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	45.817.648	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	313.530.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	313.530.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100	persen	488.253.885	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit	401.550.296	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	Unit	47.099.986	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00	Persen	150.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15	koperasi	75.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	Unit Usaha	75.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2	koperasi	75.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	Unit Usaha	75.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00	Persen	504.320.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100	koperasi	504.320.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250	Unit Usaha	504.320.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI	Persentase Koperasi sehat	33.00	Persen	394.320.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	69	persen	394.320.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250	Unit Usaha	394.320.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00	Persen	601.700.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00	Persen			
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77	persen	601.700.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520	Orang	601.700.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	28	Persen	2.060.280.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50	persen	2.060.280.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20	Kelompok Masyarakat	405.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500	Unit Usaha	1.655.280.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00	Persen	4.300.294.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600	orang	4.300.294.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	Unit Usaha	228.700.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90	Unit Usaha	50.000.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120	Unit Usaha	210.270.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	490	Orang	1.201.410.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350	Unit Usaha	203.830.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400	Unit Usaha	1.149.184.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880	Orang	1.256.900.000	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00	Persen	3.515.784.338	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100	orang	3.515.784.338	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1200	Unit Usaha	3.515.784.338	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				<b>20.451.360.181</b>	<b>0</b>	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>20.451.360.181</b>	<b>0</b>	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	15.254.270.246	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11	dokumen	123.626.100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	51.345.200	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.487.900	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.150.100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.993.900	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.448.600	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.797.400	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	2.403.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	10.096.668.600	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/bulan	9.812.725.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	279.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.798.400	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1.347.800	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.797.400	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100	persen	255.981.640	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200	Unit	65.520.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	190.461.640	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	persen	1.669.343.051	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	639.405.451	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	91.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	83.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27	Dokumen	10.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	48.700.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	713.167.600	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	84.070.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	persen	2.162.280.880	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	801.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.361.280.880	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	persen	946.369.975	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	33	Unit	503.409.976	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	Unit	5.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	394.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3713.00	Penanam	841.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5	Buah	450.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen	300.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	150.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2	Dokumen	391.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	141.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	250.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	595.00	Investor	1.201.874.293	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7	Kegiatan	1.201.874.293	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12	Dokumen	1.101.874.293	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen	100.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50	Persen	2.900.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terseleenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100	%	2.900.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	13	Dokumen	950.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500	Pelaku Usaha	900.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000	Pelaku Usaha	900.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500	Kegiatan Usaha	150.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2	Nilai	120.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	9	%	120.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1	Pelaku Usaha	20.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4	Kegiatan Usaha	100.000.000	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	99.00	Persen	134.215.642	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100	%	134.215.642	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	Dokumen	134.215.642	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>58.913.755.080</b>	<b>60.062.687.720</b>	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>58.913.755.080</b>	<b>60.062.687.720</b>	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100	Persen	15.033.082.919	15.177.687.720	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00	Persen			

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	persen			
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00	Dokumen	181.635.180	135.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	63.061.400	25.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.566.800	8.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.000.000	8.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4.000.000	7.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	42.006.980	25.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100	Persen	10.976.874.000	11.145.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang/bulan	10.564.510.000	10.750.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	387.264.000	360.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan#Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	4.000.000	5.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	5.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.400.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	5.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	4.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3.700.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	persen	90.000.000	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	90.000.000	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	Persen	1.097.005.694	1.126.500.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#ListriK/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	20.000.000	23.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	200.117.246	180.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	46.000.000	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	50.000.000	55.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	45.000.000	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	8.940.000	8.500.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	45.000.000	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	480.762.105	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	201.186.343	210.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00	Jenis	152.016.295	95.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	134.727.560	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	17.288.735	45.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	891.922.786	1.025.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	318.000.000	340.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	55.000.000	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	518.922.786	625.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	1.643.628.964	1.551.187.720	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	37.255.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit	456.765.042	405.660.720	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	7.272.000	8.272.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.139.988.319	1.100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	45.00	Persen	2.750.694.224	2.730.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10	kegiatan	1.270.694.224	1.370.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1000	Orang	590.000.000	650.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5	Kegiatan	185.694.224	210.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	300	Orang	495.000.000	510.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1600.00	Orang	1.480.000.000	1.360.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40	Organisasi	759.855.620	680.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1000	Orang	720.144.380	680.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	1273.00	jumlah	38.629.977.937	39.650.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5	Lapangan			
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00	jumlah	5.173.977.937	6.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6	Unit	5.173.977.937	6.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00	kegiatan	5.091.000.000	4.720.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6	Kegiatan	1.101.000.000	2.010.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	Kegiatan	1.500.000.000	1.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000	Orang	2.490.000.000	1.210.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1373.00	Orang	2.865.000.000	2.920.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7	Pelatda	2.240.000.000	2.260.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50	Orang	625.000.000	660.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	2.00	kegiatan	23.000.000.000	23.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	12	Dokumen	23.000.000.000	23.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00	Lapangan	2.500.000.000	2.510.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10	Unit	1.000.000.000	1.010.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	53.00	Kegiatan	2.500.000.000	2.505.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	53	Kegiatan	2.500.000.000	2.505.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10	Laporan	2.500.000.000	2.505.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>				<b>43.067.706.940</b>	<b>40.641.439.410</b>	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>26.773.970.587</b>	<b>24.173.201.337</b>	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00	Persen	17.998.272.835	17.848.182.835	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00	Persen			
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja-disbudpar	9	dokumen	102.869.600	52.869.600	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	50.536.400	536.400	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	463.900	463.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	418.900	418.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	463.900	463.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	418.900	418.900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	567.600	567.600	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	100	persen	13.480.698.380	13.480.698.380	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang/bulan	13.153.399.000	13.153.399.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	326.627.980	326.627.980	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	223.800	223.800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	223.800	223.800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	223.800	223.800	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar	100.00	Persen	149.977.400	49.977.400	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	104.972.400	4.972.400	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74	Orang	45.005.000	45.005.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-disbudpar	100	persen	1.079.087.773	1.079.087.773	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Paket	168.879.500	168.879.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19	Paket	93.118.450	93.118.450	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket	69.543.720	69.543.720	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket	43.313.163	43.313.163	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	239.850.000	239.850.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	275.000.000	275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	Dokumen	189.382.940	189.382.940	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar	100	persen	161.913.580	161.913.580	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82	Unit	161.913.580	161.913.580	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar	100	persen	2.126.697.700	2.126.607.700	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.050.090.000	1.050.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.076.607.700	1.076.607.700	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	100	persen	897.028.402	897.028.402	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	459.924.522	459.924.522	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	183.908.343	183.908.343	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	127	Unit	253.195.537	253.195.537	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30.00	Persen	7.286.515.538	4.787.548.288	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	30	persen	1.067.911.194	1.067.911.194	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	Objek	1.067.911.194	1.067.911.194	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	30	persen	4.198.967.250	1.700.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9	Objek	4.198.967.250	1.700.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	30	persen	2.019.637.094	2.019.637.094	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600	Orang	2.019.637.094	2.019.637.094	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	30.00	Persen	749.142.214	797.430.214	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	30	persen	749.142.214	797.430.214	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	650	Sertifikat	524.479.064	524.479.064	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130	Lembaga	224.663.150	272.951.150	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	91.57	Persen	740.040.000	740.040.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	91.57		740.040.000	740.040.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	465	Objek	740.040.000	740.040.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				<b>16.293.736.353</b>	<b>16.468.238.073</b>	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00	Persen	11.880.684.360	11.880.684.360	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1453030	orang	6.598.086.280	6.598.086.280	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Unit	6.598.086.280	6.598.086.280	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100	persen	5.137.397.400	5.137.397.400	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5	Lokasi	117.552.640	117.552.640	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6	Unit	4.919.844.760	4.919.844.760	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Laporan	100.000.000	100.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	95	persen	145.200.680	145.200.680	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14	Laporan	145.200.680	145.200.680	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00	Persen	3.513.051.993	3.687.553.713	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100	persen	3.513.051.993	3.687.553.713	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	Dokumen	842.556.000	842.556.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9	Kegiatan	1.044.997.713	1.044.997.713	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25	Promosi	1.625.498.280	1.800.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	90.00	Persen	900.000.000	900.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90	persen	900.000.000	900.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1000	Orang	900.000.000	900.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>				<b>17.986.450.300</b>	<b>18.454.012.921</b>	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>16.552.110.347</b>	<b>16.254.012.921</b>	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	15.129.191.990	14.534.012.921	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	Dok	121.842.600	65.849.400	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	58.064.000	6.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	4.808.600	7.849.400	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4.713.000	1.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	4.257.000	1.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100	Persen	12.381.250.000	12.458.060.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan	12.168.320.000	12.168.320.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	210.018.000	286.740.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1.454.200	1.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.457.800	1.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Persen	453.079.980	808.551.162	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	16.784.298	12.822.109	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	9.380.980	18.482.067	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	29.193.490	23.305.831	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	10.305.540	18.981.626	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	10.320.000	14.400.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	24.325.000	15.900.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	149.767.500	149.613.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	203.003.172	555.046.529	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	463.807.407	313.268.181	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	463.807.407	313.268.181	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	745.900.483	888.284.112	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	265.741.200	256.400.112	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	480.159.283	631.884.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	963.311.520	66	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	16	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit	543.774.759	15	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	101.203.870	17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	278.729.288	18	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	Rasio	1.223.190.357	1.280.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100	Persen	781.609.727	730.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	41.580.590	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	Perpustakaan	60.056.900	20.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5	Layanan	56.418.540	30.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	34.566.420	20.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60	Orang	41.834.920	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	12	Dokumen	52.332.000	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200	Eksemplar	119.911.920	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	200	Eksemplar	125.457.640	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	3	Perpustakaan	249.450.797	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100	Persen	441.580.630	550.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2	Orang	49.755.820	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3	Perpustakaan	43.762.200	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	Perpustakaan	191.315.160	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2	Orang	56.162.250	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2	Lokus	100.585.200	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00	Persen	199.728.000	440.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	47.722.800	220.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2	Orang	22.125.680	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2	Eksemplar	25.597.120	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100	Persen	152.005.200	220.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2	Eksemplar	145.647.270	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	5	Eksemplar	6.357.930	110.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>1.434.339.953</b>	<b>2.200.000.000</b>	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan	100	Persen	640.981.920	700.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik					
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100	Persen	250.844.110	300.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1500	Berkas	81.218.900	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	750	Berkas	46.567.040	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47	Laporan	123.058.170	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100	Persen	143.459.830	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	50	Arsip	26.352.790	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150	Arsip	117.107.040	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100	Persen	246.677.980	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100	Pengguna	82.456.260	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	47	Laporan	164.221.720	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100.00	Persen	698.113.023	1.300.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100	Persen	84.247.523	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000	Berkas	35.636.663	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100	Arsip	48.610.860	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100	Persen	56.042.640	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	33.035.800	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	23.006.840	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	90	Persen	217.100.720	400.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Daftar	75.000.000	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7	Arsip	100.000.720	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	20	Arsip	8.700.000	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	20	Arsip	33.400.000	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	90	Persen	142.053.540	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	100	Arsip	100.000.720	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100	Arsip	42.052.820	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	90	Persen	198.668.600	300.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	100	Arsip	41.344.400	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	20	Arsip	57.188.200	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	20	Arsip	100.136.000	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80	Persen	95.245.010	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80	Persen	95.245.010	200.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5	SOP	53.295.010	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250	Arsip	41.950.000	100.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>				<b>14.296.118.937</b>	<b>15.424.000.000</b>	
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>14.296.118.937</b>	<b>15.424.000.000</b>	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00	Orang	8.109.963.900	8.844.000.000	DINAS PERIKANAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00	Persen			
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00	Persen			
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8.00	Dokumen	103.344.400	113.750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	50.539.200	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	534.000	750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	624.000	750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	506.000	750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dokumen	624.000	750.000	DINAS PERIKANAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	517.200	750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100.00	%	6.399.387.400	6.752.250.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/bulan	6.172.501.000	6.500.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	225.650.000	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	562.000	750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	337.200	750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	337.200	750.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4.00	Kegiatan	60.600.000	60.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	30.300.000	30.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	30.300.000	30.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100.00	%	433.379.913	600.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	34.153.412	40.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	39.361.467	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.059.037	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	35.000.000	45.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	86.677.681	155.000.000	DINAS PERIKANAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	188.128.316	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3.00	Jenis	139.808.796	155.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	139.808.796	155.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	524.854.404	685.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	199.999.168	225.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	151.227.236	160.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	173.628.000	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100.00	%	448.588.987	478.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	50.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	345.259.979	350.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	27.606.359	28.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	31.762.650	50.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3169.37	ton	1.643.198.000	1.730.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	250000.00	ekor	477.000.000	480.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30	Unit	477.000.000	480.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240.00	Orang	505.000.000	550.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	Orang	505.000.000	550.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60.00	Orang	661.198.000	700.000.000	DINAS PERIKANAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	661.198.000	700.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	4080.17	ton	2.694.439.000	2.825.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200.00	Orang	607.497.000	675.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20	Kelompok	607.497.000	675.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan/sosialisasi	60.00	Orang	2.086.942.000	2.150.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Unit	1.479.378.000	1.500.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	4	Unit	607.564.000	650.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	2	Kasus	200.000.000	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan POKMASWAS	40.00	Orang	200.000.000	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	40	Pelaku Usaha	200.000.000	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17808.18	ton	1.648.518.037	1.775.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	80.00	Orang	153.997.000	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	Dokumen	153.997.000	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100.00	Orang	500.000.000	525.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan	15	Unit Usaha	500.000.000	525.000.000	DINAS PERIKANAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40.00	Orang	994.521.037	950.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17800	Ton	632.888.000	550.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	15	Pelaku Usaha	361.633.037	400.000.000	DINAS PERIKANAN
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>				<b>37.808.615.375</b>	<b>1.199.000.000</b>	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>37.808.615.375</b>	<b>1.199.000.000</b>	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00	Persen	24.095.995.030	0	DINAS PERTANIAN
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian	100.00	Persen			
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27	dokumen	108.853.360	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	53.259.626	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	5.593.734	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	4	dokumen	19.596.212.654	0	DINAS PERTANIAN
		Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian	100	%			
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	Orang/bulan	19.359.553.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	231.926.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1.423.800	0	DINAS PERTANIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	1.886.054	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.423.800	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	%	659.014.924	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	60.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	175.143.227	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	30.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	9.660.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	125.838.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	218.373.697	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	142.423.912	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	Unit	104.981.692	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	37.442.220	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	2.334.794.960	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	400.000.200	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.934.794.760	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset Dinas Pertanian	100	%	1.254.695.220	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	0	DINAS PERTANIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	377.174.511	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	Unit	168.474.845	0	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	665.085.865	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51069.22	ton	8.950.320.221	0	DINAS PERTANIAN
		Produksi hasil peternakan	36519.00	ton			
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	28	kelompok	6.878.315.367	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	29	Laporan	518.903.452	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	9	Laporan	6.359.411.915	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	75	%	1.322.486.525	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	1.322.486.525	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	60	%	174.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	9	Laporan	174.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	100	ekor	575.518.329	0	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	380	Ekor	575.518.329	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38	ton/ha	2.834.200.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	3	unit	2.834.200.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11	Unit	2.614.400.000	0	DINAS PERTANIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1	Unit	219.800.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00	Persen	900.044.839	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14	kelurahan	617.994.145	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	Laporan	617.994.145	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	2	kegiatan	58.600.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	3	laporan	36.800.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2	Laporan	21.800.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95	%	223.450.694	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	14	Laporan	124.850.694	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	35	Unit Usaha	23.600.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	35	Produk	55.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	35	Unit Usaha	20.000.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	80.00	Persen	203.650.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7	kelompok	203.650.000	0	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	100	Ha	173.204.650	0	DINAS PERTANIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	20	Ha	30.445.350	0	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	33.00	kelompok	824.405.285	1.199.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	55	%	824.405.285	1.199.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Unit	250.830.000	275.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	Unit	537.055.285	864.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	Unit	36.520.000	60.000.000	DINAS PERTANIAN
<b>3.30.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>				<b>84.468.162.652</b>	<b>81.213.709.000</b>	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>84.468.162.652</b>	<b>81.213.709.000</b>	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	40.123.125.918	41.413.709.000	DINAS PERDAGANGAN
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	Persen			
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	dokumen	109.845.228	59.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	52.173.016	1.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.471.099	1.500.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.428.099	1.500.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	1.471.099	2.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.428.099	1.500.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1.873.816	1.500.000	DINAS PERDAGANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100	persen	30.240.145.762	30.244.709.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142	Orang/bulan	29.841.709.000	29.841.709.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	395.592.000	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	948.254	1.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	948.254	1.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	948.254	1.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100	persen	1.197.039.507	1.290.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi ListriK/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.926.150	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	104.548.347	0	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	30.041.630	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	199.999.880	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	397.960.000	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	179.660.000	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	274.903.500	350.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100	persen	7.331.650.445	8.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListriK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListriK yang Disediakan	12	Laporan	6.707.229.065	7.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	624.421.380	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100	persen	1.244.444.976	1.820.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	607.999.976	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	20.000.000	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	330.000.000	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	286.445.000	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00	Persen	85.847.190	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100	persen	85.847.190	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	85.847.190	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	26	pasar	38.163.272.070	34.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	26	pasar	32.255.942.070	30.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	23.085.775.218	25.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	Unit	9.170.166.852	5.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52	pasar	5.907.330.000	4.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	5.005.890.000	4.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	901.440.000	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.93	Persen	3.737.910.894	3.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100	persen	3.737.910.894	3.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan	3.737.910.894	3.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1713153249	US\$	497.776.580	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36	persen	497.776.580	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	Pelaku Usaha	268.687.000	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10	Pelaku Usaha	113.445.610	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10	Produk	115.643.970	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86	Persen	1.000.000.000	600.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	86	persen	1.000.000.000	600.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	62780	Unit	637.138.581	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5	Orang	362.861.419	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40	Persen	860.230.000	600.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	orang	860.230.000	600.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	UMKM	705.880.000	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10	UMKM	154.350.000	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
<b>3.31.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN</b>				<b>18.406.507.350</b>	<b>18.614.962.313</b>	



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>18.406.507.350</b>	<b>18.614.962.313</b>	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00	Persen	10.845.266.200	10.853.721.163	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Peindustrian	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00	Persen			
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan _ Dinas Perindustrian	11	Dokumen	116.651.370	110.099.580	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	53.141.600	53.141.600	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.797.400	1.797.400	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.796.900	2.796.900	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.363.680	2.363.680	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.845.590	0	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3.706.200	0	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100	Persen	7.176.009.488	7.176.009.488	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang/bulan	6.915.728.000	6.915.728.000	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	249.684.000	249.684.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	7.722.128	7.722.128	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.090.080	1.090.080	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.090.080	1.090.080	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	695.200	695.200	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian	100.00	Persen	148.000.000	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70	Orang	148.000.000	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100	Persen	676.821.190	653.736.040	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	31.681.697	31.681.697	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	64.996.173	64.996.173	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	80.000.000	80.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14	Paket	47.268.982	47.268.982	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	73.085.150	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	206.040.000	206.040.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	173.749.188	173.749.188	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100	Persen	825.497.255	825.497.255	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	12.791.918	12.791.918	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	702.705.337	702.705.337	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	110.000.000	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perindustrian	100	Persen	1.459.128.800	1.459.128.800	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	400.000.000	400.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Laporan	50.000.000	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.009.128.800	1.009.128.800	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100	Persen	443.158.097	479.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.603.603	43.960.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	288.504.494	320.240.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	5.000.000	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	110.000.000	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	50.000	50.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan IKM	0.50	Persen	5.400.000.000	5.600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	96.00	Persen			
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	20	IKM	5.400.000.000	5.600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1	Sentra			
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	3	Dokumen	600.000.000	600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19	Dokumen	1.000.000.000	1.200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6	Dokumen	620.000.000	620.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	Dokumen	2.780.000.000	2.780.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	300.000.000	300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00	Persen	1.604.881.150	1.604.881.150	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15	IKM	1.604.881.150	1.604.881.150	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	undefined	2	Dokumen	1.074.881.150	1.074.881.150	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2	Dokumen	530.000.000	530.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50	Persen	556.360.000	556.360.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4	Persen	556.360.000	556.360.000	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3	Dokumen	200.000.000	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3	Dokumen	306.360.000	306.360.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>248.791.047.927</b>	<b>237.877.923.040</b>	
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>248.791.047.927</b>	<b>237.877.923.040</b>	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	45.00	OPD	167.574.016.650	146.691.125.339	SEKRETARIAT DAERAH
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00	Persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100	Persen	133.869.450	137.439.600	SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	Persen			
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	66.429.850	70.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.270.900	5.270.900	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.370.900	4.370.900	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.258.900	4.258.900	BAGIAN KEUANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.538.900	3.538.900	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100	%	45.851.442.400	45.681.474.400	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276	Orang/bulan	44.788.323.000	44.788.323.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1.059.648.000	889.680.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	785.800	785.800	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.685.600	2.685.600	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5	dokumen	1.247.279.172	1.305.085.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	122.915.102	60.085.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	1.124.364.070	1.245.000.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4	Paket	414.659.773	6.495.983.114	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	183.259.773	6.251.983.114	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang	231.400.000	244.000.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100	Persen	35.509.416.937	5.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100	Persen			
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	1.151.077.137	2.300.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	702.094.004	1.650.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	713.597.299	700.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	10.889.753.400	0	BAGIAN TATA USAHA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan	20.362.670.500	0	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	1.690.224.597	850.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	7.471.747.266	27.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	1.954.710.000	0	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	496.392.000	24.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	Unit	1.430.518.037	1.700.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	153	Unit	2.132.549.054	900.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.457.578.175	500.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	15.858.590.038	10.254.466.994	SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen			
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	120.000.000	0	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	9.403.219.632	9.374.466.994	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.564.000.000	0	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	588.990.920	0	BAGIAN TATA USAHA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	3.182.379.486	880.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	24.431.520.236	15.528.253.711	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	182.679.999	168.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149	Unit	2.857.775.348	2.600.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500	Unit	121.078.800	110.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	17.770.145.883	9.800.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1140	Unit	2.807.627.018	2.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	807	Unit	692.213.188	850.253.711	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100	Persen	5.342.375.800	1.089.313.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	Persen			
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	239.313.000	239.313.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	850.336.800	850.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	4.252.726.000	0	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100	Persen	3.955.000.000	3.955.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	1.380.000.000	1.380.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	Indeks	4.110.970.938	4.260.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	552.074.925	600.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan	2.233.691.216	2.300.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	569.058.000	600.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	14	Dokumen	756.146.797	760.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolalan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100	Persen	23.247.144.640	25.384.109.520	SEKRETARIAT DAERAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	2.041.242.491	2.216.897.156	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	14.098.183.150	15.321.001.465	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	7.107.718.999	7.846.210.899	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00	kegiatan	70.986.758.903	80.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	70.00	Persen			
		Indek Pelayanan Publik	128.00	Persen			
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00	Persen			
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16	Kecamatan	4.577.262.403	4.950.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	Dokumen	480.000.000	520.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dokumen	817.438.390	1.000.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dokumen	3.164.162.810	3.200.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8	Dokumen	115.661.203	230.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9	Kegiatan	53.391.518.319	67.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	Dokumen	43.074.379.400	55.000.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5	Dokumen	9.682.738.919	12.000.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5	Dokumen	634.400.000	700.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Perduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100	Persen	5.872.140.252	0	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565	Dokumen	685.727.323	0	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55	Kasus	1.855.535.087	0	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan##Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	550	Dokumen	3.330.877.842	0	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	80	Persen	7.145.837.929	7.550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20	Dokumen	1.566.072.736	1.850.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3	Dokumen	5.579.765.193	5.700.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00	Persen	10.230.272.374	10.986.797.701	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00	Persen			
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1	dokumen			
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100	Persen	5.519.826.084	5.811.797.701	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8	Dokumen	1.080.696.863	1.180.696.863	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8	Laporan	931.100.838	1.031.100.838	BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8	Dokumen	3.508.028.383	3.600.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100	Persen	968.192.250	1.075.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1	Dokumen			
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen	227.714.770	250.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan	624.236.320	675.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	116.241.160	150.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100	Persen	3.473.745.140	3.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	1.704.934.320	1.850.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	Dokumen	805.638.820	925.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220	Orang	963.172.000	1.025.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100	persen	268.508.900	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	Dokumen	268.508.900	300.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>135.966.315.826</b>	<b>0</b>	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>135.966.315.826</b>	<b>0</b>	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	75.848.274.241	0	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12	bulan	200.685.318	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	92.462.418	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.561.400	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.370.900	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.306.900	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.370.900	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.731.400	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	30.881.400	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100	%	8.799.554.031	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/bulan	8.430.282.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	365.452.431	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.685.000	0	SEKRETARIAT DPRD

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	2.134.600	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi	8	buah	70.000.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7	Dokumen	70.000.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50	orang	710.000.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	710.000.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	6.152.077.691	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	75.000.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Paket	397.327.845	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	473.413.980	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	378.878.046	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	225.776.400	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3.234.807.240	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.366.874.180	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100	%	3.913.303.861	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	Unit	2.833.059.662	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	605.792.613	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	474.451.586	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12	bulan	3.180.215.971	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	22.477.693	0	SEKRETARIAT DPRD

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	167.162.256	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.990.576.022	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	%	2.211.983.307	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	Unit	1.080.776.904	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248	Unit	328.313.203	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	561.044.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	241.849.200	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100	%	48.721.954.062	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Orang/Bulan	47.879.959.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	Paket	841.995.062	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100	%	1.888.500.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	Paket	1.888.500.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	18.00	dokumen	60.118.041.585	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	19	Perda	15.381.426.880	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17	Dokumen	15.381.426.880	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100	%	7.037.972.958	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	Orang	3.487.512.440	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	2.675.575.300	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6	Dokumen	874.885.218	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100	%	7.452.585.148	0	SEKRETARIAT DPRD

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50	Dokumen	7.452.585.148	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100	%	30.246.056.599	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	Dokumen	27.391.770.000	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	2.854.286.599	0	SEKRETARIAT DPRD
<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>30.042.087.872</b>	<b>30.811.450.000</b>	
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>30.042.087.872</b>	<b>30.811.450.000</b>	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	13.954.087.872	14.628.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10	Dokumen	130.300.000	140.650.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	50.700.000	55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.500.000	6.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	7.500.000	7.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.500.000	6.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	7.500.000	7.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1.600.000	1.650.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3	Dokumen	10.946.583.000	11.321.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100	Persen			
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	Orang/bulan	10.631.433.000	11.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	313.500.000	320.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	500.000	550.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	900.000	950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	250.000	300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3	Kegiatan	317.600.000	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65	Orang	317.600.000	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Persen	1.722.104.872	1.938.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	206.237.360	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Paket	50.400.000	55.000.000	BADAN PERENCANAAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	64.000.000	65.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	22.385.512	24.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	68.000.000	74.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	770.000.000	800.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	541.082.000	590.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	Persen	153.200.000	176.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	6.200.000	6.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	147.000.000	170.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100	Persen	684.300.000	722.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	44.000.000	47.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	400.700.000	425.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	239.600.000	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00	Persen	4.510.000.000	4.455.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100	Persen	3.190.000.000	3.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	300.000.000	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	Berita Acara	200.000.000	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	630.000.000	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800	Usulan	160.000.000	180.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan##(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	Dokumen	1.900.000.000	2.150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	300.000.000	335.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	200.000.000	220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	100.000.000	115.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100	Persen	1.020.000.000	1.120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	700.000.000	770.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Laporan	320.000.000	350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00	Persen	11.578.000.000	11.727.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00	Persen			
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00	Persen			
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	2.520.000.000	2.772.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	300.000.000	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	Laporan	120.000.000	132.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	1.100.000.000	1.210.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	Laporan	1.000.000.000	1.100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	3.850.000.000	3.505.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	1.975.000.000	1.500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2	Laporan	725.000.000	750.000.000	BADAN PERENCANAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	1.100.000.000	1.200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Laporan	50.000.000	55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100	%	5.208.000.000	5.450.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	2.188.000.000	2.200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	Laporan	500.000.000	550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	1.800.000.000	1.900.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	2	Laporan	720.000.000	800.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				<b>203.521.163.979</b>	<b>195.764.027.399</b>	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>203.521.163.979</b>	<b>195.764.027.399</b>	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	116.866.216.032	105.622.889.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9		121.848.558	249.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	52.984.996	65.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.075.254	18.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.851.699	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.865.574	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.081.139	26.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2.989.896	35.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100	persen	13.907.268.836	14.663.117.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	Orang/bulan	13.459.412.000	13.846.117.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	447.360.000	810.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	248.418	3.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	248.418	3.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100	persen	129.927.900	687.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	129.927.900	687.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100	persen	3.917.468.819	3.330.216.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	18.026.445	56.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	547.823.543	358.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	154.638.941	68.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	103.638.428	91.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	28.443.439	17.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	2.488.509	45.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	62.431.424	222.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	502.178.191	1.700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	14.985.000	57.881.000	BADAN PENGELOLAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	2.482.814.899	715.335.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD	100	persen	74.406.275	410.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	Unit	74.406.275	410.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100	persen	97.383.280.451	84.601.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	222.000	1.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	96.759.944.291	84.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	623.114.160	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100	persen	1.332.015.193	1.682.556.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	46.041.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	500.749.965	751.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	Unit	4.035.960	80.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21	Unit	42.359.099	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	631.906.128	400.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172	Unit	109.004.042	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	0.82	Persen	83.388.887.046	82.529.438.399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100	persen	4.044.665.344	13.059.317.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	197.192.412	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	238.298.222	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen	22.083.097	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen	21.912.157	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen	23.082.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen	4.291.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	797.494.013	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	561.889.093	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15	Dokumen	1.729.264.712	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	Dokumen	36.563.292	4.959.317.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3	Dokumen	117.559.824	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	Dokumen	52.506.171	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang	242.529.351	1.100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100	persen	1.144.530.519	6.483.121.399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720	Dokumen	234.774.519	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408	Dokumen	176.749.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	180.263.000	333.121.399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641	Dokumen	92.731.000	1.050.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	2	Laporan	106.929.000	1.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14	Dokumen	112.518.000	1.200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200	Orang	240.566.000	1.300.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100	persen	1.646.449.000	10.160.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624	Laporan	32.200.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12	Dokumen	120.200.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	223.200.000	1.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	Laporan	283.200.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	Dokumen	299.100.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Dokumen	17.149.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian	6	Dokumen	81.100.000	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan##Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	59.100.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	153.100.000	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	149.100.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan##Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250	Orang	99.500.000	1.200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39	Lembaga	129.500.000	760.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100	persen	76.553.242.183	52.827.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	76.553.242.183	52.827.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	100.00	Persen	3.266.060.901	7.611.700.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100	persen	3.266.060.901	7.611.700.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	167.363.461	274.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	71.045.738	138.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	107.737.281	303.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	355.347.188	461.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11	Laporan	209.949.430	178.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10	Laporan	1.248.827.432	4.600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10	Laporan	610.475.044	727.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	Laporan	105.350.107	168.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	Dokumen	305.798.259	400.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang	84.166.961	361.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>106.518.898.680</b>	<b>115.183.058.314</b>	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>106.518.898.680</b>	<b>115.183.058.314</b>	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00	Persen	76.774.448.308	81.791.555.879	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100	Persen			
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9	Dokumen	210.800.094	232.167.879	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	97.600.109	106.590.119	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	9.011.400	9.713.990	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.610.900	11.363.990	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.655.400	9.713.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.954.900	4.380.420	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	30.967.385	35.406.360	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	67.840.179.630	72.638.961.293	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	Orang/bulan	66.936.873.000	71.650.560.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76	Dokumen	901.623.630	986.549.993	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	223.800	246.180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	1.235.400	1.358.940	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	223.800	246.180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100	Persen	272.048.600	299.253.460	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	219.098.610	241.008.471	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	52.949.990	58.244.989	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100	Persen	472.423.523	432.875.874	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	229.942.523	252.936.774	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46	Orang	242.481.000	179.939.100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	1.484.034.431	1.308.839.435	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	63.670.500	79.200.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45	Paket	93.391.790	107.800.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90	Paket	103.320.646	113.652.711	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	202.667.510	223.618.340	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	12.000.000	13.200.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	37.500.000	41.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	687.105.375	425.815.913	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	62.100.000	58.300.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70	Dokumen	222.278.610	246.002.471	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	350.453.318	386.994.650	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	65.029.160	71.532.076	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	282.397.668	312.133.435	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	3.026.490	3.329.139	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	Persen	3.490.551.446	3.906.042.102	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	60.000.000	66.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	563.926.360	599.231.996	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168	Laporan	92.003.903	101.204.293	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	2.774.621.183	3.139.605.813	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	2.653.957.266	2.586.421.186	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	48.356.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131	Unit	1.278.769.910	1.300.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	Unit	16.143.840	17.758.224	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520	Unit	541.223.887	602.443.158	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	18.394.367	56.863.804	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	755.465.263	561.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	Persen	29.744.450.372	33.391.502.435	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	Persen	29.744.450.372	33.391.502.435	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6	Dokumen	665.978.554	863.476.409	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8	Laporan	675.038.940	742.542.834	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	Laporan	5.882.198.800	6.286.901.374	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan	3.083.008.160	3.499.496.176	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000	Obyek Pajak	424.588.570	227.807.545	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	5.494.398.967	6.376.204.304	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	Layanan	3.965.434.745	4.435.556.147	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10	Dokumen	432.069.530	475.276.190	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	7.976.533.490	8.887.920.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	201.208.020	221.328.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	Dokumen	181.965.786	536.762.365	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Laporan	762.026.810	838.229.491	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>33.134.453.856</b>	<b>0</b>	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>25.742.303.118</b>	<b>0</b>	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BKPP	100.00	Persen	18.125.034.988	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100	Persen			
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen			



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKPP	82	Nilai	123.700.705	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	51.163.683	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	4.075.254	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.075.254	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.907.975	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.042.399	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	5.436.140	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	5	Kegiatan	13.287.770.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	Orang/bulan	12.949.670.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	335.405.400	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	673.400	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	785.800	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.235.400	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1	Kegiatan	157.959.400	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	157.959.400	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8	Kegiatan	1.088.922.526	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	73.326.067	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	194.949.464	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	95.449.188	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	85.260.669	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	995.404	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	85.750.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	355.100.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	198.091.734	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1	Kegiatan	182.340.788	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	182.340.788	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3	Kegiatan	2.257.556.783	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	654.116.904	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	248.734.007	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.354.705.872	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4	Kegiatan	1.026.784.786	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	387.108.164	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	30.269.700	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	565.446.923	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50	Persen	7.617.268.130	0	BADAN KEPEGAWAIAN,

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99	Persen			
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00	Persen			
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00	Persen			
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00	Persen			
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	275.50	Persen			
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22.88	Persen			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik	5	Kegiatan	1.692.259.933	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dokumen	276.073.320	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4	Dokumen	518.939.289	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi##Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666	Dokumen	440.135.405	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	218.256.750	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000	Dokumen	238.855.169	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik	3	Kegiatan	2.464.906.700	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,	350	Dokumen	509.698.900	0	BADAN KEPEGAWAIAN,

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400	Dokumen	333.160.800	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300	Dokumen	1.622.047.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik	4	Kegiatan	1.540.353.297	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500	Orang	445.738.906	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	330	Orang	742.777.191	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300	Orang	296.957.500	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	430	Orang	54.879.700	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik	1	Kegiatan	1.919.748.200	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	206.887.270	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	365	Orang	1.091.979.710	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000	Orang	489.773.780	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan	115.254.960	0	BADAN KEPEGAWAIAN,

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
							PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25	Dokumen	15.852.480	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>7.392.150.738</b>	<b>0</b>	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	50	Persen	7.392.150.738	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik	4	Kegiatan	1.865.090.596	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	36.500.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	254.450.000	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600	Orang	1.361.968.096	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	212.172.500	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik	1	Kegiatan	5.527.060.142	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	Laporan	5.527.060.142	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>5.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>				<b>10.204.705.877</b>	<b>12.214.300.000</b>	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>10.204.705.877</b>	<b>12.214.300.000</b>	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%	5.864.888.312	7.255.300.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100	%			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	%			
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	155.145.101	170.900.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	75.935.101	82.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.500.000	4.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.100.000	4.500.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.580.000	4.100.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.610.000	4.300.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	14.420.000	17.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BRIDA	100	%	4.746.321.000	6.008.900.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/bulan	4.542.677.000	5.800.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	196.744.000	199.900.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.300.000	3.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	2.300.000	3.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.300.000	3.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%	96.907.240	100.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	96.907.240	100.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	598.889.485	675.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	89.333.098	90.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Paket	35.250.000	50.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	34.000.000	35.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	23.433.650	25.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	57.063.460	60.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	228.181.000	280.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	131.628.277	135.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100	%	93.195.490	95.500.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	6.180.000	6.500.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	87.015.490	89.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	174.429.996	205.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43.959.999	55.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	130.469.997	150.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	%	4.339.817.565	4.959.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	%	295.000.000	330.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2	Laporan	295.000.000	330.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	%	730.000.000	780.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	7	Dokumen	730.000.000	780.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	%	1.589.000.000	1.970.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	8	Dokumen	849.000.000	970.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	7	Dokumen	740.000.000	1.000.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100	%	1.725.817.565	1.879.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	795.817.565	859.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2	Laporan	400.000.000	410.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Laporan	350.000.000	410.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	180.000.000	200.000.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				<b>31.472.005.080</b>	<b>34.839.462.937</b>	
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				<b>31.472.005.080</b>	<b>34.839.462.937</b>	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	22.415.818.750	24.576.360.000	INSPEKTORAT
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100	persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen			
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	7	Dokumen	118.262.859	85.350.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	53.740.962	13.250.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.671.400	4.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.354.099	4.200.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.270.099	3.700.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.770.099	4.200.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	456.200	1.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	55.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat)	14	Dokumen	16.274.271.460	16.835.610.000	INSPEKTORAT
		Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	100	%			
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan	15.920.847.000	16.500.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	346.584.000	328.000.000	INSPEKTORAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	4.857.600	5.300.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.497.168	1.700.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	485.692	610.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100	%	1.861.808.000	2.140.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66	Orang	1.171.826.000	1.290.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	689.982.000	850.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100	%	2.162.480.581	2.721.400.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	129.757.604	183.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	94.681.089	107.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	117.632.261	159.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	4.977.018	5.400.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	102.500.000	167.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	753.006.000	960.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	263.320.618	290.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	696.605.991	850.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100	%	1.327.565.267	2.043.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	1.170.131.005	1.320.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	157.434.262	723.000.000	INSPEKTORAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor ( Inspektorat )	100	%	8.623.800	11.100.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	8.623.800	11.100.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100	%	662.806.783	739.900.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	35.625.000	39.900.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	434.531.513	488.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140	Unit	9.817.200	11.500.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	Unit	92.755.390	104.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	Unit	90.077.680	96.500.000	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00	Leveling	4.129.485.320	4.706.366.720	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	100	%	3.354.474.620	3.852.366.720	INSPEKTORAT
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	89.00	%			
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48	Laporan	365.449.000	465.850.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Laporan	740.672.760	875.435.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	657.361.200	724.318.320	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	155.016.000	176.763.400	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	Kesepakatan	1.071.130.960	1.150.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	Dokumen	364.844.700	460.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100	%	775.010.700	854.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian##Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	67.879.950	74.000.000	INSPEKTORAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	Laporan	707.130.750	780.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.09	Nilai	4.926.701.010	5.556.736.217	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	3	indeks	406.776.000	557.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	76.674.000	84.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	330.102.000	473.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi	100	%	4.519.925.010	4.999.736.217	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51	perangkat daerah	870.480.200	985.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51	perangkat daerah	568.495.000	560.076.217	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Kegiatan	2.868.549.060	3.223.660.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50	perangkat daerah	212.400.750	231.000.000	INSPEKTORAT
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG SELATAN</b>				<b>42.725.973.630</b>	<b>42.352.278.930</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>42.725.973.630</b>	<b>42.352.278.930</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen	16.978.444.900	16.776.440.130	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan	2	dokumen	69.617.500	18.718.300	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	53.488.900	3.488.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.107.300	2.107.300	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.488.900	3.488.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.107.300	2.107.300	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.488.900	3.488.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.447.300	548.100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	3.488.900	3.488.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	14.599.919.400	14.942.044.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/bulan	14.220.480.000	14.579.940.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	375.396.000	358.260.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.347.800	1.281.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1.347.800	1.281.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.347.800	1.281.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100	persen	1.024.792.200	923.550.700	KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	33.300.000	33.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	207.100.000	228.405.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	45.800.000	44.582.700	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	34.225.000	34.225.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	131.163.200	130.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	99.424.000	99.388.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	473.780.000	353.950.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	73.300.000	62.110.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	73.300.000	62.110.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	256.600.000	229.895.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	139.000.000	121.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	117.600.000	108.395.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	persen	954.215.800	600.121.330	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	Unit	319.400.000	307.121.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	426.272.800	155.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	53.813.000	59.856.400	KECAMATAN SEMARANG SELATAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	154.730.000	77.643.130	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	3.402.600.000	3.108.638.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	angka	614.500.000	614.646.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	4.500.000	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	610.000.000	609.646.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	1.411.800.000	1.385.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	521.800.000	785.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN WONODRI



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	60.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	98.000.000	60.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	1.376.300.000	1.108.992.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.376.300.000	1.108.992.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	22.206.760.830	22.260.400.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	kegiatan	11.893.610.830	11.944.600.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	Lembaga Kemasyarakatan	169.600.000	169.600.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.200.000.000	1.275.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN WONODRI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	524.010.830	500.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WONODRI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	dokumen	10.313.150.000	10.315.800.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000	669.800.000	KELURAHAN BULUSTALAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	900.800.000	900.800.000	KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000	1.041.200.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.134.800.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000	977.600.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.604.000.000	1.604.000.000	KELURAHAN WONODRI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000	1.045.400.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000	830.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	849.800.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000	1.092.200.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	32.800.000	37.200.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	107.467.900	105.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	31	angka	107.467.900	105.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	107.467.900	105.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	30.700.000	101.800.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	30.700.000	101.800.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	30.700.000	101.800.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG UTARA</b>				<b>51.313.567.689</b>	<b>53.175.207.346</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>51.313.567.689</b>	<b>53.175.207.346</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	17.890.133.979	19.254.628.512	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	5	dokumen	52.281.800	18.611.100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	50.357.600	13.160.700	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	289.400	1.789.400	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	418.900	418.900	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	289.400	1.789.400	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	418.900	418.900	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	223.800	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	283.800	1.033.800	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	100	persen	15.798.350.400	17.323.325.700	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	Orang/bulan	15.181.329.000	16.780.656.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	614.112.000	539.560.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.685.600	2.145.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	223.800	963.900	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	100	persen	1.523.385.971	1.403.626.568	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	1.280.806.701	1.185.467.468	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	30.529.770	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	2	Paket	3.824.000	3.824.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Laporan	62.000.000	62.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan	117.225.500	93.335.100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	21.000.000	21.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	100	persen	186.000.000	186.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	186.000.000	186.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	100	persen	330.115.808	323.065.144	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	163.819.804	163.819.804	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	95.363.600	94.181.800	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	63.108.990	61.563.540	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	7.823.414	3.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	3.244.970.760	3.542.927.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara	65	Angka	586.500.000	586.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1.500.000	1.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen	585.000.000	585.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	100	Persen	2.658.470.760	2.956.427.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	2.036.470.760	2.327.677.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	64.000.000	65.600.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.000.000	70.725.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	64.000.000	64.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	71.000.000	71.000.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.000.000	77.900.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	61.000.000	62.525.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	73.000.000	73.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	78.000.000	78.000.000	KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	66.000.000	66.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	29.896.719.350	30.090.240.010	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	321	Kegiatan	15.904.669.350	16.013.020.010	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga Kemasyarakatan	58.345.010	58.345.010	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.187.000.000	1.216.675.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.384.000.000	1.384.000.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.035.000.000	1.035.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.456.000.000	1.456.000.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.304.000.000	1.304.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	2.663.000.000	2.663.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	Unit	2.839.000.000	2.839.000.000	KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.152.000.000	1.152.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	301.324.340	380.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BULU LOR



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	50	Dokumen	13.992.050.000	14.077.220.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	990.200.000	1.014.955.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.557.200.000	1.596.130.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	974.600.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.693.400.000	1.693.400.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	2.318.600.000	2.318.600.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	655.400.000	671.785.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.959.800.000	1.959.800.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	2.451.800.000	2.451.800.000	KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.241.000.000	1.241.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	7.750.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	15.300.000	20.400.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	125.243.600	125.528.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara	30	Angka	125.243.600	125.528.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	125.243.600	125.528.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	156.500.000	161.882.624	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10	Angka	156.500.000	161.882.624	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480	Orang	156.500.000	161.882.624	KECAMATAN SEMARANG UTARA
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG BARAT</b>				<b>68.036.139.800</b>	<b>72.853.374.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>68.036.139.800</b>	<b>72.853.374.000</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	25.667.935.950	28.863.180.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00	Dokumen	84.643.200	30.918.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	56.931.600	7.200.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.044.300	4.100.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dokumen	5.863.800	4.350.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.421.900	3.863.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.121.400	4.350.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4.758.200	4.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2.502.000	3.055.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	dokumen	22.704.506.200	25.878.770.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Orang/bulan	21.857.625.000	25.000.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	840.590.600	870.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.573.400	2.695.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	3.144.800	4.050.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.572.400	2.025.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00	bulan	802.080.681	856.194.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	30.513.672	45.780.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	33.022.902	17.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	68.484.290	107.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	38.282.450	41.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	117.888.010	148.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	135.482.820	176.414.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	378.406.537	320.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	946.284.911	890.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	513.880.261	470.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	432.404.650	420.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	285.642.722	314.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	246.804.000	271.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	38.838.722	43.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	persen	844.778.236	892.798.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58	Unit	603.716.946	621.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	123.164.250	147.300.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	75.401.640	87.998.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	42.495.400	36.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	4.264.604.800	4.689.294.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1.00	angka	2.052.462.120	2.377.784.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	2	Laporan	30.878.000	35.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	2.021.584.120	2.342.784.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.00	Dokumen	1.688.000.000	1.740.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	360.000.000	380.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN NGENEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	85.000.000	KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	524.142.680	571.510.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	524.142.680	571.510.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	37.984.964.650	39.170.400.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	kegiatan	18.714.000.000	19.870.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	150.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.050.000.000	2.000.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	994.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.029.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.191.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	999.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.170.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.160.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.171.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	500.000.000	800.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00	Dokumen	19.270.964.650	19.300.400.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	146.564.650	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	1.263.800.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	1.880.600.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	1.034.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	603.200.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	974.600.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	783.200.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	2.002.400.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	1.252.400.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	1.190.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	740.600.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	556.400.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	912.200.000	KELURAHAN KARANGYU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	1.784.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	1.016.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	1.059.800.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	2.022.200.000	KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	40.000.000	55.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	38.637.200	42.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	98.00	persen	38.637.200	42.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15.00	Angka			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	38.637.200	42.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan	98	Persen	79.997.200	88.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00	angka	79.997.200	88.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20	Orang	79.997.200	88.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG TIMUR</b>				<b>45.901.066.036</b>	<b>45.429.030.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>45.901.066.036</b>	<b>45.429.030.000</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00	Persen	17.557.162.933	17.643.996.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Smg Timur	7	dokumen	63.538.800	35.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	51.368.600	4.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.728.900	4.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.874.900	4.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.246.900	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.706.900	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	Laporan	1.122.000	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.490.600	8.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD -Kec.Smg Timur	3	dokumen	15.237.303.000	13.295.194.279	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Smg Timur	100	Persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang/bulan	14.687.758.000	12.588.153.399	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	547.862.000	700.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	561.000	5.040.880	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	785.800	1.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200	1.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100	Persen	975.381.784	2.353.801.721	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	14.803.470	35.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	212.965.522	900.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	72.364.240	51.801.721	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	40.905.065	27.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1750	Laporan	13.000.000	140.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	221.277.000	250.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	400.066.487	950.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur	100	Persen	214.121.864	700.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	214.121.864	700.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Sng Timur	100	Persen	442.892.118	510.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	243.461.941	240.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Laporan	199.430.177	270.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Sng Timur	100	Persen	623.925.367	750.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	259.972.947	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	88.981.070	300.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	239.971.350	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	35.000.000	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	3.497.272.463	1.946.734.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	angka	215.077.567	46.800.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	7.500.000	6.800.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	207.577.567	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	2.077.229.206	952.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.181.229.206	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	95.000.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	88.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	91.000.000	93.000.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	88.000.000	KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000	87.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	91.000.000	94.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	89.000.000	90.000.000	KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	101.000.000	110.000.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000	87.000.000	KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	90.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	1.204.965.690	947.934.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	1.204.965.690	947.934.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100.00	Persen	24.564.805.090	25.733.300.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.00	kegiatan	12.881.349.000	13.908.300.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120	Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.155.000.000	1.950.225.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.675.000.000	1.675.000.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.433.000.000	1.433.000.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30	Pokmas / Ormas	453.349.000	650.075.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya	8	dokumen	11.683.456.090	11.825.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	174.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.620.000.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	890.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000	1.285.000.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000	870.000.000	KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000	620.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.303.400.000	1.310.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000	1.050.000.000	KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	2.443.400.000	2.445.000.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	630.000.000	KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000	815.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	13.050.000	16.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	32.806.090	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	182.330.000	55.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	25.00	angka	182.330.000	55.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	182.330.000	55.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98.00	Persen	99.495.550	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4	kegiatan	99.495.550	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4.00	kegiatan			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	Orang	99.495.550	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>KECAMATAN SEMARANG TENGAH</b>				<b>55.520.892.772</b>	<b>55.185.130.685</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>55.520.892.772</b>	<b>55.185.130.685</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00	Persen	24.192.189.478	24.021.232.591	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	21	dokumen	94.190.000	43.740.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	56.605.000	6.380.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.400.000	5.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.400.000	5.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.580.000	3.580.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	3.580.000	3.580.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	16.385.000	16.160.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	3.240.000	3.240.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)	8	dokumen	22.515.505.000	22.458.309.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang/bulan	21.713.409.000	21.713.409.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	792.566.000	735.370.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.660.000	3.660.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4.540.000	4.540.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.330.000	1.330.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100	Persen	232.042.828	230.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7.500.000	7.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	14.842.828	12.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	135.975.000	137.100.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	43.725.000	43.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah	100	Persen	534.997.613	536.664.961	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Unit	534.997.613	536.664.961	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)	100	Persen	269.572.522	270.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	140.000.000	140.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	129.572.522	130.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100	Persen	545.881.515	481.918.630	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	Unit	387.291.590	323.328.700	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	133.589.925	133.589.930	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	3.476.335.436	3.811.755.236	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Persen	20.225.000	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	225.000	0	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	20.000.000	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	3.426.110.436	3.761.755.236	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	2.076.110.436	2.411.755.236	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN PANDANSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN PEKUNDEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94	Persen	27.736.367.858	27.236.142.858	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827	kegiatan	27.555.000.000	27.055.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	58.000.000	58.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	1.042.000.000	1.042.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	952.000.000	952.000.000	KELURAHAN MIROTO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PEKUNDE
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	951.000.000	951.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	900.000.000	400.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	907.000.000	907.000.000	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	789.400.000	789.400.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	931.000.000	931.000.000	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	711.400.000	711.400.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	982.000.000	982.000.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	766.600.000	766.600.000	KELURAHAN KEMBANGSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	524.200.000	524.200.000	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	579.400.000	579.400.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	606.400.000	606.400.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	512.800.000	512.800.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	806.200.000	806.200.000	KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	673.000.000	673.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	762.400.000	762.400.000	KELURAHAN PEKUNDEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	786.400.000	786.400.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	950.800.000	950.800.000	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15	dokumen	181.367.858	181.142.858	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	225.000	0	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	54.142.858	54.142.858	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	16	Persen	33.600.000	33.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27	angka	33.600.000	33.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	33.600.000	33.600.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Persen	82.400.000	82.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	82.400.000	82.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45	Orang	82.400.000	82.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>KECAMATAN GUNUNG PATI</b>				<b>64.176.920.572</b>	<b>63.513.100.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>64.176.920.572</b>	<b>63.513.100.000</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	28.839.718.740	28.188.400.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	persen	60.428.000	13.600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	6	dokumen			
		dokumen pelaporan	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	51.078.400	1.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.518.000	1.600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.788.000	1.900.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.036.000	4.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	894.000	2.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	562.000	600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.551.600	2.500.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100	persen	24.584.925.900	24.811.800.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	dokumen			
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	Orang/bulan	23.753.433.000	24.000.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	830.481.300	810.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	337.200	600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	337.200	600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	337.200	600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12	bulan	2.068.964.736	1.732.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	22.288.812	24.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	764.236.700	604.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	71.984.568	73.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	22.185.740	22.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	19.350.000	20.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	183.779.964	176.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	985.138.952	813.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	555.885.691	50.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	555.885.691	50.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	305.064.455	297.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	210.934.520	202.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Laporan	94.129.935	95.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	1.264.449.958	1.284.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	Unit	378.159.958	273.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	641.390.000	738.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	159.900.000	202.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	85.000.000	71.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	4.059.518.452	4.033.500.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	2	angka	816.443.887	581.500.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	2.500.000	1.500.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	813.943.887	580.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak	100	persen	2.260.642.705	2.347.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	843.642.705	913.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	98.000.000	100.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	92.000.000	93.000.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	88.000.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	89.000.000	90.000.000	KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	89.000.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	88.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	86.000.000	87.000.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000	88.000.000	KELURAHAN NGIJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	89.000.000	KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	88.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	86.000.000	87.000.000	KELURAHAN CEPOKO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	91.000.000	92.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	89.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	89.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	88.000.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	90.000.000	89.000.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	persen	982.431.860	1.105.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	982.431.860	1.105.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	31.052.354.023	31.092.200.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	200	kegiatan	18.269.854.023	18.291.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	196.365.138	200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.208.700.000	1.209.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.228.000.000	1.229.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.145.000.000	1.146.000.000	KELURAHAN PONGANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN NGIJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	971.000.000	972.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	951.000.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas / Ormas	370.788.885	356.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN NGIJO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	51.000.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	dokumen	12.782.500.000	12.801.200.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	128.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	1.707.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.128.600.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	592.800.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	793.800.000	KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	652.200.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	574.200.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	405.600.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	586.800.000	KELURAHAN NGIJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	862.400.000	863.400.000	KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	628.200.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	441.000.000	KELURAHAN CEPOKO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	1.016.400.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	698.000.000	699.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	636.600.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	538.800.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	745.800.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga Kemasyarakatan	11.300.000	12.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	Laporan	650.000.000	651.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	111.129.357	90.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	4	angka	111.129.357	90.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	111.129.357	90.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	114.200.000	109.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan ,Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	114.200.000	109.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang	114.200.000	109.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>KECAMATAN TUGU</b>				<b>35.107.563.241</b>	<b>35.117.581.241</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>35.107.563.241</b>	<b>35.117.581.241</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00	Persen	14.972.935.350	14.982.953.350	KECAMATAN TUGU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan - Kec. Tugu	4	Dokumen	60.053.600	10.053.600	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Tugu	7	Dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	50.868.800	868.800	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	1.518.000	1.518.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	1.788.000	1.788.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	3.036.000	3.036.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	894.000	894.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	397.200	397.200	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.551.600	1.551.600	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	3	Dokumen	11.900.514.600	11.900.532.600	KECAMATAN TUGU
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100	Persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/bulan	11.535.637.000	11.535.637.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	363.866.000	363.884.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	337.200	337.200	KECAMATAN TUGU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	337.200	337.200	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	337.200	337.200	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Tugu	100	Persen	1.229.411.051	1.229.411.051	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10.446.950	10.446.950	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	294.811.748	294.811.748	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	115.442.790	115.442.790	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1	Paket	21.141.000	21.141.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	88.680.000	88.680.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	135.725.000	135.725.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	563.163.563	563.163.563	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Tugu	100	Persen	933.562.358	933.562.358	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	933.562.358	933.562.358	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Tugu	100	Persen	330.102.266	330.102.266	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	234.000.000	234.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	96.102.266	96.102.266	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec. Tugu	100	Persen	519.291.475	579.291.475	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit	240.624.868	240.624.868	KECAMATAN TUGU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	99.494.131	99.494.131	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	105.000.000	105.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	74.172.476	134.172.476	KECAMATAN TUGU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	94	Persen	1.994.373.088	1.994.373.088	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Tugu	4	Nilai	144.940.860	144.940.860	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	5.800.000	5.800.000	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	139.140.860	139.140.860	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu	100	Persen	1.728.562.228	1.728.562.228	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	1.077.562.228	1.077.562.228	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Tugu	100	Persen	120.870.000	120.870.000	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	120.870.000	120.870.000	KECAMATAN TUGU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	100	Persen	17.977.014.803	17.977.014.803	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu	297	Kegiatan	13.478.328.203	13.478.328.203	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	59.924.000	59.924.000	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.110.000.000	1.110.000.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.446.000.000	1.446.000.000	KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.648.000.000	1.648.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.191.100.000	1.191.100.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	1.724.000.000	1.724.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	2.085.000.000	2.085.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.921.000.000	1.921.000.000	KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94	Pokmas / Ormas	993.304.203	993.304.203	KECAMATAN TUGU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu	27	Dokumen	4.498.686.600	4.498.686.600	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	462.800.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	780.200.000	KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	564.800.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	362.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	902.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	699.200.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	557.600.000	KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	5.800.000	5.800.000	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	37.286.600	37.286.600	KECAMATAN TUGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	25	Persen	75.540.000	75.540.000	KECAMATAN TUGU
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan	2	Nilai	75.540.000	75.540.000	KECAMATAN TUGU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Tugu					
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	75.540.000	75.540.000	KECAMATAN TUGU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu	98	Persen	87.700.000	87.700.000	KECAMATAN TUGU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Tugu	2	Kegiatan	87.700.000	87.700.000	KECAMATAN TUGU
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	Orang	87.700.000	87.700.000	KECAMATAN TUGU
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>KECAMATAN MIJEN</b>				<b>62.087.257.480</b>	<b>62.089.085.558</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>62.087.257.480</b>	<b>62.089.085.558</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	26.525.188.990	26.674.391.350	KECAMATAN MIJEN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2	dokumen	62.829.400	11.738.200	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	51.436.000	808.800	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.795.000	3.795.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.470.000	4.470.000	KECAMATAN MIJEN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	759.000	759.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	894.000	894.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	785.800	337.200	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	689.600	674.200	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen	22.299.028.800	22.305.870.800	KECAMATAN MIJEN
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang/bulan	21.476.502.000	21.476.412.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	821.178.000	828.110.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	337.200	337.200	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	674.400	674.400	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	337.200	337.200	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	persen	1.836.826.934	1.881.185.764	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	11.365.250	10.947.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	529.813.280	532.519.820	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	46.243.960	35.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	21.041.591	20.435.753	KECAMATAN MIJEN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	30.656.000	32.656.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	148.376.000	135.751.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	Dokumen	1.049.330.853	1.113.876.191	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	735.128.730	932.920.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	735.128.730	932.920.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	323.356.661	323.356.661	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	193.623.900	193.623.900	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	129.732.761	129.732.761	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.268.018.465	1.219.319.925	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit	255.225.200	255.225.200	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	119.165.265	71.762.725	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	387.628.000	386.332.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	506.000.000	506.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	3.660.619.290	3.612.666.936	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	angka	180.831.636	235.841.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN MIJEN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	176.831.636	231.841.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	1.969.109.264	2.013.931.664	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	879.839.264	924.661.664	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	79.920.000	79.920.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.140.000	76.140.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	74.610.000	74.610.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	73.710.000	73.710.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.960.000	75.960.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.330.000	75.330.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.880.000	83.880.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	78.120.000	78.120.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	78.300.000	78.300.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	76.590.000	76.590.000	KELURAHAN KEDUNGPAHE

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.950.000	76.950.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.510.000	75.510.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.480.000	87.480.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.770.000	76.770.000	KELURAHAN PESANTREN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	1.510.678.390	1.362.893.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.510.678.390	1.362.893.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	31.722.449.200	31.599.163.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502	kegiatan	20.310.649.200	20.126.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.240.000.000	1.100.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.375.000.000	1.375.000.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.153.000.000	1.153.000.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.368.000.000	1.368.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.654.000.000	1.654.000.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	1.908.000.000	1.908.000.000	KELURAHAN WONOLOPO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.943.000.000	1.943.000.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.415.000.000	1.415.000.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.535.000.000	1.535.000.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	269.649.200	225.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN NGADIRGO



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18	dokumen	11.411.800.000	11.473.163.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	188.363.636	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	889.400.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	596.000.000	596.000.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	378.800.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	306.800.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	533.600.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	420.200.000	420.200.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	1.199.600.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	991.400.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	459.800.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	881.000.000	881.000.000	KELURAHAN KEDUNGPALE
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	1.008.200.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	607.400.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000	2.120.000.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	876.800.000	KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.800.000	7.800.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	87.000.000	110.863.636	KECAMATAN MIJEN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	60	angka	87.000.000	110.863.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15	Laporan	87.000.000	110.863.636	KECAMATAN MIJEN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	92.000.000	92.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	92.000.000	92.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	92.000.000	92.000.000	KECAMATAN MIJEN
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>KECAMATAN GENUK</b>				<b>62.468.337.286</b>	<b>62.468.337.286</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>62.468.337.286</b>	<b>62.468.337.286</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	23.174.756.885	23.174.756.885	KECAMATAN GENUK
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	2	dokumen	122.832.370	122.832.370	KECAMATAN GENUK
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan- Kecamatan Genuk	5	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	62.695.030	62.695.030	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.587.400	10.587.400	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dokumen	10.746.900	10.746.900	KECAMATAN GENUK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.696.400	15.696.400	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	9.638.900	9.638.900	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	11.251.540	11.251.540	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	2.216.200	2.216.200	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	6	dokumen	20.635.255.620	20.635.255.620	KECAMATAN GENUK
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121	Orang/bulan	19.976.403.000	19.976.403.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	651.569.220	651.569.220	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.416.200	3.416.200	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.761.000	2.761.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.106.200	1.106.200	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum - di Kecamatan Genuk	100	persen	669.386.246	669.386.246	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Paket	77.309.970	77.309.970	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	133.377.955	133.377.955	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	50.972.220	50.972.220	KECAMATAN GENUK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	26.696.121	26.696.121	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	60.750.000	60.750.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	224.900.000	224.900.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	95.379.980	95.379.980	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - di Kecamatan Genuk	100	persen	443.268.177	443.268.177	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	443.268.177	443.268.177	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - di Kecamatan Genuk	100	persen	380.776.797	380.776.797	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	181.726.500	181.726.500	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	199.050.297	199.050.297	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD - di Kecamatan Genuk	100	persen	923.237.675	923.237.675	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	445.343.025	445.343.025	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	198.784.600	198.784.600	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	225.600.000	225.600.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	53.510.050	53.510.050	KECAMATAN GENUK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	4.808.978.936	4.808.978.936	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	1	angka	1.598.899.930	1.598.899.930	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	1	Laporan	7.820.960	7.820.960	KECAMATAN GENUK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	1.591.078.970	1.591.078.970	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk	100	persen	2.003.552.786	2.003.552.786	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	794.552.786	794.552.786	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	96.000.000	96.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	94.000.000	94.000.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	102.000.000	102.000.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	97.000.000	97.000.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	94.000.000	94.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	94.000.000	94.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	88.000.000	KELURAHAN TRIMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	90.000.000	90.000.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	88.000.000	88.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	99.000.000	99.000.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	97.000.000	97.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000	85.000.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000	85.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat- di Kecamatan Genuk	100	persen	1.206.526.220	1.206.526.220	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.206.526.220	1.206.526.220	KECAMATAN GENUK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	34.271.974.595	34.271.974.595	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	232	kegiatan	18.856.785.410	18.856.785.410	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	141.240.220	141.240.220	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.171.000.000	1.171.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.197.000.000	1.197.000.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.339.000.000	1.339.000.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.392.000.000	1.392.000.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	2.019.000.000	2.019.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.092.000.000	1.092.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.133.000.000	1.133.000.000	KELURAHAN TRIMULYO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.058.000.000	1.058.000.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.078.000.000	1.078.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.151.000.000	1.151.000.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.255.000.000	1.255.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	1.155.545.190	1.155.545.190	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TRIMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk	11	angka	15.415.189.185	15.415.189.185	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	Lembaga Kemasyarakatan	146.000.000	146.000.000	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.432.400.000	1.432.400.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.346.000.000	1.346.000.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	2.193.800.000	2.193.800.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.679.000.000	1.679.000.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	1.229.600.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.214.000.000	1.214.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	498.200.000	498.200.000	KELURAHAN TRIMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	838.400.000	838.400.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	580.400.000	580.400.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	2.057.600.000	2.057.600.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.608.200.000	1.608.200.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	240.200.000	240.200.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	287.000.000	287.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	51.866.285	51.866.285	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	12.522.900	12.522.900	KECAMATAN GENUK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	109.462.510	109.462.510	KECAMATAN GENUK
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman	26	persen	109.462.510	109.462.510	KECAMATAN GENUK



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		dan Ketertiban Umum yang ditangani - di Kecamatan Genuk					
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	109.462.510	109.462.510	KECAMATAN GENUK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	103.164.360	103.164.360	KECAMATAN GENUK
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan- di Kecamatan Genuk	6	angka	103.164.360	103.164.360	KECAMATAN GENUK
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang	103.164.360	103.164.360	KECAMATAN GENUK
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>KECAMATAN GAJAHMUNGKUR</b>				<b>36.804.736.840</b>	<b>20.484.544.661</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>36.804.736.840</b>	<b>20.484.544.661</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	15.831.003.090	685.930.537	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	06.00	Dokumen	77.959.700	9.712.800	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	55.754.400	5.754.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.835.400	3.958.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.190.900	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.818.200	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.956.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.060.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	3.344.800	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen	14.431.164.600	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan	13.953.656.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	472.000.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.723.800	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	1.836.200	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.948.600	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen	525.447.521	56.443.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.925.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	109.134.400	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	60.500.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	14.935.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	11.000.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	212.360.571	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	111.592.550	56.443.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00	Persen	43.918.526	43.918.526	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	43.918.526	43.918.526	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00	Persen	280.050.353	256.218.200	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	207.300.000	207.300.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	72.750.353	48.918.200	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00	Persen	472.462.390	319.637.611	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	190.000.000	165.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	148.810.000	70.722.611	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	94.737.390	45.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	38.915.000	38.915.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	96	Persen	3.524.842.750	3.121.537.774	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00	Angka	114.250.000	124.635.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	2.250.000	4.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	112.000.000	120.635.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	100.00	Persen	1.485.000.000	1.020.714.374	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	682.000.000	317.714.374	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	98.000.000	98.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	98.000.000	98.000.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	108.000.000	108.000.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	99.000.000	99.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000	0	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000	100.000.000	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	102.000.000	102.000.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	98.000.000	98.000.000	KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	Persen	1.925.592.750	1.976.188.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	1.925.592.750	1.976.188.400	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	17.172.400.000	16.410.456.350	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.00	Kegiatan	9.752.450.000	9.757.856.350	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	83.000.000	94.156.350	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	963.000.000	963.000.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	606.450.000	600.700.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BENDUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9.00	Dokumen	7.419.950.000	6.652.600.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	678.200.000	658.400.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	674.000.000	658.400.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.669.400.000	1.669.400.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	756.200.000	658.400.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	849.800.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	814.400.000	658.400.000	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	658.400.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	658.400.000	KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000	6.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	194.516.000	185.850.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	28.00	Angka	194.516.000	185.850.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	194.516.000	185.850.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	81.975.000	80.770.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	04.00	Kegiatan	81.975.000	80.770.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	81.975.000	80.770.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>KECAMATAN TEMBALANG</b>				<b>68.622.926.866</b>	<b>70.719.326.400</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>68.622.926.866</b>	<b>70.719.326.400</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	%	22.332.817.726	22.211.526.400	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	Dokumen	62.083.400	11.253.800	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	Dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	51.524.000	1.143.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.728.900	1.728.900	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.998.900	1.998.900	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.246.900	3.246.900	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.998.900	1.998.900	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	784.800	336.200	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	801.000	801.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	Dokumen	18.157.811.600	18.337.272.600	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	%			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	17.510.099.000	17.710.000.000	KECAMATAN TEMBALANG



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	646.704.000	626.264.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	336.200	336.200	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	336.200	336.200	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200	336.200	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	%	2.186.500.490	2.373.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	59.182.108	60.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	1.329.018.714	950.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	29.008.837	31.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12.920.535	12.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	151.750.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	314.000.000	310.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	290.620.296	810.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	34.620.456	25.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	34.620.456	25.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	540.000.000	555.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	280.000.000	285.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	260.000.000	270.000.000	KECAMATAN TEMBALANG



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	1.351.801.780	910.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	201.801.780	210.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	1.000.000.000	600.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	4.768.688.740	5.086.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec Tembalang	1	angka	745.848.900	813.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	742.848.900	810.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	%	2.628.232.040	2.723.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.101.232.040	1.196.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	144.000.000	144.000.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	125.000.000	125.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	132.000.000	132.000.000	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	130.000.000	130.000.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	118.000.000	118.000.000	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	123.000.000	123.000.000	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	117.000.000	117.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	157.000.000	157.000.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	119.000.000	119.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	116.000.000	116.000.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	119.000.000	119.000.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	127.000.000	127.000.000	KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	1.394.607.800	1.550.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.394.607.800	1.550.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	%	41.365.120.400	43.268.200.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425	Kegiatan	17.875.920.400	19.575.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	168.500.000	168.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	3.040.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	1.501.000.000	1.501.000.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.635.000.000	1.635.000.000	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.309.000.000	1.309.000.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEDUNGmundu
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.901.000.000	1.901.000.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	2.261.000.000	2.261.000.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	575.420.400	510.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JANGLI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	45	Dokumen	23.489.200.000	23.693.200.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000	3.840.800.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000	1.662.200.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000	2.349.800.000	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000	2.161.400.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	908.000.000	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000	1.439.600.000	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000	803.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.214.800.000	5.214.800.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000	956.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	658.400.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.178.600.000	1.178.600.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000	1.928.600.000	KELURAHAN SAMBIROTO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	15.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	250.000.000	450.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	%	60.000.000	60.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	Angka	60.000.000	60.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	60.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	%	96.300.000	93.600.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	Kegiatan	96.300.000	93.600.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180	Orang	96.300.000	93.600.000	KECAMATAN TEMBALANG
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>KECAMATAN CANDISARI</b>				<b>34.836.828.344</b>	<b>34.554.319.281</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>34.836.828.344</b>	<b>34.554.319.281</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	Persen	13.741.675.498	10.991.740.281	KECAMATAN CANDISARI
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec.Candisari	100	persen	72.062.990	62.250.000	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec.Candisari	2	dokumen			

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	55.204.600	8.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.996.900	8.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.033.900	8.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.565.900	8.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.449.900	8.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	1.780.590	4.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2.031.200	13.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD - Kec.Candisari	100	persen	11.729.104.200	9.564.819.599	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Candisari	3	dokumen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	Orang/bulan	11.335.291.000	9.045.319.599	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	390.292.000	500.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.911.200	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	1.386.200	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	223.800	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Candisari	100	persen	998.173.786	555.000.000	KECAMATAN CANDISARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Paket	21.973.990	75.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Paket	495.973.024	87.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	80.904.430	70.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Paket	15.636.213	7.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	91.750.000	60.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	116.433.649	75.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	175.502.480	180.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec.Candisari	100	persen	211.313.432	16.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	211.313.432	16.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor - Kec.Candisari	100	persen	263.082.119	300.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	165.341.468	200.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	97.740.651	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec.Candisari	100	persen	467.938.971	493.170.682	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	222.240.761	200.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	190.000.000	193.170.682	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	30.312.960	55.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	25.385.250	45.000.000	KECAMATAN CANDISARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	94	Persen	2.479.220.086	4.277.779.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari	1	angka	30.049.300	450.900.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	900.000	900.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	29.149.300	450.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari	100	persen	817.409.216	2.320.439.500	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	328.844.216	1.806.439.500	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.102.000	72.000.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	67.716.000	71.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	73.260.000	76.000.000	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	64.944.000	68.000.000	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	67.716.000	71.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.488.000	77.000.000	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	75.339.000	79.000.000	KELURAHAN JOMBLANG



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec.Candisari	100	persen	1.631.761.570	1.506.439.500	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.631.761.570	1.506.439.500	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	18.488.482.760	19.104.800.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari	80	kegiatan	9.119.082.760	9.716.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	38.082.760	35.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.110.000.000	1.500.000.000	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	996.000.000	996.000.000	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	972.000.000	972.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	1.463.000.000	1.463.000.000	KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	390.000.000	600.000.000	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KALIWIRU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari	6	kegiatan	9.369.400.000	9.388.800.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	1.209.800.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	959.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	1.842.200.000	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	545.000.000	545.000.000	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	1.005.800.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	1.385.000.000	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	2.280.200.000	KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000	4.800.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	10.000.000	30.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	53.300.000	80.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec.Candisari	31	angka	53.300.000	80.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	53.300.000	80.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti	98	Persen	74.150.000	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec.Candisari	2	kegiatan	74.150.000	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70	Orang	74.150.000	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>KECAMATAN BANYUMANIK</b>				<b>56.087.752.962</b>	<b>56.648.917.762</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>56.087.752.962</b>	<b>56.648.917.762</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	21.186.671.844	21.497.543.862	KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik	7	Dokumen	66.345.600	14.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik	2	Dokumen			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	Dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	52.336.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.936.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.530.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.336.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.530.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4.336.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.336.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	3	Dokumen	18.204.506.800	18.600.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	100	persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik	100	Persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	Orang/bulan	17.563.894.000	18.000.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	632.592.000	590.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.336.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	5.347.200	6.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.336.800	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik	100	Persen	976.542.791	950.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	14.900.000	15.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	44.995.982	55.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	60.000.000	65.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	20.909.899	25.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	10.000.000	15.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	353.195.890	305.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	472.541.020	470.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik	100	Persen	549.122.306	891.843.862	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	549.122.306	891.843.862	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik	100	Persen	443.915.450	431.700.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	211.000.000	170.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	87.715.450	90.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	145.200.000	171.700.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik	100	Persen	946.238.897	610.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31	Unit	265.918.897	255.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	280.000.000	290.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	30.000.000	35.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	370.320.000	30.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	3.484.355.230	3.718.923.900	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan##Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik	1	Angka	143.025.000	132.475.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	3	Laporan	6.600.000	6.600.000	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	136.425.000	125.875.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik	100	Persen	1.808.477.300	1.866.204.900	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	749.477.300	763.204.900	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	92.000.000	100.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	94.000.000	100.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	90.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	97.000.000	100.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000	110.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	95.000.000	100.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	107.000.000	107.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	94.000.000	100.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000	105.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	96.000.000	100.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	91.000.000	91.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik	100	Persen	1.532.852.930	1.720.244.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.532.852.930	1.720.244.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	Persen	31.147.675.888	31.163.400.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik	455	Kegiatan	13.816.700.000	13.799.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	60.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.100.000.000	1.100.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.353.000.000	1.353.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.026.000.000	1.026.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.267.000.000	1.317.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.220.000.000	1.220.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	973.000.000	973.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	482.700.000	400.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik	5	Dokumen	17.330.975.888	17.364.400.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	213.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.163.000.000	1.163.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.405.400.000	1.405.400.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	827.000.000	827.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.643.600.000	1.643.600.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.968.200.000	1.968.200.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.373.000.000	1.373.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.825.600.000	2.825.600.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.401.200.000	1.401.200.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.543.600.000	2.543.600.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	927.800.000	927.800.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	983.000.000	983.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	117.575.888	75.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	45.450.000	45.450.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik	27	Angka	45.450.000	45.450.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	45.450.000	45.450.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	223.600.000	223.600.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik	2	Kegiatan	223.600.000	223.600.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang	223.600.000	223.600.000	KECAMATAN BANYUMANIK
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>KECAMATAN NGALIYAN</b>				<b>57.687.863.016</b>	<b>57.560.437.775</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>57.687.863.016</b>	<b>57.560.437.775</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	21.545.743.316	21.656.497.775	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	6.00	dokumen	66.368.200	13.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	57.168.600	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.060.400	1.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.775.900	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.001.400	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.250.900	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.198.600	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	912.400	2.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00	dokumen	17.552.096.800	17.948.497.775	KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	Orang/bulan	16.936.271.000	17.359.677.775	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	613.356.000	585.820.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	673.400	1.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1	Laporan	1.460.200	1.000.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200	1.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	1.411.770.764	1.035.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	19.697.967	18.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	421.410.000	350.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	23.299.095	25.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	15.979.135	12.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	19.720.000	20.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	109.920.000	110.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	801.744.567	500.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	470.689.972	500.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	470.689.972	500.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	366.326.905	360.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	206.729.917	200.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	159.596.988	160.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	1.678.490.675	1.800.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit	283.299.972	200.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	775.000.000	800.000.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.190.703	200.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	600.000.000	600.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	3.716.382.820	3.847.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00	Angka	376.790.080	354.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	4.303.350	4.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	372.486.730	350.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	1.308.269.090	1.493.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	378.269.090	500.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN WATES

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	93.000.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.000.000	100.000.000	KELURAHAN GONDORIYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	2.031.323.650	2.000.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	2.031.323.650	2.000.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	32.168.554.050	31.899.700.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	232.00	kegiatan	13.703.038.040	13.521.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	Lembaga Kemasyarakatan	49.906.040	50.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.575.000.000	1.150.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.037.800.000	1.074.000.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.113.950.000	1.154.000.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	927.500.000	950.000.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	910.000.000	950.000.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	999.300.000	1.034.000.000	KELURAHAN WATES

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.208.350.000	1.253.000.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	Unit	1.864.247.000	1.933.000.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	906.980.000	950.000.000	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.097.824.000	1.153.000.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19	Unit	917.181.000	950.000.000	KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	595.000.000	420.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WATES
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00	dokumen	18.465.516.010	18.378.700.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000	2.875.400.000	KELURAHAN BRINGIN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000	2.342.600.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	764.600.000	764.600.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000	1.748.600.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	947.600.000	947.600.000	KELURAHAN WATES
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000	2.394.200.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000	2.513.600.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000	1.296.200.000	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000	1.879.100.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.389.800.000	1.389.800.000	KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Lembaga Kemasyarakatan	48.019.910	50.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	139.096.100	50.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	176.082.830	76.140.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	28.00	Angka	176.082.830	76.140.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	176.082.830	76.140.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	81.100.000	81.100.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00	kegiatan	81.100.000	81.100.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	60	Orang	81.100.000	81.100.000	KECAMATAN NGALIYAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>KECAMATAN GAYAMSARI</b>				<b>35.796.514.330</b>	<b>43.541.063.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>35.796.514.330</b>	<b>43.541.063.000</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari)	100.00	Persen	14.355.832.121	14.460.363.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (gayamsari)	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari)	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	Dokumen	64.005.900	21.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	52.015.800	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.978.600	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.736.600	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.899.500	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.994.200	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	1.235.400	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	1.145.800	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	Dokumen	13.038.894.200	10.549.977.409	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/bulan	12.663.064.000	10.167.313.409	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	374.372.000	373.664.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	Laporan	561.000	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	448.600	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	621.243.382	2.330.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	12.345.090	10.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	200.824.574	350.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket	29.688.320	350.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	14.118.101	20.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7.500.000	100.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	Laporan	130.198.981	200.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	226.568.316	1.300.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	46.179.996	400.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	46.179.996	400.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	212.148.966	179.385.591	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	150.748.500	129.385.591	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	61.400.466	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	Persen	373.359.677	980.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	111.594.587	250.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	142.500.000	630.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	24.265.090	60.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	95.000.000	40.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	2.366.177.740	1.951.638.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1	Angka	123.865.000	3.500.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	Laporan	2.700.000	0	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	121.165.000	3.500.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1.345.773.200	1.285.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	749.773.200	760.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	75.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	75.000.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	75.000.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12	Laporan	83.000.000	75.000.000	KELURAHAN SIWALAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	75.000.000	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	75.000.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	88.000.000	75.000.000	KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	896.539.540	663.138.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	896.539.540	663.138.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	Persen	18.847.102.469	26.932.460.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80	Angka	9.675.060.318	17.364.860.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	40.310.810	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.289.408.648	1.000.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.291.000.000	1.113.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.218.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	964.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.169.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	503.340.860	724.860.000	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.085.600.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.379.600.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.102.400.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	800.000.000	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.060.400.000	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.778.600.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.270.400.000	KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768	Angka	9.172.042.151	9.567.600.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	174.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.127.600.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.506.200.000	1.506.200.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.147.400.000	1.147.400.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	779.000.000	779.000.000	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.096.400.000	1.096.400.000	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.982.600.000	1.982.600.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.354.400.000	1.354.400.000	KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	Lembaga Kemasyarakatan	11.442.151	0	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan	40.000.000	400.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25	Persen	153.602.000	153.602.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	16	Angka	153.602.000	153.602.000	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	153.602.000	153.602.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	98	Persen	73.800.000	43.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6	Kegiatan	73.800.000	43.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	Orang	73.800.000	43.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000</b>	<b>KECAMATAN PEDURUNGAN</b>				<b>67.088.998.222</b>	<b>70.644.627.000</b>	
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>67.088.998.222</b>	<b>70.644.627.000</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00	Persen	22.884.304.442	24.209.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan	5	dokumen	95.409.400	157.500.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	54.647.000	55.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.755.900	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.830.900	6.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.780.900	4.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.080.900	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	21.387.800	80.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.926.000	2.500.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurungan	4	dokumen	19.678.513.800	19.761.500.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurungan	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	Orang/bulan	18.940.177.000	19.000.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	731.260.000	750.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.461.200	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	4.754.400	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	861.200	1.500.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan	100	persen	1.675.017.929	2.140.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000	30.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	534.349.419	700.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	45.000.000	60.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15.721.181	50.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	162.317.800	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	396.574.070	400.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	496.055.459	700.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor-Pedurungan	100	persen	102.664.699	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	102.664.699	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan	100	persen	437.959.896	600.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	270.000.000	300.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	167.959.896	300.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan	100	persen	894.738.718	1.350.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	226.738.718	250.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	50.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	338.000.000	500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	280.000.000	500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94	Persen	4.269.079.180	5.001.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan#Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurungan	1	angka	1.116.000.000	1.166.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	5	Laporan	50.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107	Dokumen	1.066.000.000	1.066.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan	100	persen	1.748.945.580	1.835.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	518.945.580	550.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	125.000.000	130.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	125.000.000	110.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000	80.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000	110.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	95.000.000	100.000.000	KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000	135.000.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000	110.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	95.000.000	110.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.000.000	110.000.000	KELURAHAN GEMAH



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000	100.000.000	KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	100.000.000	100.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	85.000.000	90.000.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan	100	persen	1.404.133.600	2.000.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	1.404.133.600	2.000.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	94	Persen	39.435.010.000	40.872.200.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan	385	kegiatan	15.771.810.000	16.546.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	60.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.132.368.000	1.500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.705.376.000	1.800.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.677.736.000	1.700.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	946.736.000	1.000.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.081.008.000	1.100.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	947.552.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.027.096.000	1.029.000.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	946.192.000	950.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	947.280.000	1.000.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.079.464.000	1.100.000.000	KELURAHAN GEMAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.081.280.000	1.100.000.000	KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	993.736.000	997.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	948.096.000	1.000.000.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	607.890.000	610.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GEMAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan	8	jenis	23.663.200.000	24.326.200.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	150.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33	Lembaga Kemasyarakatan	4.002.800.000	4.200.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.561.400.000	4.661.400.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	950.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.866.200.000	1.900.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	1.254.600.000	KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000	1.843.400.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2.088.800.000	2.100.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.394.000.000	1.420.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.733.000.000	1.750.000.000	KELURAHAN GEMAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.572.800.000	1.600.000.000	KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.487.600.000	1.500.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	787.400.000	796.800.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	37.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	25	Persen	479.604.600	541.427.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurungan	25	angka	479.604.600	541.427.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	479.604.600	541.427.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti	50	Persen	21.000.000	21.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan-Pedurungan	2	kegiatan	21.000.000	21.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70	Orang	21.000.000	21.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>30.612.948.231</b>	<b>20.877.375.000</b>	
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>30.612.948.231</b>	<b>20.877.375.000</b>	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	9.246.686.000	7.473.540.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	Dokumen	116.745.000	60.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	50.941.000	3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.672.000	900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.371.000	900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.782.000	900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.331.000	900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	Laporan	674.000	1.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	974.000	1.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	50.000.000	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen	6.883.031.000	6.161.648.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	%			
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan	6.581.718.000	5.574.110.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	297.950.000	558.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	561.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	2.353.400	12.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	7.538.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	32.659.800	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	32.659.800	40.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	1.103.253.200	556.377.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi#Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.945.000	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	62.009.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	66.082.000	60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	15.781.000	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	1.248.000	1.377.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	100.000.000	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	500.257.200	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	352.931.000	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	106.573.000	79.906.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	50.987.000	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	55.586.000	29.906.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	565.300.000	183.170.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	275.920.000	48.170.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	289.380.000	135.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	439.124.000	392.039.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.604.000	55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit	356.672.000	265.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	6.982.000	12.039.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	35.866.000	60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.30	Indeks	5.239.712.760	4.923.059.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2	kejadian	5.239.712.760	4.923.059.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28	Dokumen	1.372.086.760	1.020.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4	Dokumen	415.913.000	420.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500	Orang	155.732.000	469.059.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240	Orang	114.565.000	534.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5	Laporan	234.908.000	210.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2	Dokumen	917.155.000	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	27	Orang	1.930.556.000	2.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen	36.813.000	70.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen	39.438.000	70.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50	Orang	22.546.000	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	68.00	angka	6.668.605.000	1.390.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7000	laporan	6.668.605.000	1.390.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	44	Dokumen	1.307.194.000	460.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10	Dokumen	4.582.460.000	90.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	188	Orang	92.285.000	500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	100	Orang	516.256.000	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	82	Laporan	170.410.000	310.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	59.00	indeks	2.695.909.260	1.951.612.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	36	%	2.695.909.260	1.951.612.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10	Dokumen	1.551.332.000	1.360.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5	Dokumen	215.000.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500	Orang	718.870.260	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	85	Laporan	210.707.000	481.612.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks kerukunan umat beragama	71.50	indeks	2.936.000.000	1.503.079.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1	kejadian	2.936.000.000	1.503.079.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	13	Dokumen	229.000.000	255.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80	Orang	50.400.000	103.079.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000	Orang	2.507.455.000	1.115.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Laporan	149.145.000	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	84.00	Persen	3.826.035.211	3.636.085.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	22	kejadian	3.826.035.211	3.636.085.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800	Orang	1.025.992.211	1.117.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2130	Orang	855.093.000	1.445.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365	Laporan	275.050.000	500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	1.669.900.000	573.585.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>JUMLAH</b>					<b>5.559.163.472.694</b>	<b>4.273.190.558.969</b>	

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dapat diukur diantaranya melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2025**

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 6.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	84,80 – 85,80
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	66,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61-5,31
4	Angka Kemiskinan	%	3,98 – 3,74
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80 – 6,50
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	104,80
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7,00 (29.277.435)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6,00
9	Indeks Demokrasi	indeks	73,20
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,90
11	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,28
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,35
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	85,50
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,04
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	78,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	89,00
17	Opini BPK	Predikat	WTP

#### **6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 6.2.**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Daerah Kota Semarang Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>			
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (secara administrasi kependudukan)	%	0,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80 - 6,50
3	Laju inflasi	%	2,3 ±1
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,91
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,74
<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>			
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai indeks	84,80 – 85,80
	a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. / thn	16.300
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,59
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,63
	d. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,62
7	Angka Kemiskinan	%	3,98 – 3,74
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61 – 5,31
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97
<b>Fokus Seni Budaya dan Olah Raga</b>			
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	66,20
<b>B.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100,00
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)		
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,60
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	70,50
6	Angka Partisipasi Kasar		
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	81,85
	b. SD/MI	%	100,00
	c. SLTP/MTs	%	100,00
7	Angka Partisipasi Murni :		
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90,00
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,00
8	Angka Putus Sekolah:		
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,02
9	Angka Kelulusan:		
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00
10	Angka Melanjutkan (AM):		
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00
11	Fasilitas Pendidikan:		
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97,00
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,40
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata		
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
	a. Jenjang PAUD	%	99,00
	b. Jenjang SD/MI	%	100,00
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100,00
<b>I.02.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,39
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	96,80
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100,00
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100,00
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100,00
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100,00
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100,00
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100,00
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100,00
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100,00
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100,00
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,31
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,05
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	6,86
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	79,00
19	Nilai Kinerja BLUD Baik	Indeks	A+
<b>I.03.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	97,42
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,59
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	85,50
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100,00
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	92,72
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,50
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	66,90
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43,00
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,54
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	16,00
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	30,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
<b>I.04.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100,00 (30 Unit)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100,00 (84 Unit)
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	84 (84% x 431,54 Ha = 362.502 Ha)
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	Unit	1.000
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100,00 (10 perumahan)
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	20,07
<b>I.05.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	70,00
3	Indeks Resiko Bencana	%	107,00
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100,00
5	Persentase warga Negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100,00
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100,00
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100,00
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,80
<b>I.06.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100,00
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100,00
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100,00
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	60,00 (140 kasus)
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,95
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,011
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	11,44
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,71
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	68,10
7	Rasio KDRT	Rasio	0,021
<b>2.09.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	255,074
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,00
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,1
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	82,00
<b>2.10.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>		
1	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58,00
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60,00
<b>2.11.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,35
	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	52,63
	b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	96,00
	c. Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	56,90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Persentase pengurangan timbulan sampah b. Persentase penanganan timbulan sampah	% %	30,00 70,00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	86,00
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	77,00
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,80
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100,00
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100,00
5	Perekaman KTP Elektronik	%	99,60
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
1	Persentase LPM aktif	%	100,00
<b>2.14.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2,00
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	7,52
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,34
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>		
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	17.611.420
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	1
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	2010
<b>2.16.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75,34

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100,00
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100,00
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>		
1	Persentase koperasi aktif	%	77,50
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	15,00
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	56,00
<b>2.18.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	595
2	Persentase peningkatan investasi	%	7,00
3	Nilai investasi	Rp (dalam juta)	29.277.435
<b>2.19.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	51
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,96
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,043
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00
2	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	%	100,00
<b>2.21.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100,00
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	85,00
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	91,57
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	465
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	14
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	40,83
<b>2.23.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	49,00
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	32,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	61,00
<b>2.24.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	81,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	60,00
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	152.000
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	7.249,54
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	40,20
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	17.808
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/ Tahun	3.169,37
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/ Tahun	4.080,17
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>		
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6,00 (4.363.020)
2	Tingkat hunian akomodasi	%	48,52
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19,00
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/Ta hun	6,38
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5,00
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	162
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	7
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	74,00
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	91,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	74,00
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90,00
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100,00
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10,00
4	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	Sentra	1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,50
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	78,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	89,00
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>78/BB
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,48/ST
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100,00
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		
<b>5.01.</b>	<b>PERENCANAAN</b>		
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100,00
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100,00
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>		
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	0,82
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>		
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai Indeks	84,00
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	275,54
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,88
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85,00
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	47,06
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	68
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>		
1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3,00
2	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai)	Nilai	3,08
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>		
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	95,73
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	93,20
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	94,00
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
1	Indeks Demokrasi	Indeks	73,20
2	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,50
<b>C.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>		

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
<b>1.</b>	<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>		
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	104,80
2	Nilai Ekspor	US\$	3.680.871. 861,74
<b>2.</b>	<b>Fasilitas Wilayah / Infrastruktur</b>		
2.1	Aksesibilitas Daerah		
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5935
2.2	Penataan Wilayah		
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,64
2.	Kesesuaian tata ruang	%	100
<b>3.</b>	<b>Fasilitas Iklim Berinvestasi</b>		
3.1	Ketentraman dan Ketertiban		
1	Angka Kriminalitas	kejadian	1213
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,28
3.2	Kemudahan Perijinan		
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	98,50
<b>4.</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>		
4.1	Kualitas Tenaga Kerja		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,20
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	79,00
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk (Dt. Disdukcapil)	%	41,20

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2021-2026. RKPD Kota Semarang tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025 yang memusatkan diri pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, yang dilaksanakan melalui program kegiatan dan menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2025.

Prioritas pembangunan pada tahun 2025 dititikberatkan dengan mengikuti prinsip *money follows program* dan konsep rancangannya melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dalam upaya untuk menjamin substansi dari dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya program kegiatan pembangunan, maka penyusunannya telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 juga dilakukan dengan melihat keselarasannya dengan prioritas pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan pada tingkat nasional.

Dengan mengambil tema “Keberlanjutan Capaian Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Berkesinambungan”, dokumen RKPD Kota Semarang tahun 2025 yang telah disusun ini kemudian menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025. Sinergitas seluruh komponen masyarakat untuk saling bergerak bersama diharapkan agar dapat bersama-sama meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pula kinerja pembangunan Kota Semarang dapat semakin meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Semarang dapat tercapai dengan baik.

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001